



PENELITIAN TENTANG

**PENINGKATAN KOORDINASI
PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS
DI WILAYAH KECAMATAN
DALAM RANGKA EFISIENSI
DAN EFEKTIVITAS
PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PERWAKILAN JAWA BARAT
1995/1996**



PENELITIAN TENTANG

**PENINGKATAN KOORDINASI
PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS
DI WILAYAH KECAMATAN
DALAM RANGKA EFISIENSI
DAN EFEKTIVITAS
PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PERWAKILAN JAWA BARAT
1995/1996**

RINGKASAN UNTUK PEMIMPIN

Kecamatan, sebagai wilayah administrasi pemerintahan terdepan di Indonesia, selain melaksanakan tugas dan fungsi dekonsentrasi, juga mengkoordinasikan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang ada di kecamatan, baik yang menyangkut tugas dekonsentrasi sendiri, desentralisasi, maupun medebewind. Sebagai ujung tombak pembangunan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka kualitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan tidak lepas dari sistem yang lebih luas yaitu sistem yang ada pada hierarki yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka kejelasan dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II di Wilayah Kecamatan, serta pelaksanaan koordinasi yang baik merupakan tuntutan strategis yang perlu segera dilaksanakan mengingat tuntutan pelaksanaan tugas secara kuantitatif di satu pihak dan tuntutan kualitatif di lain pihak semakin meningkat.

Dalam kenyataannya, fakta menunjukkan bahwa sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan di Tingkat Kecamatan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti masih adanya ketidakjelasan kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan instansi-instansi vertikal atau otonom yang ada di Kecamatan, sehingga terjadi ketidaktepatan waktu, personil, bahkan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasinya.

Hasil penelitian menggunakan metode *deskriptif survey* terhadap 20 (dua puluh) kecamatan di Jawa Barat sebagai sampel, dengan memfokuskan kajian terhadap 5 (lima) aspek utama yaitu koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan, koordinasi monitoring, pengawasan dan evaluasi, kualitas pelayanan serta tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan pendanaan koordinasi, menunjukkan bahwa koordinasi pembangunan di Kecamatan masih kurang baik.

Kondisi semacam ini ditentukan oleh 5 pelaku utama, yaitu Desa/Kelurahan, masyarakat, Instansi Vertikal dan Otonom yang ada di Kecamatan, Camat, dan Instansi-instansi di tingkat yang lebih tinggi yang terkait baik langsung atau pun tidak langsung dengan pembangunan di Kecamatan.

Secara umum, kurang baiknya koordinasi pembangunan di Kecamatan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pembinaan, dan evaluasi, maupun dalam peran serta masyarakat, terutama disebabkan oleh 8 (delapan) faktor utama yang dominan yaitu: *Pertama*, kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia terutama para petugas instansi vertikal dan otonom di kecamatan; *Kedua*, rendahnya kualitas dan dedikasi aparatur, baik aparatur desa, kecamatan, instansi vertikal dan otonom di Kecamatan, maupun aparatur pada instansi-instansi terkait yang lebih tinggi; *Ketiga*, kurangnya dana (keuangan) terutama dana untuk koordinasi; *Keempat* adanya dominasi pusat atau instansi atasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan lain-lain; *Kelima*, kurangnya partisipasi masyarakat, sebagai dampak dari rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat; *Keenam* kondisi geografis yang kurang menguntungkan, terutama jauh/dekatnya desa/kelurahan terhadap ibukota kecamatan, atau jauh/dekatnya kecamatan terhadap ibukota kabupaten, atau juga tingkat kelabilan/kestabilan lahan, serta kemudahan lokasi tersebut dijangkau oleh informasi; *Ketujuh* karena adanya dominasi peraturan perundang-undangan yang kaku. *Kedelapan* rendahnya kualifikasi, kemampuan, dan peranan camat dalam melakukan pengkoordinasian pembangunan di wilayahnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat, kemurahan dan kasih sayang Allah SWT jugalah, maka tepat pada waktunya tim penelitian "Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas-tugas di Wilayah Kecamatan Dalam Rangka Efisiensi dan Efektivitas Pembangunan di Jawa Barat", dapat menyelesaikan laporan akhir ini.

Penelitian ini ditujukan untuk melihat kondisi pelaksanaan koordinasi yang telah berjalan beserta berbagai permasalahan yang terkait dengan koordinasi pembangunan di Wilayah Kecamatan, sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijaksanaan Tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Wilayah Kecamatan, yang menyangkut wewenang, fungsi dan tugas dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan di wilayahnya, guna memperlancar proses pembangunan di Wilayah Kecamatan.

Dengan demikian, hasil kajian yang dipaparkan dalam laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup komprehensif dan obyektif dalam melihat dan memahami kondisi koordinasi dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan, baik pada tahap yang ada sekarang (*das sollen*), maupun kondisi ideal yang diharapkan pada waktu mendatang (*das sein*).

Dalam hal ini, peran dan kontribusi semua anggota tim sesuai dengan kualifikasi dan kedudukannya dalam tim, sungguh sangat kami hargai. Demikian juga peran dan kontribusi para narasumber dan semua responden yang telah memberikan data dan informasi yang sangat berharga bagi penelitian ini, sangat kami hargai pula. Untuk itu kami sampaikan banyak terima kasih. Juga kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Sudah barang tentu, hasil penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan disana-sini. Meskipun demikian, kami tetap optimis bahwa apa yang telah dihasilkan ini akan dapat dijadikan

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN UNTUK PEMIMPIN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN	5
D. TUJUAN PENELITIAN	6
E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR	7
F. PERTANYAAN PENELITIAN	15
G. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL	15
H. METODE PENELITIAN	17
1. Penetapan Sampel Lokasi Penelitian	18
2. Penetapan Sampel Responden	19
3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Teknik Analisis dan Interpretasi Data	21
I. SISTEMATIKA PENULISAN	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Teoritis	25
B. Aspek Normatif	35
C. Koordinasi Dalam Sistem Pemerintahan RI	38
D. Pemerintahan Wilayah	48
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAN MASALAH	53
A. Kecamatan Pandeglang Kabupaten Dati II Pandeglang	53
B. Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Dati II Pandeglang	61
C. Kecamatan Cibadak dan Rangkasbitung	

Kabupaten Lebak	68
D. Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Timur Kodya Timur.....	72
E. Kecamatan Purwakarta Kabupaten Dati II Purwakarta.....	78
F. Kecamatan Sukaraja Kabupaten Dati II Sukabumi	93
G. Kecamatan Subang dan Kecamatan Pagaden Kabupaten Dati II Subang	102
I. Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Dati II Tasikmalaya	108
J. Kecamatan Singaparna Kabupaten Dati II Tasikmalaya.....	118
K. Kecamatan Ciamis Kota Kabupaten Dati II Ciamis	127
L. Kecamatan Cipaku Kabupaten Dati II Ciamis	129
M. Kecamatan Kuningan Kabupaten Dati II Kuningan	131
N. Kecamatan Luragung	134
O. Kecamatan Sukahaji	138
P. Kecamatan Majalengka Kota	142
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	149
a. Teknik Analisis Penelitian	149
b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	151
c. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan	168
d. Koordinasi Pelaporan, Pengawasan dan Pembinaan	182
e. Pelayanan, Pemberdayaan, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	197
BAB V PENUTUP	205
A. KESIMPULAN	205
B. SARAN-SARAN	213
DAFTAR PUSTAKA	217
Lampiran 1 Struktur Organisasi Proyek	221

BAB I P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan nasional yang sedang dan akan terus dilaksanakan, pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perlu dibentuk suatu pemerintahan. Sesuai dengan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, upaya untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang adil dan makmur tersebut, pada hakekatnya merupakan tugas dan tanggung jawab semua warga negara.

Untuk memperlancar realisasi tujuan negara, maka penyelenggaraan pemerintahan dibagi beberapa tingkatan wilayah dan daerah otonom berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini dianut. Pembagian atas daerah-daerah otonom merupakan penjabaran dari asas desentralisasi, sementara penjabaran dari asas dekonsentrasi dibentuk wilayah-wilayah administratif.

Kecamatan, sebagai wilayah administrasi pemerintahan terdepan di Indonesia, selain melaksanakan tugas dan fungsi dekonsentrasi, juga mengkoordinasikan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang ada di kecamatan yang tidak hanya menyangkut dekonsentrasi saja, melainkan juga yang menyangkut desentralisasi dan medebewind. Sebagai ujung tombak pembangunan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka kualitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan tidak lepas dari sistem yang lebih luas yaitu sistem yang ada

pada hierarki yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka kejelasan dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II di Wilayah Kecamatan merupakan tuntutan strategis yang perlu segera diantisipasi mengingat tuntutan pelaksanaan tugas secara kuantitatif di satu pihak dan tuntutan kualitatif di lain pihak semakin meningkat.

Seperti dikemukakan di atas, Pemerintah Kecamatan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi, desentralisasi, dan pembantuan dari pemerintahan yang ada di atasnya. Koordinasi, pembinaan, pengamanan, pengendalian serta pemberian petunjuk operasional di tingkat kecamatan dengan demikian sangat menentukan keberhasilan pembangunan akan banyak ditentukan oleh pelaksanaannya di Tingkat Kecamatan.

Dewasa ini fakta menunjukkan bahwa sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan di tingkat Kecamatan masih mengalami berbagai hambatan, seperti halnya masih adanya ketidakjelasan kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan instansi-instansi vertikal atau otonom yang ada di Kecamatan, sehingga terjadi ketidaktepatan waktu, personil, bahkan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasinya.

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan suatu instansi yang ada di tingkat kecamatan kurang memperhatikan keterkaitan hubungan kerja instansional. Kesulitan pelaksanaan koordinasi suatu kegiatan perlu diimbangi dengan operasional, kemampuan pemerintah wilayah kecamatan dalam memadukan berbagai kegiatan wilayahnya sesuai dengan sasaran pemerintahan yang bersifat hierarkhis, maka keberfungsian koordinasi ditingkat kecamatan tidak bisa terlepas dari efisiensi dan efektifitas pemerintahan di tingkat wilayahnya yang lebih atas.

Keberfungsian petunjuk umum dan petunjuk pelaksanaan baik yang dikeluarkan oleh instansi vertikal yang ada di atasnya maupun oleh pemerintah wilayah kecamatan itu sendiri, nampaknya belum begitu

berperan dalam meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kecamatan. Berbagai kemungkinan perlu dianalisis dan perlu diteliti kebenarannya serta faktor penyebabnya sehingga dapat diformulasikan berbagai alternatif pemecahannya.

Hambatan-hambatan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah Kecamatan, diakui bukan mutlak disebabkan oleh kemampuan aparat kecamatan itu sendiri dalam memadukan kegiatan-kegiatan sejenis dan berkaitan, serta menyerasikan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai instansi di wilayahnya saja, akan tetapi berbagai variabel lain ikut menentukan juga.

Diakui juga bahwa kelancaran koordinasi pelaksanaan pembangunan di kecamatan, merupakan produk dari perencanaan sebelumnya. Artinya, jika dalam perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh berbagai instansi di kecamatan sudah diantisipasi berbagai hal yang terkait satu sama lainnya, maka akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaannya. Sementara itu, perencanaan bukan hanya merupakan wewenang Kepala Wilayah setempat, melainkan terkait langsung dengan target-target instansional di tingkat atasnya. Memperhatikan alasan ini, dalam negara yang mempunyai sistem pemerintahan lebih berdasarkan kepada pelaksanaan asas dekonsentrasi maka tidak dapat disangkal lagi, bahwa dominasi atasan dapat mempengaruhi pelaksanaan koordinasi pembangunan di kecamatan. Bentuk dominasi ini dapat beraneka ragam seperti misalnya, dalam bentuk sumber daya manusia, keuangan/ pendanaan, peraturan perundang-undangan/berbagai petunjuk, dan lain-lain. Evaluasi, pengendalian, monitoring dan peran serta masyarakat turut mewarnai pencapaian optimasi koordinasi pembangunan di kecamatan demikian pula halnya dengan faktor-faktor ekstern yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya seperti keadaan iklim, cuaca, kelabilan lahan, budaya masyarakat dan lain-lain.

Untuk lebih memperjelas semua permasalahan yang terkait dengan koordinasi pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan, perlu langkah-langkah strategis untuk menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Wilayah Kecamatan, serta Identifikasi Wewenang, Tugas, dan Fungsi Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Pembantuan di Wilayah Kecamatan. Sebagai langkah awal, perlu eksplorasi terlebih dahulu mengenai masalah-masalah yang perlu mendapat prioritas dalam penanganannya. Untuk itu Penelitian tentang **"PENINGKATAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS DI WILAYAH KECAMATAN DALAM RANGKA EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN"**, akan mengungkap berbagai permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan koordinasi pembangunan di kecamatan, serta secara alternatif memberikan saran pemecahannya. Karena banyaknya anggota populasi penelitian, maka penelitian ini akan difokuskan pada beberapa kecamatan di Jawa Barat sebagai sampel.

B. POKOK-POKOK PERMASALAHAN

Memperhatikan kondisi dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, beberapa permasalahan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar instansi di wilayah Kecamatan yang ditandai dengan tumpang tindihnya kegiatan dalam suatu lokasi atau dalam suatu waktu.
2. Belum dilaksanakan identifikasi keterkaitan tugas, wewenang, dan kepentingan antar instansi di Wilayah Kecamatan secara optimal sehingga koordinasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah Kecamatan juga belum dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Kegiatan-kegiatan sejenis dan berkaitan belum dipadukan secara optimal demikian pula penjadwalan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai instansi di wilayah kecamatan belum dapat dilaksanakan dengan serasi.

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas instansi vertikal yang ada di wilayah kecamatan belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga tidak jarang pelaksanaan kegiatan instansi vertikal di Wilayah Kecamatan berjalan sendiri-sendiri.
5. Petunjuk umum dan petunjuk pelaksanaan yang diberikan instansi vertikal atau pemerintah wilayah kecamatan kepada instansi vertikal di kecamatan, belum dilaksanakan secara optimal, atau petunjuk yang diperlukan belum ada atau belum lengkap.
6. Perencanaan yang tingkatnya lebih tinggi belum dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk terlaksananya koordinasi di Wilayah Kecamatan baik dari segi pendanaan, sumber daya manusia (SDM) maupun peraturan lainnya.

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Berhubung luasnya cakupan penelitian baik dilihat dari segi substansi maupun dari objek penelitiannya, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Secara substansial penelitian ini melingkupi: Kajian mengenai kondisi koordinasi di tingkat kecamatan; Meneliti kemampuan Pemerintah Kecamatan dalam mengidentifikasi keterkaitan tugas instansi vertikal di wilayahnya, memadukan berbagai kegiatan di wilayahnya, dan kemampuan monitoring dan evaluasi berbagai kegiatan di wilayahnya; Serta mengkaji keberadaan dan keberfungsian petunjuk umum dan petunjuk pelaksanaan bagi operasionalisasi kegiatan di kecamatan. Pengkajian akan dilakukan dari segi perencanaannya, pelaksanaannya, monitoring dan evaluasinya, serta aspek peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

2. Dari objek penelitiannya, penelitian ini akan dibatasi meliputi beberapa kecamatan yang ada di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang terpilih sebagai sampel.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kondisi pelaksanaan koordinasi yang telah berjalan beserta berbagai permasalahan yang terkait dengan koordinasi pembangunan di Wilayah Kecamatan, sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijaksanaan Tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Wilayah kecamatan, yang menyangkut wewenang, fungsi dan tugas dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan di wilayahnya, guna memperlancar proses pembangunan di Wilayah Kecamatan. Secara operasional tujuan tersebut dapat dicapai melalui sasaran sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terkait dengan koordinasi di Wilayah Kecamatan.
2. Merumuskan konsep penyelarasan dan perbaikan koordinasi antar instansi yang ada di wilayah kecamatan.
3. Merumuskan konsep peningkatan kemampuan Pemerintah Kecamatan dalam memadukan kegiatan-kegiatan sejenis dan berkaitan, serta menyerasikan jadwal kegiatan yang dilakukan oleh berbagai instansi diwilayahnya.
4. Merumuskan konsep peningkatan efisiensi dan efektifitas pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan.
5. Memberikan bahan masukan guna penyempurnaan pelaksanaan pedoman umum dan pedoman operasional yang dipergunakan oleh instansi-instansi yang ada di Wilayah Kecamatan.

E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Mengingat negara adalah suatu organisasi raksasa yang juga harus tunduk kepada falsafah dan mekanisme organisasi, maka merupakan konsekuensi logis apabila penataan (manajemen) organisasi negara dibagi ke dalam tingkatan-tingkatan sesuai dengan besar kecilnya organisasi tersebut. Demikian juga, Negara Republik Indonesia merupakan negara besar, baik dilihat dari luas wilayahnya maupun jumlah penduduk, demikian juga ditinjau dari kerumitan organisasinya. Maka wajar, apabila struktur organisasinya mengenal pembagian kekuasaan, pendelegasian kekuasaan, berikut pengendalian terpusat dan tersebar.

Para perumus UUD 1945 dari semula telah sadar bahwa demi efisiensi dan efektivitas serta demi untuk mencapai hasil maksimal dalam pengelolaan negara, maka daerah Negara Indonesia dibagi ke dalam Daerah Besar dan Kecil. Pikiran itu tercermin dengan tegas dalam Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi:

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Kemudian demi menghilangkan keragu-raguan serta demi mencapai kesatuan tafsir, maka rumusan Pasal 18 tersebut diperjelas dan dipertegas lagi dalam Penjelasan UUD 1945 sebagai berikut:

Oleh karena Negara Indonesia itu suatu "*eenheidstaat*", maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat "*staat*" juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.

Daerah-daerah yang bersifat *autonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen)* atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Di daerah-daerah yang bersifat *autonom* akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Sesuai dengan rumusan dan tafsiran Undang-undang yang berlaku di Indonesia, dikenal beberapa asas yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan (*medebewind*). Ketiga asas itu tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1974. Bahkan dalam salah satu prinsipnya disebutkan: *"Desentralisasi dan dekonsentrasi dilakukan secara bersama-sama dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan"*.

Urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini, prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut pembiayaan, semuanya diserahkan kepada daerah yang dilaksanakan oleh perangkat-perangkat daerah yaitu dinas-dinas daerah.

Oleh karena tidak semua urusan pemerintah dapat diserahkan melalui asas desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan dilaksanakan oleh perangkat pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.

Urusan-urusan yang diserahkan oleh pemerintah kepada pejabat-pejabatnya di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya.

Unsur pelaksanaannya adalah instansi-instansi vertikal, yang dikoordinasikan oleh Kepala Wilayah dalam kedudukan sebagai perangkat pemerintah pusat, tetapi kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.

Seperti disebutkan, tidak semua urusan pemerintah diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya melalui asas desentralisasi, akan tetapi ada sebagian tugas yang diserahkan melalui asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Hal tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan, bahwa urusan-urusan tersebut tidak efisien dan tidak memungkinkan jika diserahkan kepada daerah.

Desentralisasi merupakan kebalikan dari sistem sentralisasi. Dalam sistem desentralisasi, sebagaimana kewenangan Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada Daerah. Pelimpahan kewenangan dari Pusat kepada Daerah itu dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu: Desentralisasi teritorial, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi administratif atau yang lazim dikenal dengan dekonsentrasi.

Untuk meringankan tugas Pemerintah Pusat dan untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan di daerah dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan yang nyata dari Daerah, maka apabila keadaan memungkinkan, Pemerintah melimpahkan sebagian dari kewenangannya kepada alat atau perangkat pemerintah sendiri di Daerah, yakni pejabat-pejabat pemerintah yang ada di Daerah. Itulah dekonsentrasi atau nama lainnya desentralisasi administratif (*ambtelijk*).

Pelimpahan kewenangan yang semula dipusatkan kepada pejabat-pejabat bawahannya sendiri itu pun dapat dipandang sebagai suatu desentralisasi (Soejito: 1984: 24), yaitu suatu tindakan kebalikan dari pada sentralisasi. Namun orang juga dapat memandang bahwa pelimpahan yang demikian itu berlangsung dalam rangka pemerintahan yang dipusatkan. Jadi dapat dianggap sebagai suatu modifikasi atau suatu perlunakan pada sentralisasi, sebagai suatu langkah menuju ke arah *desentralisasi*.

Karena di dalam praktek masih terdapat beberapa bentuk desentralisasi, maka pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri itu disebut juga desentralisasi administratif, ambtelyke decentralisatie atau dekonsentrasi atau yang dalam literatur Perancis disebut "*deconcentration administrative*". Sedangkan istilah yang dipakai dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 yang kini merupakan hukum positif ialah "*dekonsentrasi*" (Bay Suryawikarta, 1995).

Di Indonesia, penyelenggara pemerintahan di daerah yang didasarkan asas dekonsentrasi, dilaksanakan oleh instansi-instansi vertikal di daerah, dibawah koordinasi Kepala Wilayah. Wilayah Kecamatan sebagai wilayah administratif yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, merupakan wajah terdepan dari Pemerintah Pusat. Kecamatan juga merupakan pintu masuk bagi kebijaksanaan, rencana, program maupun keinginan dari pemerintah Pusat terhadap masyarakat luas. Selain itu Camat juga dapat berperan untuk mengkompromikan berbagai kepentingan dalam rangka integrasi horizontal dengan integrasi vertikal (Nordholt, 1987, 36, dalam Sadu, 1991, 12).

Jika pendapat K.D. Jackson (Sadu, 1991, 12) yang mengatakan bahwa "Sistem Pemerintahan Indonesia merupakan suatu pemerintahan birokrasi" dapat diterima, maka kedudukan Pemerintah Kecamatan di mata masyarakat menjadi sangat penting. Sebab menurut Jackson, ciri pemerintahan birokrasi adalah "...tidak ada partisipasi atau mobilisasi rakyat secara tetap, yang ada adalah bentuk partisipasi yang secara tetap melibatkan begitu banyak warga negara sehubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan nasional dan bukan pembuatan kebijakan itu".

Camat sebagai kepala wilayah kecamatan secara kualitas mempunyai bobot wewenang, tugas dan kewajiban yang sama dengan kepala wilayah lainnya. Yang membedakan adalah segi kuantitas, karena adanya perbedaan tingkatan atau jenjang (*level*) serta ruang lingkup geografisnya.

Menurut pasal 81 UU Nomor 5 Tahun 1974, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah adalah:

- a. Membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi-instansi vertikal dan antara instansi-instansi vertikal dengan Dinas-dinas Daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
- d. Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- e. Mengusahakan secara terus menerus agar segala peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah dijalankan oleh instansi-instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk itu serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
- f. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya;
- g. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi lainnya.

Uraian wewenang, tugas dan kewajiban kepala wilayah di atas memberikan gambaran mengenai luas dan beratnya tanggung jawab kepala wilayah. Wewenang, tugas dan kewajiban tersebut bersifat sangat umum dan abstrak, bahkan dalam kenyataannya batas-batasnya sangat kabur (Sadu, 1991, 15). Dilihat dari sisi efektivitas organisasi, titik rawan (*crucial point*)-nya terletak pada uraian huruf "g" dimana kepala wilayah harus melaksanakan segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk tugas sesuatu instansi atau dinas daerah (*tugas residual*). Tugas residual ini ternyata berbeda baik kualitas maupun kuantitasnya antara satu wilayah administratif dengan wilayah administratif lainnya, atau antara satu tingkatan wilayah dengan tingkatan wilayah lainnya. Bagi wilayah

administratif tertentu, keadaan semacam itu menyulitkan, baik dalam pencapaian tujuan, pembuatan program kerja, maupun dalam mengukur tingkat efektivitas organisasi pemerintah wilayah yang bersangkutan.

Bagi kepala wilayah yang *ex-officio* dipegang oleh kepala daerah, kesulitan semacam itu tidak begitu nampak. Kendala semacam itu dapat ditutupi dengan memanfaatkan pegawai daerah serta menggunakan anggaran daerah sebagaimana diatur dalam APBD. Sebaliknya pada Kepala Wilayah Administratif "murni" seperti camat, kendala semacam itu dirasakan berat. Sumber keuangan utama untuk menggerakkan roda organisasi berasal dari dana dekonsentrasi yang jumlahnya relatif terbatas. Apabila ada kekurangan biaya, satu-satunya cara ialah meminta kepada pemerintah tingkat atasnya atau meminta "sumbangan" dari desa bawahannya. Kondisi semacam ini menimbulkan ketidak efektifan organisasi kecamatan.

Wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah butir "c" yaitu menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi-instansi vertikal dan antara instansi-instansi vertikal dengan Dinas-dinas Daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, pada tingkat kecamatan juga mendapatkan kesulitan.

Disamping sebagai dampak dari banyak dan bervariasi tugas, wewenang, dan kewajiban residual yang perlu ditangani, serta terbatasnya dana dekonsentrasi, juga adanya faktor lain yang seolah-olah mengeliminasi tugas, wewenang, dan kewajiban camat tersebut, berupa dominasi dari tingkat atasnya, dan kurangnya dukungan faktor lain yang terkait.

Kecamatan sebagai unit terkecil wilayah administratif merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan, karena pada tingkat wilayah ini terdapat instansi-instansi baik vertikal maupun otonom yang secara operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara empirik, tidak semua kecamatan memiliki instansi vertikal dan otonom yang sama. Instansi yang ada di kecamatan berbeda dan bervariasi.

Sehubungan dengan berbeda jumlah dan bervariasinya instansi yang ada di wilayah kecamatan, maka koordinasi antar instansi dalam melaksanakan tugas-tugasnya merupakan faktor utama yang mempengaruhi tercapainya tujuan setiap kegiatan tersebut. Berkaitan dengan koordinasi, terkait erat dengan hubungan kerja, karena koordinasi hanya dapat dicapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif.

Suwarno Handyaningrat mengemukakan 7 butir hakikat dari koordinasi. Koordinasi adalah akibat logis dari pada adanya prinsip pembagian habis tugas; Koordinasi timbul karena adanya fungsionalisasi; Koordinasi juga akibat adanya rentang kendali (*span of control*); Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks; Koordinasi juga sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang dibentuk berdasar atas prinsip jalur lini dan staf; Koordinasi hanya dapat berhasil dengan bantuan sarana komunikasi yang baik; Koordinasi adalah perwujudan kerjasama.

Dikaitkan dengan konteks pelaksanaan tugas-tugas di Wilayah Kecamatan, sebagai suatu organisasi yang hakikatnya bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi pembangunan, maka kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi di Kecamatan harus terkoordinasi dengan baik. Koordinasi dimaksud harus bermula dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga kepada monitoring, evaluasi dan pengawasannya.

Koordinasi pada tingkat perencanaan sekaligus ditunjang oleh sistem komunikasi yang efektif yang bersifat timbal balik antara sesama instansi yang ada yang terlibat dalam berbagai sektor pembangunan itu. Sistem koordinasi perencanaan dimaksud tercermin dalam pewardahan yang berbentuk struktural fungsional maupun non struktural. Koordinasi perencanaan yang dilakukan oleh wadah-wadah tersebut antara lain diselenggarakan melalui konsultasi, rapat-rapat kerja, dan lokakarya, yang melibatkan berbagai instansi vertikal dan otonom yang dipimpin oleh Kepala Wilayah sesuai tingkatan wilayahnya.

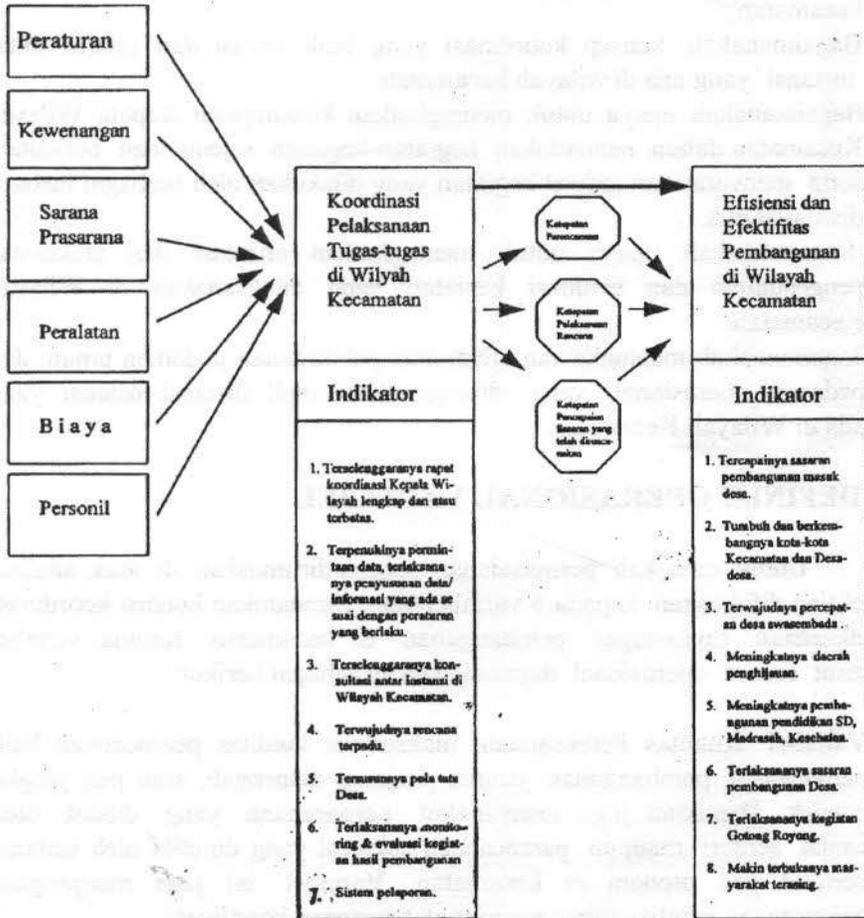
Mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan di Tingkat Kecamatan berwujud Temu Karya/Rapat UDKP, yang dihadiri oleh para Kepala Instansi Vertikal dan Instansi Otonom di Kecamatan, dengan mendapat pembinaan dari pejabat BAPPEDA Tingkat II dan Kantor Bangdes Tingkat II, serta dipimpin oleh Camat dibantu oleh petugas Bangdes Kecamatan (F.X. Soedjadi).

Koordinasi pelaksanaan pada hakekatnya adalah berlandaskan pada prinsip fungsionalisasi yang menentukan secara tegas siapa atau badan/lembaga mana yang disertai wewenang mengkoordinasikan program dalam suatu sektor. Prinsip fungsionalisasi dapat pula diartikan adanya berbagai kegiatan yang saling menunjang untuk mencapai sesuatu tujuan atau sasaran yang merupakan kepentingan bersama. Prinsip fungsionalisasi ini dituangkan ke dalam berbagai prosedur pelaksanaan. Koordinasi pelaksanaan dalam hal ini adalah koordinasi yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah yang mempunyai kegiatan-kegiatan yang dituangkan ke dalam berbagai bentuk pedoman dalam bidang kegiatannya tertentu.

Koordinasi pengawasan diwadahi dalam suatu tim koordinasi Pengendalian Pengawasan Pembangunan di Daerah yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 18 Tahun 1981, yaitu tim yang membantu Gubernur dalam bidang Pengawasan dan Pengendalian. Koordinasi pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh tim tersebut pada prinsipnya ditujukan untuk tercapainya keserasian dan keterpaduan dalam pelaksanaan rencana dan program pemerintah dalam rangka pembangunan di daerah. Tim koordinasi ini sekaligus dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing instansi (F.X. Soedjadi).

Sebagai landasan yang digunakan dalam penelitian, maka digunakan Kerangka Pemikiran seperti pada bagan berikut ini:

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS DI WILAYAH KECAMATAN DALAM RANGKA EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN



F. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Permasalahan apakah yang terkait dengan koordinasi pembangunan di Wilayah Kecamatan, yang menghambat efektivitas pembangunan di kecamatan;
2. Bagaimanakah konsep koordinasi yang baik, serasi dan selaras antar instansi yang ada di wilayah kecamatan.
3. Bagaimanakah upaya untuk meningkatkan kemampuan Kepala Wilayah Kecamatan dalam memadukan kegiatan-kegiatan sejenis dan berkaitan, serta menyetarakan jadwal kegiatan yang dilakukan oleh berbagai instansi diwilayahnya.
4. Bagaimanakah upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan.
5. Bagaimanakah meningkatkan efektivitas pelaksanaan pedoman umum dan pedoman operasional yang dipergunakan oleh instansi-instansi yang ada di Wilayah Kecamatan.

G. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Untuk mengkaji permasalahan seperti dirumuskan di atas, analisis penelitian difokuskan kepada 5 variabel yang menentukan kondisi koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan di kecamatan. Kelima variabel tersebut secara operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Kualitas Perencanaan; maksudnya kualitas perencanaan baik perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, atau pun jangka pendek. Demikian juga menyangkut perencanaan yang dibuat oleh camat sendiri maupun perencanaan sektoral yang dimiliki oleh instansi vertikal dan otonom di kecamatan. Variabel ini juga menyangkut perencanaan pembangunan maupun perencanaan koordinasi.
Indikator variabel ini dapat dilihat dari:

- a. Keterkaitan antara rencana yang dibuat dengan rencana organisasi yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Konsistensi antara rencana sekarang dengan rencana sebelumnya;
- c. Tingkat/proposisi antara kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan.

2. Variabel Kualitas Pelaksanaan; Variabel pelaksanaan maksudnya berbagai aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi di kecamatan, serta pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan tersebut.

Indikatornya antara lain dapat dilihat dari:

- a. Perbandingan antara biaya dengan hasil yang diperoleh;
- b. Ketaatan pada jadwal waktu pelaksanaan;
- c. Ada tidaknya tumpang-tindih pelaksanaan.

3. Variabel Kualitas Monitoring, pengawasan dan Evaluasi; Untuk mengukur kualitas monitoring dan evaluasi akan dilakukan melalui pengukuran terhadap indikator-indikator yang meliputi;

- a. Frekuensi dan metode monitoring dan evaluasi internal instansi yang ada di kecamatan;
- b. Frekuensi dan metode monitoring dan evaluasi instansi teknis atasannya terhadap pelaksanaan kegiatan dan proyek yang dilakukan oleh instansi yang ada di kecamatan;
- c. Frekuensi dan metode monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh camat terhadap pembangunan yang dilaksanakan berbagai instansi di kecamatannya,
- d. Frekuensi dan metode monitoring dan evaluasi terhadap camat yang dilakukan oleh atasannya.

4. Variabel Kualitas Pelayanan Serta Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat; Melalui variabel kualitas pelayanan akan dicoba diungkap berbagai indikator pelayanan kecamatan dan berbagai instansi vertikal dan otonom yang ada di kecamatan terhadap masyarakat. Secara

langsung variabel kualitas pelayanan mempengaruhi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Maka dalam analisisnya kedua variabel ini akan dipadukan. Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, maksudnya, sampai sejauh mana pemerintah kecamatan dan instansi yang ada di kecamatan, baik secara langsung maupun tidak memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

Selanjutnya akan diukur juga, bagaimana peran serta masyarakat di kecamatan, baik peran serta aktif maupun sebagai dampak dari pemberdayaan dimaksud.

Indikator-indikatornya antara lain:

- a. Jangkauan atau cakupan pelayanan;
- b. Kecepatan pelayanan;
- c. Upaya yang dilakukan aparat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

5. Variabel Pendanaan Koordinasi; Maksudnya bahwa dalam segala tindakan pembangunan tidak terlepas dari aspek pendanaan, dan diakui bahwa aspek ini merupakan yang sangat penting dalam menentukan berjalan atau tidaknya pembangunan dimaksud. Demikian pula halnya dalam koordinasi. Bagaimanakah dana koordinasi pembangunan di kecamatan disediakan oleh pemerintah, atau jika tidak disediakan, bagaimanakah kemampuan pemerintah kecamatan menghimpun dana swadaya dalam melaksanakan koordinasi tersebut.

Indikator-indikatornya antara lain:

- a. Ada tidaknya dana koordinasi;
- b. Sumber dana yang ada;
- c. Besarnya dana.

H. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan substansi penelitian ini yang ingin mengungkap dan mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, maka metode yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif. Secara lebih spesifik, termasuk ke dalam *Metode Deskriptif Survey*.

Penyelidikan akan dilakukan dalam waktu yang bersamaan terhadap sejumlah individu atau unit secara sampel.

1. Penetapan Sampel Lokasi Penelitian

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa karena luasnya cakupan penelitian dilihat dari sisi objek penelitiannya, maka penelitian akan dibatasi pada kecamatan-kecamatan di Jawa Barat yang terpilih sebagai sampel. Setelah dilakukan sampling wilayah dengan teknik purposif didapatkan sampel sebagai berikut: Tiap Wilayah Pembangunan di Jawa Barat akan diambil dua DT.II. Selanjutnya dari tiap DT II akan diambil dua kecamatan, masing-masing adalah kecamatan yang ada di kota kecamatan dan kecamatan yang berada di pedalaman. Pemilihan Kabupaten Daerah Tingkat II telah dilakukan, dan kabupaten-kabupaten yang terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel I.1.
Sampel Lokasi Penelitian

WILAYAH PEMBANGUNAN	KABUPATEN/KODYA	KECMATAN
1. Wilayah Pembangunan I	Kab. Pendeglang	Pandeglang Mandalawangi
	Kab. Serang	Cibadak Rangkasbitung
2. Wilayah Pembangunan II	Kab. Purwakarta	Purwakarta Campaka
	Kab. Subang	Subang Kota Pagaden
3. Wilayah Pembangunan III	Kab. Kuningan	Kuningan Luragung
	Kab. Majalengka	Sukahaji Majalengka Kota
4. Wilayah Pembangunan IV	Kab. Sukabumi	Sukabumi Sukaraja
	Kodya Bogor	Bogor Timur Bogor Barat
5. Wilayah Pembangunan V	Kab. Tasikmalaya	Singaparna Sodonghilir
	Kab. Ciamis	Ciamis Kota Cipaku

2. Penetapan Sampel Responden

Jumlah keseluruhan responden yang akan dimintai informasinya ditetapkan secara purposif juga sebanyak 330 orang, yang terdiri dari beberapa strata, mulai dari masyarakat (LKMD), pejabat di Tingkat Kecamatan (termasuk camat), sampai kepada para pejabat di Daerah Tingkat II, yang terkait dengan pelaksanaan berbagai kegiatan di Wilayah

Kecamatan. Secara rinci, 330 orang responden tersebut, komposisinya sebagai berikut:

Tabel I.2.
Jumlah Responden Setiap Strata
pada 10 Kabupeten/Kodya

NO.	RESPONDEN	JUMLAH
I	DI TINGKAT KABUPATEN/KODYA	
	1. Kabag Pemerintahan Umum	10
	2. Kabag Pemerintahan Desa	10
	3. Kabag Pembangunan	10
	4. Kabag Kesra	10
	5. Kepala Kantor BANGDES	10
II	DI KECAMATAN	
	1. Camat	20
	2. Kepala Instansi Vertikal	60
	3. Kepala Instansi Otonom	40
	4. Kapolsek	20
	5. Danramil	20
III	DI DESA/KELURAHAN	
	1. Kepala Desa	40
	2. Ketua LKMD	40
	3. Ketua PKK	40
TOTAL		330

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data primer digunakan instrumen berupa daftar pertanyaan. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder digunakan daftar isian.

1. Pengumpulan Data Primer;

Pengumpulan data primer dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh responden, baik di wilayah Kecamatan, Desa, maupun Daerah Tingkat II. Untuk itu, kuesioner dibagi kedalam 4 (empat) kategori, yaitu: (1)

Kuesioner untuk responden di tingkat Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Kelurahan, Ketua LKMD, dan Ketua PKK), yang diberi simbol F-1; (2) Kuesioner untuk responden para kepala/petugas instansi vertikal atau dinas otonom di kecamatan, diberi simbol F-2; (3) Kuesioner untuk responden Kepala Wilayah Kecamatan (Camat), Kapolsek, dan Danramil, yang diberi simbol F-3; (4) Kuesioner untuk responden di Daerah Tingkat II, yang diberi simbol F-4.

2. Pengumpulan Data Sekunder;

Data skunder yang diperlukan terutama data kuantitatif mengenai indikator kependudukan dan ketenagakerjaan, indikator kondisi ekonomi dan mata pencaharian, indikator kondisi sosial budaya dan keagamaan, data bantuan desa baik dari pusat maupun dari DT.I dan DT.II, data perkembangan perlombaan desa/kelurahan, data perkembangan sarana dan prasarana desa, data perkembangan pembangunan fisik, indikator tentang pelaksanaan koordinasi, data penghijauan/reboisasi, dan lain-lain. Untuk pengumpulan data skunder tersebut, langsung dilakukan oleh para peneliti lapangan yang dibekali dengan beberapa daftar isian.

4. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan dasar analisis pokok berupa jawaban kuesioner yang didapatkan dari 4 (empat) strata responden di 20 (duapuluh) kecamatan sampel. Secara operasional, sesuai dengan stratifikasi responden, pembahasan akan dilakukan secara komprehensif dengan melakukan penyilangan data antar strata, dengan tujuan mempertajam analisis yang dilakukan.

Keempat strata responden tersebut adalah: Strata pertama responden pada tingkat desa yang meliputi aparat desa dan tokoh masyarakat; Strata kedua responden pada tingkat kecamatan sebagai pelaksana operasional pembangunan yang dilakukan yaitu para petugas/kepala instansi vertikal dan otonom di kecamatan; Strata ketiga masih ditingkat kecamatan yaitu

para camat, danramil, dan kapolsek; Dan strata keempat responden aparat Kabupaten Daerah Tingkat II.

I. Sistematika Penulisan

Tata urutan penulisan laporan penelitian ini disusun sesuai dengan aturan baku yang tertuang dalam Pedoman Litbang Administrasi. Laporan disajikan dalam 5 (lima) Bab, yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Data mentah hasil penelitian, Analisis dan Pembahasan terhadap data hasil penelitian, dan Penutup.

Pada Bab I Pendahuluan, dipaparkan mengenai latar belakang penelitian. Berangkat dari latar belakang tersebut, dilakukan identifikasi terhadap masalah-masalah dalam penyelenggaraan koordinasi pembangunan di Kecamatan sebagai bahan untuk rumusan masalah yang akan menjadi acuan analisis dan pembahasan pada Bab IV. Karena luasnya masalah yang dihadapi, maka dilakukan pembatasan sekaligus ditentukan secara lebih spesifik mengenai tujuan penelitian. Kerangka teoritik dan kerangka pikir, pertanyaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian pun dicantumkan pada Bab Pendahuluan ini.

Pada Bab II Tinjauan Pustaka, dipaparkan landasan-landasan teoritis mengenai pemerintahan wilayah sebagai pengejawantahan dari asas dekonsentrasi, teori tentang koordinasi, serta secara spesifik teori dan kebijaksanaan koordinasi di tingkat Kecamatan, sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini.

Bab III berisi objek penelitian, yang merupakan hasil pengamatan dan observasi para peneliti serta data-data skunder yang didapatkan mengenai situasi dan kondisi lokasi penelitian, tanpa dicampuri interpretasi peneliti. Secara garis besar Bab III berisi tentang kondisi umum daerah, aktivitas perekonomian, dan mata pencaharian penduduk, kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan dan kualitas SDM, kondisi sarana dan

prasasaran, sikap kekeluargaan dan kesetiakawanan masyarakat, serta dinamika pembangunan di kecamatan.

Bab IV, Analisis dan Pembahasan terhadap masalah-masalah yang diajukan pada Bab I dengan dasar analisis hasil survey berupa isian kuesioner yang didukung data sekunder. Secara garis besar, pembahasan dibagi ke dalam 5 (lima) Sub Bab utama yaitu; Perencanaan dan koordinasi pembangunan di Kecamatan; Pelaksanaan dan Koordinasi pembangunan di Kecamatan; Evaluasi, pengawasan dan pengendalian pembangunan di Kecamatan; Pelayanan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat; Dan □ Pendanaan koordinasi pembangunan di Kecamatan.

Bab terakhir Penutup, berisis kesimpulan dan saran/rekomendasi kebijaksanaan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA; KAJIAN TENTANG KOORDINASI DAN PEMERINTAH WILAYAH KECAMATAN

A. TINJAUAN TEORITIS

Koordinasi adalah aktivitas yang paling banyak menyerap biaya, tenaga, dan pikiran. Timbulnya masalah koordinasi karena pelaksanaan prinsip pembagian pekerjaan (*division of work*, Fayol, 1929 dalam Hodgetts, 1982) sebagai konsekuensi proses modernisasi. Modernisasi melahirkan *coorporate institution* (Smelser, 1964), seperti *bureaucracy* (Weber, 1946, renewed 1976). Dengan diterapkannya prinsip pembagian pekerjaan, maka spesialisasi berkembang, dan menimbulkan keperluan akan adanya koordinasi. Semakin banyak perbedaan kegiatan-kegiatan dan pengkhususan pekerjaan, akan semakin sulit masalah-masalah koordinasi itu. Hall (1972:146) mengingatkan bahwa:

Both horizontal and vertical differentiation present organizations with control, communication, and coordination problems. Subunits along either axis are nuclei that are differentiated from adjacent units and the total organization according to horizontal or vertical factors. The greater the differentiation, the greater the potentiality for difficulties in control, coordination, and communications.

(Kedua perbedaan horisontal dan vertikal menghadapi organisasi-organisasi dengan masalah-masalah kontrol, komunikasi, dan koordinasi. Sub-sub unit di sepanjang poros jadi mengecil yang dibedakan dari unit-unit di hadapannya dan keseluruhan organisasi sesuai dengan faktor-faktor horisontal atau vertikal. Semakin besar perbedaan itu, semakin besar potensi kesulitan-kesulitan dalam kontrol, koordinasi, dan komunikasi).

Semua organisasi biasanya menetapkan beberapa mekanisme yang berbeda untuk mewujudkan koordinasi. Litterer (1973:455 - 473) menyarankan digunakannya tiga metode yang bersifat umum yaitu *directive* (langsung), *voluntary* (bebas), dan *facilitated* (mudah). Salah satu bentuk koordinasi langsung ialah koordinasi hirarkis, dengan menempatkan berbagai kegiatan terkait satu sama lain di bawah wewenang pusat. Misalnya, dalam konteks penelitian ini, fungsi-fungsi utama dikordinasikan oleh Camat. Karena organisasi kecamatan relatif sederhana, maka bentuk koordinasi hirarkis ini bisa efisien.

Tetapi dalam organisasi yang lebih kompleks dengan banyak jenjang dan jumlah bagian yang sudah terspesialisasi, koordinasi hirarkis menjadi lebih sulit dilaksanakan. Meski dari segi piramida organisasi bisa terlihat bahwa hanya ada satu posisi puncak yang paling menentukan bagi koordinasi semua kegiatan, tampaknya bagi organisasi yang besar tidak mungkin lagi mengandalkan koordinasi hirarkis. Masalah besar lainnya ialah komunikasi dari atas ke bawah tidak mungkin dilaksanakan oleh pemegang kedudukan puncak, misalnya, untuk memiliki informasi yang diperlukan bagi koordinasi kegiatan-kegiatan pada level yang lebih bawah. Terlebih lagi pada organisasi yang berlapis-lapis, koordinasi hirarkis mesti dibantu dengan sarana yang lain.

Sistem administrasi yang baik merupakan mekanisme kedua untuk membentuk koordinasi langsung atas berbagai kegiatan, sebab bagian terbesar dari upaya koordinatif dalam organisasi berada pada arus pekerjaan rutin di garis horizontal. Sistem administrasi menggariskan prosedur formal untuk melaksanakan begitu banyak koordinasi pekerjaan rutin secara otomatis. Banyak prosedur penyelesaian pekerjaan, seperti penggunaan memo, disposisi, membantu pengkoordinasian berbagai kegiatan yang berbeda unit-unit pelaksanaannya. Sampai batas tertentu prosedur semacam ini bisa merupakan kegiatan rutin, dan karenanya tidak perlu distrukturkan secara khusus. Untuk yang tidak termasuk kegiatan rutin dan tidak diprogramkan, mungkin diperlukan unit-khusus seperti panitia-panitia agar bisa menyatukan kegiatan-kegiatan tersebut.

Jenis yang kedua ialah koordinasi melalui cara-cara yang bebas. Banyak kegiatan bisa dikoordinasikan atas dasar kehendak dan kemampuan seseorang atau kelompok untuk secara bebas menemukan cara-cara menyatupadukan kegiatan-kegiatannya dengan bagian-bagian lain dari organisasi.

Mewujudkan koordinasi semacam ini merupakan upaya paling penting bagi seorang pimpinan meskipun juga merupakan masalah yang sulit. Syaratnya ialah, tiap orang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tujuan-tujuan organisasi, memahami informasi mengenai masalah khusus koordinasi, dan motivasi untuk mengerjakan sesuatu menurut cara dan pertimbangan sendiri.

Masalah-masalah penyatuan gerak dalam organisasi yang lingkungannya stabil, teknologi kerjanya tetap, dan kegiatan-kegiatannya sudah bersifat rutin sangat berbeda dengan organisasi yang selalu dihadapkan pada perubahan lingkungan dan teknologi yang cepat. Organisasi yang stabil bisa mengandalkan pada struktur hirarkis dan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan untuk menjamin koordinasi. Organisasi yang menghadapi perubahan-perubahan cepat harus mengembangkan mekanisme kerja yang berbeda untuk memudahkan penyatuan gerak.

Di lain pihak, Mary Parker Follet (dalam Harmon and Mayer, 1986:345-348) menolak pendapat yang menempatkan kontrol sebagai cara yang dominan, baik dengan penggunaan kekuatan pribadi maupun melalui pelaksanaan wewenang hirarkis. Bagi Follet, kontrol lebih punya makna mengkorelasikan sejumlah cara pengendalian daripada sekedar kontrol yang dipaksakan. Kontrol pada dasarnya adalah pengendalian diri yang bersifat kolektif, dan hal ini hanya dimungkinkan lewat koordinasi. Koordinasi, akhirnya, bukan suatu kegiatan yang dilakukan hanya oleh pemegang peran khusus, tetapi merupakan proses yang berlangsung yang melibatkan setiap orang dalam suatu situasi kerja. Oleh karena itu Follet kurang peduli dengan cara-cara yang instrumental mengenai bagaimana melakukan

koordinasi, tetapi lebih baik menjelaskan apa sebenarnya koordinasi itu. Secara konsisten Follet mengabaikan keharusan-keharusan instrumental, dia lebih suka menielaskan apa yang terlibat dalam proses koordinasi. Pendirian inilah yang membuat perhatiannya begitu kuat terhadap prinsip-prinsip dasar organisasi, di mana:

- (1) Koordinasi merupakan proses yang bersifat timbal-balik (reciprocal) yang menghubungkan semua faktor dalam suatu situasi (kerja).
- (2) Koordinasi melalui kontak langsung orang yang bertanggungjawab untuk tugas yang bersangkutan.
- (3) Koordinasi merupakan proses yang berkesinambungan.

Yang pertama, diartikan oleh Follet sebagai penyampaian pikiran atau gagasan bahwa fakta-fakta dari suatu situasi (kerja) selalu berubah melalui proses "penyesuaian bersama" diantara banyak faktor. Fakta-fakta menjadi begitu penting berkat adanya proses penyesuaian yang menimbulkan kepatuhan semua pihak kepada "hukum situasi." Setiap orang mengerti keterlibatannya yang memang diperlukan dalam rangka mengetahui apa kepentingan dia sebenarnya. Kepentingan nyata setiap orang tidak bisa dipahami dengan nalar sebelum terbukti dalam kegiatan kerjasama. Follet mengatakan bahwa,

this reciprocal relating, coordinating, unifying is a process which does not require sacrifice on the part of the individual. The fallacy that the individual must give up his individuality for the sake of the whole is one of the most pervasive, the most insidious, fallacies I know.

(hubungan timbal-balik, pengkoordinasian, penyatuan adalah suatu proses yang tidak memerlukan pengorbanan diri seseorang. Kepalsuan yang menyebabkan seseorang mesti menyerahkan dirinya demi semua adalah paling kuat daya rembesnya, paling menjebak, itulah kepalsuan-kepalsuan yang saya ketahui)

Yang kedua, koordinasi melalui kontak langsung orang yang bertanggungjawab untuk tugas ybs., menerangkan keyakinan Follet bahwa koordinasi tidak bisa dicapai melalui perintah-perintah yang diberikan

atasan dan diterima bawahan. Jika kontrol intinya pengendalian diri, maka pemberian perintah berarti melanggar proses internal yang membuat seseorang berhenti dengan sendirinya karena situasi. Ini menunjukkan kurangnya moralitas ketimbang sebagai suatu prinsip psikologis:

We know that every individual has many warring tendencies inside himself. We know that effectiveness of an individual, his success in life, depend largely on these various tendencies, impulses, desires, being adjusted to one another, being made into a harmonious whole. Yet no one can issue a fiat by which I am adjusted, I can only be helped to adjust myself.

(Kita mengetahui bahwa tiap orang mempunyai banyak kecenderungan takut dalam dirinya. Kita mengetahui bahwa efektivitas seseorang, keberhasilannya dalam hidup, banyak tergantung pada berbagai kecenderungan ini, dorongan-dorongan dari dalam, keinginan-keinginan, bisa menyesuaikan satu sama lain, bisa menyeraskan pada keseluruhan. Namun, tidak satu orangpun bisa mengeluarkan disposisi yang membuat saya jadi sesuai, saya hanya ditolong untuk menyesuaikan diri saya sendiri).

Jadi kontak langsung sebenarnya menyarankan bahwa hubungan-hubungan horisontal, yang menurut definisi tidak mencakup pemberian perintah, akan memunculkan fakta-fakta yang relevan dari suatu situasi kepada para pelaku (kontak langsung). Bebas dari paksaan, mereka melakukan penyesuaiannya sendiri, baik antar pribadi maupun dengan pelaku-pelaku lain dalam situasi itu.

Yang ketiga dan keempat dari prinsip-prinsip yang disebut di atas, memperingatkan akan bahaya kecenderungan-kecenderungan para pelaku secara perorangan untuk menduduki posisi lebih dini dan memangku jabatan tertentu. Sebab sekali hal itu dijadikan putusan, kedudukan-kedudukan itu mesti langgeng. Dalam pandangan dan keyakinan Follet, tindakan sensitif itu muncul dari pengalaman yang bersifat kolaboratif, mengerti dan secara individual seseorang yang memegang kedudukan-kedudukan cenderung untuk mempertahankan proses kreatif yang

diperlukan untuk memunculkan tindakan tsb. Lebih lanjut, situasi dan fakta terus berubah, melahirkan masalah-masalah baru begitu masalah lama terpecahkan.

Pemikiran Mary Parker Follet hanya bisa dipahami sepenuhnya apabila kita mempertimbangkan baik berbagai tingkatan dimana tulisannya diterapkan, maupun apa yang mungkin tak terlihat di permukaan berupa sentimen-sentimen yang saling bertentangan yang membuahkan pendapatnya. Follet adalah seorang psikolog, tetapi juga ahli teori politik dan organisasi. Ia adalah moralis, tapi pada saat yang bersamaan ia juga praktisi yang tangguh. Akhirnya, meski Follet menolak sosialisme, ia bukanlah kategori ahli yang bisa membiarkan bisnis berjalan sebagaimana lazimnya, seperti *laissez-faire*-nya kapitalisme.

Follet melihat sepasang bahaya dari pemaksaan dan pembedaan (bidang kerja) yang mendasari organisasi sosial dan ekonomi. Alternatif-alternatif untuk itu harus dicari atas dasar kepercayaan yang tinggi baik melalui belajar dari pengalaman maupun kesatuan masyarakat yang dimungkinkan ada melalui upaya kerjasama.

Thompson (1967:54) melakukan kajian mengenai koordinasi berangkat dari premis bahwa organisasi bisa mempertautkan orang-orang dan kelompok-kelompok secara bersama-sama berkat teknologi. Dari kajiannya itu dihasilkan tiga jenis hubungan saling ketergantungan, yang disebutnya *pooled*, *sequential*, dan *reciprocal interdependence*. *Pooled* (tergabung) adalah hubungan saling ketergantungan di mana tiap bagian memberikan kontribusi yang berbeda-beda bagi keseluruhan dan tiap bagian itu dibantu oleh keseluruhan. Bagian-bagian dari organisasi adalah unit-unit semi otonomi dan tidak secara langsung tergantung pada yang lain. Contoh yang nyata dalam konteks penelitian ini ialah pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Meski tiap sektor memberikan kontribusi yang berbeda-beda bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, tidak satu pun sektor yang bisa bekerja tanpa terjalinnnya hubungan dengan sektor lain.

Dalam pada itu, sequential interdependence (hubungan saling ketergantungan yang berurutan) adalah di mana hubungan saling ketergantungan yang bersifat langsung dapat diamati di antara (unit-unit organisasi) dan urutannya bisa dispesifikasi. Misalnya, jalur operasional pelaksanaan perencanaan dari bawah (botom-up planning) yang dimulai dari temukarya LKMD Rakorbang II, Rakorbang I, Konreg, Rakorbang-nas (vide Permendagri No.9 Tahun 1982). Logikanya tidak mungkin ada Rakorbang II jika sebelumnya tidak ada penyelenggaraan Temu Karya LKMD, begitu pula seterusnya.

Jenis hubungan saling ketergantungan yang ketiga ialah reciprocal interdependence, yang oleh Thompson dilihat sebagai suatu situasi di mana keluaran-keluaran dari tiap (subunit organisasi) menjadi masukan untuk yang lain. Jadi setiap sub unit dipengaruhi oleh keluaran-keluaran dari semua sehingga hubungan timbal balik terbentuk. Dalam konteks bekerjanya suatu sistem, maka keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum merupakan keluaran yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan. Demikian juga sebaliknya, keberhasilan tugas-tugas pembangunan mestinya berpengaruh positif terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum.

Setiap jenis hubungan saling ketergantungan ini memerlukan koordinasi, tapi pada level yang berbeda. Yang tergolong relatif mudah mengkoordinasikannya ialah pooled interdependence di mana pembakuan (standardized) berbagai prosedur cocok diterapkan di situasi hubungan tersebut. Teori birokrasi memberi tekanan yang berat pada pembakuan tersebut baik di dalam maupun antar unit-unit organisasi.

Untuk sequential interdependence, koordinasi melalui perencanaan bisa diterapkan. Membuat jadual kegiatan yang bisa memperbaiki urutan pekerjaan dapat dipraktekkan dalam koordinasi ini. Thompson melihat mekanisme koordinatif lebih kompleks dan berbiaya karena mengandung lebih banyak fluktuasi manakala ada perubahan-perubahan tugas yang mengharuskan penjadualan ulang.

Reciprocal interdependence adalah jenis koordinasi yang paling kompleks dan banyak menelan biaya. Di sini penyesuaian bersama diperlukan. Koordinasi jenis ini melibatkan pengalihan informasi baru selama proses pelaksanaan kegiatan berlangsung. Penyesuaian-penyesuaian dilakukan selagi pekerjaan berjalan. Manajemen proyek dan organisasi matrix adalah sebuah contoh dari serangkaian hubungan-hubungan reciprocal di mana ada proses penyesuaian bersama begitu proyek berjalan menuju penyelesaian.

Banyak pejabat yang memandang koordinasi sebagai fungsi pimpinan yang harus terpisah. Bagaimanapun, akan jauh lebih cermat jika memahami koordinasi sebagai hal yang pokok dalam mempraktekkan kegiatan-kegiatan yang bersifat manajerial, untuk mewujudkan keserasian semua upaya yang dilakukan para pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Tiap fungsi manajemen adalah bentuk pelaksanaan kegiatan yang memberikan kontribusi kepada koordinasi.

Koordinasi yang paling baik terjadi, manakala setiap orang (pegawai/anggota) mengerti bagaimana pekerjaan yang dilakukannya memberikan kontribusi kepada tujuan-tujuan organisasi secara keseluruhan. Semuanya bisa mengerti hanya jika mereka mengetahui apa saja tujuan-tujuan organisasi/badan/lembaga bahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kepanitiaan adalah bentuk yang sangat efektif untuk pengkoordinasian berbagai kegiatan di antara begitu banyak unit-unit organisasi. Kepanitiaan dalam bentuk kelompok kerja, satuan tugas (task force) juga efektif dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan berbagai program. Dinamika organisasi modern justru bersumber pada beban berat yang dipikul pimpinannya dalam menyatukan perencanaan dengan berbagai kegiatan yang pelik, sering berubah, dan begitu banyaknya bagian yang terspesialisasi sehingga sulit dikoordinasikan. Untuk itu ada cara-cara yang biasa digunakan para

pimpinan di segala tingkatan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, yaitu (1) mengalihkan dan membagi Informasi, (2) mengkonsolidasikan kewenangan, dan (3) memotivasi lewat partisipasi.

Yang pertama, pimpinan memberikan informasi yang benar kepada semua pelaksana mengenai manfaat dan pentingnya suatu kegiatan dilaksanakan dengan berhasil. Yang kedua, pimpinan menilai batas kewenangan yang dimilikinya agar tidak bertabrakan dengan kewenangan bagian lain, kemudian mendelegasikannya kepada pimpinan di bawahnya supaya tumbuh inisiatif dan kreatifitasnya dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, mendorong semua bawahan/pelaksana untuk berperan-serta secara aktif pada setiap kegiatan sehingga hasilnya merupakan andil dari semua, bukan hanya hasil kerja pimpinan.

Semua cara untuk melaksanakan koordinasi betapapun baiknya selalu mengandung kelemahan-kelemahan, karena yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi ialah manusia dengan pekerjaannya. Oleh karena itu, penerapan setiap cara mengkoordinasikan kegiatan harus dikaitkan dengan situasi dan tuntutan persyaratan yang berlaku. Dalam hubungan ini, Mintzberg (1979; 1989) mensintesisakan apa yang diteorikan dalam literatur mengenai organisasi kedalam struktur organisasi. Mintzberg memperlihatkan bagaimana berbagai unsur struktur organisasi (seperti ukuran bagian-bagiannya, jangkauan desentralisasi, dsb.) membentuk susunan departementasi dari struktur organisasi (semacam satu lingkungan). Dengan demikian Mintzberg mengembangkan suatu tipologi konfigurasi organisasi, yang membedakan berbagai jenis mekanisme koordinasi.

Ada enam jenis mekanisme koordinasi yang diketengahkan oleh Mintzberg (1989:101), yaitu:

1. Mutual adjustment (penyesuaian bersama), yang bisa mewujudkan koordinasi melalui proses komunikasi informal yang bersifat sederhana (sebagaimana yang biasa dilakukan oleh dua orang pegawai pelaksana).
2. Direct supervision (supervisi/penyediaan langsung) di mana koordinasi bisa diwujudkan melalui seseorang yang berwenang memberikan

perintah atau instruksi kepada beberapa orang lain yang pekerjaannya saling terkait (sebagaimana jika seorang boss memerintah bawahannya apa yang harus segera dikerjakan).

3. Standardization of work process (pembakuan proses pelaksanaan pekerjaan) di mana koordinasi bisa diwujudkan melalui pengkhususan proses-proses pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tugas-tugasnya saling terkait. Pembakuan-pembakuan itu biasanya dikembangkan dalam tekno-struktur untuk dilaksanakan oleh para pelaksana, sebagaimana dalam kasus instruksi-instruksi yang dihasilkan oleh time-and-motion studies.

(Keterangan: Teknostruktur merupakan bagian dari organisasi di mana para analis berada. Mereka ini adalah staf non-struktural berada di luar jenjang kekuasaan. Mereka merencanakan dan mengawasi pekerjaan orang-orang lain. Contoh, pekerjaan studi para analis, pembuat jadual kegiatan, pengawas mutu, perencana, pembuat anggaran, para akuntan, para ahli riset-operasi)

4. Standardization of outputs (pembakuan hasil) di mana koordinasi bisa diwujudkan melalui spesifikasi (pengkhususan) hasil dari berbagai pekerjaan yang berbeda-beda (juga biasanya dikembangkan dalam teknostruktur, seperti dalam perencanaan keuangan yang mengkhhususkan pencapaian target-target tiap sub-unit, atau spesifikasi-spesifikasi yang membuat garis besar dimensi suatu produk yang dihasilkan).
5. Standardization of skills (pembakuan keterampilan termasuk pengetahuan) di mana berbagai pekerjaan yang berbeda-beda dikoordinasikan atas dasar hasil keterkaitan pelatihan yang diterima para pekerja (sebagaimana dalam keahlian para spesialis kedokteran misalnya dokter ahli bedah dan ahli anestesi dalam suatu operasi yang bisa menjawab hampir secara otomatis tiap-tiap prosedur yang sudah dibakukan).
6. Standardization of norms (pembakuan aturan/kaidah) dimana aturan/kaidah itulah yang menentukan bagaimana pekerjaan itu dikendalikan, biasanya untuk seluruh bagian organisasi, sehingga setiap orang

melakukan fungsinya sesuai dengan keyakinan yang sama (sebagaimana dalam menjalankan perintah agama).

Keenam jenis mekanisme koordinasi ini adalah mencakup semua cara dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan di dalam konteks keorganisasian. Di situ bagaimana tiap orang dalam organisasi mengkomunikasikan pengetahuan dan apa yang diharapkannya. Demikian juga, sebaliknya, di situ orang-orang dalam organisasi bisa belajar apa yang perlu diketahuinya dari orang-orang lain untuk melaksanakan tugas-tugasnya, sebagaimana halnya apa yang mereka harapkan dari orang-orang lain itu. Keenam jenis mekanisme koordinasi ini merupakan alternatif daripada mekanisme harga yang diciptakan oleh pasar untuk mengkomunikasikan informasi dan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ekonomi. Jadi merupakan jawaban untuk menekan biaya koordinasi yang dinilai mahal itu.

B. ASPEK NORMATIF

Dari uraian mengenai teori koordinasi, terlihat bahwa segi-segi normatif dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan juga menjadi bagian dari mekanisme koordinasi.

Dalam praktek pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembangunan di wilayah kecamatan, koordinasi yang biasa dilakukan bersumber pada ketentuan-ketentuan normatif yang masih berlaku dan sudah digariskan sebelumnya. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah mencantumkan ketentuan mengenai Kepala Wilayah sebagai administrator tunggal pemerintahan, masyarakat, dan pembangunan. Perwujudan fungsi ini ialah dalam menjalankan koordinasi (lihat Pasal 89 dan 90) tugas-tugas pemerintahan umum, masyarakat dan pembangunan. Demikian juga dengan Camat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan yang berfungsi melakukan koordinasi atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, masyarakat, dan pembangunan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, disebutkan:

Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasilguna dan dayaguna yang sebesar-besarnya. (Pasal 1 ayat 1);

Kepala Wilayah adalah pejabat yang menjadi wakil Pemerintah Pusat di Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya yaitu Gubernur, Bupati, Walikota, Walikotamadya, Walikota dan Camat (Pasal 1 ayat 2).

Dengan diberlakukannya PP No.6/1988 ini maka peraturan-peraturan yang berlaku sebelumnya, seperti Instruksi Presiden No. 04 Tahun 1969 tentang Pedoman Hubungan Kerja antara Aparatur Pemerintah di Tingkat Pusat dan Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Nasional, menjadi tidak berlaku lagi.

Peningkatan koordinasi dari segi normatif seharusnya bertolak dari optimalisasi penerapan PP No.6/1988 ini. Namun demikian, oleh karena koordinasi itu merupakan hal yang pokok (esensial) dalam tugas-tugas pekerjaan manajerial, maka seni memimpin dari Kepala Wilayah yang memikul wewenang koordinatif akan sangat menentukan keberhasilan yang optimal dari pelaksanaan koordinasi tugas-tugas pemerintahan umum, kemasyarakatan dan pembangunan.

Dalam pelaksanaan ketiga macam tugas tersebut, derajat kompleksitas masalah yang dihadapi sudah bisa diantisipasi sebelumnya oleh para Kepala Wilayah. Dengan demikian, cara-cara pelaksanaan koordinasi bisa dipilih dari paparan teoritis yang diuraikan di atas. Memilih cara yang tepat bukan saja tergantung kepada kecakapan memimpin tetapi

juga seni memimpin karena memahami perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya.

Standardization of norms sebagai salah satu dari enam macam mekanisme koordinasi yang dikemukakan oleh Mintzberg, bisa dikembangkan lebih lanjut dari PP No.6/1988 itu misalnya melalui Keputusan Gubernur, Bupati, Walikota, sehingga Walikota Kota Administratif dan Camat bisa menjadikannya sebagai pedoman dalam melaksanakan koordinasi.

Dalam pada itu, kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui temukarya LKMD dan forum-forum lainnya pada level kecamatan bisa dijadikan landasan normatif bagi pelaksanaan koordinasi berbagai tugas di tingkat kecamatan. Prosedur ini perlu ditempuh, mengingat pada tingkat kecamatan wibawa Camat kerap kali tidak bisa dijadikan sumber legalitas yang mendasari pelaksanaan koordinasi terutama jika dihadapkan dengan berbagai instansi vertikal lainnya di kecamatan, termasuk instansi ABRI.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kendala dalam pelaksanaan koordinasi pada unit administratif terendah bukan berasal dari ketentuan-ketentuan normatif yang mendasari adanya koordinasi itu. Kendala kerap kali timbul dari satuan-satuan organisasi yang setingkat dengan kecamatan yang merasa memiliki peran paling menentukan (perasaan egoisme sektoral). Pembebasan tanah untuk jalan Tol CIPULARANG yang tidak mencapai penyelesaian, membuktikan bahwa peran Camat di wilayah itu dalam melakukan koordinasi berbenturan dengan berbagai kendala. Begitu pula dengan kasus Cimahi Selatan (penggusuran hunian □ di atas tanah negara).

Aspek normatif yang mendasari pelaksanaan koordinasi tidak cukup "menggigit" jika diterapkan secara apa adanya. Pendekatan-pendekatan persuasif dan partisipatif merupakan bagian dari seni melaksanakan tugas-tugas koordinatif yang dipikul oleh pimpinan di segala tingkatan kegiatan manajerial. Jadi pertimbangan rasional yang melahirkan manajemen

pemerintahan modern belum bisa sepenuhnya berlaku, jika masyarakatnya berorientasi kolektif lebih kental daripada orientasi mandirinya.

C. KOORDINASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN RI

Proses pelaksanaan koordinasi dalam sistem pemerintahan negara RI didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988 Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

Dalam *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988*, diungkapkan bahwa *Koordinasi* adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. Adapun *Kepala Wilayah* adalah pejabat yang menjadi wakil Pemerintah Pusat di Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya yaitu Gubernur, Bupati, Walikota, dan Camat. *Instansi Vertikal* adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan, sedangkan *Dinas Daerah* adalah perangkat Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenang otonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah tersebut diungkapkan tugas dan kewajiban Kepala Wilayah, Kepala Instansi Vertikal, dan Kepala Dinas Daerah; juga tentang hubungan serta mekanisme dan tatacara penyelenggaraan koordinasi antara Kepala Wilayah, Kepala Instansi Vertikal, dan Kepala Dinas Daerah.

Di dalam PP Nomor 6 Tahun 1988 diatur mengenai mekanisme dan tata cara koordinasi, yang pelaksanaannya dilakukan melalui:

1. Rapat koordinasi Kepala Wilayah lengkap dan/atau terbatas;
2. Permintaan dan penyampaian data, informasi atau pendapat forum-forum koordinasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Konsultasi antar Kepala Instansi Vertikal dan antara Kepala Instansi Vertikal dengan Kepala Dinas Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Wilayah menetapkan peraturan pelaksanaannya.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 diungkapkan bahwa untuk melengkapi pengertian koordinasi perlu diperhatikan adanya jenis-jenis koordinasi yang meliputi:

1. *Koordinasi fungsional*, antara dua atau lebih Instansi yang mempunyai program yang berkaitan erat;
2. *Koordinasi instansional*, terhadap beberapa Instansi yang menangani suatu urusan tertentu yang bersangkutan;
3. *Koordinasi teritorial*, terhadap dua atau lebih wilayah dengan program tertentu.

Pada hakekatnya untuk mencapai tujuan yang berdayaguna dan berhasilguna diperlukan adanya keselarasan dan keserasian antara pelaksanaan kegiatan Pemerintah dengan kebutuhan Daerah dan masyarakatnya. Oleh sebab itu suatu bagian kegiatan atau beberapa bagian kegiatan di Daerah yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal atau Dinas Daerah tidak semuanya dan selamanya harus dilaksanakan serentak atau secara berurutan, tetapi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut perlu dikaitkan dengan kebutuhan Daerah dan masyarakatnya di samping faktor teknis yang timbul sebagai akibat dari kegiatan itu sendiri.

Kepala Wilayah dalam rangka pelaksanaan koordinasi dapat menetapkan suatu jadwal waktu, baik bagi Instansi Vertikal maupun Dinas Daerah, sehingga tercipta suatu sistem pelaksanaan kegiatan yang

selaras dan serasi dengan kebutuhan wilayah dan masyarakat, serta kepentingan suatu Instansi atau beberapa instansi dengan kegiatan Instansi lainnya yang saling berkaitan. Dengan demikian dalam penetapan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan Instansi-instansi tersebut, Kepala Wilayah Dapat menetapkan:

1. Pelaksanaan semua kegiatan antara semua Instansi Vertikal dan Dinas Daerah yang berkaitan, secara serentak atau secara berurutan atau;
2. Pelaksanaan kegiatan antara satu atau beberapa Instansi Vertikal dan/atau Dinas Daerah secara serentak dan yang lain secara berurutan atau;
3. Pelaksanaan kegiatan antara satu atau beberapa Instansi Vertikal dan/atau Dinas Daerah dengan satu atau beberapa Sub Kegiatan Instansi-instansi Vertikal dan/atau Dinas Daerah dan yang lain secara berurutan atau;
4. Pelaksanaan kegiatan antara satu atau beberapa Sub Kegiatan Instansi Vertikal dan/atau Dinas Daerah secara serentak dan yang lain secara berurutan.

Sejalan dengan wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah dalam menjalankan koordinasi, para Kepala Instansi Vertikal berkewajiban melaporkan kepada Kepala Wilayah segala sesuatu perihal bidang tugas dan kegiatannya baik yang sudah maupun yang sedang dan yang akan dilaksanakan dalam wilayah kewenangan Kepala Wilayah yang bersangkutan. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 ditetapkan bahwa koordinasi di Daerah meliputi:

1. *Koordinasi Perencanaan:*

- a. Koordinasi dilaksanakan pada tingkat perencanaan berdasarkan pembagian tugas pelaksanaan yang dilakukan oleh berbagai departemen atau lembaga sehingga setiap instansi dapat melibatkan diri dalam pelaksanaan suatu sektor atau antar sektor dan program sesuai dengan tanggung jawab dari wilayah kerjanya.

- b. Koordinasi pada tingkat perencanaan sekaligus ditunjang oleh sistem komunikasi yang efektif yang bersifat timbal antara sesama instansi pemerintah yang terlibat dalam berbagai sektor. Sistem koordinasi perencanaan sebagai dimaksudkan telah tercermin dalam bentuk-bentuk wadah struktural, fungsional seperti Bappenas, Bappeda Tk. I dan Bappeda Tk II maupun non struktural fungsional seperti badan-badan di bidang sektoral regional. Koordinasi perencanaan yang dilakukan oleh wadah-wadah tersebut di atas antara lain diselenggarakan melalui konsultasi, rapat-rapat kerja, lokakarya yang melibatkan berbagai instansi vertikal dan instansi otonom yang dipimpin oleh Kepala Wilayah pada tingkat daerah. Sedangkan pada tingkat pusat dilakukan melalui forum konsultasi antara Bappenas dengan Bappeda Tk I dan rapat-rapat Gubernur atau Kepala Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan melibatkan beberapa Menteri yang fungsional.

Koordinasi perencanaan di tingkat Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Wilayah yang dalam hal ini dilakukan oleh Bappeda Tk I/Tk II sebagai badan staf dalam menentukan kebijaksanaan pembangunan daerah. Koordinasi perencanaan ini meliputi baik perencanaan daerah maupun perencanaan sektoral.

Dalam menyusun rencana masing-masing yang dilakukan oleh dinas-dinas otonom dan instansi vertikal di wilayah kerjanya telah dilakukan konsultasi fungsional untuk menyerasikan pembangunan sektoral dan daerah. Rencana yang telah disusun oleh tiap-tiap instansi tersebut disampaikan pada Bappeda Tk I/Tk II, sedangkan rencana dari instansi vertikal disamping disampaikan pada Bappeda Tk I/Tk II disampaikan pula pada Departemen/Direktorat Jenderal yang bersangkutan. Rencana yang telah diterima oleh Bappeda Tk I/Tk II kemudian dibahas bersama-sama oleh semua instansi yang berada di wilayah dalam forum-forum yang telah disebutkan di atas.

- c. Kepala Wilayah meminta dan menerima program/rencana serta pelaksanaan tugas dari Instansi Vertikal yang ada di wilayahnya;
- d. Kepala Wilayah membahas program/rencana yang telah disampaikan oleh Instansi Vertikal bersama-sama dengan Instansi Vertikal lainnya dan Dinas Daerah yang ada di wilayahnya untuk dipadukan antara rencana Pusat dan Daerah;
- e. Program/rencana yang sudah dikoordinasikan; disampaikan oleh Kepala Instansi Vertikal kepada Menteri Pimpinan Departemen dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk mendapatkan persetujuan;
- f. Program/rencana dan kegiatan Instansi Vertikal yang telah diberikan persetujuan oleh Instansi Atasannya, sebelum dilaksanakan oleh masing-masing Instansi Vertikal di Daerah, agar diberikan petunjuk terlebih dahulu oleh Kepala Wilayah.
- g. Koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di daerah, khusus dalam perencanaan proyek-proyek di Daerah dan Desa, koordinasi dilaksanakan melalui forum konsultasi sesuai dengan asas perencanaan dari bawah, yang terintegrasikan dengan perencanaan dari atas yang tercakup antara lain dalam Permendagri No. 9/1982. Dalam Permendagri tersebut dinyatakan bahwa mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan berwujud Temu Karya atau Rapat UDKP, yang dihadiri oleh para Kepala Instansi Vertikal dan Instansi Otonom tingkat kecamatan, yang mendapat pembinaan dari pejabat Bappeda TK II atau Kantor Bangdes Tk II yang dipimpin oleh Camat dan dibantu oleh petugas Bangdes Kecamatan.

Di dalam Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan, terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan, diantaranya yaitu:

- a. Pengembangan sebuah desa dirasakan sangat terbatas baik dilihat dari segi potensi yang dimilikinya maupun prasarana dan sarana yang diperlukan,

sehingga membutuhkan dukungan prasarana dan sarana lainnya. Kecamatan di Indonesia rata-rata mempunyai 15 sampai dengan 20 desa, sehingga memenuhi persyaratan untuk dianalisis dan direncanakan perkembangannya.

- b. Perkembangan suatu wilayah memerlukan persyaratan adanya pusat pertumbuhan atau perkembangan. Kota kecamatan sebagai pusat fasilitas sosial ekonomi bagi desa-desa di sekitarnya perlu dikembangkan menjadi kota-kota kecil sesuai dengan fungsi dan potensinya masing-masing.
- c. Dalam pembangunan nasional telah dikembangkan pendekatan wilayah pengembangan utama A, B, C, D, dan E, wilayah pembangunan besar (87 kota propinsi dan kabupaten atau kotamadya) dan wilayah pembangunan sedang (kota-kota Kabupaten). Di tingkat terbawah dikenal wilayah pembangunan kecil (kecamatan) atau terkecil yaitu desa-desa dalam wilayah kecamatan, sesuai dengan fungsi dan potensinya yang mendukung struktur wilayah pembangunan, bersambung satu dengan yang lain.
- d. Kecamatan merupakan unit pemerintah dan pembangunan di tingkat bawah dari wilayah Kabupaten atau Kotamadya dan Propinsi, memiliki organisasi pemerintah dan aparat yang relatif lengkap dan baku diseluruh Indonesia dibanding dengan Desa atau Kelurahan. Disamping itu, sebagian camat sudah dan terus akan diarahkan untuk berpendidikan akademis, serta dibantu oleh petugas lapangan dari sejumlah instansi vertikal Tingkat Kecamatan.
- e. Camat sebagai Kepala Wilayah mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan berbagai instansi di tingkat kecamatan sesuai dengan pasal 80 dan 81 UU nomor 5 tahun 1974, yang lebih memantapkan kedudukan dan fungsinya sebagai alat dekonsentrasi. (H. Mutawali)

2. Koordinasi Pelaksanaan

Koordinasi pelaksanaan pada hakekatnya berlandaskan pada prinsip fungsionalisasi yang menentukan secara jelas siapa atau badan atau lembaga mana yang diseserahi wewenang mengkoordinasikan program dalam suatu sektor.

Prinsip fungsionalisasi dapat pula diartikan adanya sebagai kegiatan yang saling menunjang untuk mencapai sesuatu tujuan atau sasaran yang merupakan kepentingan bersama. Prinsip fungsionalisasi ini dituangkan kedalam berbagai prosedur pelaksanaan. Koordinasi pelaksanaan dalam masalah ini adalah koordinasi yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah yang mempunyai proyek-proyek yang dituangkan kedalam berbagai bentuk dalam bidang proyek-proyek tertentu.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) mempunyai arti yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan Desa, yang bertujuan antara lain:

1. Mengkoordinasikan keseluruhan kegiatan pembangunan masuk desa, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas yang lebih besar melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan wilayah yang terpadu dengan pendekatan perendanaan dari bawah.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kota-kota kecamatan dan desa-desa dalam wilayahnya sebagai pusat perkembangan kecil atau terkecil di pedesaan, dengan meningkatkan fungsi fasilitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan maupun ketertiban dan keamanan masyarakat.
3. Mempercepat pencapaian desa swasembada di seluruh wilayah, sebagai prakondisi untuk mencapai landasan kuat bagi terwujudnya sasaran-sasaran nasional yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Kegiatan-kegiatan yang pada umumnya dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan UKDP, diantaranya adalah:

1. Penelitian dan penyusunan pola Tata Desa;

2. Perencanaan yang menyeluruh dan terpadu;
3. Pelaksanaan terpadu dari berbagai program sektoral, regional dan peran serta masyarakat;
4. Latihan Kader Pengembangan Desa (KPD) untuk membantu pelaksanaan peran serta aktif dan produktif dari masyarakat;
5. Pengendalian pelaksanaan proyek dan kegiatan pembangunan secara mantap oleh Camat;
6. Monitoring dan evaluasi semua kegiatan dan hasil pembangunan di wilayah kecamatan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam koordinasi pelaksanaan adalah:

- a. Kepala Instansi Vertikal berkewajiban melaporkan kepada Kepala Wilayah perihal tugas dan kegiatannya yang sudah, sedang dan yang akan dilaksanakan dalam wilayah kewenangan Kepala Wilayah yang bersangkutan;
- b. Laporan Kepala Instansi Vertikal mengenai bidang tugas kegiatan dimaksud, memuat hal-hal sebagai berikut:
 - apa yang akan dikerjakan;
 - waktu pelaksanaan;
 - Instansi yang terkait;
 - pelaksanaan kegiatan yang diselesaikan.
- c. Apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaan program/rencana yang ada, terutama yang menyangkut dengan kegiatan Instansi Vertikal lainnya dan Dinas Daerah, agar dilaporkan kepada Kepala Wilayah untuk diberikan pemecahannya.

3. Koordinasi Pengawasan

Koordinasi di bidang pengawasan yang dijalankan saat ini di tingkat daerah diwadahkan di dalam suatu tim koordinasi Pengendalian Pengawasan Pembangunan di Daerah yang dibentuk berdasarkan Keppres No 18 tahun 1981. Tim ini membantu Gubernur dalam bidang pengawasan dan pengendalian.

Koordinasi pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh tim tersebut pada prinsipnya ditujukan untuk tercapainya keserasian dan keterpaduan dalam pelaksanaan rencana dan program pemerintah dalam rangka pembangunan di daerah.

Tim koordinasi ini sekaligus dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing instansi. Dalam hal ini perlu disadari bahwa peningkatan kegiatan usaha pembangunan telah mempunyai implikasi terhadap peningkatan sejumlah aparatur pengawasan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Yang harus diperhatikan dalam koordinasi pengawasan:

- a. Pengawasan pelaksanaan program/rencana Instansi Vertikal dilakukan oleh Aparat Pengawasan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen di bawah koordinasi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan program/rencana Instansi Vertikal dimaksud disampaikan kepada Menteri Pimpinan Departemen dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta tembusannya disampaikan kepada Kepala Wilayah;
- c. Kepala Wilayah melaporkan data dan informasi hasil pengawasan yang diterima dari BPKP kepada Menteri Pimpinan Departemen dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen disertai pertimbangan dan saran dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

4. *Koordinasi Pelaporan:*

- a. Kepala Instansi Vertikal wajib melaporkan secara periodik (3 bulan sekali) kepada Kepala Wilayah segala sesuatu atas perkembangan pelaksanaan tugasnya;
- b. Setiap berakhirnya Tahun Anggaran, Kepala Instansi Vertikal menyampaikan Laporan Tahunan kepada Kepala Wilayah mengenai pelaksanaan tugasnya selama tahun berjalan;

- c. Laporan insidentil agar disampaikan oleh Instansi Vertikal kepada Kepala Wilayah terhadap hal-hal yang perlu segera mendapatkan penyelesaiannya.

5. *Koordinasi Pembinaan,*

Koordinasi pembinaan dilakukan dalam hal pengangkatan/pemindahan serta pelantikan Kepala Instansi Vertikal.

Hubungan antara Kepala Instansi Vertikal dengan Kepala Dinas Daerah dirumuskan sebagai berikut:

1. Kepala Instansi Vertikal dengan sepengetahuan Kepala Daerah yang bersangkutan memberikan bimbingan teknis kepada Kepala Dinas Daerah terhadap pelaksanaan urusan-urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah;
2. Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Dinas Daerah saling memberikan informasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
3. Kepala Dinas Daerah wajib melaporkan mengenai perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Instansi Vertikal yang memberikan bimbingan teknis.

Dalam mekanisme fungsi koordinasi pun ditentukan sanksi bahwa, terhadap Kepala Instansi Vertikal yang lalai dan tidak mengindahkan ketentuan mengenai koordinasi sebagaimana tersebut di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989, maka Kepala Wilayah dapat mengusulkan tindakan administratif kepada Pejabat Atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. PEMERINTAHAN WILAYAH

1. Pembagian Wilayah

Wilayah Negara Kesatuan RI dibagi dalam wilayah-wilayah administratif, yaitu yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, dan disamping itu dibentuk pula daerah-daerah otonom yaitu yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.

Adanya pemerintahan di Daerah yang bersifat administratif, adalah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas dekonsentrasi yaitu suatu pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Wilayah administratif adalah lingkungan kerja perangkat Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah. Adapun tugas atau urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang meliputi bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga daerah otonom.

Urusan Pemerintahan Umum dibedakan menjadi urusan pemerintahan umum pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, serta urusan pemerintahan umum pusat di Daerah yang bersifat administratif atau lebih dikenal dengan pemerintahan khusus pusat di Daerah yang diselenggarakan oleh jawatan pusat di Daerah.

Baik pemerintah pamong praja maupun jawatan pusat di Daerah merupakan bagian dari pemerintahan di Daerah yang bersifat administratif saja. Dengan kata lain hanya merupakan kepanjangan tangan saja dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian pada prinsipnya hanya menyelenggarakan saja kebijaksanaan yang telah digariskan Pemerintah Pusat, walaupun dalam pelaksanaannya dibutuhkan pula kebijaksanaannya.

Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi ini, maka wilayah Negara Kesatuan RI dibagi dalam wilayah-wilayah propinsi dan Ibukota. Wilayah Propinsi dibagi dalam wilayah-wilayah Kecamatan. Dan apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, dalam Wilayah Kabupaten dapat dibentuk Kota Administratif yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (pasal 72 Undang Undang No. 5 Tahun 1974)

Berdasarkan pasal 76 dan 77 Undang-undang No. 5 Tahun 1974, setiap wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah, yang sebutannya adalah sebagai berikut:

- a. Propinsi dan Ibukota Negara disebut Gubernur;
- b. Kabupaten disebut Bupati;
- c. Kotamadya disebut Walikota;
- d. Kota Administrasi disebut Walikota;
- e. Kecamatan disebut Camat

2. Pemerintahan Wilayah Kecamatan

Kecamatan merupakan pemerintahan administratif dalam tingkatan yang paling rendah, dan ini biasanya berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Aparat kecamatan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan dari pemerintah yang ada di atasnya, untuk melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pemberian petunjuk operasional sehubungan hal tersebut, keberhasilan pembangunan akan banyak ditentukan oleh pelaksanaannya ditingkat kecamatan.

a. Wewenang, tugas dan kewajiban Pemerintah Kecamatan

Camat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan secara kualitas mempunyai bobot wewenang, tugas dan kewajiban yang sama dengan kewenangan Kepala Wilayah lainnya, yang membedakan adalah segi

kuantitas, karena adanya perbedaan tingkat jenjang serta ruang lingkup geografisnya.

Berdasarkan pasal 81 Undang-undang No. 5 Tahun 1974, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah adalah sebagai berikut:

- 1) Membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan, ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 2) Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 3) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan instansi-instansi Vertikal dan antara kegiatan instansi Vertikal dengan Dinas-dinas Daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.
- 4) Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 5) Mengusahakan secara terus menerus agar segala perundangan dan peraturan daerah dijalankan oleh instansi pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk ikut serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
- 6) Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya.
- 7) Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi lainnya.

b. Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kecamatan

Organisasi pemerintah kecamatan di Indonesia desawa ini diatur menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan. Di lokasi penelitian, Keputusan Menteri Dalam Negeri ini ternyata belum berlaku secara efektif di seluruh Kecamatan, karena sebagian besar kecamatan masih mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 82 tentang

Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Kecamatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 1993 pasal 1, organisasi kecamatan terdiri dari.

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayan umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota/Walikota, yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan pemerintah Desa/Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal atas instansi vertikal, instansi vertikal dengan dinas daerah dan antar instansi vertikal lainnya dalam wilayah kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Camat mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah
3. Pembinaan pembangunan masyarakat desa yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup
4. Pembinaan kesejahteraan sosial
5. Pembinaan Pelayanan Umum
6. Penyusunan rencana program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Die folgenden Aussagen sind richtig oder falsch. Kreuzen Sie an.

- 1. Die Epithelzellen des Darmes sind polarisiert.
- 2. Die Epithelzellen des Darmes sind unipolar.
- 3. Die Epithelzellen des Darmes sind multipolar.
- 4. Die Epithelzellen des Darmes sind bipolar.
- 5. Die Epithelzellen des Darmes sind unipolar.
- 6. Die Epithelzellen des Darmes sind multipolar.
- 7. Die Epithelzellen des Darmes sind bipolar.
- 8. Die Epithelzellen des Darmes sind unipolar.

Die folgenden Aussagen sind richtig oder falsch. Kreuzen Sie an.

- 1. Die Epithelzellen des Darmes sind polarisiert.
- 2. Die Epithelzellen des Darmes sind unipolar.
- 3. Die Epithelzellen des Darmes sind multipolar.
- 4. Die Epithelzellen des Darmes sind bipolar.
- 5. Die Epithelzellen des Darmes sind unipolar.
- 6. Die Epithelzellen des Darmes sind multipolar.
- 7. Die Epithelzellen des Darmes sind bipolar.
- 8. Die Epithelzellen des Darmes sind unipolar.

BAB III

GAMBARAN UMUM KONDISI DAN MASALAH

A. KECAMATAN PANDEGLANG KABUPATEN DATI II PANDEGLANG

Kecamatan Pandeglang mempunyai luas 3587,9 Ha, yang terdiri dari tanah sawah seluas 991,7 Ha, tanah kering 2347 Ha dan tanah basah seluas 249,2 Ha. Bentuk wilayah di kecamatan ini yaitu berupa tanah datar sampai berombak (35%), berombak sampai berbukit (50%) dan berbukit sampai bergunung (15%).

Dilihat dari segi geografis kecamatan ini jaraknya dekat dengan ibukota kabupaten yaitu 1 Km. Pada akhir tahun 1995, jumlah kelurahan di kecamatan terdapat sebanyak 9 kelurahan yang semuanya tergolong ke dalam desa swasem-bada.

Iklm di kecamatan ini hampir sama dengan iklim secara keseluruhan di Pandeglang. Udara yang sedang, disertai curah hujan yang cukup, sehingga matapencaharian masyarakatnya pun sama dengan matapencaharian masyarakat secara umum di Kabupaten Pandeglang yaitu bertani.

1. Aktivitas Perekonomian Dan Mata-pencaharian Penduduk

Sebagaimana juga Kecamatan lainnya, masyarakat di Kecamatan Pandeglang mempunyai aktivitas ekonomi yang bermacam-macam. Ada yang bermatapencaharian bertani, pengusaha sedang maupun besar, pengrajin, buruh, pedagang, jasa transportasi, serta pegawai negeri dan lain-lain. Secara ringkas struktur matapencaharian penduduk Kecamatan Pandeglang dapat dilihat pada tabel III.1. berikut:

Tabel III.1.
Struktur Matapencaharian Penduduk
Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang

Matapencaharian	Jumlah
Bertani	6073
Pengusaha sedang/besar	397
Pengrajin/industri kecil	243
Buruh	3101
Pensiunan	576
Jasa transportasi	381
Pedagang	1881
Pegawai Negeri Sipil/ABRI	5230

Sumber : Monografi Kecamatan Pandeglang

Dari tabel III.1 di atas, terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Pandeglang bekerja sebagai petani, belum termasuk di dalamnya buruh tani. Pegawai negeri termasuk di dalamnya ABRI menempati urutan kedua. Sedangkan proporsi paling kecil dari penduduk Kecamatan Pandeglang adalah pengrajin.

Pertanian yang ada di kecamatan ini bervariasi pula, dari mulai tanaman padi, jagung ketela pohon, kacang tanah, kedelai, sayur-sayuran dan buah-buahan, di samping itu terdapat tanaman-tanaman keras seperti cengkeh dan kelapa. Di kecamatan ini juga tidak sedikit pertanian yang heterogen dalam suatu lahan.

2. Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

Dilihat dari aspek kependudukan dan ketenagakerjaan, Kecamatan Pandeglang mempunyai beberapa indikator seperti tergambar pada Tabel III.2 berikut ini:

Tabel III.2.
Indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang

INDIKATOR KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	Tahun 1995
1. Jumlah Penduduk	62.061
2. Kepadatan Penduduk	1.477
3. Jml. Rumah Tangga (RT)	12.216
4. Penduduk Usia Dewasa	34.718
5. Penduduk Anak-anak	27.343
6. Penduduk Menurut Agama	
- Islam	61.868
- Katholik	50
- Protestan	31
- Hindu	3
- Budha	109
7. Penduduk menurut Kewarganegaraan	
- WNI	62.046
- WNA	15
8. Penduduk Pencari Kerja	408

Sumber: Monografi Kecamatan Pandeglang

Dari Tabel III.2 di atas terlihat bahwa Kecamatan Pandeglang dapat dikategorikan wilayah yang mempunyai jumlah penduduk kedua tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya di Pandeglang. Dilihat dari struktur penduduknya, secara kasar dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Pandeglang perbandingan antara golongan usia tua dan anak-anak hampir sebanding.

3. Pendidikan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pendidikan yang secara langsung mempengaruhi kualitas SDM, seperti disebutkan di atas, merupakan salah satu faktor yang besar pengaruhnya terhadap kelancaran terselenggaranya pembangunan di kecamatan, di samping sumber daya alam dan sumber dana. Dilihat dari

dimensi ini, Kecamatan Pandeglang memiliki beberapa indikator pendidikan sebagai penentu kualitas SDM sebagaimana terlihat pada Tabel III.3 berikut ini:

Tabel III.3.
Indikator Pendidikan Dan Kualitas SDM
Di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang

INDIKATOR PENDIDIKAN DAN KUALITAS SDM	TAHUN 1995
1. Belum sekolah	10.439
2. Penduduk Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD)	2.987
3. Penduduk Tamat SLTP/ sederajat	727
4. Penduduk Tamat SLTA/ sederajat	713
5. Penduduk Tamat Akademi/ sederajat	41
6. Penduduk Tamat Perguruan Tinggi/ sederajat	37
7. TK : Jumlah Sekolah	7
8. SD : Jumlah Sekolah	57
9. SLTP : Jumlah Sekolah	7
10. SLTA : Jumlah Sekolah	9
11. PT : * Jml PT	1
12. Lain-lain (kursus)	6

Sumber : Monografi Kecamatan Pandeglang, diolah.

Seperti terlihat pada Tabel III.3, sarana pendidikan di Kecamatan Pandeglang relatif memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada dan jumlah penduduknya. Jumlah SD, SLTP, dan SLTA baik umum maupun agama (sekolah islam) relatif banyak. Demikian juga, pendidikan penduduknya relatif lebih maju dibandingkan kecamatan lainnya, seperti Mandalawangi.

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di kecamatan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi aktivitas kehidupan di kecamatan, baik aktivitas ekonomi, pemerintahan, pembangunan, dan lain-lain.

Sehingga lancar tidaknya pembangunan yang dilaksanakan di kecamatan sangat ditentukan oleh keberadaan dan kondisi sarana dan prasarana ini. Dilihat dari aspek ini, Kecamatan Pandeglang memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel III.4.
Indikator Kondisi Sarana Dan Prasarana
Di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang

INDIKATOR SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1. Transportasi	
- Jalan Aspal	62 km
- Jalan Diperkeras	51 km
- Jalan Tanah	7 km
- Kendaraan Umum	Memadai
2. Komunikasi	
- Televisi	Memadai
- Radio	Memadai
- Telephone	Ada
- Telephone Umum	6 Buah
3. Penerangan	
- Listrik	Memadai
4. Ekonomi	
- Bank	4 buah
- Koperasi	3 buah
- Pasar Selapan	2 buah
- Pasar Permanen	2 buah
- Toko/Kios/Warung	1421 buah
- Stasiun Bus	-
- Stasiun Oplet	3 buah
5. Pemukiman Penduduk	
- Permanen	4785 buah
- Semi permanen	2911 buah
- Panggung	2213 buah
6. Tempat peribadatan	
- Mesjid	56 buah
- Surau/Mushola	24 buah
- Gereja	-
7. Kesehatan	
- RS Umum	1 buah
- Poliklinil	1 buah
- Puskesmas	4 buah
- Dokter	15 orang

Tabel Lanjutan

- Dukun	48 orang
- Apotik	3 buah
-Panti Pijat	1 buah

Sumber : Monografi Kecamatan Pandeglang, diolah.

Jalan merupakan urat nadi aktivitas kehidupan di kecamatan dan desa. Prasarana jalan yang memadai akan mendukung lancarnya aktivitas ekonomi dan pembangunan di wilayah tersebut. Dilihat dari aspek ini, Kecamatan Pandeglang dapat dikategorikan wilayah yang mempunyai prasarana jalan cukup memadai.

Sarana dan prasarana komunikasi pun di kecamatan ini cukup memadai. Hampir ke seluruh wilayah kecamatan, televisi dan telephone telah masuk. Sarana komunikasi yang relatif baik ini, secara langsung dapat memperlancar arus informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Demikian juga listrik, yang juga merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi aktivitas kehidupan di kecamatan dan di desa-desa, sudah sejak lama masuk ke Wilayah Kecamatan Pandeglang.

Sarana dan prasarana yang secara langsung mendukung aktivitas ekonomi, di Kecamatan Pandeglang cukup memadai pula. Lembaga keuangan seperti Bank dan koperasi cukup untuk menampung kegiatan ekonomi masyarakat kecamatan ini. Sementara pasar sebagai tempat interaksi langsung antara konsumen dan produsen, di kecamatan ini relatif lengkap, mulai dari pasar selapan, pasar permanen sampai pasar yang tidak mempunyai bangunan permanen ada di kecamatan ini, disamping juga jumlah toko, kios, dan warung-warung yang relatif banyak dengan omset penjualan yang cukup besar.

Hanya untuk pendukung prasarana dan sarana ekonomi tersebut, Kecamatan Pandeglang belum memiliki terminal bus tapi hanya terminal oplet yang cukup memadai, sehingga kota ini merupakan salah satu sentral transportasi di Kabupaten Pandeglang.

Sedangkan sarana peribadatan karena mayoritas penduduk Kecamatan Pandeglang adalah beragama Islam maka sarana peribadatan

yang paling banyak adalah mesjid, surau dan mushola. Adapun sarana kesehatan cukup memadai dengan adanya 1 Rumah Sakit Umum dan sarana penunjang medis lainnya seperti apotik, puskesmas, tenaga dokter serta dukun tradisional.

5. Sikap Kekeluargaan Dan Kesetiakawanan Masyarakat

Sikap kekeluargaan dan kesetiakawanan masyarakat di Kecamatan Pandeglang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Di tempat-tempat yang masih jauh dari kota kecamatan, nampaknya sikap kekeluargaan dan kegotongroyongan masyarakat masih kuat, baik dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk kepentingan sosial, keagamaan, maupun kegiatan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan di kotanya, nampaknya dalam aktivitas yang bersifat individu, sikap kegotongroyongan dan kekeluargaan ini sudah berkurang. Namun, dalam hal-hal yang bersifat sosial dan keagamaan masih tetap melekat pada masyarakat.

6. Pemerintahan Dan Sarana Pemerintahan di Kecamatan

Sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan, di Kecamatan Pandeglang terdapat beberapa instansi, baik vertikal, otonom, maupun BUMN/BUMD. Ada 7 (tujuh) instansi vertikal yang ada di kecamatan ini, yaitu Depdikbud, Departemen Agama, Departemen Penerangan (JUPEN), Sosial, Statistik, PLKB, Departemen Transmigrasi dan PPH, Koramil, dan Polsektif.

Instansi otonom yang ada di kecamatan Pandeglang, juga cukup banyak. Ada 8 instansi yang ada, yaitu Dinas P&K, KCD PUK, KCD Pertanian, KCD Peternakan, KCD Perikanan, PUSKESMAS, PU, DLLAJ, Dinas Pasar. Sementara instansi BUMN/BUMD yang ada di kecamatan ini berjumlah 13 BUMN/BUMD, yaitu antara lain BRI, Pegadaian, PT: TELKOM, PLN, Pos dan Giro, Bank Pasar, BKPD, dan PDAM. Sarana dan prasarana pemerintahan terlihat cukup memadai.

Semua desa yang ada di kecamatan ini telah memiliki kantor desa dan balai desa.

7. Dinamika Pembangunan Dan Faktor Pendukung Lainnya

Dengan modal kondisi wilayah seperti dipaparkan di muka, di Kecamatan Pandeglang setelah beberapa kurun waktu melaksanakan pembangunan, sesuai dengan rencana pembangunan nasional, nampak terdapat perkembangan yang menggembirakan, meskipun di sisi lain terdapat aspek-aspek yang belum tersentuh secara memuaskan.

Kemajuan pembangunan yang berhasil dicapai Kecamatan Pandeglang terlihat misalnya dari perkembangan kehidupan dan keramaian wilayah, yang secara kongkrit dapat dilihat dari terus berlanjutnya pembangunan di wilayah ini. Misalnya, pada tahun 1995 pembangunan dilakukan di sektor perhubungan dan pariwisata, daerah desa dan kota, agama, pendidikan dan generasi muda, kebudayaan dan kepercayaan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, kependudukan dan Keluarga Berencana, dengan keseluruhan jumlah proyek sebanyak 20 proyek dengan biaya total sebesar Rp 456.526.000,- yang berasal dari biaya pusat Rp 200.526.000,-; Biaya dari Dati I Rp 219.000.000,- dan swadaya penduduk Rp 37.000.000,-.

Dinamika masyarakat juga dipacu oleh program-program pemerintah yang bersasaran untuk meningkatkan prestasi daerah dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan lomba desa dan kegiatan PKK misalnya, dirasakan dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan desa-desa di Kecamatan Pandeglang.

B. KECAMATAN MANDALAWANGI KABUPATEN DATI II PANDEGLANG

Kecamatan Mandalawangi mempunyai luas 5043 Ha, yang terdiri dari tanah sawah seluas 1191 Ha, tanah kering 1650 Ha, tanah basah seluas 1332 Ha, tanah hutan 1161 Ha, dan tanah lain-lainnya 160 Ha. Bentuk wilayah di kecamatan ini yaitu berupa tanah datar sampai berombak sampai berbukit (70%) dan berbukit sampai bergunung (30%).

Dilihat dari segi geografis kecamatan ini jaraknya tidak terlalu jauh dengan ibukota kabupaten yaitu 1 Km. Pada akhir tahun 1995, jumlah kelurahan di kecamatan terdapat sebanyak 15 desa yang semuanya tergolong ke dalam kategori desa swadaya (1 desa) dan desa swasembada (14 desa).

Iklm di kecamatan ini hampir sama dengan iklim secara keseluruhan di Mandalawangi. Udara yang sedang, disertai curah hujan yang cukup, sehingga matapencaharian masyarakatnya pun sama dengan matapencaharian masyarakat secara umum di Kabupaten Pandeglang yaitu bertani.

1. Aktivitas Perekonomian Dan Matapencaharian Penduduk

Sebagaimana juga Kecamatan lainnya, masyarakat di Kecamatan Mandalawangi mempunyai aktivitas ekonomi yang bermacam-macam. Ada yang bermatapencaharian bertani, pengusaha sedang maupun besar, pengrajin, buruh, pedagang, jasa transportasi, serta pegawai negeri dan lain-lain. Secara ringkas struktur matapencaharian penduduk Kecamatan Mandalawangi dapat dilihat pada tabel III.5 berikut:

Tabel III.5.
Struktur Matapencarian Penduduk
Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang

Matapencarian	Jumlah
Bertani	13.531
Pengusaha sedang/besar	10
Pengrajin/industri kecil	15
Buruh	2736
Pensiunan	124
Jasa transportasi	-
Pedagang	59
Pegawai Negeri Sipil/ ABRI	422

Sumber: Monografi Kecamatan Mandalawangi

Dari tabel III.5 di atas, terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Mandalawangi bekerja sebagai petani, belum termasuk di dalamnya buruh tani. Buruh menempati urutan kedua disusul oleh Pegawai negeri termasuk di dalamnya ABRI menempati urutan kedua. Sedangkan proporsi paling kecil dari penduduk Kecamatan Mandalawangi adalah pengusaha dan pengrajin.

Pertanian yang ada di kecamatan ini bervariasi pula, dari mulai tanaman padi, jagung, ketela pohon, kacang tanah, kedelai, sayur-sayuran dan buah-buahan, di samping itu terdapat tanaman-tanaman keras seperti cengkeh dan kelapa. Di kecamatan ini juga tidak sedikit pertanian yang heterogen dalam suatu lahan.

2. Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

Dilihat dari aspek kependudukan dan ketenagakerjaan, Kecamatan Mandalawangi mempunyai beberapa indikator seperti tergambar pada Tabel III.6 berikut ini:

Tabel III.6.
Indikator Kependudukan Dan Ketenagakerjaan
Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang

INDIKATOR KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	Tahun 1995
1. Jumlah Penduduk	35.336
2. Kepadatan Penduduk	10
3. Jml. Rumah Tangga (RT)	8.013
4. Penduduk Usia Dewasa	22.579
5. Penduduk Anak-anak	12.757
6. Penduduk Menurut Agama	
- Islam	35.336
- Katholik	0
- Protestan	0
- Hindu	0
- Budha	0
7. Penduduk Pencari Kerja	2245

Sumber: Monografi Kecamatan Mandalawangi

Dari Tabel III.6 di atas terlihat bahwa Kecamatan Mandalawangi dapat dikategorikan wilayah yang mempunyai jumlah penduduk sedang dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Pandeglang. Dilihat dari struktur penduduknya, secara kasar dapat dilihat bahwa duapertiga penduduk di Kecamatan Mandalawangi adalah golongan usia tua.

3. Pendidikan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pendidikan yang secara langsung akan mempengaruhi kualitas SDM, seperti disebutkan di atas, merupakan salah satu faktor yang besar pengaruhnya terhadap kelancaran terselenggaranya pembangunan di kecamatan, di samping sumber daya alam dan sumber dana. Dilihat dari dimensi ini, Kecamatan Mandalawangi memiliki beberapa indikator pendidikan sebagai penentu kualitas SDM sebagaimana terlihat pada Tabel III.7 berikut ini:

Tabel III.7.
Indikator Pendidikan Dan Kualitas SDM
Di Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang

INDIKATOR PENDIDIKAN DAN KUALITAS SDM	TAHUN 1995
1. Belum sekolah	4.580
2. Penduduk Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD)	TT
3. Penduduk Tamat SD	3.015
4. Penduduk Tamat SLTP/ sederajat	3.654
5. Penduduk Tamat SLTA/ sederajat	370
6. Penduduk Tamat Akademi/ sederajat	TT
7. Penduduk Tamat Perguruan Tinggi/ sederajat	TT
8. TK : Jumlah Sekolah	TT
9. SD : Jumlah Sekolah	47
10. SLTP : Jumlah Sekolah	1
11. SLTA : Jumlah Sekolah	TT
12. PT : * Jml PT	TT
13. Lain-lain (kursus)	TT

Sumber : Monografi Kecamatan Mandalawangi, diolah.

Catatan : TT = Data Tidak Tersedia

Seperti terlihat pada Tabel III.7, sarana pendidikan di Kecamatan Mandalawangi khususnya tingkat sekolah dasar cukup memadai, hanya untuk tingkat lanjutan pertama dan lanjutan atas tampaknya masih mengkhawatirkan, begitu pula dengan pendidikan tingkat tinggi.

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di kecamatan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi aktivitas kehidupan di kecamatan, baik aktivitas ekonomi, pemerintahan, pembangunan, dll. Sehingga lancar tidaknya pembangunan yang dilaksanakan di kecamatan sangat ditentukan oleh keberadaan dan kondisi sarana dan prasarana ini. Dilihat dari aspek ini, Kecamatan Mandalawangi memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel III.8.
Indikator Kondisi Sarana Dan Prasarana
Di Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang

INDIKATOR SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1. Transportasi	
- Jalan Aspal	90 km
- Jalan Diperkeras	26 km
- Jalan Tanah	32km
- Kendaraan Umum	Memadai
2. Komunikasi	
- Televisi	Cukup Memadai
- Radio	Tidak Ada
- Telephone	Cukup Memadai
- Telephone Umum	Tidak Ada
3. Penerangan	
- Listrik	Memadai
4. Ekonomi	
- Bank	-
- Koperasi	2 buah
- Pasar Selapan	1 buah
- Pasar Permanen	1 buah
- Toko/Kios/Warung	258 buah
- Stasiun Bus	-
- Stasiun Oplet	-
5. Pemukiman Penduduk	
- Permanen	15371 buah
- Semi permanen	1341 buah
- Ponggung	7846 buah
6. Tempat peribadatan	
- Masjid	61 buah
- Surau/Mushola	96 buah
- Gereja	-
7. Kesehatan	
- RS Umum	-
- Poliklinik	-
- Puskesmas	1 buah
- Dokter	1 orang
- Dukun	108 orang
- Apotik	-
-Panti Pijat	-

Sumber : Monografi Kecamatan Mandalawangi, diolah.

Jalan merupakan urat nadi aktivitas kehidupan di kecamatan dan desa. Prasarana jalan yang memadai akan mendukung lancarnya aktivitas ekonomi dan pembangunan di wilayah tersebut. Dilihat dari aspek ini, Kecamatan Mandalawangi dapat dikategorikan wilayah yang mempunyai prasarana jalan cukup memadai.

Sedangkan hanya saja dalam hal sarana dan prasarana komunikasi di kecamatan ini kurang memadai. Sarana komunikasi yang kurang baik ini, secara langsung mengakibatkan kurang lancarnya arus informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Demikian juga listrik, yang juga merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi aktivitas kehidupan di kecamatan dan di desa-desa, sudah sejak lama masuk ke Wilayah Kecamatan Mandalawangi.

Sarana dan prasarana yang secara langsung mendukung aktivitas ekonomi, di Kecamatan Mandalawangi masih kurang memadai pula. Tidak ada lembaga keuangan seperti Bank dan koperasi cukup untuk menampung kegiatan ekonomi masyarakat kecamatan ini. Sementara pasar sebagai tempat interaksi langsung antara konsumen dan produsen, di kecamatan ini relatif lengkap, mulai dari pasar selapan, pasar permanen sampai pasar yang tidak mempunyai bangunan permanen ada di kecamatan ini, disamping juga jumlah toko, kios, dan warung-warung yang cukup banyak.

Sedangkan sarana peribadatan karena mayoritas penduduk Kecamatan Mandalawangi adalah beragama Islam maka sarana peribadatan yang paling banyak adalah mesjid, surau dan mushola.

Adapun sarana kesehatan tampaknya masih kurang memadai karena tidak ada rumah sakit umum atau balai pengobatan, begitu pula dengan sarana penunjang medis lainnya seperti apotik, puskesmas, tenaga dokter masih kurang sedangkan dukun tradisional cukup banyak.

5. Sikap Kekeluargaan Dan Kesetiakawanan Masyarakat

Sikap kekeluargaan dan kesetiakawanan masyarakat di Kecamatan Mandalawangi dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Di tempat-tempat yang masih jauh dari kota kecamatan, nampaknya sikap kekeluargaan dan kegotongroyongan masyarakat masih kuat, baik dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk kepentingan sosial, keagamaan, maupun kegiatan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan di kotanya, nampaknya dalam aktivitas yang bersifat individu, sikap kegotongroyongan dan kekeluargaan ini agak berkurang. Namun, dalam hal-hal yang bersifat sosial dan keagamaan masih tetap melekat pada masyarakat.

6. Pemerintahan Dan Sarana Pemerintahan di Kecamatan

Sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan, di Kecamatan Mandalawangi terdapat beberapa instansi, baik vertikal, otonom, maupun BUMN/BUMD. Ada 6 (enam) instansi vertikal yang ada di kecamatan ini, yaitu Depdikbud, Departemen Agama, Departemen Penerangan (JUPEN), Sosial, PLKB, dan PPH.

Instansi otonom yang ada di kecamatan Mandalawangi sebanyak 7 instansi yang ada, yaitu Dinas P&K, KCD Pertanian, KCD Peternakan, KCD Perikanan, PUSKESMAS, PU, DLLAJ, Dinas Pasar. Sementara instansi BUMN/BUMD yang ada di kecamatan ini berjumlah 13 BUMN/BUMD, yaitu antara lain BRI, Pegadaian, PT. TELKOM, PLN, Pos dan Giro, Bank Pasar, BKPD, dan PDAM.

Sarana dan prasarana pemerintahan terlihat cukup memadai. Semua desa yang ada di kecamatan ini telah memiliki kantor desa dan balai desa.

7. Dinamika Pembangunan Dan Faktor Pendukung Lainnya

Dengan modal kondisi wilayah seperti dipaparkan di muka, di Kecamatan Mandalawangi setelah beberapa kurun waktu melaksanakan pembangunan, sesuai dengan rencana pembangunan nasional, nampak terdapat perkembangan yang menggembirakan, meskipun di sisi lain terdapat aspek-aspek yang belum tersentuh secara memuaskan.

Pembangunan di Kecamatan Mandalawangi tampaknya masih ditekankan pada upaya peningkatan produktivitas pertanian. Misalnya, pada tahun 1995 pembangunan dilakukan di sektor pertanian dan pengairan, agama, dan sektor kesejahteraan sosial, peranan wanita, kependudukan dan Keluarga Berencana, dengan keseluruhan jumlah proyek sebanyak 9 proyek dengan biaya total sebesar Rp 385.500.000,- yang berasal dari biaya pusat Rp 315.500.000,-; dan swadaya penduduk sebanyak Rp 70.000.000,-.

Dinamika masyarakat juga dipacu oleh program-program pemerintah yang bersasaran untuk meningkatkan prestasi daerah dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan lomba desa dan kegiatan PKK misalnya, dirasakan dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan desa-desa di Kecamatan Mandalawangi.

C. KECAMATAN CIBADAK DAN RANGKASBITUNG (KABUPATEN LEBAK)

Secara administratif, pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak meliputi 6 Wilayah Pembantu Bupati, 19 Kecamatan, 14 Wilayah Pembantu Kecamatan dan 300 desa/kelurahan. Adapun Kecamatan yang menjadi objek penelitian di Kabupaten Lebak ini adalah Kabupaten Cibadak dan Kabupaten Rangkasbitung.

Kecamatan Cibadak yang memiliki luas 8734,132 Ha terletak pada ketinggian 750 m di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata $30^{\circ} - 23^{\circ} C$ dan curah hujan 2000 Mm/tahun. Kecamatan ini terdiri dari 11 buah desa, 41 lingkungan/dusun, 41 RW dan 163 RT.

Kecamatan Rangkasbitung memiliki luas daerah sebesar 8.592,613 km, dengan jumlah penduduk 99.616 orang. Kecamatan ini terletak pada ketinggian 235 m di atas permukaan laut, memiliki suhu rata-rata $30^{\circ} - 23^{\circ} C$, dan curah hujan 2120 Mm/tahun. Kecamatan Rangkasbitung terdiri dari 17 desa, 5 kelurahan, 39 lingkungan/dusun, serta 118 RW dan 444 RT.

1. Aktivitas Perekonomian Dan Mata Pencaharian Penduduk

Sekalipun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, tetapi dilihat dari pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak masih relatif kecil. Struktur dan mata pencaharian penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak pada umumnya adalah petani yaitu sebesar 75 % (petani tradisional serta buruh tani), sedangkan sisanya terdiri dari para pedagang 5,5 %, dari sektor industri 5,2 %, jasa 8,8 %, dan lain-lain 4,7 %.

Perekonomian dan mata pencaharian penduduk di Kecamatan Cibadak cukup beragam, dan sebagian besar merupakan petani pemilik tanah yaitu sebesar 5640 orang, buruh tani 2378 orang. Adapun penduduk yang mata pencahariannya sebagai pedagang dan buruh industri, masing-masing sebesar 253 orang dan 241 orang.

Di Kecamatan Rangkasbitung, ragam perekonomian dan mata pencaharian penduduknya tidak berbeda jauh dengan keadaan perekonomian di Kecamatan di Cibadak. Penduduk yang mendapatkan penghasilan dari hasil bertani berjumlah 11.195 orang, terdiri dari 6340 orang petani pemilik tanah, 3725 orang petani penggarap, dan 1130 buruh tani. Tetapi bila dilihat dari penduduk yang bermata pencaharian sebagai buruh industri jauh lebih banyak yaitu tercatat sejumlah 1315 orang. Dan

sebagian kecil dari penduduk di Kecamatan ini ada pula yang bermata pencaharian sebagai nelayan.

2. Kependudukan, Ketenagakerjaan, Pendidikan Dan Kualitas SDM

Jumlah penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak tercatat 925.314 jiwa dengan laju pertumbuhan relatif tinggi yaitu 2,19 %, dimana angka ini berada di atas angka rata-rata pertumbuhan Nasional 1,98 %, tetapi masih di bawah angka rata-rata di Jawa Barat 2,57 %. Penyebaran penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak tidak merata, tetapi terkonsentrasi di Lebak Utara. Secara keseluruhan, kepadatan penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak baru mencapai 324 jiwa per km².

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, masih banyak usia kerja yang menganggur, demikian pula tenaga kerja yang belum produktif karena ketrampilan yang mereka miliki masih rendah kualitasnya. Selain itu, masih ada masyarakat yang bekerja di luar daerah, khususnya pada musim pakeklik sehingga peluang untuk menciptakan lapangan kerja di daerah sendiri sulit dilakukan.

Dilihat dari jumlah lulusan yang melanjutkan sekolah pada tingkat yang lebih atas sampai pada Pelita VI tercatat untuk lulusan SD/MI yang melanjutkan 68,57% angka ini diharapkan dapat bertambah melalui kejar paket B yang sedang berjalan. Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Dati II Lebak dapat dikemukakan sbb: belum sekolah 20,9 %, lulusan SD 27,4 %, lulusan SLTP 6,5 %, lulusan SLTA 4,6 %, lulusan Perguruan Tinggi 0,2 %.

Hal mengenai kependudukan di Kecamatan Cibadak, yaitu jumlah penduduknya tercatat sebesar 33.202 orang, dimana jumlah Kepala Keluarganya sebanyak 7017 KK. Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dapat dikatakan sama yaitu masing-masing berjumlah 16.354 orang dan 16.848 orang.

Di Kecamatan Rangkasbitung, jumlah Kepala keluarganya hampir tiga kali lebih besar dari jumlah KK di Kecamatan Rangkasbitung yaitu terdiri dari 19.918 KK. Jumlah penduduk laki-laki agak lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, masing-masing tercatat sebanyak 50.386 orang dan 49.230 orang.

3. Kondisi sarana dan prasarana

Sarana perhubungan yang menunjang transportasi di Kecamatan Cibadak, diantaranya adalah tersedianya jalan propinsi sepanjang 7 km, jalan klas II sepanjang 11 km, dan jalan desa 18 km. Sedangkan di Kecamatan Rangkasbitung, sarana perhubungan yang ada yaitu jalan negara sepanjang 13 km, jalan propinsi 15 km, jalan klas II 38 km, dan jalan desa 207 km.

Sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Cibadak, meliputi:

- * Taman Kanak-kanak sebanyak 1 buah
- * Sekolah Dasar 21 buah, dengan jumlah lulusan 6440 orang,
- * Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 1 buah, dengan jumlah lulusan 5913 orang
- * SLTA belum ada.

Sementara di Kecamatan Rangkasbitung, jumlah sarana pendidikan yang ada, yaitu:

- * Taman Kanak-kanak sebanyak 12 buah
- * Sekolah Dasar 89 buah, dengan jumlah lulusan 15.232 orang,
- * Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 13 buah, dengan jumlah lulusan 6.211 orang,
- * MI sebanyak 1 buah
- * SLTA sebanyak 16 buah dengan jumlah lulusan 5.233 orang.

Salah satu sarana perekonomian yang ada yaitu Koperasi. Adapun jumlah anggota Koperasi Unit Desa/Non Koperasi Unit Desa belum begitu banyak, yaitu sekitar 137.600 orang. Peranan Koperasi yang

merupakan sokoguru ekonomi di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak belum banyak berkembang. Pada tahun 1994 tercatat baru 35 KUD Mandiri sedangkan Non KUD 196 buah.

Sarana perekonomian di Kecamatan Cibadak didukung oleh adanya Bank sebanyak 1 buah, Koperasi 1 buah, dan pasar 1 buah. Sedangkan di Kecamatan Rangkasbitung jumlah sarana perekonomiannya lebih banyak, yaitu ada 4 buah Bank dan 4 buah Koperasi, serta 3 buah pasar.

4. Sikap Kekeluargaan Dan Kesetiakawanan Masyarakat

Sikap kekeluargaan tercermin antara lain dari pelaksanaan gotong royong dalam melaksanakan pembangunan fisik dan non fisik baik di tingkat desa maupun kecamatan. Kegiatan gotong royong tersebut yang telah mampu mengajak peran serta masyarakat meliputi pembangunan dalam hal:

- * pembuatan badan jalan sepanjang 12,5 km
- * pembuatan jembatan 1 unit
- * pembuatan bendungan irigasi 1 unit
- * pembangunan sarana kesehatan dan pendidikan

Sedangkan dilihat dari sudut agama, kerukunan umat beragama, antar agama dan pemeluk agama pada prinsipnya telah dapat dicapai.

D. KECAMATAN BOGOR BARAT DAN BOGOR TIMUR (KODYA BOGOR)

Kecamatan yang dijadikan objek penelitian di Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor yaitu kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Barat. Wilayah Kec. Bogor Timur yang mempunyai luas 454,4 Ha, terdiri dari 4 kelurahan, 38 RW, dan 197 RT. dengan jumlah penduduk sebesar 60.792 jiwa.

Letak geografis Kecamatan Bogor Timur, di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Babakan dan Kelurahan Tegal Gundil Kec. Bogor Utara. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Katu Lampak Kec. Kedung Halang Kod. DT II Bogor. Sebelah Barat berbatasan dengan Kel. Bondongan Kec. Kota Bogor Selatan dan Kelurahan Guang Kec. Kota Bogor Tengah. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tajur Kec. Ciawi Kab. DT II Bogor dan Kel. Lawang Ginting Kec. Kota Bogor Selatan.

Kecamatan Bogor Barat yang berpenduduk sebanyak 41.453 jiwa, memiliki luas wilayah sebesar 356 Ha, terdiri dari 4 kelurahan, 47 RW dan 178 RT. Kec. Bogor Barat terletak pada ketinggian 1068 m dari permukaan laut. Adapun keadaan curah hujan rata-rata dan kisaran suhu rata-rata di Kec. Bogor Barat, tidak berbeda dengan keadaan di Kec. Bogor Timur.

1. Aktivitas Perekonomian Dan Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk di Kotamadya DT II Bogor cukup beragam, yaitu mulai dari yang bekerja sebagai buruh tani, berdagang, tukang, pegawai negeri/swasta, dan lain-lain. Dari berbagai macam mata pencaharian tersebut, yang paling banyak adalah penduduk yang penghasilannya berasal dari hasil berdagang, yaitu sebanyak 35.064 orang. Urutan kedua adalah penduduk yang statusnya pegawai swasta, yaitu sejumlah 26.925 orang. Jumlah Pegawai Negeri kurang lebih hanya separuh dari jumlah pegawai swasta, yaitu sebanyak 13.514 orang. Dan yang terkecil adalah jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian sebagai buruh tani, yaitu 384 orang.

Seperti halnya di Kotamadya DT II Bogor, di Kecamatan Bogor Timur, penduduknya pun paling banyak bermata pencaharian sebagai pedagang, yaitu sebanyak 22.699 orang. Bila dibandingkan dengan penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri (2.520 orang), yang bekerja sebagai pegawai swasta jumlahnya lebih banyak yaitu 10.460 orang. Yang jumlahnya paling sedikit bila dibandingkan dengan keseluruhan

penduduk adalah penduduk yang yang bekerja sebagai buruh tani, yaitu sebesar 218 orang dan sebagai tukang ssebanyak 814 orang.

Di Kecamatan Bogor Barat, penduduk yang bekerja sebagai pedagang masih tetap mendominasi jenis pekerjaan lainnya, yaitu sebanyak 3.125 orang. Di Kecamatan ini, jumlah Pegawai Negeri menempati urutan kedua, yaitu sebanyak 1.120 orang. Yang paling sedikit adalah penduduk yang bekerja sebanyak tukang sejumlah 70 orang.

Berikut ini secara lengkap gambaran mata pencaharian penduduk di Kodya Bogor, Kecamatan Bogor Barat, dan Kecamatan Bogor Timur.

Tabel III.9.
Struktur Matapencaharian Penduduk
Kodya Bogor, Kec. Bogor Barat, Dan Kec. Bogor Timur
Tahun 1995 (Dlm Jiwa)

Matapencaharian	KODYA BOGOR	BOGOR BARAT	BOGOR TIMUR
Buruh Tani	384	218	105
Jasa	11.536	8.755	204
Perdagangan	35.064	22.699	3.125
Swasta	29.925	10.460	298
Peg. Negeri	13.514	2.520	1.120
Tukang	4.584	814	70
Pensiunan	6.176	1.057	70

Sumber: Monografi Kecamatan

2. Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk di Kotamadya DT II Bogor terdiri dari 266.994 jiwa, dengan perbandingan jumlah antara jenis kelamin pria dan wanita tidak terlalu jauh, yaitu terdiri dari 133.418 jiwa laki-laki, dan 133.576 jiwa perempuan. Adapun kepadatan penduduk rata-ratanya adalah 124 jiwa/Ha.

Kecamatan Bogor Timur memiliki jumlah penduduk sebesar 60.792 jiwa. Jumlah ini terdiri dari 30.274 jiwa berjenis kelamin pria, dan 30.518 jiwa berjenis kelamin wanita. Kepadatan penduduk di Kec. Bogor Timur 135 jiwa/Ha.

Sedangkan jumlah penduduk di Kec. Bogor Barat, lebih sedikit bila dibandingkan dengan Kec. Bogor Timur, yaitu 41.453 jiwa. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin pria sebanyak 20.589 jiwa, dan yang berjenis kelamin wanita sebanyak 20.664 jiwa. Adapun kepadatan penduduk di Kec. Bogor Barat adalah 117 jiwa/Ha.

Dilihat dari segi ketenagakerjaan, maka penduduk usia kerja dan angkatan kerja serta tingkat partisipasi angkatan kerja selama ini memperlihatkan kecenderungan peningkatan. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang semakin tinggi memberikan indikasi adanya perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja di Kotamadya Bogor.

3. Kondisi Sarana Dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana secara umum di Kotamadya Bogor antara lain berupa sarana perhubungan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan sarana prasarana bidang lainnya. Secara umum kondisi sarana dan prasarana di Kodya Bogor relatif baik. Sedangkan di dua kecamatan yang menjadi lokasi penelitian dapat diterangkan sebagai berikut:

a. Sarana dan prasarana Perhubungan

Jalan yang merupakan sarana penghubung di Kecamatan Bogor Timur terdiri dari jalan aspal sejauh 57 km, jalan tanah 2 km, dan jalan lingkungan 61 km. Sedangkan jalan-jalan tersebut dihubungkan oleh jembatan beton 11 buah, jembatan besi 1 buah, dan jembatan bambu 1 buah. Adapun di Kecamatan Bogor Barat sarana jalan yang ada hanya jalan aspal sejauh 13 km, yang dilengkapi oleh 3 buah jembatan besi dan 3 buah jembatan beton.

b. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Di Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Barat tidak jauh berbeda dengan keadaan di Kodya Bogor, yaitu bahwa jumlah sarana pendidikan yang terbanyak adalah SD, dengan masing-masing jumlah sebanyak 29 dan 28 sekolah dengan jumlah siswa 6.164 dan 6.023 murid. Jumlah TK, SLTP dan SLTA yang ada di Kecamatan Bogor Barat lebih banyak bila dibandingkan dengan Kecamatan Bogor Timur, yaitu 14 TK dengan jumlah siswa 896, 13 SLTP dengan 8194 siswa, 9 SLTA dengan 4309 siswa di Kecamatan Bogor Barat, sedangkan di Kec. Bogor Timur hanya ada 7 TK dengan 401 siswa, 2 SLTP dengan 1493, dan 3 SLTA dengan 3235 siswa.

c. Sarana Kesehatan

Keberhasilan derajat kesehatan penduduk secara umum adalah pengaruh dari faktor-faktor antara lain perubahan perilaku penduduk, perubahan lingkungan dan upaya kesehatan di samping faktor keturunan. Dilihat dari indikator derajat ini maka meningkatnya indeks mutu hidup penduduk menurunnya angka kematian bayi dan angka status gizi serta meningkatnya angka melek huruf dan angka harapan hidup.

Di Kecamatan Bogor Timur terdapat 2 buah Rumah Sakit, 5 buah Puskesmas, dan 72 buah Pos Yandu. Sedangkan sarana di Kecamatan Bogor Barat terdapat 2 buah Rumah Sakit, 4 Puskesmas, dan 52 buah Pos Yandu.

Pelaksanaan gerakan KB dalam PJP I semakin meluas tidak terbatas pada pemakaian kontrasepsi saja, tetapi lebih dari itu berorientasi pada keluarga sejahtera melalui pasangan usia subur, pengaturan kelahiran, pembinaan kesehatan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

4. Sikap Kekeluargaan Dan Kesetiakawanan Masyarakat

Sikap kekeluargaan masyarakat di dua kecamatan lokasi penelitian ini dapat terlihat dari adanya organisasi yang secara aktif bersama-sama dalam menunjang berbagai kegiatan yang menyangkut pembangunan fisik maupun non fisik. Beberapa lembaga yang mencerminkan adanya kegotongroyongan diantaranya adalah kegiatan Tim Pembina LKMD Kecamatan yang aktif membina warga di kelurahan, tim penggerak PKK yang telah mampu untuk melaksanakan pembinaan sekaligus mengisi program kerja PKK Kecamatan dan Kelurahan. Selain itu organisasi kemasyarakatan juga banyak membantu pelaksanaan program di wilayah baik Tingkat Kecamatan, Kelurahan, RW, maupun RT.

5. Dinamika Pembangunan

Dengan pesatnya pertumbuhan perkotaan yang menyangkut penyediaan sarana sosial ekonomi, perhubungan, maupun penyediaan sarana pemukiman, diperlukan perencanaan yang terpadu. Sebagai ilustrasi, realisasi kegiatan pelaksanaan pembangunan yang telah selesai dikerjakan di wilayah Kecamatan Bogor Timur yang bersumber dari dana APBN, APBD I dan APBD II serta swadaya murni masyarakat tahun 1995/1996 adalah sebagai berikut:

- a. APBN/Banpres 3 proyek, senilai Rp 281.000.000,-
- b. Inpres 22 proyek, senilai Rp. 191.274.222,-
- c. APBD I 2 proyek, senilai Rp. 5.000.000
- d. APBD II tidak ada
- e. Swadaya Murni Masyarakat 70 proyek fisik
- f. Swadaya Murni Masyarakat 70 proyek non fisik

E. KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN DATI II PURWAKARTA

Keadaan Wilayah Kecamatan Purwakarta sebagian besar merupakan daerah pedataran dan sebagian kecil merupakan daerah berbukit dengan ketinggian rata-rata 83,69 m DPL, wilayah ini berada pada jalur strategis yang menghubungkan Ibu Kota Propinsi Jawa Barat dengan Ibu Kota Negara. Wilayah Kecamatan Purwakarta mempunyai luas 8.045 ha, terdiri dari tanah darat 6.302 km dan tanah sawah 1.743 km. Kecamatan Purwakarta beriklim tropis dengan suhu udara sedang, dan mempunyai curah hujan rata-rata antara 2000 - 2400 Mm/tahun. Dilihat dari wilayah administrasi pemerintahannya, Kecamatan Purwakarta terdiri dari 4 perwakilan kecamatan, 9 kelurahan, 14 desa, 38 dusun, 26 lingkungan, 160 RW dan 649 RT.

1. Aktivitas Perekonomian dan Matapencaharian Penduduk

Wilayah Kecamatan Purwakarta yang merupakan wilayah Perkotaan, mempunyai struktur mata pencahariannya yang cukup beragam. Kebanyakan penduduk di Kecamatan Purwakarta bermata pencaharian sebagai petani pemilik tanah, sebagai buruh pabrik, sebagai pegawai negeri/swasta, dan sebagian kecil penduduknya adalah sebagai pengusaha. Secara lengkap struktur mata pencaharian penduduk di Kecamatan Purwakarta terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel III.10.
Struktur Matapencaharian Penduduk

No.	Matapencaharian	Jumlah
1.	Petani/Penggarap	5.498 orang
2.	Petani Pemilik Tanah	9.972 orang
3.	Petani Penggarap	7.108 orang
4.	Buruh Tani	1.220 orang
5.	Perikanan	237 orang
6.	Peternakan	1.697 orang
7.	Perdagangan dan Jasa	4.040 orang
8.	Pegawai Negeri/ABRI	7.332 orang
9.	Industri Kecil	4.489 orang
10.	Buruh Swasta/Pabrik	8.081 orang
11.	Pensiunan PNS	2.930 orang
12.	Pengusaha	158 orang

Sumber: Monografi Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta

Dilihat dari tabel di atas, ternyata hampir sebagian besar penduduknya masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

2. Kependudukan

Penduduk Kecamatan Purwakarta cukup heterogen, terdiri dari warga negara Indonesia (penduduk asli dengan berbagai suku bangsa Indonesia lainnya, keturunan asing, ditambah dengan warga negara asing yang berdomisili di Wilayah Kecamatan Purwakarta).

Jumlah Penduduk : 128.018 orang

Laki-laki : 62.888 orang

Perempuan : 65.125 orang

Jumlah Kepala Keluarga : 31.940 orang

Ditinjau dari kepadatan penduduk, Kecamatan Purwakarta termasuk yang padat penduduknya yaitu 1.567 jiwa/km². Keadaan Penduduk dari segi usia dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel III.11.
Struktur Penduduk Berdasarkan Usia

No.	U m u r	J u m l a h	Keterangan
1.	0 - 5 tahun	17.470	
2.	6 - 16 tahun	29.136	
3.	17 - 25 tahun	24.366	
4.	26 - 55 tahun	43.709	
5.	56 tahun ke atas	11.395	
	Jumlah	128.013	

Sumber: Monografi Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta

Usia Produktif merupakan potensi sumber daya manusia yaitu penduduk yang berumur 13 - 55 dimana jumlahnya adalah 73.887 orang atau 58,61% dari jumlah penduduk Kecamatan Purwakarta dari jumlah usia produktif tersebut mempunyai mata pencaharian yang bervariasi yaitu:

- Jasa dan perdagangan : 34.978 (47,34%)
- Pertanian : 31.638 orang
- Pengusaha/industri : 7.271 (91,84%)

3. Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia guna terselenggaranya kelancaran pembangunan di Kecamatan.

Sarana pendidikan di Kecamatan Purwakarta boleh dikatakan cukup memadai yaitu terdiri dari:

- TK : 8 buah
- TPA : 6 buah
- Sekolah Dasar : 114 buah
- MI : 34 buah
- SMTP : 16 buah
- SMTA : 19 buah
- Kelompok Belajar Paket B : 3 kelompok

Lulusan SD yang melanjutkan ke SMTP dan Pesantren boleh dikatakan cukup tinggi hal ini bisa kita lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.12.
Indikator Kualitas
Pendidikan dan Sumber Daya Manusia

No.	Tahun	Jumlah	Melanjutkan ke		Jumlah	%
			SMTP	Pesantren		
1.	1993/1994	3.602	3.296	153	3.449	95,75
2.	1994/1995	3.664	3.269	395	3.664	100

Sumber: Monografi Kecamatan Purwakarta

Dilihat dari latar belakang pendidikan penduduk Kecamatan Purwakarta boleh dikatakan cukup maju, hal ini tercermin dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.13.
Latar Belakang Pendidikan Penduduk

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	16.758
2.	TK Tamat Sekolah Dasar	12.089
3.	Tamat Sekolah Dasar	45.430
4.	Tamat Sekolah Menengah Tk. Pertama	37.459
5.	Tamat Sekolah Menengah Tk. Atas	15.719
6.	Akademi	781
7.	PT	840

Sumber: Monografi Kecamatan Purwakarta

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Purwakarta karena Kecamatan Purwakarta merupakan Kecamatan yang di Kota Kabupaten, maka boleh dikatakan cukup memadai yang bisa kita lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.14
Indikator Kondisi Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan prasarana	JUMLAH
1.	Perhubungan - Jalan Negara - Jalan Propinsi - Jalan Kabupaten - Jalan Desa - Jalan Dusun	10,20 km dengan kondisi baik 41,00 km dengan kondisi baik 32,75 km dengan kondisi baik 20 km dengan kondisi baik 18,41 km dengan kondisi baik
2.	Komunikasi - Televisi - Radio - Telephone - Telephone Umum - Wartel	Memadai Memadai 2315 satuan sambungan 32 buah 2 buah
3.	Listrik	23,147 rumah teraliri listrik (77,62 %)
4.	Ekonomi - Bank - Asuransi - PDAM - Telkom - Pos dan Giro - Stasiun km ² - Sub terminal - Stasiun Kereta - Koperasi - Toko - Pasar Kecamatan	12 buah 7 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 2 buah 1 buah 63 buah 265 buah 4 buah
5.	Pemukiman Penduduk - Permanen - Semi Permanen - Ponggung	17.721 buah 8.135 buah 3.965 buah

Sumber: Monografi Kecamatan Purwakarta

Sarana perhubungan yang ada di Wilayah Kecamatan Purwakarta yang meliputi jalan negara, jalan kabupaten dan jalan desa cukup menunjang lancarnya aktivitas ekonomi dan pembangunan walaupun belum maksimal.

Sarana dan peranan komunikasipun di Kecamatan Purwakarta cukup memadai, hampir seluruh wilayah kecamatan telah dimulai oleh jalannya

telepon, televisi dan radio, juga seluruh wilayah telah dimasuki oleh jaringan listrik. Hal ini jalur akan sangat mempengaruhi aktivitas kehidupan penduduk diseluruh wilayah kecamatan.

Sarana dan prasarana yang mendukung langsung pada kegiatan ekonomipun cukup memadai yaitu adanya beberapa bank, pertokoan dan pasar serta didukung juga oleh sarana transportasi yang memadai.

5. Sikap Kekeluargaan Dan Kesetiakawanan

Masyarakat Kecamatan Purwakarta sudah terkena oleh imbas masyarakat perkotaan, dimana orang-orang lebih mementingkan kepentingan individunya masing-masing tetapi walaupun demikian bukan berarti masyarakat Kecamatan Purwakarta individualistis karena kalau dilihat dari kegiatan sosial dan keagamaan boleh dikatakan cukup kuat melekat jadi warga masyarakat.

6. Pemerintahan

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan telah diadakan forum komunikasi antara lain:

- a) Koordinasi antara unsur MUSPIKA (Camat, Kapolsek, Danramil minimal 3 bulan sekali).
- b) Koordinasi dengan unit vertikal dan otonomi 1 bulan sekali.
- c) Koordinasi antara desa/kelurahan 1 minggu sekali tiap hari Rabu.

Sampai saat ini instansi vertikal tingkat Kecamatan yang ada sebanyak 11 instansi, otonomi 13 instansi dan lembaga sebanyak 10.

7. Dinamika Pembangunan Dan Faktor Pendukung Lainnya

Dengan modal kondisi wilayah seperti telah dipaparkan dimuka, terdapat perkembangan yang menggembirakan, hal ini mengundang para

pengusaha industri besar untuk menanamkan investasinya di Kecamatan Purwakarta. Pada saat ini terdapat 9 industri besar yang menanamkan investasinya di Kecamatan Purwakarta, hal ini menguntungkan bagi Kecamatan Purwakarta, karena selain penyerapan tenaga kerja juga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

F. KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN DATI II SUKABUMI

Kecamatan Sukabumi, merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sukabumi di antara 31 (tiga puluh satu) kecamatan lainnya.

Luas wilayahnya sekitar 3869,841 Ha. Dilihat dari letak geografis, kecamatan ini berada di ibukota kabupaten. Letak geografis tersebut, didukung oleh prasarana transportasi (kendaraan) yang mencukupi. Tingginya frekuensi kendaraan umum angkutan penumpang juga menghubungkan jalur kota kecamatan ini dengan kota kabupaten lain, seperti Kotamadya Bogor, Kabupaten Cianjur. Dilihat dari sisi ini, logislah kiranya apabila dikatakan bahwa mobilitas dan aktivitas ekonomi relatif tinggi apabila dibandingkan dengan kecamatan lain yang letaknya di luar ibukota kabupaten.

Pada pertengahan tahun 1995, jumlah desa di kecamatan ini sebanyak 11 desa (tidak ada yang tergolong kelurahan). Kesebelas desa tersebut tergolong ke dalam kategori Desa Swasembada. Berdasarkan kategori tersebut, kondisi secara keseluruhan mengenai sarana dan prasarana desa, nampaknya hampir sama. Tentu saja desa-desa yang terletak dekat dengan kota kecamatan mempunyai sarana dan prasarana relatif baik.

Dilihat dari kondisi daerah, Kecamatan Sukabumi merupakan daerah pegunungan, dengan ketinggian daerah 700 meter di atas permukaan laut. Sedangkan tingkat curah hujan rata-rata setiap tahun relatif tinggi, yaitu 2.000 mm per tahun.

1. Aktivitas Perekonomian Dan Mata-pencaharian Penduduk

Masyarakat Kecamatan Sukabumi mempunyai kegiatan ekonomi bervariasi. Ada yang bermatapencaharian tani, usaha kerajinan, berdagang, jasa transportasi, buruh tani, dan bekerja pada sektor jasa lainnya. Secara ringkas struktur mata pencaharian penduduk Kecamatan Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.15.
Struktur Mata Pencaharian Penduduk
Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi

Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
Petani	16.626 (54,87 %)
Industri Rumah Tangga/Kerajinan	667 (2,2 %)
Pedagang	3.206 (10,6 %)
Jasa Angkutan	1.674 (5,52 %)
Buruh	6.487 (21,41 %)
Pengusaha	87 (0,29 %)
Pegawai Negeri	940 (3,1 %)
A B R I	172 (0,57 %)
Peternak	443 (1,46 %)

Sumber: Monografi Kecamatan Sukabumi

Dari tabel III.15 di atas, terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Sukabumi bekerja sebagai petani (54,87%). Petani pemilik lahan sebesar 35,26%, petani penggarap sebesar 46,97%, dan buruh tani sebesar 17,76%. Sedangkan proporsi paling sedikit dari penduduk kecamatan tersebut adalah yang bermatapencaharian sebagai pengusaha (0,29%).

Pertanian yang ada di kecamatan ini bervariasi, dari mulai tanaman bahan makanan pokok sampai dengan tanaman-tanaman keras seperti cengkeh, kopi, teh, dll. Meskipun masyarakat petani merupakan yang terbanyak, namun tidak sedikit dari mereka yang hanya bersifat subsistem. Mereka bertani dengan lahan yang terbatas, dan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, belum untuk tujuan pasar.

2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Kondisi kependudukan wilayah kecamatan banyak menggambarkan aspek lain yang merupakan indikator atau berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut.

Misalnya, wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk relatif tinggi dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi pula, akan berbeda dampaknya terhadap pembangunan, dibandingkan dengan wilayah yang relatif jarang penduduknya dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah. Demikian juga kondisi kependudukan wilayah dapat mempengaruhi aspek ketenagakerjaannya. Dilihat dari sisi ini, Kecamatan Sukabumi indikator kependudukan dan ketenagakerjaan seperti tergambar pada Tabel 3.16 sebagai berikut:

Tabel III.16.
Indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi

INDIKATOR KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	TAHUN 1995
1. Jumlah Penduduk	90.898
2. Kepadatan Penduduk	± 901
3. Jml. Rumah Tangga (RT)	21.725
4. Pddk Per Rumah Tangga	4,18
5. Penduduk Usia Dewasa	72.979
6. Penduduk Anak-anak	17.919

Sumber: Monografi Kecamatan Sukabumi.

Kecamatan Sukabumi, dapat dikategorikan wilayah yang mempunyai jumlah dan kepadatan penduduk tinggi dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Sukabumi. Pada Tahun 1995, jumlah penduduk Kecamatan Sukabumi sebanyak 90.898 orang dengan kepadatan penduduk sebesar 901 orang per kilometer persegi.

Indikator kependudukan lainnya dapat dilihat dari jumlah Rumah Tangga dan banyaknya rata-rata anggota keluarga (penduduk per Rumah

Tangga). Pada Tahun 1995 jumlah Rumah Tangga di Kecamatan Sodonghilir sebanyak 21.725 dengan rata-rata penduduk per Rumah Tangga sebanyak 4,18 orang. Ini berarti rata-rata tanggungan kepala keluarga di kecamatan ini sebanyak 4,18 orang.

Struktur usia penduduk biasanya mencerminkan kondisi ketenagakerjaan. Dilihat dari sisi ini, sebagian besar penduduk di Kecamatan Sukabumi tergolong usia dewasa. Dari sejumlah 90.898 penduduk Kecamatan Sukabumi pada Tahun 1995, sebanyak 72.979 orang (80,29%) termasuk usia dewasa, sedangkan sisanya anak-anak. Dengan kategorisasi anak-anak dimaksud adalah bukan usia kerja, maka dapat dikatakan usia kerja penduduk di kecamatan Sukabumi lebih tinggi dibandingkan penduduk di bawah usia kerja.

3. Pendidikan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Faktor lain yang besar pengaruhnya terhadap terselenggaranya pembangunan di kecamatan, selain sumber daya alam dan sumber dana adalah Sumber Daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu kualitas Sumber Daya Manusia ini, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Dilihat dari dimensi ini, Kecamatan Sukabumi memiliki beberapa indikator pendidikan sebagai penentu kualitas SDM sebagaimana terlihat pada Tabel 3.17 berikut ini:

Tabel III.17.
Indikator Pendidikan Dan Kalitas SDM
Di Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi

INDIKATOR PENDIDIKAN DAN KUALITAS SDM	TAHUN 1995
1. Jumlah SD	46
2. Jumlah SMP/Tsanawiyah	3
3. Jumlah SLTA	2
4. Jumlah Pesantren	12
5. Jumlah PT	-
6. Jumlah Lulusan PT	141

Sumber : Monografi Kecamatan Sukabumi.

Seperti terlihat pada Tabel III.17, sarana pendidikan di Kecamatan Sukabumi, relatif memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada dan jumlah penduduknya. Apabila dirata-ratakan, jumlah Sekolah Dasar per desa misalnya, di setiap desa rata-rata mempunyai 4,18 buah SD. Namun, jika dilihat dari jumlah SLTP dan SLTA, nampaknya dapat memberikan gambaran bahwa minat masyarakat untuk melanjutkan anaknya ke tingkatan sekolah yang lebih tinggi masih kurang. Satu hal yang merupakan modal bagi pengembangan kualitas SDM di Kecamatan Sukabumi adalah antusiasnya masyarakat terhadap pendidikan pesantren. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pesantren yang ada.

Kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan, antara lain dapat dilihat dari banyaknya sarjana yang ada di kecamatan ini. Hingga tahun 1995, jumlah kumulatif lulusan Perguruan Tinggi yang ada di kecamatan ini hanya sebanyak 141 orang (0,46% dari seluruh penduduk kecamatan). Ini menunjukkan bahwa rata-rata kualitas SDM di kecamatan ini masih relatif rendah. Belum lagi, bahwa mereka yang berpredikat sarjana itu, masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan.

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di kecamatan merupakan faktor dominan yang memengaruhi aktivitas kehidupan di kecamatan, baik aktivitas ekonomi, pemerintahan, pembangunan, dll. Sehingga lancar tidaknya pembangunan yang dilaksanakan di kecamatan sangat ditentukan oleh keberadaan dan kondisi sarana dan prasarana ini. Dilihat dari aspek ini, Kecamatan ini memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

No	Indikator	Nilai
1
2
3
4
5

Tabel III.18.
Indikator Kondisi Sarana dan Prasarana
Di Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi

INDIKATOR SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1. Transportasi	
- Jalan Propinsi	5 km
- Jalan Kabupaten	47 km
- Jalan Desa	23 km
- Kendaraan Umum	Sangat Memadai
2. Komunikasi	
- Televisi	Di Semua Desa Ada
- Radio	Di Semua Desa Ada
- Telephone	Di Semua Desa Ada
- Ratel	Hanya Kecamatan
3. Penerangan	
- Listrik	Di Semua Desa Ada
4. Ekonomi	
- Bank	3 buah
- Koperasi	3 buah
- Pasar	1 buah
- Warung/Kios	136 buah
5. Pemukiman Penduduk	
- Permanen	5.281 buah
- Semi permanen dan semi permanen	11.096 buah

Sumber : Monografi Kecamatan Sukabumi.

Jalan merupakan urat nadi aktivitas kehidupan di kecamatan dan desa. Prasarana jalan yang memadai akan mendukung lancarnya aktivitas ekonomi dan pembangunan di wilayah tersebut. Dilihat dari aspek ini, Kecamatan Sukabumi dapat dikategorikan sebagai wilayah yang mempunyai prasarana jalan sangat memadai. Di wilayah kecamatan, hanya ada 5 km jalan Propinsi, 47 km jalan Kabupaten, dan 23 km jalan desa. Kondisi jalan yang memadai ini, disertai pula oleh banyaknya sarana transportasi berupa kendaraan umum penumpang yang menghubungkan suatu tempat dengan tempat lain, termasuk antara kota kecamatan dengan kota kabupaten.

Sarana dan prasarana komunikasi di kecamatan ini pun sangat memadai. Hampir di setiap tempat terdapat televisi, bahkan sarana telephone.

Sarana komunikasi jarak jauh berupa Ratel, sampai saat ini masih digunakan oleh pemerintah wilayah kecamatan.

Listrik, yang juga merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi aktivitas kehidupan di kecamatan dan di desa-desa, juga terdapat di setiap desa.

Sarana dan prasarana yang secara langsung mendukung aktivitas ekonomi, di Kecamatan Sukabumi cukup memadai. Lembaga keuangan seperti Bank, selain jumlahnya yang cukup memadai, juga telah memasyarakat di wilayah ini. Koperasi yang selama ini ada dengan jumlah yang cukup memadai mampu berfungsi sebagai lembaga ekonomi masyarakat. Sementara pasar sebagai tempat interaksi langsung antara konsumen dan produsen, juga dapat kita temui di kecamatan ini. Selain daripada itu, interaksi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari pun dilakukan di warung-warung dan kios.

Kualitas pemukiman penduduk, yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk yang cukup baik, sehingga mempunyai daya dukung positif terhadap pembangunan daerah tersebut. Dari seluruh pemukiman yang ada (16.377 rumah), sekitar 32,25% (5.281 rumah) tergolong kategori permanen. Sementara yang lainnya berupa rumah panggung dan semi permanen.

Sarana dan prasarana pemerintahan pun terlihat memadai. Kapasitas kantor kecamatan yang ada terlihat memadai, jika dibandingkan dengan jumlah karyawan yang ada.

Pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah yaitu desa, sarana dan prasarana pemerintahannya cukup memadai. Di samping kualitas, juga kuantitasnya. Dari 11 desa yang ada, kesemuanya memiliki kantor desa dan balai desa.

5. Sikap Kekeluargaan Dan Kesetiakawanan Masyarakat

Sikap kekeluargaan dan kesetiakawanan masyarakat, diduga dapat mempengaruhi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Hal ini terutama terkait erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan di kecamatan. Mengenai aspek ini, terlihat bahwa beberapa indikator sikap kekeluargaan dan kegotongroyongan serta kesetiakawanan masih melekat kuat pada masyarakat di kecamatan ini.

Dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat sosial (kebutuhan orang banyak), seperti kerja bakti kebersihan lingkungan, kegotongroyongan dalam membuat atau memperbaiki jalan swadaya, kegotongroyongan dalam membuat atau memperbaiki jembatan sederhana, dan lain-lain, masih semarak dilaksanakan oleh masyarakat.

Kegotongroyongan dalam melaksanakan pekerjaan yang merupakan kebutuhan individu juga masih nampak terutama di desa-desa yang jauh dari kota kecamatan. Apabila salah seorang tetangga hendak membangun atau memindahkan rumahnya, maka masyarakat melalui komando RT/RW-nya serempak membantunya. Apalagi kegotongroyongan mereka dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan peribadatan, seperti membangun masjid, langgar, madrasah, dan lain-lain.

6. Pemerintahan Dan Sarana Pemerintahan di Kecamatan

Sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan, di Kecamatan Sukabumi terdapat beberapa instansi, baik vertikal, otonom, maupun BUMN/BUMD. Ada 6 (enam) instansi vertikal yang ada di kecamatan ini, yaitu Depdikbud, Departemen Agama, Departemen Penerangan (JUPEN), Departemen Sosial, Statistik dan PLKB. Instansi otonom yang ada di Kecamatan Sukabumi sebanyak 4 instansi, yaitu Dinas P & K, Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Sedangkan instansi BUMN/BUMD yang ada di kecamatan ini hanya ada BRI.

Sarana dan prasarana pemerintahan terlihat memadai. Kantor kecamatan dan kantor-kantor instansi vertikal dan otonom terlihat memadai. Semua instansi menempati/mempunyai kantor/ruangan. Prasarana desa yang ada di wilayah ini juga memadai. Kesemua desa yang ada memiliki kantor desa lengkap dengan balai desanya.

7. Dinamika Pembangunan Dan Faktor Pendukung Lainnya

Dengan modal kondisi wilayah seperti dipaparkan di muka, di Kecamatan Sukabumi setelah beberapa kurun waktu melaksanakan pembangunan, sesuai dengan rencana pembangunan nasional, nampak terdapat perkembangan yang menggembirakan.

Kemajuan pembangunan yang berhasil dicapai Kecamatan Sukabumi terlihat misalnya dari perkembangan sarana dan prasarana seperti perpanjangan prasarana transportasi berupa jalan, penambahan sarana telekomunikasi antar daerah, meningkatnya jumlah sarana pendidikan, serta meningkatnya income percapita masyarakat.

Tingginya aktivitas pembangunan di Wilayah ini, juga tercermin dari total penerimaan pembangunan yang diterima. Pada tahun 1995, bantuan pembangunan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 783.845.000,-. Sementara bantuan dari Daerah Tingkat I sebesar Rp 5.000.000,-, dan dari Daerah Tingkat II sebesar Rp 172.000.000,-, sedangkan biaya pembangunan wilayah yang berasal dari swadaya masyarakat sebesar Rp 135.000.00,-

Dinamika masyarakat juga dipacu oleh program-program pemerintah yang bersasaran untuk meningkatkan prestasi daerah dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan lomba desa misalnya, dirasakan dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan desa-desa di Kecamatan Sukabumi ini.

G. KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN DT II SUKABUMI

Kecamatan Sukaraja, merupakan salah satu kecamatan yang berjarak \pm 5 km dari Kabupaten Sukabumi. Luas wilayahnya sekitar 7.225,18 Ha. Dilihat dari letak geografis, kecamatan ini berada dekat ibukota kabupaten. Letak geografis tersebut, didukung oleh prasarana transportasi (kendaraan) yang mencukupi. Tingginya frekuensi kendaraan umum angkutan penumpang juga menghubungkan jalur kota kecamatan ini dengan kota kabupaten lain, seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur. Dilihat dari sisi ini, logislah kiranya apabila dikatakan bahwa mobilitas dan aktivitas ekonomi relatif tinggi apabila dibandingkan dengan kecamatan lain yang letaknya di luar ibukota kabupaten.

Pada pertengahan tahun 1995, jumlah desa di kecamatan ini sebanyak 20 desa (tidak ada yang tergolong kelurahan). Keduapuluh desa tersebut tergolong ke dalam kategori Desa Swasembada. Berdasarkan kategori tersebut, kondisi secara keseluruhan mengenai sarana dan prasarana desa, nampaknya hampir sama. Tentu saja desa-desa yang terletak dekat dengan kota kecamatan mempunyai sarana dan prasarana relatif baik.

Dilihat dari kondisi daerah, Kecamatan Sukaraja merupakan daerah pegunungan, dengan ketinggian daerah 500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan tingkat curah hujan rata-rata setiap tahun relatif tinggi, yaitu \pm 1.746 mm per tahun.

1. Aktivitas Perekonomian Dan Mata-pencaharian Penduduk

Masyarakat Kecamatan Sukaraja mempunyai kegiatan ekonomi bervariasi. Ada yang bermatapencaharian tani, usaha kerajinan, berdagang, jasa transportasi, buruh tani, dan bekerja pada sektor jasa lainnya. Secara ringkas struktur mata pencaharian penduduk Kecamatan Sukaraja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.19.
Struktur Matapencaharian Penduduk
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi

Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
Petani	25.053 (66,28 %)
Industri Rumah Tangga/Kerajinan	142 (0,38 %)
Pedagang	6.883 (18,08 %)
Jasa Angkutan	92 (0,24 %)
Buruh	1.727 (4,57 %)
Pegawai Negeri Sipil	2.185 (5,78 %)
A B R I	62 (0,16 %)
Peternak	1.703 (4,51 %)

Sumber: Monografi Kecamatan Sukaraja.

Dari tabel III.19 di atas, terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Sukaraja bekerja sebagai petani (66,28%). Petani pemilik lahan sebesar 1,67%, petani penggarap sebesar 33,34%, dan buruh tani sebesar 64,98%. Sedangkan proporsi paling sedikit dari penduduk kecamatan tersebut adalah yang bermatapencaharian sebagai ABRI (0,16%).

Pertanian yang ada di kecamatan ini bervariasi, dari mulai tanaman bahan makanan pokok sampai dengan tanaman-tanaman keras seperti cengkeh, kopi, teh, dll. Meskipun masyarakat petani merupakan yang terbanyak, namun tidak sedikit dari mereka yang hanya bersifat subsistem. Mereka bertani dengan lahan yang terbatas, dan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, belum untuk tujuan pasar.

2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Kondisi kependudukan wilayah kecamatan banyak menggambarkan aspek lain yang merupakan indikator atau berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut.

Misalnya, wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk relatif tinggi dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi pula, akan berbeda dampaknya

terhadap pembangunan, dibandingkan dengan wilayah yang relatif jarang penduduknya dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah.

Demikian juga kondisi kependudukan wilayah dapat mempengaruhi aspek ketenagakerjaannya. Dilihat dari sisi ini, Kecamatan Sukaraja indikator kependudukan dan ketenagakerjaan seperti tergambar pada Tabel III.20 sebagai berikut:

Tabel III.20.
Indikator Kependudukan Dan
Ketenagakerjaan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi

INDIKATOR KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	TAHUN 1995
1. Jumlah Penduduk	103.371
2. Kepadatan Penduduk	± 100
3. Jml. Rumah Tangga (RT)	28.282
4. Pddk Per Rumah Tangga	0,27
5. Penduduk Usia Dewasa	90.369
6. Penduduk Anak-anak	13.002

Sumber: Monografi Kecamatan Sukaraja.

Kecamatan Sukaraja, dapat dikategorikan wilayah yang mempunyai jumlah penduduk tinggi dan kepadatan penduduk relatif rendah dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Sukabumi. Pada Tahun 1995, jumlah penduduk Kecamatan Sukaraja sebanyak 103.371 orang dengan kepadatan penduduk sebesar ± 100 orang per kilometer persegi.

Indikator kependudukan lainnya dapat dilihat dari jumlah Rumah Tangga dan banyaknya rata-rata anggota keluarga (penduduk per Rumah Tangga). Pada Tahun 1995 jumlah Rumah Tangga di Kecamatan Sukaraja sebanyak 28.282 dengan rata-rata penduduk per Rumah Tangga sebanyak 0,27 orang.

Ini berarti rata-rata tanggungan kepala keluarga di kecamatan ini sebanyak 0,27 orang.

Struktur usia penduduk biasanya mencerminkan kondisi ketenagakerjaan. Dilihat dari sisi ini, sebagian besar penduduk di Kecamatan Sukaraja berusia dewasa.

Dari sejumlah 103.371 penduduk Kecamatan Sukaraja pada Tahun 1995, sebanyak 90.369 orang (87,42%) termasuk usia dewasa, sedangkan sisanya anak-anak. Dengan kategorisasi anak-anak dimaksud adalah bukan usia kerja, maka dapat dikatakan usia kerja penduduk di kecamatan Sukaraja lebih tinggi dibandingkan penduduk di bawah usia kerja.

3. Pendidikan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Faktor lain yang besar pengaruhnya terhadap terselenggaranya pembangunan di kecamatan, selain sumber daya alam dan sumber dana adalah Sumber Daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu kualitas Sumber Daya Manusia ini, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Dilihat dari dimensi ini, Kecamatan Sukaraja memiliki beberapa indikator pendidikan sebagai penentu kualitas SDM sebagaimana terlihat pada Tabel 3.21 berikut ini:

Tabel III.21.
Indikator Pendidikan Dan Kualitas SDM
Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi

INDIKATOR PENDIDIKAN DAN KUALITAS SDM	TAHUN 1995
1. Jumlah SD	49
2. Jumlah SMP/Tsanawiyah	14
3. Jumlah SLTA	6
4. Jumlah PT	-
5. Jumlah Lulusan PT	1.427

Sumber : Monografi Kecamatan Sukaraja.

Seperti terlihat pada Tabel III.21., sarana pendidikan di Kecamatan Sukaraja, relatif memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada dan jumlah penduduknya. Apabila dirata-ratakan, jumlah Sekolah Dasar per desa misalnya, di setiap desa rata-rata mempunyai 2,45 buah SD.

Namun, jika dilihat dari jumlah SLTP dan SLTA, nampaknya dapat memberikan gambaran bahwa minat masyarakat untuk melanjutkan anaknya ke tingkatan sekolah yang lebih tinggi relatif cukup baik. Satu hal yang merupakan modal bagi pengembangan kualitas SDM di Kecamatan Sukaraja adalah antusiasnya masyarakat terhadap pendidikan dasar. Hal ini terlihat dari jumlah sarana pendidikan dasar yang tersedia.

Kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan, antara lain dapat dilihat dari banyaknya sarjana yang ada di kecamatan ini. Hingga tahun 1995, jumlah kumulatif lulusan Perguruan Tinggi yang ada di kecamatan ini hanya sebanyak 1.427 orang (1,38% dari seluruh penduduk kecamatan). Ini menunjukkan bahwa rata-rata kualitas SDM di kecamatan ini masih relatif baik.

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di kecamatan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi aktivitas kehidupan di kecamatan, baik aktivitas ekonomi, pemerintahan, pembangunan, dll. Sehingga lancar tidaknya pembangunan yang dilaksanakan di kecamatan sangat ditentukan oleh keberadaan dan kondisi sarana dan prasarana ini. Dilihat dari aspek ini, Kecamatan Sukaraja memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel III.22.
Indikator Kondisi Sarana Dan Prasarana
Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi

INDIKATOR SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1. Transportasi	
- Jalan Propinsi	12 km
- Jalan Kabupaten	46 km
- Jalan Desa	52 km
- Kendaraan Umum	Sangat Memadai
2. Komunikasi	
- Televisi	Di Semua Desa Ada
- Radio	Di Semua Desa Ada
- Telephone	Di Semua Desa Ada
- Ritel	Hanya Kecamatan
3. Penerangan	
- Listrik	Di Semua Desa Ada
4. Ekonomi	
- Bank	3 buah
- Koperasi	3 buah
- Pasar	1 buah
- Warung/Kios	5.668 buah
5. Pemukiman Penduduk	
- Permanen	8.030 buah
- Semi permanen dan semi permanen	2.164 buah

Sumber : Monografi Kecamatan Sukaraja.

Jalan merupakan urat nadi aktivitas kehidupan di kecamatan dan desa. Prasarana jalan yang memadai akan mendukung lancarnya aktivitas ekonomi dan pembangunan di wilayah tersebut. Dilihat dari aspek ini, Kecamatan Sukaraja dapat dikategorikan sebagai wilayah yang mempunyai prasarana jalan sangat memadai. Di wilayah kecamatan, hanya ada 12 km jalan Propinsi, 46 km jalan Kabupaten, dan 52 km jalan desa. Kondisi jalan yang memadai ini, disertai pula oleh banyaknya sarana transportasi berupa kendaraan umum penumpang yang menghubungkan suatu tempat dengan tempat lain, termasuk antara kota kecamatan dengan kota kabupaten.

Sarana dan prasarana komunikasi di kecamatan ini pun sangat memadai. Hampir di setiap tempat terdapat televisi, bahkan sarana telephone.

Sarana komunikasi jarak jauh berupa Ratel, sampai saat ini masih digunakan oleh pemerintah wilayah kecamatan.

Listrik, yang juga merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi aktivitas kehidupan di kecamatan dan di desa-desa, juga terdapat di setiap desa.

Sarana dan prasarana yang secara langsung mendukung aktivitas ekonomi, di Kecamatan Sukaraja cukup memadai. Lembaga keuangan seperti Bank, selain jumlahnya yang cukup memadai, juga telah memasyarakat di wilayah ini. Koperasi yang selama ini ada dengan jumlah yang cukup memadai mampu berfungsi sebagai lembaga ekonomi masyarakat. Sementara pasar sebagai tempat interaksi langsung antara konsumen dan produsen, juga dapat kita temui di kecamatan ini. Selain daripada itu, interaksi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari pun dilakukan di warung-warung dan kios.

Kualitas pemukiman penduduk, yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk yang cukup baik, sehingga mempunyai daya dukung positif terhadap pembangunan daerah tersebut. Dari seluruh pemukiman yang ada (10.194 rumah), sekitar 78,77% (8.030 rumah) tergolong kategori permanen. Sementara yang lainnya berupa rumah panggung dan semi permanen.

Sarana dan prasarana pemerintahan pun terlihat memadai. Kapasitas kantor kecamatan yang ada terlihat memadai, jika dibandingkan dengan jumlah karyawan yang ada.

Pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah yaitu desa, sarana dan prasarana pemerintahannya cukup memadai. Di samping kualitas, juga kuantitasnya. Dari 20 desa yang ada, kesemuanya memiliki kantor desa dan balai desa.

5. Sikap Kekeluargaan Dan Kesetiakawanan Masyarakat

Sikap kekeluargaan dan kesetiakawanan masyarakat, diduga dapat mempengaruhi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini terutama terkait erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan di kecamatan.

Mengenai aspek ini, terlihat bahwa beberapa indikator sikap kekeluargaan dan kegotongroyongan serta kesetiakawanan masih melekat kuat pada masyarakat di kecamatan ini.

Dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat sosial (kebutuhan orang banyak), seperti kerja bakti kebersihan lingkungan, kegotongroyongan dalam membuat atau memperbaiki jalan swadaya, kegotongroyongan dalam membuat atau memperbaiki jembatan sederhana, dan lain-lain, masih semarak dilaksanakan oleh masyarakat.

Kegotongroyongan dalam melaksanakan pekerjaan yang merupakan kebutuhan individu juga masih nampak terutama di desa-desa yang jauh dari kota kecamatan. Apabila salah seorang tetangga hendak membangun atau memindahkan rumahnya, maka masyarakat melalui komando RT/RW-nya serempak membantunya. Apalagi kegotongroyongan mereka dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan peribadatan, seperti membangun masjid, langgar, madrasah, dan lain-lain.

6. Pemerintahan Dan Sarana Pemerintahan di Kecamatan

Sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan, di Kecamatan Sukaraja terdapat beberapa instansi, baik vertikal, otonom, maupun BUMN/BUMD. Ada 7 (tujuh) instansi vertikal yang ada di kecamatan ini, yaitu Depdikbud, Departemen Agama, Departemen Penerangan (JUPEN), Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Statistik dan PLKB. Instansi otonom yang ada di Kecamatan Sukaraja sebanyak 5 instansi, yaitu Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan

Transmigrasi. Sedangkan instansi BUMN/BUMD yang ada di kecamatan ini adalah BRI, PTP XII, PLN, Pos dan Giro, dan DOLOG (Sumber: Monografi Kecamatan Sukaraja).

Sarana dan prasarana pemerintahan terlihat memadai. Kantor kecamatan dan kantor-kantor instansi vertikal dan otonom terlihat memadai. Semua instansi menempati/mempunyai kantor/ruangan. Prasarana desa yang ada di wilayah ini juga memadai. Kesemua desa yang ada memiliki kantor desa lengkap dengan balai desanya.

7. Dinamika Pembangunan Dan Faktor Pendukung Lainnya

Dengan modal kondisi wilayah seperti dipaparkan di muka, di Kecamatan Sukaraja setelah beberapa kurun waktu melaksanakan pembangunan, sesuai dengan rencana pembangunan nasional, nampak terdapat perkembangan yang mengembirakan.

Kemajuan pembangunan yang berhasil dicapai Kecamatan Sukaraja terlihat misalnya dari perkembangan sarana dan prasarana seperti perpanjangan prasarana transportasi berupa jalan, penambahan sarana telekomunikasi antar daerah, meningkatnya jumlah sarana pendidikan, serta meningkatnya income percapita masyarakat.

Dinamika masyarakat juga dipacu oleh program-program pemerintah yang bersasaran untuk meningkatkan prestasi daerah dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan lomba desa misalnya, dirasakan dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan desa-desa di Kecamatan Sukaraja ini.

H. KECAMATAN SUBANG DAN KECAMATAN PAGADEN KABUPATEN DATI II SUBANG

Kecamatan yang diteliti di Kabupaten Subang yaitu kecamatan Subang dan Kecamatan Pagaden. Kecamatan Subang terletak di kota kabupaten Subang. Luas kecamatan ini adalah 5940.581 Ha dan terbagi ke dalam 11 desa. Sementara Kecamatan Pagaden terletak sekitar 15 kilometer dari kota Subang. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 8.071 Ha yang terdiri dari 7 desa.

1. Aktivitas Perekonomian Dan Mata Pencaharian Penduduk

Struktur mata pencaharian penduduk kecamatan Subang adalah petani, perdagangan, jasa dan buruh. Begitu pula di Kecamatan Pagaden, sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah di bidang pertanian, perdagangan dan bidang jasa, dengan tingkat pendapatan rata-rata Rp 2.235,- pada tahun 1994 dan meningkat menjadi Rp 2.450,- pada tahun 1995.

2. Kependudukan, Ketenagakerjaan, Pendidikan Dan Kualitas SDM

Kecamatan Subang merupakan kecamatan yang terpadat di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang yaitu 101.604 orang pada tahun 1994 dan meningkat menjadi 102.420 orang pada tahun 1995. Dengan rincian di tiap desa kira-kira terdapat 9323 orang atau tiap kilometer persegi terdapat 1880 orang penduduk.

Berdasarkan pendidikan sekitar 12,77% tidak tamat SD, 41,81% berpendidikan SD, 16,52% berpendidikan SMP, 12,805 berpendidikan SLTA dan hanya 0,47% yang berpendidikan perguruan tinggi.

Ditinjau dari aspek ketenagakerjaan di Kecamatan Subang memiliki usia kerja sebanyak 75.257 orang, angkatan kerja sejumlah 35.165 orang,

dengan jumlah yang bekerja sebanyak 34.063 orang dan jumlah penduduk pencari kerja sebanyak 6.029 orang.

Sedangkan Kecamatan Pagaden jumlah penduduknya pada tahun 1994 adalah 72.288 orang dan menurun menjadi 71.428 orang pada tahun 1995. Di tiap desa diperkirakan terdapat 4257 orang atau 926 orang setiap kilometer persegi. Adapun berdasarkan latar pendidikan dapat dirinci sebagai berikut: tidak tamat SD berjumlah 14.981 orang pada tahun 1994 dan tahun 1995 11.729 orang; pendidikan SD 24.257 orang tahun 1994 dan 22.931 orang tahun 1995; pendidikan SMP 4.782 orang tahun 1994 dan tahun 1995 berjumlah 5.885 orang; adapun pendidikan SLTA adalah 4.256 orang tahun 1994 dan 3.551 orang pada tahun 1995; sedangkan yang berpendidikan perguruan tinggi pada tahun 1994 hanya 142 orang dan pada tahun 1995 meningkat menjadi 187 orang.

Adapun ditinjau dari aspek ketenagakerjaan di Kecamatan Pagaden jumlah usia kerja sebanyak 57.595 orang, dengan angkatan kerja sebanyak 26.9123 orang, adapun yang bekerja sebanyak 26.068 orang dan yang sedang mencari kerja (pencari kerja) sebanyak 4.614 orang.

3. Kondisi Sarana Dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana secara umum di Kabupaten Subang antara lain berupa sarana perhubungan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan sarana prasarana bidang lainnya.

a. Sarana dan prasarana Perhubungan

Di Kecamatan Subang kondisi prasarana perhubungan, mutunya cukup baik mengingat kecamatan Subang juga merupakan ibukota kabupaten, sehingga prasarana ini banyak mendapat perhatian. Selama dua tahun terakhir terjadi peningkatan panjang jalan dari 199 Km pada tahun 1994 menjadi 212 Km pada tahun 1995 jalan yang sudah beraspal.

Sementara di Kecamatan Pagaden jalan yang beraspal baru 26,60 Km pada tahun 1994 dan panjangnya bertambah menjadi 26,70 Km. Jalan berbatu di kecamatan ini masih banyak yaitu pada tahun 1994 sepanjang 95 Km dan pada tahun 1995 meningkat sepanjang 99 Km. Jalan tanah yang pada umumnya merupakan jalan desa pada tahun 1994 sepanjang 48 Km dan pada tahun 1995 turun menjadi 44 Km panjangnya.

b. Sarana dan Prasarana di Kantor Kecamatan dan Desa

Sarana di tingkat kecamatan tampaknya sangat tergantung kepada letak geografis kecamatan itu sendiri. Misalnya di kecamatan Subang karena merupakan ibu kota kabupaten maka kondisi kantor kecamatan sudah cukup memadai, meskipun belum dilengkapi dengan sarana teknologi perkantoran yang modern seperti komputer. Untuk surat menyurat masih dilakukan secara manual menggunakan mesin tik. Juga dilengkapi dengan sarana telekomunikasi berupa telepon dan ratel untuk pengiriman berita-berita yang penting dan segera.

Sedangkan di kecamatan pagaden gedung kantor kecamatan kondisinya masih kurang memadai dengan peralatan dan perlengkapan kantor yang kualitasnya kurang baik. Apalagi sarana telekomunikasi seperti telepon sering mengalami kerusakan.

c. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Subang terdiri dari sekolah negeri dan swasta mulai tingkat taman kanak-kanak hingga pendidikan menengah atas. Sarana dan prasarana ini merupakan jumlah sekolah yang tersedia.

Fasilitas pendidikan tingkat taman kanak-kanak umumnya dikelola oleh swasta yang seluruhnya berjumlah 60 taman kanak-kanak. Adapun di Kecamatan Subang jumlah taman kanak-kanaknya yaitu 8 sekolah. Sedangkan di kecamatan Pagaden hanya 1 sekolah taman kanak-kanak.

Fasilitas pendidikan tingkat sekolah dasar baik itu bangunan yang non-inpres, Inpres biasa dan Inpres bertingkat sebanyak 97 sekolah. Sedangkan di Kecamatan Pagaden mempunyai 52 sekolah dasar.

Fasilitas pendidikan tingkat menengah pertama di Kecamatan Subang sebanyak 13 sekolah dan sementara di Kecamatan Pagaden hanya 5 sekolah. Adapun fasilitas pendidikan tingkat menengah atas terdiri dari sekolah umum dan sekolah kejuruan. Di kecamatan Subang terdapat 13 sekolah menengah atas umum, 2 STM dan 2 SMEA. Sedangkan di Kecamatan Pagaden hanya mempunyai satu sekolah menengah atas umum.

Di samping itu terdapat juga fasilitas pendidikan keagamaan yaitu pesantren. Di kecamatan Subang terdapat 5 pesantren, sedangkan di Kecamatan Pagaden hanya 1 pesantren.

d. Sarana Perekonomian

Sarana perekonomian yang terdapat di tingkat kecamatan terdiri dari bank, koperasi dan pasar. Di kecamatan Subang terdapat 9 bank, 11 koperasi dan 2 pasar. Sementara di Kecamatan Pagaden terdapat 13 bank, 6 koperasi dan 2 pasar.

e. Sarana Kesehatan

Di kabupaten Subang hanya terdapat 4 rumah sakit yaitu terdiri dari 1 rumah sakit pemerintah, 1 rumah sakit swasta dan 2 rumah sakit ABRI yang terletak di kota Subang. Sarana prasarana kesehatan di tingkat kecamatan yaitu puskesmas, balai pemeriksaan dan posyandu. Di kecamatan Subang terdapat kurang lebih terdapat 3 puskesmas, 2 balai pemeriksaan kesehatan yang dikelola swasta, 1 klinik bersalin dan 1 balai pemeriksaan ABRI serta 102 Pos Yandu. Sedangkan di kecamatan Pagaden terdapat 2 Puskesmas, 2 balai kesehatan swasta dan 93 Pos Yandu.

f. Sarana Pemukiman

Kualitas sarana pemukiman terdiri dari rumah mewah, permanen biasa, permanen dan rumah darurat. Data pemukiman untuk kecamatan Subang tidak terekam. Sedangkan di Kecamatan Pagaden jumlah rumah mewah sebanyak 335 rumah, permanen biasa sebanyak 5.305 rumah, 10.400 rumah permanen dan 5.194 rumah darurat.

4. Sikap Kekeluargaan Dan Kesetiakawanan Masyarakat

Sikap ini tercermin antara lain dari pelaksanaan gotong royong baik di tingkat desa maupun kecamatan dan kegiatan lomba desa baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten.

Gotong royong yang dilaksanakan sangat bermanfaat bagi lancarnya roda pemerintahan desa, peningkatan kesejahteraan rakyat dan proses pembangunan. Karena sebagian besar penduduk beragama Islam maka kegiatan gotong royong ini bermanfaat pula dalam upaya peningkatan ketaqwaan beragama. Sedangkan kegiatan lomba desa sangat bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap program-program pemerintah beserta hasil-hasil pembangunan.

Untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan gotong royong dan lomba desa biasanya setiap minggu di kecamatan diadakan rapat yang dihadiri oleh aparat kecamatan, instansi vertikal dan otonom serta kepala desa dan aparatnya. Misalnya di Kecamatan Subang rapat mingguan dilaksanakan pada hari Kamis, sedangkan di Kecamatan Pagaden biasanya dilaksanakan pada hari Rabu. Rapat ini sangat bermanfaat dalam memusyawarahkan masalah-masalah yang ada baik di tingkat kecamatan maupun di masing-masing desa untuk kemudian dicari pemecahannya.

Di kecamatan Pagaden kegiatan gotong royong terwujud dalam Rencana Anggaran Pendapatan Pengeluaran Keuangan Daerah (RAPPKD),

pembuatan Masjid Jami kecamatan, rehabilitasi total gedung serba guna kecamatan dan rehabilitasi total kantor Kapolseknya.

5. Dinamika Pembangunan Di Kecamatan

Dinamika pembangunan didaerah kecamatan terutama pembangunan fisik ditujukan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang sifatnya vital dan dibutuhkan oleh masyarakat. Pembangunan fisik tersebut meliputi pembangunan sarana perhubungan seperti pembuatan jembatan, pengaspalan jalan dan perbaikan jalan; pembangunan sarana produksi seperti pembuatan dan perbaikan irigasi untuk pertanian, sarana produkti peternakan dan perikanan; dan pembangunan prasarana sosial seperti pembangunan dan perbaikan mesjid, pembangunan pos-pos kamling untuk meningkatkan keamanan desa.

Adapun dananya sebagian besar bersumber dari pemerintah namun apabila dana yang disediakan tidak memadai pembangunan fisik tetap dilaksanakan atas swadaya masyarakat. Misalnya di Kecamatan Subang tahun 1994 mendapat dana pembangunan sebesar Rp 893.372.000, yang kemudian didistribusikan ke desa-desa. Sedangkan di Kecamatan Pagaden dana untuk kegiatan-kegiatan pembangunan fisik pada tahun 1994 sebesar Rp 243.522.750,- dan meningkat menjadi sebesar Rp 276.317.125,-.

6. Pemerintah Dan Sarana Pemerintah

Sebagai motor penggerak pembangunan di Kecamatan Subang Kota dan Kecamatan Pagaden terdapat beberapa instansi vertikal maupun instansi otonom. Ada 6 instansi vertikal di Kecamatan Subang kota ini yaitu Depdikbud, Departemen Agama, Departemen Penerangan (Jupen), Departemen Sosial, Statistik dan Dep Transmigrasi. Sedangkan instansi otonom yang ada yaitu dinas P & K, Puskesmas, Dinas Pasar, Dipenda, dan DLLAJ.

I. KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN DATI II TASIKMALAYA

Kecamatan Sodonghilir, merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya diantara 30 (tiga puluh) kecamatan lainnya. Luas wilayahnya sekitar 97,110 Kilometer Persegi. Dilihat dari letak geografis, kecamatan ini dapat dikatakan jauh dari ibukota kabupaten. Letak geografis yang relatif jauh, juga kurang didukung oleh prasarana transportasi (kendaraan) yang mencukupi. Frekuensi kendaraan umum angkutan penumpang yang menghubungkan jalur kota kecamatan dengan kota kabupaten relatif jarang, bahkan setelah batas waktu tertentu (\pm jam 18.00) sudah tidak ada. Dilihat dari sisi ini, dapat diduga bahwa mobilitas dan aktivitas ekonomi terutama relatif rendah dibandingkan dengan kecamatan lain yang lebih dekat dengan kota kabupaten.

Pada akhir tahun 1994, jumlah desa di kecamatan ini sebanyak 12 desa (tidak ada yang tergolong kelurahan). Diantara keduabelas desa tersebut pada tahun 1994 terdapat 5 desa yang tergolong miskin, sehingga terhadap kelima desa tersebut pemerintah memberikan bantuan dana IDT. Meskipun yang terkategori desa miskin hanya 5 (lima) desa, namun dilihat dari kondisi secara keseluruhan mengenai sarana dan prasarana desa, nampaknya hampir sama. Hanya desa-desa yang dekat dengan kota kecamatanlah yang mempunyai sarana dan prasarana relatif baik.

Dilihat dari kondisi daerah, Kecamatan Sodonghilir dapat dikatakan daerah yang banyak memiliki pegunungan, sehingga tingkat curah hujan rata-rata setiap tahun relatif tinggi. Sementara dilihat dari kondisi kestabilan daerah, banyak tempat-tempat dan desa-desa di kecamatan ini yang labil, rawan longsor. Bahkan pada tahun 1993 yang lalu, musibah longsor diderita oleh salah satu desa (yaitu desa Cikalong), yang mengakibatkan lebih dari 60 orang korban jiwa. Data statistik juga menunjukkan, pada tahun 1993 Kecamatan Sodonghilir merupakan kecamatan yang paling besar menderita kerugian akibat bencana alam, yaitu sebesar Rp. 384.372.000,00 (Sumber, Tasikmalaya Dalam Angka, 1993; 85).

1. Aktivitas Perekonomian Dan Mata-pencaharian Penduduk

Masyarakat Kecamatan Sodonghilir mempunyai kegiatan ekonomi bervariasi. Ada yang bermatapencaharian tani, usaha kerajinan, berdagang, jasa transportasi, buruh tani, dan bekerja pada sektor jasa lainnya. Secara ringkas struktur matapencaharian penduduk Kecamatan Sodonghilir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.23.
Struktur Matapencaharian Penduduk
Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya

Mata Pencaharian	Prosen Penduduk
Bertani	64,04
Industri Rumah Tangga/Kerajinan	2,11
Berdagang	12,09
Jasa Angkutan	0,71
Buruh tani	14,60
Jasa lainnya	6,45

Sumber: Petugas Statistik Kecamatan Sodonghilir

Dari tabel III.23 di atas, terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Sodonghilir bekerja sebagai petani (64,04%) pemilik lahan. Buruh tani menempati urutan kedua, yaitu sebesar 14,60%. Sedangkan proporsi paling sedikit dari penduduk kecamatan tersebut adalah yang bermatapencaharian pada bidang jasa angkutan.

Pertanian yang ada di kecamatan ini bervariasi, dari mulai tanaman bahan makanan pokok sampai dengan tanaman-tanaman keras seperti cengkeh, kopi, teh, dll. Meskipun masyarakat petani merupakan yang terbanyak, namun tidak sedikit dari mereka yang hanya bersifat subsisten. Mereka bertani dengan lahan yang terbatas, dan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, belum untuk tujuan pasar.

2. Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

Kondisi kependudukan wilayah kecamatan banyak menggambarkan aspek lain yang merupakan indikator atau berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut. Misalnya, wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk relatif tinggi dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi pula, akan berbeda dampaknya terhadap pembangunan, dibandingkan dengan wilayah yang relatif jarang penduduknya dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah. Demikian juga kondisi kependudukan wilayah dapat mempengaruhi aspek ketenagakerjaannya.

Dilihat dari sisi ini, Kecamatan Sodonghilir mempunyai beberapa indikator kependudukan dan ketenagakerjaan seperti tergambar pada Tabel III.24 sebagai berikut:

Tabel III.24.
Indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya

INDIKATOR KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	TAHUN		
	1993	1994	1995
1. Jumlah Penduduk	51.829	51.602	51.415
2. Kepadatan Penduduk	534	532	530
3. Jml. Rumah Tangga (RT)	13.519	TT	13.554
4. Pddk Per Rumah Tangga	3,83	TT	3,79
5. Penduduk Usia Dewasa	30.066	TT	TT
6. Penduduk Anak-anak	21.763	TT	TT

Sumber: Petugas Statistik Kecamatan Sodonghilir dan Tasikmalaya Dalam Angka, diolah.

Catatan: T = Data Tidak Tersedia

Kecamatan Sodonghilir dapat dikategorikan wilayah yang mempunyai jumlah dan kepadatan penduduk sedang dibandingkan kecamatan lainnya di Tasikmalaya. Pada Tahun 1993, jumlah penduduk Kecamatan

Sodonghilir sebanyak 51.829 orang dengan kepadatan penduduk sebesar 534 orang per kilo meter persegi.

Sementara kepadatan yang paling tinggi di Kabupaten Tasik pada waktu yang sama adalah Kecamatan Cihideung sebesar 11.824 orang per kilometer persegi, dan terendah Kecamatan Pancatengah sebesar 179 orang per kilometer persegi.

Pada Tahun 1994 jumlah penduduk Kecamatan Sodonghilir turun menjadi 51.602 orang dengan kepadatan menjadi 532 orang per kilometer persegi. Dan pada Tahun 1995 jumlah penduduk menurun lagi menjadi 51.415 orang dengan kepadatan 530 orang per kilometer persegi.

Berdasarkan informasi dari aparat setempat, terjadinya penurunan jumlah dan kepadatan penduduk itu, yang sebenarnya telah terjadi sejak Tahun 1991 bukan bersifat alamiah, namun karena urbanisasi ke kota, baik kota kabupaten, atau kota-kota lainnya, bahkan ke Metropolitan dan kota-kota di luar Pulau Jawa. Sebagian besar dari mereka adalah dalam mencari penghidupan baru yang menurut anggapan mereka di kota akan lebih baik.

Indikator kependudukan lainnya dapat dilihat dari jumlah Rumah Tangga dan banyaknya rata-rata anggota keluarga (penduduk per Rumah Tangga). Pada Tahun 1993 jumlah Rumah Tangga di Kecamatan Sodonghilir sebanyak 13.519 dengan rata-rata penduduk per Rumah Tangga sebanyak 3,83 orang. Ini berarti rata-rata tanggungan kepala keluarga di kecamatan ini sebanyak 3,83 orang. Sedangkan pada tahun 1995, jumlah Rumah Tangga di kecamatan ini sebanyak 13.554 dengan rata-rata penduduk per Rumah Tangga sebanyak 3,79 orang. Jadi dari tahun 1993 ke tahun 1995 mengalami penurunan angka tanggungan kepala keluarga.

Struktur usia penduduk biasanya mencerminkan kondisi ketenagakerjaan. Dilihat dari sisi ini, sebagian besar penduduk di Kecamatan Sodonghilir tergolong usia dewasa. Dari sejumlah 51.829 penduduk Sodonghilir pada Tahun 1993, sebanyak 30.066 orang (58%)

termasuk usia dewasa, sedangkan sisanya anak-anak. Dengan menganggap anak-anak dimaksud adalah bukan usia kerja, maka dapat dikatakan usia kerja penduduk di kecamatan Sodonghilir lebih tinggi dibandingkan penduduk di bawah usia kerja.

3. Pendidikan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Faktor lain yang besar pengaruhnya terhadap terselenggaranya pembangunan di kecamatan, selain sumber daya alam dan sumber dana adalah Sumber Daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu kualitas Sumber Daya Manusia ini, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan.

Dilihat dari dimensi ini, Kecamatan Sodonghilir memiliki beberapa indikator pendidikan sebagai penentu kualitas SDM sebagaimana terlihat pada Tabel III.25 berikut ini:

Tabel III.25.
Indikator Pendidikan dan Kualitas SDM
di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya

INDIKATOR PENDIDIKAN DAN KUALITAS SDM	TAHUN	
	1994	1995
1. Jumlah SD	63	63
2. Jumlah SMP/Tsanawiyah	8	8
3. Jumlah SLTA	2	2
4. Jumlah Pesantren	23	23
5. Jumlah PT	-	-
6. Jumlah Lulusan PT	TA	186

Sumber : Petugas Statistik Kecamatan Sodonghilir, diolah.

Catatan: TT = Data Tidak Tersedia

Seperti terlihat pada Tabel 3.25, sarana pendidikan di Kecamatan Sodonghilir relatif memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada dan jumlah penduduknya. Apabila dirata-ratakan, jumlah Sekolah Dasar per desa misalnya, di setiap desa rata-rata mempunyai 5,25 buah SD. Namun, jika dilihat dari jumlah SLTP dan SLTA, nampaknya

dapat memberikan gambaran bahwa minat masyarakat untuk melanjutkan anaknya ke tingkatan sekolah yang lebih tinggi masih sangat kurang. Satu hal yang merupakan modal bagi pengembangan kualitas SDM di Kecamatan Sodonghilir adalah antusiasnya masyarakat terhadap pendidikan pesantren. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pesantren yang ada.

Kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan, antara lain dapat dilihat dari banyaknya sarjana yang ada di kecamatan ini. Hingga tahun 1994, jumlah kumulatif lulusan Perguruan Tinggi yang ada di kecamatan ini hanya sebanyak 186 orang (0,36% dari seluruh penduduk kecamatan). Ini menunjukkan bahwa rata-rata kualitas SDM di kecamatan ini masih rendah. Belum lagi, bahwa mereka yang berpredikat sarjana itu, masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan.

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di kecamatan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi aktivitas kehidupan di kecamatan, baik aktivitas ekonomi, pemerintahan, pembangunan, dll. Sehingga lancar tidaknya pembangunan yang dilaksanakan di kecamatan sangat ditentukan oleh keberadaan dan kondisi sarana dan prasarana ini. Dilihat dari aspek ini, Kecamatan Sodonghilir memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel III.26.
Indikator Kondisi Sarana Dan Prasarana
Di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya

INDIKATOR SARANA DAN PRASARANA	TAHUN	
	1994	1995
1. Transportasi		
- Jalan Aspal	34 km	39 km
- Jalan Batu Koral	62 km	57 km
- Kendaraan Umum	Kurang memadai	Kurang Memadai
2. Komunikasi		
- Televisi	Tidak Semua Desa	Tidak Semua Desa
- Radio	Di Semua Desa Ada	Di Semua Desa Ada
- Telephone	Tidak ada	Tidak Ada
- Ratel	Hanya Kecamatan	Hanya Kecamatan
3. Penerangan		
- Listrik	Hanya 3 Desa	Hanya 4 Desa
4. Ekonomi		
- Bank	2 buah	2 buah
- Koperasi	2 buah	2 buah
- Pasar	1 (seminggu 2X)	1 buah (seminggu 2X)
- Warung/Kios	163	163 buah
5. Pemukiman Penduduk		
- Permanen	TA	3.852 buah
- Semi permanen dan panggung	TA	9.702 buah

Sumber : Petugas Statistik Kecamatan Sodonghilir, diolah.

Catatan : TA = Data tidak tersedia

Jalan merupakan urat nadi aktivitas kehidupan di kecamatan dan desa. Prasarana jalan yang memadai akan mendukung lancarnya aktivitas ekonomi dan pembangunan di wilayah tersebut. Dilihat dari aspek ini, Kecamatan Sodonghilir dapat dikategorikan wilayah yang mempunyai prasarana jalan sangat kurang. Di seluruh wilayah kecamatan, hanya ada 34 Km jalan yang diaspal pada tahun 1994 dan 39 Km pada tahun 1995. Sementara jalan lainnya yang menghubungkan antara satu tempat dengan tempat lainnya adalah jalan batu koral dan jalan tanah, bahkan jalan setapak. Kondisi jalan yang kurang memadai ini, disertai pula oleh kurangnya sarana transportasi berupa kendaraan umum penumpang yang

menghubungkan suatu tempat dengan tempat lain, termasuk antara kota kecamatan dengan kota kabupaten.

Sarana dan prasarana komunikasi pun di kecamatan ini sangat terbatas. Di beberapa tempat belum ada televisi, bahkan sarana telephone, hingga kota kecamatan dan kantor kecamatan belum memiliki. Sarana komunikasi jarak jauh yang saat ini digunakan oleh pemerintah wilayah kecamatan adalah Ratel.

Listrik, yang juga merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi aktivitas kehidupan di kecamatan dan di desa-desa, baru masuk ke beberapa desa saja. Bahkan masuknya listrik ke kota kecamatan pun belum lama. Desa lain yang memperoleh penerangan listrik, terutama berasal dari PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), dengan kapasitas yang relatif terbatas.

Sarana dan prasarana yang secara langsung mendukung aktivitas ekonomi, di Kecamatan Sodonghilir sangat terbatas. Lembaga keuangan seperti Bank, selain jumlahnya yang sangat terbatas, juga belum memasyarakat di wilayah ini. Koperasi yang selama ini ada dengan jumlah sangat terbatas pun belum mampu berfungsi sebagai lembaga ekonomi masyarakat. Sementara pasar sebagai tempat interaksi langsung antara konsumen dan produsen, hanya bersifat mingguan (dua kali dalam seminggu, yaitu Hari Minggu dan Rabu), dan berpusat di kota kecamatan. Sementara, interaksi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari banyak menggantungkannya kepada warung-warung dan kios.

Kualitas pemukiman penduduk, yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk sehingga mempunyai simpati dan daya dukung positif terhadap pembangunan, terlihat sangat kurang. Dari seluruh pemukiman yang ada (13.554 rumah) hanya 28,4% (3.852 rumah) saja yang permanen. Sementara yang lainnya berupa panggung dan semi permanen.

Sarana dan prasarana pemerintahan pun terlihat kurang memadai. Kapasitas kantor kecamatan yang ada terlihat kurang, jika dibandingkan dengan jumlah karyawan yang ada. Demikian juga masih ada petugas instansi vertikal di kecamatan yang belum memiliki kantor atau ruangan tersendiri.

Pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah yaitu desa, itu pun sarana dan prasarana pemerintahannya masih kurang. Disamping kualitas, juga kuantitas. Dari 12 desa yang ada, hanya 7 Desa yang memiliki kantor desa dan balai desa. Terdapat 2 desa yang hanya memiliki kantor desa tanpa memiliki balai desa, dan terdapat 3 desa yang mempunyai balai desa tanpa mempunyai kantor desa.

5. Sikap Kekeluargaan Dan Kesetiakawanan Masyarakat

Sikap kekeluargaan dan kesetiakawanan masyarakat, diduga dapat mempengaruhi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini terutama terkait erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan di kecamatan. Mengenai aspek ini, terlihat bahwa beberapa indikator sikap kekeluargaan dan kegotongroyongan serta kesetiakawanan masih melekat kuat pada masyarakat di kecamatan ini.

Dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat sosial (kebutuhan orang banyak), seperti kerja bakti kebersihan lingkungan, kegotongroyongan dalam membuat atau memperbaiki jalan swadaya, kegotong-royongan dalam membuat atau memperbaiki jembatan sederhana, dan lain-lain, masih semarak dilaksanakan oleh masyarakat.

Kegotongroyongan dalam melaksanakan pekerjaan yang merupakan kebutuhan individu juga masih nampak terutama di desa-desa yang jauh dari kota kecamatan.

Apabila salah seorang tetangga hendak membangun atau memindahkan rumahnya, maka masyarakat melalui komando RT/RW-nya serempak

membantunya. Apalagi kegotongroyongan mereka dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan peribadatan, seperti membangun masjid, langgar, madrasah, dan lain-lain.

6. Pemerintahan Dan Sarana Pemerintahan di Kecamatan

Sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan, di Kecamatan Sodonghilir terdapat beberapa instansi, baik vertikal, otonom, maupun BUMN/BUMD. Ada 8 (sembilan) instansi vertikal yang ada di kecamatan ini, yaitu Depdikbud, Departemen Agama, Departemen Penerangan (JUPEN), Departemen Sosial, Statistik, PLKB, Koramil, dan Polsek. Instansi otonom yang ada di Kecamatan Sodonghilir sebanyak 4 instansi, yaitu Dinas P&K, KCD PUK, KCD Pertanian, dan PUSKESMAS. Sedangkan instansi BUMN/BUMD yang ada di kecamatan ini hanya ada BRI, dan BKPD. (Sumber: Monografi Kecamatan Sodonghilir, diolah).

Sarana dan prasarana pemerintahan terlihat kurang memadai. Kantor kecamatan dan kantor-kantor instansi vertikal dan otonom terlihat kurang memadai. Bahkan terdapat instansi yang tidak mempunyai kantor/ruangan. Prasarana desa yang ada di wilayah ini juga kurang memadai. Hanya 7 desa dari 12 desa yang ada, yang memiliki kantor desa lengkap dengan balai desanya. Ada 2 desa yang hanya memiliki kantor desa, dan 3 desa yang hanya memiliki balai desa.

7. Dinamika Pembangunan Dan Faktor Pendukung Lainnya

Dengan modal kondisi wilayah seperti dipaparkan di muka, di Kecamatan Sodonghilir setelah beberapa kurun waktu melaksanakan pembangunan, sesuai dengan rencana pembangunan nasional, nampak terdapat perkembangan yang menggembarakan, meskipun di sisi lain terdapat aspek-aspek yang belum tersentuh secara memuaskan. Bahkan di sisi lain juga tidak dapat dipungkiri terjadinya *backwash effect*, yang baik secara moril maupun material tidak selaras dengan program pembangunan yang dicanangkan.

Kemajuan pembangunan yang berhasil dicapai Kecamatan Sodonghilir terlihat misalnya dari perkembangan sarana dan prasarana seperti perpanjangan prasarana transportasi berupa jalan, adanya listrik meskipun baru dalam wilayah-wilayah tertentu, meningkatnya jumlah sarana pendidikan, serta meningkatnya income percapita masyarakat.

Peningkatan aktivitas pembangunan di Wilayah ini, juga tercermin dari meningkatnya total penerimaan pembangunan yang diterima. Pada tahun 1994 misalnya, bantuan pembangunan dari Pemerintah Pusat sebesar 72 juta rupiah, dan meningkat menjadi 146,605 juta rupiah pada tahun 1995. Sementara bantuan dari Daerah konstan sebesar 5 juta rupiah, dan dana yang berasal dari swadaya masyarakat relatif tetap sebesar 104,3 juta rupiah. Pada dua tahun yang bersangkutan, masyarakat juga secara langsung menerima dana bantuan IDT sebesar 100 juta rupiah tiap tahun.

Dinamika masyarakat juga dipacu oleh program-program pemerintah yang bersasaran untuk meningkatkan prestasi daerah dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan lomba desa misalnya, meskipun hanya dilaksanakan melalui program Kabupaten DT.II namun dirasakan dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan desa-desa di Kecamatan Sodonghilir ini.

J. KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN DATI II TASIKMALAYA

Kecamatan Singaparna mempunyai luas wilayah sekitar 61,05 Kilometer Persegi. Dilihat dari letak geografis, kecamatan ini sangat dekat dari kota kabupaten. Singaparna merupakan jalur transportasi yang sangat hidup.

Kendaraan-kendaraan dengan tujuan kota-kota besar seperti Garut, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, bahkan Daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, melalui persinggahan terminal bis Singaparna. Letak

geografis yang strategis ini yang didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai, menyebabkan Kecamatan Singaparna mempunyai tingkat kemajuan di atas rata-rata kecamatan lainnya.

Pada akhir tahun 1994, jumlah desa di kecamatan ini sebanyak 22 desa (tidak ada yang tergolong kelurahan), dan mempunyai dua perwakilan kecamatan. Semua desa yang ada di Kecamatan Singaparna sudah terklasifikasi desa swasembada. Dilihat dari kondisi daerah, Kecamatan Singaparna dapat dikatakan daerah yang relatif stabil dibandingkan Kecamatan Sodonghilir. Hanya saja, Kecamatan Singaparna mempunyai gunung yang pada tahun 1984 aktif yaitu Gunung Galunggung. Sehingga, akibat meletusnya Gunung Galunggung pada tahun itu, tak sedikit aktivitas ekonomi masyarakat dan aktivitas pembangunan lainnya yang rusak. Namun sekarang ini sudah pulih kembali.

Iklim di kecamatan ini hampir sama dengan iklim secara keseluruhan di Tasikmalaya. Udara yang sedang, disertai curah hujan yang cukup, sehingga mata pencaharian masyarakatnya pun sama dengan mata pencaharian masyarakat secara umum di Kabupaten Tasikmalaya yaitu bertani.

1. Aktivitas Perekonomian Dan Mata-pencaharian Penduduk

Sebagaimana juga Kecamatan lainnya, masyarakat di Kecamatan Singaparna mempunyai aktivitas ekonomi yang bermacam-macam. Ada yang bermata pencaharian tani, pengusaha, peternak, jasa transportasi, serta pegawai negeri dan lain-lain. Secara ringkas struktur matapencaharian penduduk Kecamatan Sodonghilir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27.
Struktur Matapencaharian Penduduk
Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

Mata Pencaharian	Jumlah/Prosen Penduduk	
Bertani	50346	79,4
Industri Rumah Tangga/Kerajinan	8345	13,2
Berdagang	2212	3,5
Jasa Angkutan	169	0,3
Buruh tani	2019	3,2
Jasa lainnya	246	0,4

Sumber: Monografi Kecamatan Singaparna

Dari tabel III.26 di atas, terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Singaparna bekerja sebagai petani (79,4%), termasuk petani pemilik dan buruh tani. Pengusaha yang terdiri dari pengusaha jasa transportasi dan pedagang menempati urutan kedua, yaitu sebesar 13,2%. Sedangkan proporsi paling kecil dari penduduk Kecamatan Singaparna adalah ABRI.

Pertanian yang ada di kecamatan ini bervariasi pula, dari mulai tanaman bahan makanan pokok sampai dengan tanaman-tanaman keras seperti cengkeh, kopi, teh, dll. Di kecamatan ini juga tidak sedikit pertanian yang heterogen dalam suatu lahan. Tidak melakukan spesialisasi, dan market oriented semata. Sementara pengusaha mayoritas adalah sebagai pemilik toko. Dan peternak yang dominan adalah, peternak ayam dan ikan.

2. Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

Dilihat dari aspek kependudukan dan ketenagakerjaan, Kecamatan Singaparna mempunyai beberapa indikator seperti tergambar pada Tabel III.28 berikut ini:

Tabel III.28.
Indikator Kependudukan Dan Ketenagakerjaan
Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

INDIKATOR KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	TAHUN		
	1993	1994	1995
1. Jumlah Penduduk	113.310	113.388	113.366
2. Kepadatan Penduduk	1.856	1.857	1.857
3. Jml. Rumah Tangga (RT)	25.629	21.183	25.397
4. Pddk Per Rumah Tangga	4,42	5,35	4,46
5. Penduduk Usia Dewasa	54.435	TT	TT
6. Penduduk Anak-anak	58.875	TT	TT

Sumber: Monografi Kecamatan Singaparna dan Tasikmalaya Dalam Angka, diolah.

Catatan: TT = Data Tidak Tersedia

Dari Tabel 3.27 di atas terlihat bahwa Kecamatan Singaparna dapat dikategorikan wilayah yang mempunyai jumlah penduduk tinggi dibandingkan kecamatan lainnya di Tasikmalaya. Pada Tahun 1993, jumlah penduduk Kecamatan Singaparna menduduki ranking pertama yaitu sebanyak 113.310 jiwa. Pada Tahun 1994 naik menjadi 113.388 jiwa, dan pada tahun 1995 turun lagi menjadi 113.366 jiwa. Sementara kepadatan penduduknya masih ada di bawah kecamatan-kecamatan lain, namun tetap jauh di atas rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Tasikmalaya. Ini menunjukkan bahwa Singaparna merupakan salah satu kota yang menjadi tempat tujuan urbanisasi dari kecamatan-kecamatan sekitarnya.

Indikator kependudukan lainnya dapat dilihat dari jumlah Rumah Tangga dan banyaknya rata-rata anggota keluarga (penduduk per Rumah Tangga).

Pada Tahun 1993 jumlah Rumah Tangga di Kecamatan Singaparna sebanyak 25.629 dengan rata-rata penduduk per Rumah Tangga sebanyak 4,42 orang. Ini berarti rata-rata tanggungan kepala keluarga di kecamatan ini sebanyak 4,42 orang. Pada Tahun 1994 jumlah rumah tangga menurun menjadi 21.183 dengan rata-rata penduduk per rumah tangga sebanyak 5,35 orang.

Sementara pada tahun 1995 jumlah rumahtangga meningkat lagi menjadi 25.397 dengan rata-rata tanggungan per rumah tangga sebanyak 4,46 orang. Dilihat dari fluktuasinya jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dan rata-rata penduduk per rumah tangga, dapat diduga bahwa diantara penduduk Kecamatan Singaparna ada penduduk yang tidak tetap. Pergi ke Kecamatan ini hanya sekedar mencari nafkah atau tujuan lainnya, tidak bermaksud untuk menetap di kecamatan ini.

Dilihat dari struktur penduduknya, secara kasar dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Singaparna tergolong usia anak-anak. Dari sejumlah 113.310 jiwa penduduk pada tahun 1993, sebanyak 58.875 orang tergolong usia anak-anak. Sedangkan sisanya sebanyak 54.435 orang termasuk kategori usia dewasa. Hal ini dapat dimaklumi karena di kecamatan ini terdapat sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren yang banyak dituju oleh masyarakat/penduduk di kecamatan lainnya di Tasikmalaya.

3. Pendidikan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pendidikan yang secara langsung mempengaruhi kualitas SDM, seperti disebutkan di atas, merupakan salah satu faktor yang besar pengaruhnya terhadap kelancaran terselenggaranya pembangunan di kecamatan, di samping sumber daya alam dan sumber dana. Dilihat dari dimensi ini, Kecamatan Singaparna memiliki beberapa indikator pendidikan sebagai penentu kualitas SDM sebagaimana terlihat pada Tabel III.29 berikut ini:

Tabel III.29.
Indikator Pendidikan dan Kualitas SDM
Di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

INDIKATOR PENDIDIKAN DAN KUALITAS SDM	TAHUN	
	1994	1995
1. Penduduk Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD)	1.430	1.445
2. SD : * Jml Sekolah	86	57
* Jml Penduduk	22.195	22.190
3. SLTP : * Jml Sekolah	9	13
* Jml Penduduk	26.007	26.147
4. SLTA : * Jml Sekolah	9	8
* Jml Penduduk	44.152	44.086
5. PT : * Jml PT	-	-
* Jml Penduduk	812	807
6. Pesantren		
* Jml Pesantren	35	35

Sumber : Monografi Kecamatan Singaparna, diolah.

Catatan: TT = Data Tidak Tersedia

Seperti terlihat pada Tabel 3.29, sarana pendidikan di Kecamatan Singaparna relatif memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada dan jumlah penduduknya. Jumlah SD, SLTP, dan SLTA baik umum maupun agama (sekolah islam) relatif banyak. Demikian juga, pendidikan penduduknya relatif lebih maju dibandingkan kecamatan lainnya, seperti Sodonghilir. Penduduk yang mempunyai predikat lulusan perguruan tinggi saja (sarjana) mencapai 0,7% dari seluruh penduduk Kecamatan Singaparna. Dan mayoritas penduduk Singaparna berpendidikan SLTA (38,9%).

Suasana religius di Kecamatan Singaparna, juga sama seperti Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya. Pada kalangan tertentu, masyarakat memilih pendidikan pesantren sebagai prioritas. Hal ini didukung oleh banyaknya jumlah pesantren di kecamatan ini.

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di kecamatan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi aktivitas kehidupan di kecamatan, baik aktivitas ekonomi, pemerintahan, pembangunan, dll. Sehingga lancar tidaknya pembangunan yang dilaksanakan di kecamatan sangat ditentukan oleh keberadaan dan kondisi sarana dan prasarana ini. Dilihat dari aspek ini, Kecamatan Singaparna memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 3.30.
Indikator Kondisi Sarana dan Prasarana
Di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

INDIKATOR SARANA DAN PRASARANA	TAHUN	
	1994	1995
1. Transportasi		
- Jalan Aspal	77 km	77 km
- Jalan Diperkeras	65 km	65 km
- Jalan Tanah	35 km	35 km
- Kendaraan Umum	Memadai	Memadai
2. Komunikasi		
- Televisi	Memadai	Memadai
- Radio	Memadai	Memadai
- Telephone	Ada	Ada
- Telephone Umum	13 buah	13 buah
3. Penerangan		
- Listrik	Memadai	Memadai
4. Ekonomi		
- Bank	5 buah	5 buah
- Koperasi	12 buah	12 buah
- Pasar Selapan	3 buah	3 buah
- Pasar Permanen	2 buah	2 buah
- Pasar tanpa bangunan	1 buah	1 buah
- Warung/Kios	967 buah	967 buah
- Stasiun Bus	1 buah	1 buah
- Stasiun Opler	1 buah	1 buah
5. Pemukiman Penduduk		
- Permanen	TT	5.979 buah
- Semi permanen dan panggung	TT	19.423 buah

Sumber : Monografi Kecamatan Singaparna, diolah.

Catatan: TT = Data tidak tersedia

Jalan merupakan urat nadi aktivitas kehidupan di kecamatan dan desa. Prasarana jalan yang memadai akan mendukung lancarnya aktivitas ekonomi dan pembangunan di wilayah tersebut. Dilihat dari aspek ini, Kecamatan Singaparna dapat dikategorikan wilayah yang mempunyai prasarana jalan cukup memadai. Di seluruh wilayah kecamatan yang luasnya 61,05 Km persegi, mempunyai jalan aspal 77 Km, jalan diperkeras 65 Km, dan jalan tanah 35 Km. Kondisi jalan yang cukup memadai ini dapat mendukung aktivitas pembangunan yang dilaksanakan

Sarana dan prasarana komunikasi pun di kecamatan ini cukup memadai. Hampir ke seluruh wilayah kecamatan, televisi dan telephone telah masuk. Sarana komunikasi yang relatif baik ini, secara langsung dapat memperlancar arus informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Demikian juga listrik, yang juga merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi aktivitas kehidupan di kecamatan dan di desa-desa, sudah sejak lama masuk ke Wilayah Kecamatan Singaparna.

Sarana dan prasarana yang secara langsung mendukung aktivitas ekonomi, di Kecamatan Singaparna cukup memadai pula. Lembaga keuangan seperti Bank dan koperasi cukup untuk menampung kegiatan ekonomi masyarakat kecamatan ini. Sementara pasar sebagai tempat interaksi langsung antara konsumen dan produsen, di kecamatan ini relatif lengkap, mulai dari pasar selapan, pasar permanen sampai pasar yang tidak mempunyai bangunan permanen ada di kecamatan ini, disamping juga jumlah toko, kios, dan warung-warung yang relatif banyak dengan omset penjualan yang cukup besar.

Selain prasarana dan sarana ekonomi tersebut, Kecamatan Singaparna juga memiliki terminal bus dan terminal oplet yang cukup memadai, sehingga kota ini merupakan salah satu sentral transportasi di Kabupaten Tasikmalaya. Terminal Bus Singaparna merupakan persinggahan bus-bus dari dan menuju ke Tasikmalaya, Ciamis, Jawa Tengah, Jawa Timur, Garut, Bandung, dan Kota Metropolitan Jakarta.

5. Sikap Kekeluargaan Dan Kesetiakawanan Masyarakat

Sikap kekeluargaan dan kesetiakawanan masyarakat di Kecamatan Singaparna dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Di tempat-tempat yang masih jauh dari kota kecamatan, nampaknya sikap kekeluargaan dan kegotongroyongan masyarakat masih kuat, baik dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk kepentingan sosial, keagamaan, maupun kegiatan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan di kotanya, nampaknya dalam aktivitas yang bersifat individu, sikap kegotongroyongan dan kekeluargaan ini sudah berkurang. Namun, dalam hal-hal yang bersifat sosial dan keagamaan masih tetap melekat pada masyarakat.

6. Pemerintahan Dan Sarana Pemerintahan di Kecamatan

Sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan, di Kecamatan Singaparna terdapat beberapa instansi, baik vertikal, otonom, maupun BUMN/BUMD. Ada 9 (sembilan) instansi vertikal yang ada di kecamatan ini, yaitu Depdikbud, Departemen Agama, Departemen Penerangan (JUPEN), Departemen Sosial, Statistik, PLKB, Departemen Transmigrasi dan PPH, Koramil, dan Polsektif.

Instansi otonom yang ada di kecamatan Singaparna, juga cukup banyak. Ada 10 instansi yang ada, yaitu Dinas P & K, KCD PUK, KCD Pertanian, KCD Peternakn, KCD Perikanan, PUSKESMAS, Pengamat PU, DLLAJ, Dinas Pasar, dan Dipenda. Sementara instansi BUMN/BUMD yang ada di kecamatan ini berjumlah 8 BUMN, yaitu BRI, Pegadaian, PT. TELKOM, PLN, Pos dan Giro, Bank Pasar, BKPD, dan PDAM (Sumber: Monografi Kecamatan Singaparna, diolah).

Sarana dan prasarana pemerintahan terlihat cukup memadai. Semua desa yang ada di kecamatan ini telah memiliki kantor desa dan balai desa. Hanya saja, berdasarkan pengamatan kantor kecamatan yang berlokasi dekat terminal bus, sedang direnovasi kecil-kecilan. Sehingga untuk saat ini

nampaknya aktivitas kecamatan masih kurang terkonsentrasi karena kantor kecamatan yang kurang memadai itu.

7. Dinamika Pembangunan Dan Faktor Pendukung Lainnya

Dengan modal kondisi wilayah seperti dipaparkan di muka, di Kecamatan Singaparna setelah beberapa kurun waktu melaksanakan pembangunan, sesuai dengan rencana pembangunan nasional, nampak terdapat perkembangan yang menggembirakan, meskipun di sisi lain terdapat aspek-aspek yang belum tersentuh secara memuaskan. Bahkan di sisi lain juga tidak dapat dipungkiri terjadinya *backwash effect*, yang baik secara moral maupun material tidak selaras dengan program pembangunan yang dicanangkan.

Kemajuan pembangunan yang berhasil dicapai Kecamatan Singaparna terlihat misalnya dari perkembangan kehidupan dan keramaian wilayah, yang secara kongkrit dapat dilihat dari terus berlanjutnya pembangunan di wilayah ini. Misalnya, pada tahun 1994 proyek yang dilakukan sebanyak 26 proyek dengan menghabiskan biaya 639 juta rupiah, dan pada tahun 1995 sebanyak 41 proyek dengan biaya 296 juta rupiah.

Dinamika masyarakat juga dipacu oleh program-program pemerintah yang bersasaran untuk meningkatkan prestasi daerah dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan lomba desa dan kegiatan PKK misalnya, dirasakan dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan desa-desa di Kecamatan Singaparna.

K. KECAMATAN CIAMIS KOTA KABUPATEN DATI II CIAMIS

Kecamatan Ciamis Kota mempunyai luas wilayah 7.515.825 Ha. Secara geografis sesuai namanya Kecamatan Ciamis Kota terletak di pusat kota Ciamis yang berdekatan dengan kota Kabupaten. Ciamis Kota merupakan jalur transportasi yang sangat hidup, kendaraan-kendaraan

dengan tujuan kota-kota besar seperti Tasikmalaya Garut, Bandung bahkan ke kota-kota di Jawa Tengah.

Kendaraan-kendaraan dari Jakarta atau Bandung yang menuju ke Jawa Tengah lewat jalur selatan, pasti melewati Ciamis Kota. Letak geografis yang strategis ini didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai, menyebabkan kecamatan Ciamis Kota mempunyai tingkat kemajuan di atas rata-rata kecamatan lainnya sehingga berhasil menyanggah Kecamatan teladan.

1. Kependudukan

Pada akhir tahun 1995 jumlah penduduk Kecamatan Ciamis Kota adalah 108.580 orang sedangkan jumlah tenaga kerja di Kecamatan ini adalah 64220 orang.

2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Ciamis kota ini sangat beragam terutama adalah pertanian, perkebunan, peternakan, perindustrian, usaha pemberi jasa dan perdagangan.

3. Pendidikan

Komposisi jumlah sekolah/prasarana pendidikan yang ada di Kecamatan Ciamis Kota adalah sebagai berikut:

SD	64 buah
SMP	10 buah
SLTA	10 buah
Pesantren	9 buah

4. Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan pada tahun 1995

- Tidak tamat SD	19567
- SD	48452
- SMP	19656
- SLTA	14808
- Perguruan tinggi	3848

5. Pemerintah dan sarana pemerintahan di Kecamatan Ciamis kota

Sebagai motor penggerak pembangunan di Kecamatan Ciamis Kota terdapat beberapa instansi vertikal maupun instansi otonom. Ada 9 instansi vertikal di Kecamatan Ciamis kota ini yaitu Depdikbud, Departemen Agama, Departemen Penerangan (Jupen), Departemen Sosial, Statistik, Dep Transmigrasi. Sedangkan instansi otonom yang ada yaitu dinas P & K, Puskesmas, Dinas Pasar, Dipenda, dan DLLAJ.

L. KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN DATI II CIAMIS

Kecamatan Cipaku mempunyai luas wilayah 6.610.432 Ha. Secara geografis Kecamatan Cipaku terletak tidak jauh dari pusat Kabupaten yang berjarak ± Km dari pusat kota Ciamis.

Kecamatan Cipaku merupakan jalur transportasi antara Ciamis ke arah Kawali yang dapat berhubungan langsung dengan kota Kuningan, Cirebon dan kota lain di Jawa Tengah.

1. Kependudukan

Jumlah penduduk pada akhir tahun 1985 di Kecamatan Cipaku adalah 59.634 orang. Sedangkan jumlah tenaga kerja 3.900 orang dari angkatan kerja di Kecamatan tersebut sebanyak 27.286 orang.

2. Mata Pencaharian

Komposisi mata pencaharian di Kecamatan Cipaku pada akhir tahun 1995 adalah sebagai berikut:

PNS dan ABRI	751 orang
Buruh petani dan pedagang	21.450 orang

3. Pendidikan

Komposisi sekolah/prasarana pendidikan pada akhir tahun 1995 adalah sebagai berikut:

SD + MI	57 buah
SMP + Tsanawiyah	5 buah
SLTA	1 buah
Pesantren	18 buah

4. Komposisi Penduduk berdasarkan pendidikan pada tahun 1995

Tidak tamat SD	784 orang
SD	28.862 orang
SMP	5.387 orang
Perguruan tinggi	354 orang

5. Pemerintahan dan Sarana Pemerintahan di Kecamatan Cipaku

Sebagai pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Cipaku terdapat beberapa instansi vertikal maupun otonomi. Ada 7 instansi vertikal yang ada yaitu, Depdikbud, Departemen Agama, Departemen Penerangan (Jupen) Departemen Sosial, Statistik, PBB, Departemen Transmigrasi dan PPH. Sedangkan instansi otonom yang ada di Kecamatan ini adalah Dinas P & K, Puskesmas, Dinas Pasar, Dipenda dan DLLAJ.

M. KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN DATI II KUNINGAN

Pemerintah Daerah DT.II Kuningan membagi daerahnya dalam 3 (tiga) wilayah daerah pembangunan. Pembagian itu didasarkan pada kondisi masing-masing wilayah sebagai berikut:

1. Wilayah "A" termasuk ke dalam Potensi pertumbuhan kondisi segera, yang meliputi Kecamatan Kuningan, Kadugede, Cilimus, Mandirancan, Jalaksana dan Garawangi. Daerah ini relatif terbaik untuk mengembangkan pertanian, terutama padi, Industri klompemerter dan pariwisata.
2. Wilayah "B" termasuk ke dalam Potensi pertumbuhan masa depan, terdiri atas kecamatan : Ciwaru, Cibingbin, Ciawigebang dan Lebak Wangi. Terhadap wilayah ini prioritas diberikan pada tanaman palawija.
3. Wilayah "C" termasuk klasifikasi daerah potensi pertumbuhan rendah. maka prioritas diarahkan pada tanaman palawija dan usaha pengembangan industri ekstraktif rakyat. Yang tercakup dalam Wilayah pembangunan ini adalah kecamatan: Luragung, Ciniru, Subang, Selajambe dan Cidahu.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, Kecamatan Kuningan yang mempunyai luas wilayah 73 km², merupakan kelompok Wilayah Pembangunan "A" yang berpotensi pertumbuhan segera. Kecamatan ini merupakan wilayah yang terdekat dari pusat pemerintahan Kabupaten Kuningan.

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Kuningan yang meliputi 13 desa menurut data monografi kecamatan 1995 adalah 73.580 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga 16.368 KK. Dilihat dari kepadatan penduduknya, Kecamatan ini merupakan kecamatan yang terpadat.

Berdasarkan jenis kelaminnya, penduduk di kecamatan ini mempunyai komposisi; Laki-laki 36.367 orang dan perempuan 37.213 orang. Sedangkan penduduk menurut kewarganegaraan terdiri dari WNI Laki-laki 6.610 orang; WNI Perempuan 6.710 orang; WNA Laki-laki 22 orang; Dan WNA Perempuan 30 Orang.

2. Pendidikan

Bila ditinjau dari tingkat pendidikan secara umum dari 21.594 jumlah penduduk kabupaten Kuningan, 16.316 merupakan penduduk yang melek huruf latin dan angka. Hal ini berarti 75.56% penduduk kecamatan Kuningan Kabupaten DT II Kuningan sudah bisa dikatakan maju dalam hal pendidikan.

3. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Kecamatan Kuningan Kabupaten DT.II Kuningan, mempunyai 13 buah Balai Desa/Kelurahan dan 13 Kantor Desa/Kelurahan. Sedangkan tanah kas Desa/Area; lainnya untuk kepentingan Desa/Kelurahan seluas: 12.453 Ha.

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terutama Tingkat Kecamatan bersumber dari dana: APBN, INPRES, APBD I, APBD II, pada tahun 1995 dan ini berjumlah total Rp. 28.000.000,-

Instansi Vertikal yang berada di wilayah kecamatan ini terdiri dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pengairan, Perikanan, dan Departemen Agama/KUA. Instansi Otonom yang berada di Wilayah Kecamatan ini terdiri dari: Kantor Cabang Dinas Pertanian, Kantor Cabang Dinas Sosial, Kantor Cabang Dinas Perkebunan, Departemen Penerangan, dan Departemen Penerangan. Sedangkan Instansi BUMN/BUMD yang ada di Kecamatan Kuningan adalah PDAM dan BKPD.

4. Sarana dan Prasarana Pengairan Dan Perhubungan Dan Komunikasi

Prasarana Pengairan yang ada di Kecamatan Kuningan terdiri dari waduk, dam, kincir air, pompa air, air terjun dan sungai. Sedangkan prasarana/sarana pengangkutan dan komunikasi terdiri dari: Lalulintas darat melalui jalan Aspal 77,710 Km, Jalan Hot Mix (diperkeras) 39,960 Km, Jalan Tanah 2,750 Km, dan jembatan 42 buah dengan panjang jalan 404,9 m.

Sedangkan sarana dan prasarana komunikasi yang ada di Kecamatan Kuningan terdiri dari TV Umum 5969 buah, Telepon umum 23 buah, Kantor Pos Pembantu 2 buah, dan Pemancar Radio Swasta 2 buah.

5. Sarana dan Prasarana Perekonomian

Prasarana/Sarana Perekonomian terdiri dari koperasi, koperasi simpan pinjam, Koperasi Unit Desa/KUD, BKK, Koperasi Produksi/Konsumsi, pasar selapan/umum, fasilitas perkreditan (Bimas/Inmas, KIK, KMKP, Kredit Canda Kulak)

6. Prasarana dan Sarana Sosial/Budaya

- a. Prasaranan Pendidikan terdiri dari: T.K 9 buah, S.D Negeri 26 buah, S.D Inpres 27 buah, Madrasah/Ibtidaiyah Negeri 3 buah, SLTP Negeri 7 buah, SMTA 9 buah, Perguruan Tinggi Swasta 1 buah, dan Kursus-kursus keterampilan 5 buah.
- b. Sarana dan Prasarana Pariwisata; Tempat Rekreasi terdiri dari: Taman 2 buah, Tempat Pertunjukan Wayang/kesenian Daerah 4 buah, dan Toko Cendera mata 2 buah.
- c. Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Kesenian terdiri dari: Jumlah perkumpulan sanggara Kesenian 63, Jumlah anggota Budayawan 32 orang, Jumlah Anggota Seniman 63 orang, Bioskop 6 buah, Penginapan 8 buah, dan Restoran 5 buah.

7. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kecamatan Kuningan terdiri dari: Rumah Sakit Umum Pemerintah 1 buah, RSUD Swasta 1 buah, Rumah Bersalin/BKIA 9 buah, PUSKESMAS 3 buah, Praktek Dokter 21 Orang, Dukun khitan/sunat 2 orang, Dukun Bayi/Parji 26 orang, Sanatorium 4 buah, Apotik/Depo Obat 12 buah, Panti Pijat 2 buah, dan Posko KB 12 buah.

N. KECAMATAN LURAGUNG

Kecamatan Luragung termasuk kedalam kategori Wilayah Pembangunan "C" yaitu daerah yang potensi pertumbuhannya rendah, oleh karena itu prioritas perekonomian diarahkan pada pertanian dan industri ekstraktif rakyat.

Keadaan kependudukan di wilayah Kecamatan Luragung pada akhir tahun 1994 adalah: 66.821 orang dengan perbandingan laki-laki: 33.060 orang dan wanita: 33.761 orang, dengan jumlah Kepala Keluarga: 14.119 kepala keluarga.

1. Sarana dan Prasarana

Sarana Pendidikan Agama Islam terdiri dari: Madrasah Ibtidaiyah 3 buah, Madrasah Aliyah 1 buah, Madrasah Tsanawiyah 1 buah, pondok pesantren 3 buah, dan pengajian 49 buah.

2. Sikap Kekeluargaan Dan Kesetiakawanan Masyarakat

Sikap kekeluargaan dan kesetiakawanan masyarakat di Kecamatan Luragung, terlihat baik. Dalam kegiatan Politik dan Keamanan misalnya, walaupun Pemerintah Daerah terutama Bupati dan jajarannya memegang kendali sebagai pihak pengawas dan pengkoordinir, tapi masyarakat juga ikut serta dalam menjaga ketertiban dan keamanannya.

3. Dinamika Pembangunan Di Kecamatan

Untuk meningkatkan pembangunan di Kecamatan Luragung, pemerintah masing-masing Kecamatan selalu mengevaluasi hasil kerja setiap tahunnya baik itu menyangkut perangkat kecamatannya sendiri maupun perangkat Desa, selanjutnya mereka inilah akan memegang kendali dalam kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan bahkan sampai ke tingkat desanya. Hasil-hasil atau kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 1994 sampai 1995 yang terlihat dalam aspek:

a. Bidang Pemerintahan

- Bidang Politik
- Persatuan dan kesatuan Bangsa
- Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
- Pemerintahan Desa/Kelurahan
- Pembinaan Aparatur
- Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
- Pembinaan Transmigrasi

b. Bidang Pembangunan

- Peningkatan Produksi Pangan
- Sukses Program INPRES
- Sukses Program Koperasi
- Sukses Kependudukan dan Program Keluarga Berencana
- Sukses Pelaksanaan KEPRES 29 Th.1984.
- Sukses Pemasyarakatan P4
- Sukses Bidang Agraria/Pertanahan
- Sukses peningkatan Ekspor Komoditi Non Migas

c. Bidang Kemasyarakatan

- PKK
- LKMD
- Pembinaan bidang Kemasyarakat
- Pembinaan Agama
- Pembangunan Peribadatan Selain Agama Islam

- Kegoitong Royongan pengumpulan Zakat Fitrah
- Pembangunan Sarana pendidikan Umum
- Kegiatan dan Pembinaan Bidang Kesenian
- Pembinaan Generasi Muda, Pramuka dan Olah Raga.

Kegiatan kegiatan tersebut di atas sudah menghasilkan dan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dicapai dengan adanya kerjasama yang baik dengan semua pihak baik antara unsur Muspida, Dinas Instansi Terkait, Kecamatan maupun dengan Unsur Aparatur Desa itu sendiri yang disertai partisipasi aktif Masyarakat yang secara bergotong royong disetiap bidang kegiatan yang telah diprogramkan disamping itu tetap mendapat bimbingan dan petunjuk serta pengawasan dari Pemerintah tingkat Kabupaten.

Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan Luragung pada kurun waktu 1994 - 1995 terlihat ada kenaikan atau peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya menuju kearah pembangunan yang lebih baik. Unsur utama yang menyebabkan hal ini adalah berkat adanya gotong royong dan partisipasi Masyarakat.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, Kecamatan Kuningan yang mempunyai luas wilayah 73 km², merupakan kelompok Wilayah Pembangunan "A" yang berpotensi pertumbuhan segera. Kecamatan ini merupakan wilayah yang terdekat dari pusat pemerintahan Kabupaten Kuningan.

1. Kependudukan

Jumlah penduduk kecamatan kuningan yang meliputi 13 desa menurut data monografi kecamatan 1995 adalah 73.580 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 16.368 KK, tersebar di 36 desa, dengan luas wilayahnya 73 km² dan kecamatan ini merupakan kecamatan yang terpadat dan terdekat dari pusat pemerintahan Kabupaten Kuningan, kecamatan ini merupakan kelompok Wilayah Pembangunan "A" yang berpotensi pertumbuhan segera.

Sedangkan data penduduk menurut jenis kelaminnya adalah:

Laki-laki : 36.367 orang

Perempuan : 37.213 orang.

Sedangkan data penduduk menurut Kewarganegaraan adalah:

WNI Laki-laki : 6.610 orang

WNI Perempuan : 6.710 orang

WNA Laki-laki : 22 orang

WNA Perempuan : 30 Orang

Data penduduk menurut agama di Kecamatan Kuningan Kab.DT.II Kuningan adalah:

Islam : 70.153 Orang

Katholik : 1.168 Orang

Protestan : 1.909 Orang

Hindu : 50 Orang

Budha : 346 Orang

Penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME tidak ada

Bila ditinjau dari tingkat pendidikan secara umum dari 21.594 jumlah penduduk Kab. Kuningan ,16.316 merupakan penduduk yang melek huruf latin dan angka, hal ini berarti 75.56 % penduduk kecamatan Kuningan Kab.DT II Kuningan sudah bisa dikatakan maju dalam hal pendidikan.

O. KECAMATAN SUKAHAJI

Luas wilayah Kecamatan Sukahaji 56,49 km², dengan ketinggian 406 m dari permukaan laut. Suhu minimum/maksimum 24° C dan 29° C. Jumlah desa di Kecamatan Sukahaji sebanyak 20 desa. Jarak dari ibukota Kecamatan Sukahaji ke ibukota Kabupaten sejauh 6 km. Kondisi jalan yang baik di kecamatan ini, memperlancar hubungan transportasi antara kecamatan dengan ibukota kabupaten.

1. Kependudukan

Penduduk Kecamatan Sukahaji berjumlah 49.230 orang yang terdiri dari 24.399 laki-laki dan 24.831 perempuan. Dilihat dari struktur usianya, penduduk di kedua kecamatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31.
Struktur Umur Penduduk
Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka

USIA	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
0 - 5	4.444
6 - 16	8.138
17 - 25	5.889
26 - 55	14.399
55 ke atas	16.360

Sumber : Monografi Kecamatan Sukahaji

2. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk Kecamatan Sukahaji mempunyai mata pencaharian beraneka macam, dengan penduduk mayoritas bermata pencaharian tani. Secara rinci jumlah penduduk Kecamatan Sukahaji berdasarkan mata pencaharian tersebut adalah: Petani berjumlah: 7982 orang, pengusaha industri/wiraswasta 187 orang, pedagang 945 orang, dan pegawai negeri kurang lebih 253 orang.

Luas lahan sawah yang digarap para petani di Kecamatan Sukahaji pada tahun 1995 adalah 4.119 ha dengan produksi 23.117 ton, atau rata-rata produksi per hektar adalah 56,12 kwintal.

3. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Kantor kecamatan Sukahaji berdiri di atas tanah seluas 2107 m², dengan luas bangunan 274 m², dan jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 23 orang. Dilihat dari kondisi perlengkapan kantor yang menunjang

pelaksanaan kerja di kantor Kecamatan Sukahaji, masih sederhana dan belum dilengkapi oleh peralatan teknologi komputer Sarana komunikasi/ telephone sudah ada di depan kantor Kecamatan, dan keberadaannya masih bersifat untuk umum.

4. Sarana dan Prasarana Perhubungan

Kualitas jalan dari arah Majalengka Kota menuju Kecamatan Sukahaji pada umumnya baik dan cukup luas. Prasarana yang terdapat di Kecamatan Sukahaji 100% melalui lalu lintas darat, dengan kondisi jalan aspal sepanjang 27 km, jalan diperkeras 38 km dan jalan tanah 23 km. Adapun panjang jalan kabupaten yaitu 27 km dan jalan desa 59 km. Jalan di Kecamatan Sukahaji mempunyai jumlah jembatan yang melengkapi sarana transportasi sebanyak 50 buah. Jumlah kendaraan/angkutan yang menunjang sarana transportasi di Kecamatan ini juga cukup baik, banyak dan mudah diperoleh.

5. Sarana dan Prasarana Ekonomi

Di Kecamatan Sukahaji terdapat 24 buah koperasi dengan bentuk koperasi simpan pinjam 23 buah dan BKK 1 buah. Jumlah pasar, baru terdapat 1 buah dengan jenis pasar umum. Jumlah perusahaan yang ada di Kecamatan Sukahaji sebanyak 6 buah industri besar dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 400 orang, dan 2 buah industri kecil dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 40 orang.

Dalam hal fasilitas perkreditan, jumlah orang yang menerima kredit investasi kecil (KIK) sebanyak 441 orang, dan jumlah yang penerima Kredit Modal Kerja Permanen sebanyak 12 orang.

6. Sarana dan Prasarana Sosial/Budaya

Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Sukahaji terdiri dari; TK sebanyak 11 buah dengan daya tampung murid 200 orang, dan jumlah pengajar 21 orang. Jumlah SD sebanyak 56 buah, dengan daya tampung

murid 9445 orang, dan pengajar 433 orang. Jumlah SLTP sebanyak 2 buah, dengan daya tampung 826 murid, dan pengajar 36 orang. SLTA belum terdapat di kecamatan Sukahaji.

Sarana ibadah yang di kecamatan Sukahaji hanyalah tempat ibadah bagi orang Islam, yaitu masjid sebanyak 2 buah, dan surau/mushola 142 buah.

Sarana kesehatan, berupa Puskesmas terdapat 5 buah, dengan tenaga bantuan dokter sebanyak 2 orang, bidan 5 orang dan perawat 6 orang.

7. Sikap Kekeluargaan Dan Kesetiakawanan Masyarakat

Sikap kekeluargaan masyarakat di Kecamatan Sukahaji diantaranya dapat dilihat dari adanya gotong royong masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana seperti bangunan sekolah, masjid, jalan desa, dll. Selain itu keberadaan gotong royong masyarakat di Kecamatan Sukahaji dapat dilihat pula dari adanya bulan Bhakti LKMD.

8. Dinamika Pembangunan Di Kecamatan

a. Pembangunan pada Tahun-tahun Tertentu

Di Kecamatan Sukahaji pada periode tahun 1993/1994 pembangunan diutamakan pada rehabilitasi Sekolah Dasar dan masjid. Pembangunan ini selain dibiayai oleh pemerintah, juga ditunjang pula oleh Swadaya Gotong Royong Masyarakat.

b. Kemitraan Antara Masyarakat dan Pemerintah

Di dalam menunjang program-program pemerintahan, keikutsertaan dan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah cukup baik, hal ini dapat terlihat dari beberapa kegiatan diantaranya adalah adanya pembinaan Ideologi Negara melalui pemasyarakatan P-4. Kegiatan tersebut dilakukan melalui simulasi P-4 di seluruh desa Kecamatan

Sukahaji yang dikuti oleh 115 orang yang dibagi-bagi menjadi 60 kelompok.

Dari hasil pembinaan ini kemajuan yang nampak dari masyarakat adalah meningkatnya kesadaran mereka dalam pembayaran pajak, bermusyawah, dll.

Untuk menjaga stabilitas pemerintahan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat, selalu diupayakan menambah dan membina Anggota Pertahanan Sipil. Pada saat ini di Kecamatan Sukahaji terdapat 208 orang anggota HANSIP dan 116 Pos Kamling.

c. Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemerintah

Partisipasi masyarakat di kecamatan Sukahaji dalam menunjang program pemerintah di bidang Keluarga Berencana, cukup menggembarakan, yaitu kurang lebih 84,24% dari masyarakat di Kecamatan Sukahaji telah menjadi anggota KB.

Dalam menunjang administrasi kependudukan, dari keseluruhan jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Sukahaji, belum menunjukkan hal yang menggembarakan, karena kalau dilihat dari jumlah wajib KTP, baru terpenuhi sebesar 50,8%. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat.

Dilihat dari pelaksanaan program K-3, sejak mulai dicanangkannya K-3, selalu diupayakan usaha peningkatan kesadaran masyarakat, dan penteladanan aparat pemerintah sebagai contoh bagi masyarakat. Masyarakat selalu diikutsertakan dalam berbagai lomba K-3, dan pernah meraih juara ke tiga dalam suatu perlombaan.

P. KECAMATAN MAJALENGKA KOTA

Kecamatan Majalengka Kota berada di pusat kota Kabupaten Majalengka. Luas wilayah Kecamatan Majalengka Kota adalah 57 km², berada di atas ketinggian 100 m dari permukaan laut. Suhunya rata-rata 28° C. Sedangkan jumlah desa/kelurahan di kecamatan ini sebanyak 16 desa dan 9 kelurahan.

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Majalengka Kota sebanyak 59.851 orang yang terdiri dari 29.766 laki-laki dan 30.085 perempuan. Struktur usia penduduk di kecamatan ini dapat diikuti pada Tabel 3.32 berikut:

Tabel 3.32
Struktur Umur Penduduk
Kecamatan Majalengka Kota Kabupaten Majalengka

USIA	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
0 - 5	8.549
6 - 16	12.236
17 - 25	9.996
26 - 55	21.809
55 ke atas	7.261

Sumber: Monografi Kecamatan Majalengka Kota

2 Matapencaharian Penduduk

bagian besar penduduk Kecamatan Majalengka Kota bermata-encaharian tani, yaitu sebanyak 3543 orang. Sementara penduduk yang bermatapencaharian sebagai pengusaha industri atau wirasasta 343 orang dan pedagang 1728 orang.

Luas panen sawah yang digarap petani di kecamatan ini pada tahun 1995 adalah 2.830 ha dengan produksi padinya 16.144 ton, atau rata-rata produksi per hektar 57,05 kwintal.

3. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Kantor kecamatan Majalengka Kota berdiri di atas tanah seluas 1668 m², dan luas bangunan 280 m². Keadaan/kondisi kantor Kecamatan Majalengka Kota masih sederhana, belum ada komputer, namun sudah ada telephone.

Kecamatan Majalengka terdiri dari 6 desa dan 8 kelurahan. Jumlah instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan Majalengka terdiri dari 5 (lima) *instansi vertikal* yaitu Depdikbud, KUA, Jupen, Statistik dan KB; 5 (lima) *instansi otonom* yaitu Dinas P dan K, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, dan Dinas Kesehatan; serta 4 (empat) *instansi BUMN/BUMD* yaitu BPKD, BRI, BPD, dan PDAM.

4. Sarana dan Prasarana Perhubungan

Prasarana dan sarana pengangkutan yang terdapat di Kecamatan Majalengka, 100% melalui darat, dengan kondisi jalan aspal sepanjang 7,5 km, jalan diperkeras 20,8 km dan jalan tanah 61,3 km². Adapun panjang jalan kabupaten yaitu 27 km dan jalan desa 59 km. Jumlah jembatan yang melengkapi sarana transportasi di Kecamatan Sukahaji ada 50 buah.

5. Sarana dan Prasarana Ekonomi

Koperasi yang terdapat di Kecamatan Majalengka terdapat 16 buah dengan bentuk Koperasi Unit Desa 7 buah, BKK 3 buah serta Badan-badan Kredit ada 6 buah. (Jenis Koperasi Produksi, Koperasi Konsumsi dan Koperasi lainnya belum ada).

Jumlah lembaga keuangan lainnya yang terdapat di Kecamatan Majalengka Kota ada 6 buah Bank, dan 6 buah Lumbung Desa. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, telah tersedia pasar yang berjumlah 2 buah, dengan sifat sebagai pasar umum.

Untuk memudahkan komunikasi telah tersedia 18 buah telepon umum.

Jumlah perusahaan yang menunjang sistem perekonomian yang ada di Kecamatan Majalengka Kota terdapat 11 buah industri kecil dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 225 orang. Dalam hal fasilitas perkreditan, terdapat bentuk fasilitas Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan Kredit Canda Kulak (KCK).

6. Sarana dan Prasana Sosial/Budaya

Sarana pendidikan Pendidikan meliputi Taman Kanak-kanak sebanyak 17 buah dengan daya tampung murid 546 orang, dan jumlah pengajar 24 orang. Jumlah SDN sebanyak 34 buah, dengan daya tampung murid 5896 orang, dan pengajar 472 orang. Sekolah Dasar Inpres sebanyak 15 buah, dengan daya tampung murid sebanyak 2342 orang, dan pengajar 126 orang. Sekolah Dasar Swasta Islam sebanyak 7 buah, dengan daya tampung murid 770 orang, dan tenaga pengajar sebanyak 32 orang.

Jumlah SLTP Negeri ada sebanyak 4 buah, dengan daya tampung 3165 murid, dan pengajar 153 orang, serta sudah dilengkapi fasilitas Laboratorium dan Perpustakaan. Selain SLTP Negeri, juga terdapat SMTP Swasta Islam yang dilengkapi fasilitas Laboratorium dan Perpustakaan, dengan jumlah sebanyak 5 buah, dengan daya tampung murid 473 orang, dan jumlah pengajar 72 orang.

Jumlah SMU Negeri yang sudah dilengkapi fasilitas Laboratorium dan Perpustakaan terdapat 2 buah, dengan daya tampung 1519 orang dan jumlah pengajar 114 orang. Selain SMU Negeri, juga terdapat 4 SMU

Swasta, dengan daya tampung murid 1857 orang dan jumlah tenaga pengajar 130 orang. Yang lainnya adalah SMTA Swasta Islam, ada 4 buah, dengan daya tampung murid 324 orang, dan jumlah pengajar 76 orang. Dan yang terakhir adalah jenis SMTA Kejuruan Negeri, terdapat 1 buah, dengan daya tampung murid sebanyak 547 orang, dan tenaga pengajar sebanyak 54 orang. Semua Sekolah Lanjutan Atas tersebut telah dilengkapi oleh fasilitas Laboratorium dan Perpustakaan.

Di Kecamatan Majalengka jumlah Perguruan Tinggi Swasta terdapat 2 buah dengan jumlah mahasiswa sebanyak 4227 orang dan jumlah Dosen sebanyak 37 orang.

Di Kecamatan Majalengka Kota juga sudah terdapat 1 buah Sekolah Luar Biasa, dengan jumlah murid sebanyak 17 orang, dan jumlah tenaga pengajar 10 orang.

Sarana dan prasarana ibadah terdiri dari 43 masjid, 139 surau/mushola, 2 gereja, dan 1 buah Kuil/Pura.

Sementara *sarana dan prasarana kesehatan* di Kecamatan Majalengka terdapat 1 buah Rumah Sakit Umum/Pemerintah, dan dokter Umum 5 orang.

7. Sikap Kekeluargaan Dan Kesetiakawanan Masyarakat

Sedangkan sikap kekeluargaan masyarakat di Kecamatan Majalengka Kota diantaranya dapat dilihat dari adanya gotong royong masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana seperti bangunan sekolah, masjid, jalan desa, dll.

8. Dinamika Pembangunan Di Kecamatan

a. Pembangunan pada Tahun-tahun Tertentu

Dinamika pembangunan di Kecamatan Majalengka Kota dapat tercermin dari keaktifan sejumlah Kader Pembangunan Desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik dan non fisik. Pada tahun 1995 yang pembangunan dilaksanakan di sektor pertanian dan pengairan.

b. Kemitraan Antara Masyarakat dan Pemerintah

Di dalam menunjang program-program pemerintahan, keikutsertaan dan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah cukup baik, hal ini dapat terlihat dari beberapa kegiatan diantaranya adalah adanya pembinaan Ideologi Negara dan pembinaan kesatuan bangsa, melalui pemasyarakatan P-4. Warga di Kecamatan Majalengka yang telah mengikuti p-4 berjumlah 14.601 orang penduduk WNI yang terdiri dari 2094 PNS dan 280 pegawai daerah.

Sedangkan dalam rangka pembinaan masyarakat, terdapat Komisaris Organisasi Kekuatan Sosial Politik yang meliputi 6 orang PPP, 76 Golkar, dan 6 PDI.

Untuk menjaga stabilitas pemerintahan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat, selalu diupayakan menambah dan membina Anggota Pertahanan Sipil. Pada saat ini di Kecamatan Majalengka terdapat 140 orang anggota HANSIP, 45 jumlah anggota Menwa dan 140 anggota Kamra. Sedangkan Pos Kamling yang ada berjumlah 228 pos. □

c. Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemerintah

Masyarakat di kecamatan Majalengka dalam menunjang program pemerintah di bidang Keluarga Berencana cukup aktif. Di Kecamatan Majalengka terdapat sejumlah 2096 akseptor KB. Sedangkan sarana penunjang yang tersedia adalah adanya 5 buah pos/klinik KB.

Partisipasi masyarakat dalam pencapaian jumlah ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan berhasil baik, hal ini terlihat dari ercapainya target, dan tidak adanya tunggakan PBB tahun lalu.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. TEKNIK ANALISIS PENELITIAN

Seperti telah dikemukakan pada Bab Pendahuluan, bahwa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Analisis yang dilakukan bersifat deskriptif dengan mengungkapkan opini dari para responden dan mengulasnya dengan dukungan data-data sekunder yang ada.

Secara operasional, deskripsi opini responden dibagi kedalam lima sub pembahasan sesuai dengan jumlah variabel penelitian. Kelima Sub Pembahasan tersebut adalah: Pertama, koordinasi perencanaan pembangunan di kecamatan; Kedua, koordinasi pelaksanaan pembangunan di kecamatan; Ketiga, koordinasi pelaporan, pengawasan dan pembinaan; Keempat, pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat; Dan kelima, pendanaan koordinasi pembangunan di kecamatan.

Sesuai dengan stratifikasi responden, pembahasan terhadap Sub-bab Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan, akan dilakukan secara komprehensif dengan melakukan lintas data antar strata, dengan tujuan untuk mempertajam analisis yang dilakukan. Demikian juga pada Sub-bab Pelayanan, Pemberdayaan, dan Partisipasi Masyarakat. Sementara itu analisis dan pembahasan pada Sub-bab Pendanaan Koordinasi akan didasarkan kepada hasil wawancara dan data-data sekunder yang diperoleh.

Ada empat strata responden dengan jumlah responden tiap strata bervariasi. Keempat strata responden tersebut adalah: Strata pertama responden pada tingkat desa yang meliputi aparat desa dan tokoh masyarakat; Strata kedua responden pada tingkat kecamatan sebagai

pelaksana operasional pembangunan yang dilakukan yaitu para petugas/kepala instansi vertikal dan otonom di kecamatan; Strata ketiga masih ditingkat kecamatan yaitu para Camat, Danramil, dan Kapolsek; Dan strata keempat responden pada tingkat kabupaten yang terdiri dari Kabag Pemerintahan Umum, Kabag Pemerintahan Desa, Kabag Pembangunan, Kabag Kesra, dan Kepala Kantor BANGDES.

Untuk mengkonvergenkan pembahasan pada Sub-bab berdasar kepada kuesioner, maka jawaban responden dikategorikan ke dalam tiga kategori berdasarkan makna yang dikandung dalam jawaban tersebut. Ketiga kategori tersebut yaitu: *Pertama*, jawaban yang bermakna bahwa kondisi sudah baik dan tidak perlu mendapat perubahan apa-apa; *Kedua*, jawaban yang bermakna bahwa kondisi sebagian sudah baik, namun belum optimal, karena itu masih perlu sedikit perbaikan; Dan kategori *ketiga*, jawaban responden yang bermakna bahwa kondisi masih tidak baik, sehingga perlu banyak perubahan.

Pembahasan atas jawaban responden diperkuat dengan alasan-alasan yang dikemukakannya. Alasan-alasan tersebut, juga dikategorikan kedalam 8 (delapan) alasan utama yang dominan sebagai berikut: *Pertama*, kategori alasan kuantitas Sumber Daya Manusia dengan simbol (1). *Kedua*, kategori alasan kualitas dan dedikasi SDM dengan lebih spesifik SDM aparatur dengan simbol (2). *Ketiga*, kategori alasan pendanaan (keuangan) dengan simbol (3).

Kategori alasan *keempat* adalah adanya dominasi pusat atau instansi atasannya dengan simbol (4). *Kelima*, kategori alasan partisipasi dan budaya masyarakat dengan simbol (5). Kategori alasan *keenam* diberi simbol (6), yaitu kondisi geografis, jauh dekatnya desa/kelurahan terhadap ibukota kecamatan, jauh/dekatnya kecamatan terhadap ibukota kabupaten, atau juga tingkat kelabilan/kestabilan lahan, serta kemudahan lokasi tersebut dijangkau oleh informasi. Kategori alasan *ketujuh* diberi simbol (7), yaitu dominasi peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, kategori alasan

kedelapan adalah kualifikasi, kemampuan, dan peranan camat dalam melakukan pengkoordinasian pembangunan di wilayahnya.

Sementara, jawaban-jawaban yang tidak disertai alasannya, dikategorikan tersendiri dengan simbol (0). Alasan lainnya, seperti alasan politik, keamanan, dan lain-lain yang tidak dominan, diklasifikasikan tersendiri pula dengan simbol (9)

B. KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN

Perencanaan merupakan langkah pertama dalam kegiatan pembangunan. Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia mempunyai 4 (empat) dimensi (Bintoro Tjokroamidjojo; 1987, 175). Dimensi pertama, yaitu perencanaan pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kemudian perencanaan jangka panjang tersebut diterjemahkan dalam dimensi kedua yaitu perencanaan jangka menengah (lima tahunan) yaitu Repelita. Dimensi ketiga, adalah penerjemahan lebih lanjut dari Repelita ke dalam perencanaan operasional tahunan dalam bentuk APBN. APBN didasarkan atas undang-undang. Sementara dimensi keempat adalah kebijaksanaan ataupun perencanaan bidang tertentu yang umumnya bersifat upaya stabilisasi, misalnya satu paket kebijaksanaan dan program ekspor non migas.

Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat, dan pelaksanaan pembangunan di kecamatan merupakan operasionalisasi sebagian rencana pembangunan nasional, maka sistem perencanaan yang ada di tingkat kecamatan pun merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Artinya, pelaksanaan kegiatan pembangunan di kecamatan merupakan bagian dari implementasi rencana pembangunan nasional. Karena pada hakekatnya pembangunan nasional merupakan pembangunan nasional daerah (Bagir Manan: 1995, 51).

Argumentasi perlunya perencanaan adalah agar sasaran dan tujuan pembangunan dapat tercapai dengan lebih baik (Kunarjo; 1992, 8);

merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Perencanaan menjadi fungsi organik pertama karena ia merupakan dasar dan titik tolak dari kegiatan pelaksanaan selanjutnya (Siagian; 1987, 108); Dan juga dalam rangka menata dan merujuk kebutuhan-kebutuhan yang bersaing dengan sumber-sumber daya yang tersedia (Bryant & White; 1989, 310).

Dalam perencanaan juga sudah mencakup koordinasi, dengan mengidentifikasi hubungan-hubungan antar sektor dalam rangka menunjukkan secara jelas bidang-bidang kegiatan yang esensial untuk persoalan-persoalan kunci (Bryant & White; 1989, 315).

Dengan demikian, apa yang dimaksudkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 mengenai koordinasi perencanaan, sejalan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan para ahli di atas. Inmendagri tersebut menyatakan, dalam rangka koordinasi perencanaan instansi vertikal di Daerah; Pertama, Kepala Wilayah meminta dan menerima program/rencana serta pelaksanaan tugas dari instansi vertikal yang ada di wilayahnya; Kedua, Kepala Wilayah membahas program/rencana yang telah disampaikan oleh instansi vertikal bersama-sama dengan instansi vertikal lainnya dan Dinas Daerah yang ada di wilayahnya untuk dipadukan antara rencana Pusat dan Daerah; Ketiga, program/rencana yang sudah dikoordinasikan, disampaikan oleh Kepala Instansi Vertikal kepada Menteri Pimpinan Departemen dan Pimpinan LPND untuk mendapat persetujuan; Dan keempat, program/rencana dan kegiatan Instansi Vertikal yang telah diberikan persetujuan oleh Instansi atasannya, sebelum dilaksanakan oleh masing-masing Instansi Vertikal di Daerah, agar diberikan petunjuk terlebih dahulu oleh Kepala Wilayah.

Merujuk kepada beberapa pendapat ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, untuk melihat kondisi koordinasi perencanaan di tingkat Kecamatan, diajukan beberapa indikator untuk mendapatkan tanggapan dari responden. Dari beberapa indikator yang

diajukan tersebut terdapat permasalahan yang perlu segera diatasi, seperti dapat disimak pada tabel IV.2.1 s.d. tabel IV.2.4.

1. Peran Desa/Kelurahan Dalam Koordinasi Perencanaan Pembangunan Di Tingkat Desa/Kelurahan

Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di desa, dengan mata pencaharian mereka yang dominan bertani. Dilihat dari kontribusinya terhadap pembangunan nasional, Desa memberi sumbangan yang tidak sedikit. Selain berperan sebagai penyedia bahan pangan, Desa juga berperan sebagai penyedia bahan-bahan baku industri.

Pembangunan yang dilakukan di desa-desa, selain hasil upaya masyarakat desa sendiri secara swadaya, juga atas dorongan dari pemerintah. Oleh karena itu, kelanjutan dan keoptimalan pembangunan yang dilaksanakan di Desa termasuk juga Kelurahan, sangat dipengaruhi oleh kelancaran koordinasi yang terjadi di Desa itu, yang secara otomatis juga terkait dengan organisasi pemerintahan di atasnya, serta instansi-instansi teknis yang mempunyai proyek atau yang melaksanakan kegiatan atau pembangunan di desa.

Sehubungan dengan pentingnya peran dan fungsi Desa dalam pembangunan nasional, maka koordinasi perencanaan pembangunan di tingkat Desa menjadi sangat penting, agar tujuan-tujuan dari semua kegiatan, baik kegiatan pembangunan yang dibiayai dan dilakukan secara swadaya, maupun kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh anggaran negara dan dilaksanakan oleh instansi-instansi yang ada di Kecamatan. Untuk melihat kondisi koordinasi dalam perencanaan pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan tersebut, diajukan beberapa pertanyaan. Rekapitulasi pendapat responden, terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian atau perlu diperbaiki seperti dapat diikuti pada tabel berikut ini:

Tabel IV.2.1
Klasifikasi Pendapat Responden Tentang Beberapa Indikator
Peran Desa/kelurahan Dalam Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Di Tingkat Desa/Kelurahan

INDIKATOR KOORDINASI	PROSENTASE RESPONDEN PER KLASIFIKASI PENDAPAT			Alasan
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1. Perencanaan Tahunan (F-1: 1)	70,3 %	29,7 %	-	2,3,5,6
2. Kemampuan rencana dalam beradaptasi jika terjadi perubahan situasi dan kondisi (F-1: 7)	45,6 %	47,4 %	7,0 %	1,3,4,9
3. Penggunaan kegiatan/proyek yang telah dilaksanakan sebagai acuan bagi perencanaan selanjutnya (F-1: 7)	76,5 %	21,8 %	1,7 %	5,7,8,9

Sumber : Data Lapangan, kuesioner, diolah.

Keterangan alasan :

- | | |
|--|---|
| 1 = Alasan kuantitas/jumlah SDM | 6 = Alasan geografis dan kondisi daerah |
| 2 = Alasan kualitas dan dedikasi aparat | 7 = Alasan peraturan perundang-undangan |
| 3 = Alasan pendanaan | 8 = Alasan kualifikasi, kemampuan dan peranan Camat |
| 4 = Alasan dominasi pusat | 9 = Alasan lain-lain (bukan kategori 1,2,3, dst) |
| 5 = Alasan partisipasi dan budaya masyarakat | |

Seperti dikemukakan **Bintoro Tjokroamidjojo (1987, 175)** bahwa salah satu dimensi perencanaan pembangunan nasional adalah perencanaan tahunan, yang dalam lingkup nasional diwujudkan dalam bentuk APBN. Karena program-program/rencana pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan merupakan salah satu bagian dari perencanaan nasional, maka keberadaan perencanaan desa/kelurahan sangat penting. Di Desa perencanaan ini dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), yang dibahas saat Rapat LKMD dengan Ketua LKMD sebagai pimpinan; Camat dan petugas BANGDES Kecamatan sebagai pengarah; Pengurus LKMD, LMD, dan aparat pemerintah yang ada di Desa sebagai peserta.

Dalam kesempatan tersebut, dibahas rencana proyek-proyek yang diusulkan oleh LKMD, lalu usulan proyek yang telah disepakati itu disampaikan kepada LMD untuk disahkan. Selanjutnya, proyek yang telah disahkan oleh LMD diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat. Menelusuri mekanisme pengusulan rencana tersebut, maka kurang baiknya rencana tahunan yang dimiliki oleh desa-desa berarti kurang baiknya penyelenggaraan Rapat LKMD.

Sesuatu yang wajar, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan terjadi pergeseran dari rencana semula yang disebabkan perubahan situasi dan kondisi. Namun, yang perlu diperhatikan, seperti diungkapkan Kunarjo (1992, 8) bahwa perencanaan dimaksudkan agar sasaran dan tujuan pembangunan dapat tercapai dengan lebih baik. Artinya, dalam perencanaan semaksimal mungkin dilakukan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya situasi dan kondisi yang akan merusak pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.

Memperhatikan kemampuan beradaptasi dari rencana-rencana yang ada seperti terlihat pada tabel di atas, diakui oleh responden ternyata masih banyak rencana yang kurang memperhatikan kemungkinan-kemungkinan negatif tersebut. Perencanaan yang dibuat di tingkat desa/kelurahan belum mampu menjangkau situasi dan kondisi yang akan datang, bahkan dalam satu periode perencanaan sekali pun (satu tahun). Di sinilah, pentingnya kualitas Sumber Daya Manusia Perencana Tingkat Desa/Kelurahan. Dan hal ini sebenarnya tidak bisa kita elakkan, karena secara umum kondisi SDM di desa/kelurahan kita masih relatif rendah.

Sejalan dengan kondisi itu, mekanisme perencanaan masih kurang memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai. Kegiatan/ pembangunan yang telah dilaksanakan jarang dipergunakan sebagai acuan bagi perencanaan selanjutnya. Di sini terlihat bahwa dalam merencanakan sesuatu mereka tidak berpandangan jauh mengenai keterkaitannya dengan kegiatan lain, atau kelanjutan dari kegiatan tersebut. Pemikirannya tercurah pada kondisi suatu saat. Dalam kaitan ini,

Kelemahan koordinasi perencanaan di tingkat Desa/Kelurahan ini tidak terlepas dari faktor-faktor, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhinya. Faktor-faktor internal antara lain kurangnya kuantitas dan kualitas SDM perencana, serta kurangnya disiplin aparat desa/kelurahan yang ada. Sementara faktor eksternal yang juga berpengaruh terhadap kondisi ini antara lain; Budaya masyarakat desa secara umum, termasuk aparatnya yang kurang memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang, sumber dana dari APBN yang kurang memadai untuk pelaksanaan koordinasi, kondisi geografis yang kurang memungkinkan bagi desa untuk melakukan koordinasi yang intensif dengan kecamatan, peraturan perundang-undangan yang ada yang terlalu membatasi gerak langkah desa/kelurahan dalam membuat perencanaan, serta kualifikasi camat sendiri dalam memberikan komando terhadap bawahan-bawahannya yaitu Kepala Desa atau Lurah.

2. Peran Instansi Vertikal Dan Otonom Yang Ada Di Kecamatan Dalam Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Koordinasi Perencanaan yang harus dilaksanakan oleh instansi vertikal di kecamatan, pada dasarnya merupakan implementasi dari Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989.

Meskipun Inmendagri tersebut ditujukan bagi instansi vertikal saja, namun koordinasi perencanaan yang mesti dilakukan oleh instansi otonom pun pada substansinya adalah sama. Berkenaan dengan itu indikator-indikator koordinasi perencanaan yang dilontarkan kepada responden tidak dibedakan. Dari beberapa indikator yang dilontarkan, ada 8 (delapan) permasalahan yang mendapat respon kuat dari responden untuk segera diprioritaskan. Kedelapan permasalahan tersebut, dapat disimak pada tabel berikut:

Tabel IV.2.2
Klasifikasi Pendapat Responden Tentang Beberapa Indikator Peran
Instansi Vertikal Dan Otonom Yang Ada Di Kecamatan
Dalam Koordinasi Perencanaan Pembangunan

INDIKATOR KOORDINASI	PROSENTASE RESPONDEN PER KLASIFIKASI PENDAPAT			Alasan
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1. Perhatian terhadap keterkaitan kerja antara satu instansi dengan instansi lain dalam perencanaan (F - 2: 1) (F - 3: 1) (F - 4: 1)	43,9 % 41,1 % 36,6 %	33,7 % 25,0 % 34,1 %	22,4 % 33,9 % 29,3 %	2,4,7,9 2,7 2,4,7,9
2. Penentuan sasaran-sasaran kegiatan dalam perencanaan (F - 2: 2) (F - 3: 4)	91,7 % 88,2 %	2,4 % 3,9 %	5,9 % 7,9 %	4,6 9
3. Dukungan sumber daya dan dana terhadap rencana kereja instansi (F - 2: 3) (F - 3: 4)	22,7 % 21,0 %	53,6 % 54,4 %	23,7 % 24,6 %	1,2,3 1,3,4
4. Penyiapan jumlah, kualifikasi, dan kualitas Tenaga Kerja, serta baha-bahan, peralatan dan mesin dalam kegiatan/proyek (F - 2: 8)	14,1 %	50,0 %	35,9 %	1,3,6
5. Penggunaan kegiatan/proyek yang telah dilaksanakan sebagai acuan bagi perencanaan selanjutnya (F - 2: 9)	69,8 %	21,9 %	8,3 %	2,9
6. Frekuensi perubahan mendadak atas rencana karena situasi dan kondisi berubah (F - 2 : 11) (F - 3: 10) (F - 4: 6)	20,5 % 14,8 % -	54,2 % 44,4 % 73,3 %	25,3 % 40,8 % 26,7 %	3,8,9 3,4,9 1,4,6
7. Frekuensi perubahan mendadak atas rencana karena instruksi dari atasnya (F - 3 : 12)	37,0 %	40,7 %	22,3 %	2,3,4,5
8. Kemampuan rencana dalam beradaptasi jika terjadi perubahan situasi dan kondisi (F - 2 : 12) (F - 3 : 11) (F - 4 : 7)	35,6 % 40,4 % 47,2 %	56,6 % 51,1 % 26,4 %	5,8 % 8,5 % 26,4 %	4,5 2,4,9 6,9

Sumber : Data Lapangan, kuesioner, diolah

Keterangan alasan :

- | | |
|--|---|
| 1 = Alasan kuantitas/jumlah SDM | 6 = Alasan geografis dan kondisi daerah |
| 2 = Alasan kualitas dan dedikasi aparat | 7 = Alasan peraturan perundang-undangan |
| 3 = Alasan pendanaan | 8 = Alasan kualifikasi, kemampuan dan peranan Camat |
| 4 = Alasan dominasi pusat | 9 = Alasan lain-lain (bukan kategori 1,2,3, dst) |
| 5 = Alasan partisipasi dan budaya masyarakat | |

Koordinasi pada dasarnya merupakan langkah untuk menyamakan, menyerempakkan dan menyelaraskan aktivitas guna guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pendapat responden (F-2, F-3, dan F-4) terhadap indikator koordinasi berupa perhatian terhadap keterkaitan kerja antara satu instansi dengan instansi lain yaitu dalam perencanaan menunjukkan bahwa prosentasenya masih belum memuaskan.

Terlihat pada tabel, prosentase-prosentase tersebut menunjukkan bahwa koordinasi perencanaan yang dilakukan oleh Camat di lokasi penelitian dengan instansi vertikal dan dinas otonom masih perlu ditingkatkan. Banyak faktor penyebab terjadinya koordinasi perencanaan di tingkat Kecamatan seperti ini, yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga faktor penyebab. Pertama pada diri koordinator, kedua pada orang yang dikoordinasikan, dan ketiga pada sistem koordinasi.

Kegiatan perencanaan mencakup penentuan berbagai sasaran. Berkaitan dengan hal itu, sebagian besar responden menyatakan bahwa penentuan sasaran perencanaan sudah baik. Proporsi-proporsi yang tertera pada tabel menunjukkan koordinasi pada tahap penentuan sasaran perencanaan yang dilakukan oleh Camat di lokasi penelitian terhadap para kepala Instansi Vertikal dan Dinas Daerah sudah berjalan dengan baik.

Agar suatu perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan dukungan sumber daya dan sumber dana. Berkaitan dengan itu, lebih dari setengah responden mengatakan bahwa dukungan sumber daya dan sumber dana terhadap rencana kerja instansi masih kurang. Hal ini menunjukkan bahwa kendala utama koordinasi perencanaan adalah keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Keterbatasan tersebut berada di

luar jangkauan kewenangan Camat sebagai koordinator. Sumber daya dan sumber dana bagi instansi vertikal dan dinas daerah di tingkat Kecamatan disediakan oleh instansi tingkat atasnya yaitu Kantor Departemen dengan bersumber pada dana APBN, serta Bupati KDH Tingkat II dengan bersumber pada dana APBN dan APBD Tingkat II.

Pernyataan di atas sejalan dengan pendapat responden mengenai penyiapan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja, bahan-bahan, dan peralatan untuk pelaksanaan proyek. Lebih dari setengah responden menyatakan kurang baik dan tidak baik.

Perencanaan adalah suatu proses penyusunan rencana. Sebagai suatu proses, suatu tahapan perencanaan mempunyai kaitan erat dengan tahap berikutnya serta dengan pelaksanaannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan pendapat responden seperti tertera pada tabel, bahwa perencanaan antara satu kurun waktu dengan kurun waktu berikutnya, secara umum dapat dinilai berkesinambungan.

Setiap perencanaan selalu menuntut adanya konsistensi, meskipun dimungkinkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan (*correction on the way*). Namun, perbuatan semacam itu perlu dibatasi agar tidak mengganggu keseluruhan rencana yang telah disusun. Sehubungan dengan pertanyaan mengenai frekuensi perubahan rencana secara mendadak karena perubahan situasi dan kondisi, secara umum responden menyatakan sering terjadi perubahan.

Apabila Bryant dan White (1989, 315) menyatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan perlu mengidentifikasi hubungan-hubungan antara sektor-sektor dalam rangka menunjukkan secara jelas bidang-bidang kegiatan yang esensial untuk persoalan-persoalan kunci, maka dalam perencanaan yang dilakukan oleh instansi vertikal dan otonom di Kecamatan diakui responden belum sepenuhnya memperhatikan hal ini. Keadaan seperti itu akan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih pekerjaan dalam suatu waktu dan tempat, yang akan menimbulkan

kegagalan salah satu rencana atau bahkan kedua-duanya. Ini merupakan pemborosan baik waktu maupun sumber daya.

Penyiapan jumlah, kualifikasi, dan kualitas tenaga kerja, serta peralatan dan mesin dalam suatu kegiatan yang relatif kurang, seperti diakui responden, memang wajar, karena sumber daya dan sumber dana yang tersedia relatif terbatas. Namun, yang perlu disoroti lebih tajam lagi adalah, sumber daya dan sumber dana yang relatif terbatas tersebut, malah sebagian terbuang oleh inefisiensi akibat terjadinya tumpang tindih kegiatan dalam suatu waktu dan tempat, yang disebabkan lemahnya perencanaan dalam memperhatikan keterkaitan dengan kegiatan instansi lain.

Pembudayaan *bottom up planning* dengan menggunakan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai acuan bagi perencanaan selanjutnya, juga kurang dilaksanakan di kalangan instansi vertikal dan otonom di Kecamatan. Hal ini sebenarnya tercermin juga dari seringnya perubahan atas rencana-rencana yang telah ditetapkan semula. Selain akibat situasi dan kondisi yang menuntut untuk diadakannya perubahan, juga karena adanya dominasi dari pihak atasan yang cukup kuat dalam menentukan rencana kegiatan di kecamatan. Sehingga sangat dimungkinkan, keengganan menjadikan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai acuan bagi perencanaan selanjutnya, disebabkan karena seringnya terjadi perubahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, **Sondang P. Siagian (1987, 112)** menyarankan bahwa rencana harus bersifat luwes. Meskipun pola dasar rencana harus bersifat permanen dan tidak berubah, akan tetapi perencanaan yang lebih operasional harus memperhatikan kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan atau penyesuaian-penyesuaian tanpa merobah pola dasar rencana keseluruhan. Keluwesan rencana pada tingkat kecamatan seperti ini, diakui oleh responden masih kurang. Disamping akibat kurangnya kemampuan aparat dalam membuat perencanaan, kurangnya dukungan budaya masyarakat, dan kondisi geografis yang kurang mendukung, juga adanya dominasi pusat terhadap perencanaan itu.

3. Peran Camat Dalam Koordinasi Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan

Camat tidak mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban secara khusus dalam perencanaan pembangunan, sebagaimana halnya Kepala Wilayah pada tingkat yang lebih tinggi sekali pun, seperti dapat dilihat dalam pasal 81 UU Nomor 5 Tahun 1974. Namun, terkait dengan wewenang, tugas, dan kewajiban koordinasi kegiatan/pembangunan yang dilaksanakan oleh instansi-instansi dan Desa/Kelurahan yang ada di wilayahnya, maka Camat merupakan pemeran utama dalam koordinasi perencanaan, sebagaimana salah satu wewenang, tugas dan kewajiban Camat yang tertuang dalam pasal 81 UU Nomo 5 Tahun 1974 tersebut: "Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi-instansi vertikal dengan dinas-dinas Daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya". Dengan demikian peran Camat dalam perencanaan pembangunan tetap merupakan kunci utamanya di Wilayah Kecamatan.

Camat berkewajiban untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan perencanaan kegiatan pembangunan di wilayahnya. Camat berkewajiban melakukan pengumpulan data dan informasi bagi penyusunan rencana pembangunan Desa yang ada di wilayahnya. Demikian juga, Camat berkewajiban mengajukan usulan mengenai rencana proyek beserta lokasi pembangunan sarana dan prasarana, seperti untuk prasarana pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah, dan lain-lain.

Dalam Diskusi UDKP atau Temu Karya LKMD, dimana dilakukan pembahasan atas usulan proyek yang diterima dari Desa-desanya setelah diolah oleh Camat/Petugas BANGDES untuk kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, Camat bertindak sebagai pimpinan. Dalam Rapat LKMD, Camat/Petugas BANGDES Kecamatan berperan sebagai pengarah. Dengan demikian secara langsung maupun tidak langsung Camat banyak berperan dalam perencanaan pembangunan.

Menyimak Inmendagri Nomor 18 Tahun 1989 yang menyatakan, bahwa dalam rangka koordinasi perencanaan instansi vertikal di Daerah, Kepala Wilayah meminta dan menerima program/rencana serta pelaksanaan tugas dari instansi vertikal yang ada di wilayahnya, membahas program/rencana tersebut bersama-sama dengan instansi vertikal lainnya dan Dinas Daerah yang ada di wilayahnya, serta memberi petunjuk pelaksanaannya. Di sini nampak jelas, bahwa peranan Camat dalam perencanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan dan instansi-instansi yang ada di Wilayahnya sangat dominan.

Schubungan dengan wewenang, tugas dan kewajiban Camat dalam koordinasi perencanaan tersebut, diajukan beberapa pertanyaan kepada responden. Hasil pegolahan dan pengklasifikasian pendapat responden, dapat direduksi menjadi 4 (empat) permasalahan pokok yang dianggap perlu segera diperbaiki, seperti dapat diikuti pada tabel berikut:

Tabel IV.2.3
Klasifikasi Pendapat Responden Tentang Beberapa Indikator
Peran Camat Dalam Koordinasi Perencanaan Pembangunan

INDIKATOR KOORDINASI	PROSENTASE RESPONDEN PER KLASIFIKASI PENDAPAT			Alasan
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1. Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan camat bagi penyusunan rencana pembangunan desa (F - 1 : 9)	73,9 %	25,2 %	0,9 %	1,5,8,9
2. Pembahasan program/rencana instansi terkait vertikal dan otonom oleh Camat beserta instansi lainnya dalam rangka memadukan berbagai rencana/program yang ada (F - 2: 5) (F - 3: 5)	54,5 %	36,4 %	9,1 %	2,7,8,9
	62,1 %	20,7 %	17,2 %	1,2,4,8
3. Pengusulan Camat mengenai rencana proyek beserta lokasi pembangunan, seperti untuk prasarana pendidikan SD, Madarasah dll. (F - 2: 10) (F - 3: 8) (F - 4 : 5)	84,4 %	12,2 %	3,4 %	3,4,8,9
	36,4 %	30,9 %	32,7 %	2,4,7
	62,8 %	30,2 %	7,0 %	4,6,8
4. Penggunaan kegiatan/proyek yang telah dilaksanakan sebagai acuan bagi perencanaan selanjutnya (F - 3 : 9)	61,1 %	27,8 %	11,1 %	2,7

Sumber : Data Lapangan, kuesioner, diolah

Keterangan alasan :

- | | |
|--|---|
| 1 = Alasan kuantitas/jumlah SDM | 6 = Alasan geografis dan kondisi daerah |
| 2 = Alasan kualitas dan dedikasi aparat | 7 = Alasan peraturan perundang-undangan |
| 3 = Alasan pendanaan | 8 = Alasan kualifikasi, kemampuan dan peranan Camat |
| 4 = Alasan dominasi pusat | 9 = Alasan lain-lain (bukan kategori 1,2,3, dst) |
| 5 = Alasan partisipasi dan budaya masyarakat | |

Perencanaan diawali dengan pengumpulan data dan informasi. Pada tahap ini menurut sebagian responden, Camat telah menjalankan peranannya dengan baik. Namun, langkah camat di lokasi penelitian dalam hal mengumpulkan data dan informasi masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini terlihat dari adanya pendapat responden yang menyatakan bahwa peranan camat dalam pengumpulan data dan informasi itu "kurang baik". Tanpa data

dan informasi yang lengkap dan tepat nantinya akan dihasilkan rencana yang tidak akurat (Prinsip 6160: "Garbage in - Garbage out").

Agar terjadi kesamaan tujuan serta kesamaan irama di dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan diperlukan berbagai pembahasan, baik melalui rapat maupun surat menyurat. Menurut sebagian besar responden para Camat di lokasi penelitian telah melaksanakan pembahasan program/rencana pembangunan dengan instansi vertikal. Meskipun demikian, masih ada responden yang menyatakan bahwa pembahasan tersebut kurang baik dan tidak baik.

Pendapat responden seperti dikemukakan di atas paling tidak merupakan suatu indikasi bahwa koordinasi dalam bentuk rapat untuk membahas program/rencana antara Camat dengan instansi vertikal dan dinas otonom masih perlu ditingkatkan, baik dilihat dari frekuensinya maupun metodenya. Rapat koordinasi yang selalu dilakukan di Kantor Camat akan menimbulkan kebosanan. Untuk menghindari hal tersebut, dapat dilakukan berbagai variasi antara lain tempat rapatnya bergantian di Kantor Instansi Vertikal atau Dinas Daerah.

Camat, Kepala Instansi Vertikal maupun Kepala Dinas Otonom Tingkat Kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sendiri program dan proyek yang akan dilaksanakan. Sesuai semangat yang terkandung di dalam P5D, yaitu memadukan perencanaan yang datang dari bawah (*bottom up*) dengan kebijaksanaan yang datang dari atas (*top down*), maka instansi pemutus tingkat pertama berada pada arah/level Kabupaten/Kotamadya DT.II. Masing-masing instansi vertikal atau dinas otonom mengajukan program atau proyek kepada instansi atasannya di Kabupaten/Kotamadya DT. II untuk memperoleh persetujuan. Bersamaan dengan itu, Camat sebagai Kepala Wilayah mengajukan program dan proyek yang telah dibahas di Tingkat Kecamatan pada Rapat Koordinasi Pembangunan II (RAKORBANG II).

Menurut pendapat sebagian besar responden, Camat telah mengusulkan rencana pembangunan pada RAKORBANG II dengan baik.

Dengan demikian Camat di lokasi penelitian telah menjalankan peranannya sebagai koordinator maupun komunikator dengan cukup baik. Dikatakan "cukup baik" karena masih ada responden yang mengatakan bahwa usulan yang dilakukan oleh Camat kurang baik bahkan tidak baik. Adanya pendapat responden seperti ini, sekaligus merupakan masukan bagi Camat untuk mawas diri sehingga dapat lebih meningkatkan peranannya secara lebih baik lagi di kemudian hari.

4. Peranan Instansi Teknis Yang Membawahi Instansi Vertikal/Otonom Di Kecamatan Dan Instansi Lainnya Di Kabupaten DT.II Dalam Koordinasi Perencanaan Di Kecamatan

Instansi-instansi yang ada di Wilayah Kecamatan, baik instansi vertikal maupun otonom merupakan kepanjangan tangan dari instansi-instansi yang ada di atasnya. Oleh karena itu semua rencana kegiatan pembangunan yang ada di kecamatan semestinya selaras atau merupakan operasionalisasi dari rencana instansi yang bersangkutan pada lingkup kecamatan. Artinya, apabila suatu instansi (vertikal atau otonom) yang ada di kecamatan melaksanakan kegiatan tertentu, maka kegiatan tersebut merupakan implementasi dari rencana instansi di Kabupaten/Kotamadya DT.II dengan mengambil lokasi di Kecamatan tersebut.

Secara teknis fungsional, Kepala Instansi Vertikal yang ada di Wilayah bertanggung jawab kepada Menteri Pimpinan Departemen atau Pimpinan LPND (lihat pasal 4 PP No.6 Tahun 1988). Dengan demikian, jelas bahwa pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan instansi vertikal di Wilayah Kecamatan, tidak kepada Camat melainkan kepada instansi atasannya. Demikian juga, Kepala Dinas Daerah dalam menjalankan tugasnya, baik teknis administratif maupun taktis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (lihat pasal 8 PP No.6 Tahun 1988). Dari sini pun nampak jelas bahwa Dinas Daerah yang ada di Kecamatan, tidak bertanggung jawab kepada Camat, melainkan kepada atasannya langsung di Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II.

Dalam hal perencanaan, berdasarkan survey yang telah dilakukan, peranan instansi vertikal dan otonom yang membawahi instansi-instansi di Kecamatan tidak terlalu mendapat sorotan dari responden. Dalam perencanaan, mereka menganggap berjalan sebagai mana mestinya, meskipun diakui dalam pelaksanaannya dominasi pusat cukup tinggi. Yang mendapat sorotan responden, terutama dari pihak Camat, Danramil, dan Kapolsek adalah bahwa Daftar Inventarisasi Kegiatan/Proyek Pembangunan dan Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan, yang semestinya disampaikan Bupati/Walikota kepada Camat (sebagaimana Inmendagri Nomor 16 Tahun 1989), tidak selalu didapatkan oleh Camat. Pendapat responden mengenai hal ini dapat diikuti pada tabel berikut:

Tabel IV.2.4
Klasifikasi Pendapat Responden Tentang Beberapa Indikator
Peran Instansi Teknis Yang Membawahi Instansi Vertikal/Otonom
Di Kecamatan Dan Instansi Lainnya Di Kabupaten DT.II
Dalam Koordinasi Perencanaan Di Kecamatan

INDIKATOR KOORDINASI	PROSENTASE RESPONDEN PER KLASIFIKASI PENDAPAT			Alasan
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
Daftar inventarisasi kegiatan/proyek pembangunan dan pedoman/petunjuk pelaksanaan, yang disampaikan Bupati/Walikota kepada Camat (F - 3 : 7)	46,2 %	11,5 %	42,3 %	2,4

Sumber : Data Lapangan, kuesioner, diolah

Keterangan alasan :

- | | |
|--|---|
| 1 = Alasan kuantitas/jumlah SDM | 6 = Alasan geografis dan kondisi daerah |
| 2 = Alasan kualitas dan dedikasi aparat | 7 = Alasan peraturan perundang-undangan |
| 3 = Alasan pendanaan | 8 = Alasan kualifikasi, kemampuan dan peranan Camat |
| 4 = Alasan dominasi pusat | 9 = Alasan lain-lain (bukan kategori 1,2,3, dst) |
| 5 = Alasan partisipasi dan budaya masyarakat | |

Data di atas memperlihatkan bahwa lebih dari 50% responden menyatakan bahwa Daftar Inventarisasi Kegiatan/Proyek Pembangunan dan

Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan tersebut tidak selalu diberikan oleh Bupati/Walikota/madya KDH II. Padahal, sesuai dengan Inmendagri tersebut, penyampaian Daftar Inventarisasi dan Pedoman Pelaksanaan ini dimaksudkan agar Camat menguasai data dan informasi tentang: *pertama*, penyebaran lokasi kegiatan/proyek di masing-masing Kecamatan; *kedua*, keterkaitan suatu kegiatan/proyek dengan kegiatan/proyek lainnya, termasuk dalam hubungannya dengan persiapan untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup; *ketiga*, identifikasi jenis-jenis kegiatan/proyek yang karena sifatnya memerlukan peranserta langsung masyarakat; *keempat*, luas tanah dan lokasi yang harus disediakan untuk suatu kegiatan/proyek, selanjutnya sebagai bahan bagi Camat dalam mengajukan usulan/saran tentang tata letak yang tepat; *kelima*, agar Camat menguasai tentang biaya konstruksi kegiatan/proyek di wilayahnya, sehingga dapat diketahui penyerapan jumlah dan kualitas tenaga kerja, serta bahan, peralatan dan mesin yang diperlukan oleh kegiatan/proyek yang bersangkutan.

Mengacu kepada pernyataan dalam Inmendagri tersebut, jelas bahwa lemahnya pelaksanaan aspek ini akan berdampak luas terhadap efektivitas koordinasi yang dilaksanakan Camat dan efektivitas pembangunan pada umumnya.

Keterlambatan penyampaian daftar inventarisasi kegiatan/proyek pembangunan dan pedoman/petunjuk pelaksanaan dapat disebabkan karena kurang lancarnya hubungan kerja antara unit-unit yang bertanggung jawab menangani hal tersebut, terutama antara BAPPEDA dengan Bagian Penyusunan Program pada Setwilda Tingkat II.

Menghadapi keadaan semacam itu, Camat hendaknya tidak tinggal diam melainkan bersikap "pro-aktif" dalam arti harus berinisiatif untuk menanyakannya ke BAPPEDA atau ke Bagian Penyusunan Program. Tanpa adanya daftar inventarisasi kegiatan, maka Camat tidak dapat menyusun rencana kerja tahunan secara akurat.

C. KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN

Aspek pelaksanaan merupakan langkah kedua dan sangat menentukan terhadap pencapaian keluaran (*output*) suatu kegiatan atau proyek. Meskipun dalam perencanaan tertata dengan baik, namun apabila dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut, termasuk perencanaan yang telah ditetapkan, niscaya output yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan/pembangunan menjadi syarat mutlak bagi optimasi pencapaian tujuan kegiatan/pembangunan itu.

Koordinasi pelaksanaan pada hakekatnya berlandaskan pada prinsip fungsionalisasi yang menentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana yang disertai wewenang mengkoordinasikan program dalam suatu sektor. Prinsip fungsionalisasi dapat pula diartikan adanya berbagai kegiatan yang saling menunjang untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang merupakan kepentingan bersama, sebagaimana dikemukakan oleh **James D. Mooney**: *The orderly arrangement of group effort, to provide unity of action in the pursuit of a common purpose* (pengaturan usaha sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan bersama) (Sutarto: 1988: 126).

Khusus mengenai koordinasi pelaksanaan kegiatan instansi vertikal, seperti tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989, adalah: Pertama, bahwasannya Kepala Instansi Vertikal berkewajiban melaporkan kepada Kepala Wilayah perihal bidang tugas dan kegiatannya baik yang sudah, sedang dan yang akan dilaksanakan. Kedua, apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaan program/rencana yang ada terutama yang menyangkut dengan kegiatan Instansi Vertikal lainnya dan Dinas Daerah, agar dilaporkan kepada Kepala Wilayah untuk diberikan pemecahannya. Ketiga, laporan Kepala Instansi Vertikal

mengenai bidang tugas kegiatan dimaksud harus memuat bentuk kegiatannya, waktu pelaksanaan, instansi yang terkait, dan pelaksanaan kegiatan yang diselesaikan.

Mengacu kepada Inmendagri tersebut, dengan dilakukan perluasan terhadap substansi aspek pelaksanaan koordinasi, tidak hanya menyangkut pelaksanaan yang dilakukan Instansi Vertikal, tetapi juga yang dilaksanakan Dinas Daerah dan Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan yang bersangkutan, maka dilontarkan beberapa indikator pelaksanaan kegiatan/pembangunan kepada responden. Hasil rekapitulasi pendapat responden tentang hal ini dapat disimak pada tabel-tabel yang akan disajikan kemudian.

1. Peran Desa/Kelurahan Dalam Koordinasi Dan Kondisi Koordinasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Tingkat Desa/Kelurahan

Untuk melihat kondisi koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, diajukan beberapa pertanyaan. Hasil rekapitulasi pendapat responden, terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian atau perlu diperbaiki seperti dapat diikuti pada tabel berikut ini:

Tabel IV.3.1

Klasifikasi Pendapat Responden Tentang Beberapa Indikator Peran Desa/kelurahan Dalam Koordinasi Dan Kondisi Koordinasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Tingkat Desa/Kelurahan

INDIKATOR KOORDINASI	PROSENTASE RESPONDEN PER KLASIFIKASI PENDAPAT			Alasan
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1. Kondisi Sumber Daya Manusia di Tingkat Desa/Kelurahan (F - 1 : 14)	7,8 %	-	92,2 %	1,2,3,4,9
2. Keikutsertaan Kepala Desa dalam diskusi UDKP kecamatan atau temu karya LKMD (F - 2 : 26) (F - 3 : 25)	60,7 %	31,5 %	7,8 %	4,9
	75,5 %	16,3 %	8,2 %	2,9
3. Peran serta Kepala Desa dalam diskusi UDKP atau temu karya LKMD (F - 2:27)	53,3 %	35,9 %	10,8 %	4
4. Keikutsertaan ketua LKMD dalam diskusi UDKP atau temu karya LKMD (F - 2 : 28) (F - 3 : 27)	36,4 %	50,4 %	10,2 %	2,9
	41,5 %	52,8 %	5,7 %	2,5
5. Peranserta ketua LKMD dalam diskusi UDKP atau temu karya LKMD (F - 2 : 29)	42,7 %	44,9 %	12,4 %	4
6. Ketepatan waktu pelaksanaan proyek atau kegiatan yang dilaksanakan di desa (F - 1 : 15) (F - 1 : 16)	52,9 %	34,6 %	12,5 %	5,7,9
	49,1 %	-	50,9 %	2,3,5

Sumber : Data Lapangan, kuesioner, diolah

Keterangan alasan :

- | | |
|--|---|
| 1 = Alasan kuantitas/jumlah SDM | 6 = Alasan geografis dan kondisi daerah |
| 2 = Alasan kualitas dan dedikasi aparat | 7 = Alasan peraturan perundang-undangan |
| 3 = Alasan pendanaan | 8 = Alasan kualifikasi, kemampuan dan peranan Camat |
| 4 = Alasan dominasi pusat | 9 = Alasan lain-lain (bukan kategori 1,2,3, dst) |
| 5 = Alasan partisipasi dan budaya masyarakat | |

Operasionalisasi kegiatan pembangunan di kecamatan, dilaksanakan di Desa/Kelurahan.

Sudah barang tentu personil di tingkat Desa terlibat dalam pelaksanaan proyek atau kegiatan yang dilakukan, bersama-sama dengan warga desa sesuai kebutuhan proyek atau kegiatan itu. Dari tabel tersebut terlihat bahwa permasalahan pertama yang menjadi faktor penyebab kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan di kecamatan adalah lemahnya sumber daya manusia yang ada. Hal ini diakui oleh aparat Desa sendiri. Dari 115 responden yang memberikan pendapatnya tentang kondisi sumber daya manusia di tingkat desa/kelurahan, sebanyak 106 (92%) pendapatnya dapat dikategorikan bahwa kondisi sumber daya manusia di tingkat desa/kelurahan perlu mendapat perbaikan yang mendasar, baik kualitas, kuantitas, maupun disiplin dan dedikasi aparat.

Lemahnya sumber daya manusia di tingkat desa/kelurahan, terutama dalam hal kurangnya dedikasi aparat, juga tercermin dari beberapa indikator seperti partisipasi aparat Desa/Kelurahan dalam kegiatan pelaksanaan koordinasi di kecamatan. Meskipun sebagian besar aparat Desa (antara lain Kepala Desa dan Ketua LKMD) taat mengikuti forum-forum koordinasi, namun di desa-desa tertentu masih terdapat Kepala Desa dan Ketua LKMD yang tidak berperan bahkan tidak aktif dalam forum-forum koordinasi tersebut. Demikian, menurut penilaian Camat, Kapolres, Danramil, dan para petugas instansi vertikal dan otonom di kecamatan.

Kelemahan pihak kecamatan terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, adalah tidak selalu tepatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pengunduran waktu sudah menjadi kebiasaan. Padahal hal tersebut dapat mempengaruhi respon masyarakat desa/kelurahan terhadap berbagai program atau kebijaksanaan yang disampaikan oleh pihak kecamatan. Hasil rekapitulasi pendapat responden, menunjukkan bahwa sebanyak 32% responden yang menjawab pertanyaan yang diajukan mengenai hal ini, menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa/kelurahan banyak perbaikan, dalam arti desa/kelurahan mengharapkan pihak kecamatan untuk memperhatikan penjadualan yang telah ditetapkan tersebut.

Respon aparat desa dan tokoh masyarakat seperti ini, sebenarnya dapat dipahami, bahwasannya aparat kecamatan (Camat) sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah yang ada di atasnya sering memberikan harapan-harapan kepada Desa, berkenaan dengan perbaikan sarana dan prasarana desa, serta perbaikan kehidupan masyarakat desa apalagi menjelang pesta demokrasi (Pemilu). Rakyat desa, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa, Ketua LKMD, dan tokoh-toko masyarakat, menilai bahwa janji-janji yang kadang tak kunjung tiba ini, merupakan penyimpangan dari penjadualan kegiatan yang telah ditetapkan.

Ada berbagai argumentasi yang mereka kemukakan sebagai penyebab lemahnya kondisi sumber daya manusia ini. Dana, menurut mereka merupakan penyebab yang dominan terhadap lemahnya SDM, karena dengan adanya dana mereka dapat merekrut personil yang lebih banyak dan yang lebih berkualitas dalam pelaksanaan kegiatan di desa/kelurahan. Alasan kedua adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa/Kelurahan. Namun sebenarnya dalam kondisi sosial budaya masyarakat yang masih diwarnai primordialisme, maka partisipasi masyarakat merupakan timbal balik atau efek dari pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak penguasa. Oleh karena itu jika alasan partisipasi masyarakat merupakan faktor penghambat pelaksanaan pembangunan, maka sebenarnya upaya pemberdayaan pihak penguasalah yang perlu diperbaiki.

2. Peran Instansi Vertikal/Otonom Yang Ada Di Kecamatan Dalam Koordinasi, Serta Kondisi Koordinasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan

Instansi vertikal dan dinas-dinas otonom yang ada di kecamatan, merupakan instansi operasional yang langsung terjun ke lapangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, keberadaan, keberfungsian, dan kemampuan instansi-instansi ini sangat menentukan keberhasilan program pembangunan atau kegiatan yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengungkap berbagai permasalahan yang menyangkut keberadaan dan peran instansi vertikal/otonom di kecamatan, serta hubungannya dengan kondisi koordinasi pelaksanaan pembangunan di kecamatan, dilontarkan beberapa pertanyaan kepada responden. Dari seluruh indikator yang dilontarkan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu segera ditangani, seperti dapat diikuti pada tabel berikut:

Tabel IV.3.2
Klasifikasi Pendapat Responden Tentang Beberapa Indikator Peranan
Instansi Vertikal/Otonom Di Kecamatan Dalam Koordinasi
Serta Kondisi Koordinasi Dalam Pelaksanaan
Pembangunan Di Tingkat Kecamatan

INDIKATOR KOORDINASI	PROSENTASE RESPONDEN PER KLASIFIKASI PENDAPAT			Alasan
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1. Frekuensi tumpah tindih pekerjaan antar instansi : (F - 1 : 17) (F - 2 : 34) (F - 3 : 44) (F - 4 : 20)	28,8 %	64,9 %	6,3 %	2,9
	30,5 %	64,2 %	5,3 %	4,6,7,8
	40,0 %	58,0 %	2,0 %	2,4,6,7
	37,5 %	62,5 %	-	2,4,9
2. Pelaksanaan pekerjaan ayng sebenarnya cukup oleh satu instansi saja, namun dikerjakan oleh beberpa instansi/tumpang tindih pekerjaan: (F - 3: 44) (F - 4: 11)	40,0 %	26,0 %	34,0 %	2,4,7,8,9
	10,3 %	79,5 %	10,2 %	2,3,6,7,8
3. Keikutsertaan instansi pemerintah/ tim-tim koordinasi yang ada di kecamatan dalam diskusi UDKP atau temu karya LKMD (F - 1 : 22) (F - 2 : 25) (F - 3 : 23)	39,8 %	53,1 %	7,1 %	2,8,9
	26,5 %	63,2 %	10,3 %	4,9
	28,3 %	66,0 %	5,7 %	2,3,4,6,7,8
4. Hubungan kerja antar instansi terkait di keecamatan (F -2 : 37)	91,3 %	6,5 %	2,2 %	4,5,9
5. Hubungan komunikasi dan informasi antar petugas instansi yang ada di kecamatan (F-2:37)	39,4 %	60,6 %	-	2,8,9

Lanjutan Tabel 4.3.2

INDIKATOR KOORDINASI	PROSENTASE RESPONDEN PER KLASIFIKASI PENDAPAT			Alasan
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
6. Komunikasi antara instansi yang ada di kecamatan dengan camat dalam rangka pelaksanaan kegiatan/proyek (F - 2 : 46)	87,8 %	9,8 %	2,4 %	6,9
7. Ketaatan instansi vertikal dan otonom di kecamatan dalam melaksanakan kegiatannya pada waktu dan tempat yang telah ditentukan (F - 3 : 31)	41,2 %	49,0 %	9,8 %	1, 2, 4, 5, 9
8. Ketaatan instansi di kecamatan terhadap kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh instansi atasannya (F-3: 41)	27,8 %	72,2 %	-	2, 4, 7
9. Kemampuan instansi di kecamatan dalam bekerjasama dengan pihak lain dan kemudahan dalam dikoordinasikan (F-3: 42)	16,0 %	58,0 %	26,0 %	2, 6, 7 8, 9
10. Tdpt pekerjaan yang tidak dikerjakan krn setiap instansi merasa bukan pekerjaannya (F-3 : 45) (F-4: 12)	11,6 %	44,2 %	44,2 %	2, 7, 8
	60,5 %	23,7 %	15,8 %	2, 8

Sumber : Data Lapangan, kuesioner, diolah

Keterangan alasan :

- | | |
|--|---|
| 1 = Alasan kuantitas/jumlah SDM | 6 = Alasan geografis dan kondisi daerah |
| 2 = Alasan kualitas dan dedikasi aparat | 7 = Alasan peraturan perundang-undangan |
| 3 = Alasan pendanaan | 8 = Alasan kualifikasi, kemampuan dan peranan Camat |
| 4 = Alasan dominasi pusat | 9 = Alasan lain-lain (bukan kategori 1,2,3, dst) |
| 5 = Alasan partisipasi dan budaya masyarakat | |

Indikator kurangnya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kecamatan, antara lain terlihat dari adanya tumpang tindih kegiatan antara suatu instansi dengan instansi lainnya, dan adanya suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh beberapa instansi yang semestinya tidak demikian. Seperti disebutkan **The Liang Gie**: "Kosong atau kurangnya koordinasi dalam suatu organisasi akan terlihat dari adanya gejala-gejala, antara lain petugas atau satuan-satuan organisasi bertengkar menuntut suatu bidang kerja atau wewenang yang masing-masing menganggap termasuk dalam lingkungan tugasnya (Sutarto: 1988, 130). Kondisi ini diakui oleh

responden antara lain oleh Kepala Desa dan Tokoh masyarakat yang menyaksikan gejala-gejala tersebut.

Terjadinya kekembaran dalam pelaksanaan pekerjaan juga diamati oleh Camat selaku koordinator pembangunan di kecamatan, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Dinas Otonom, serta aparat kabupaten DT.II yang terkait. Dari seluruh pendapat yang berhasil diakumulasi, secara umum 32% menyatakan bahwa tidak perlu ada perbaikan karena tidak pernah terjadi tumpang tindih kegiatan, 63% menyatakan perlu sedikit perbaikan karena berdasarkan pengamatannya kadang-kadang terjadi tumpang tindih kegiatan, sementara terdapat pula responden yang sering mengamati terjadinya tumpang tindih kegiatan antar instansi, yaitu sebanyak 5%.

Indikator lain yang menunjukkan kurangnya koordinasi antar instansi di kecamatan adalah, terdapatnya pekerjaan yang tidak dikerjakan karena setiap instansi merasa bukan pekerjaannya. The Liang Gie menyatakan bahwa indikator lain dari kurangnya koordinasi adalah "petugas atau satuan-satuan organisasi saling melemparkan sesuatu tanggung jawab kepada pihak lain karena masing-masing merasa bahwa pekerjaan itu tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya (Sutarto: 1988, 130).

Secara kausalitas, dapat dilihat bahwa terjadinya tumpang tindih kegiatan antar instansi di kecamatan, dan adanya kekosongan tindakan yang semestinya dijalankan, antara lain disebabkan oleh: Pertama, kurangnya disiplin para petugas/tim-tim koordinasi dalam mengikuti forum-forum koordinasi yang diselenggarakan di kecamatan; Kedua, kurang baiknya hubungan kerja dan hubungan komunikasi antar instansi di kecamatan; Ketiga, kurangnya komunikasi antara instansi yang ada di kecamatan dengan camat dalam rangka pelaksanaan kegiatan/proyek; Keempat, kurangnya ketaatan instansi vertikal dan otonom di kecamatan dalam melaksanakan kegiatannya pada waktu dan tempat yang telah ditentukan; Kelima, kurangnya ketaatan instansi di kecamatan terhadap kebijaksanaan yang di keluarkan oleh instansi atasannya; Dan keenam, kurangnya kemampuan instansi di kecamatan dalam bekerjasama dengan pihak lain.

Kondisi-kondisi tersebut diakui oleh responden, seperti terlihat pada tabel di atas.

3. Peran Camat Dalam Koordinasi, Dan Kondisi Koordinasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan

Camat sebagai kepala wilayah kecamatan secara kualitas mempunyai bobot wewenang, tugas, dan kewajiban yang sama dengan kepala wilayah lainnya. Yang membedakan adalah segi kuantitas karena adanya perbedaan tingkatan jenjang (level) serta ruang lingkup geografisnya (Wasistiono: 1991, 14).

Dari sekian wewenang, tugas dan tanggung jawab Camat, salah satu diantaranya adalah menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi-instansi vertikal dan antara instansi-instansi vertikal dengan dinas dinas saerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya (Pasal 81 UU No.5 Tahun 1974).

Dari wewenang, tugas dan tanggung jawab koordinasi tersebut, dapat diterjemahkan ke dalam beberapa indikator. Dari indikator-indikator koordinasi dan peran serta tanggung jawab camat tersebut yang dilontarkan kepada responden, terdapat beberapa indikator yang merupakan permasalahan yang perlu segera ditangani, seperti dapat diikuti pada tabel berikut:

Tabel 4.3.3
Klasifikasi Pendapat Responden Tentang Beberapa Indikator
Peran Camat Dalam Koordinasi Dan Kondisi Koordinasi
Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan

INDIKATOR KOORDINASI	PROSENTASE RESPONDEN PER KLASIFIKASI PENDAPAT			Alasan
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1. Juklak yang diberikan camat kepada Desa/ Kelurahan (F-1 : 10)	56,5 %	25,0 %	18,5 %	5,7,8
2. Keberadaan Juklak pelaksanaan kegiatan yang diberikan camat kepada instansi vertikal dan otonom di kecamatan (F-2 : 36)	35,1 %	41,5 %	23,4 %	7, 8, 9
3. Juklak yang diberikan camat kepada instansi di kecamatan terhadap program/rencana yang akan dilaksanakan (F-2 : 41)	33,7 %	41,6 %	24,7 %	2, 7, 8, 9
4. Peraturan pelaksanaan koordinasi yang ditetapkan Camat untuk Desa/Kelurahan (F1:11)	98,8 %	-	7,2 %	4, 5, 7
5. Peraturan pelaksanaan koordinasi yang ditetapkan Camat untuk instansi vertikal dan otonom di kecamatan (F-2 : 40)	72,0 %	-	28,0	2, 7, 8
6. Ketepatan penjadualan pelaksanaan diskusi UDKP Kecamatan atau temu karya LKMD (F-1:24)	52,3 %	40,5 %	7,2 %	2, 7, 9
7. Kehadiran camat dalam diskusi UDKP (F-1:26)	40,2 %	58,1 %	1,7 %	2, 8, 9
8. Pelaksanaan rapat koordinasi antar instansi untuk membahas pelaksanaan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pemerintahan umum, kemasyarakatan yang melibatkan seluruh petugas instansi (F-2 : 14)	76,0 %	24,0 %	-	2, 5, 6, 9
8. Ketaatan instansi di kecamatan terhadap kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh instansi atasannya (F-3: 41)	27,8 %	72,2 %	-	2, 4, 7
9. Keikutsertaan Camat dalam Rakorda Bangdes Tk. II(F-2: 20)	87,8 %	12,2 %	-	8, 9
10. Ketepatan penjadual diskusi UDKP kecamatan atau temu karya LKMD (F-2 : 3))	26,4 %	64,4 %	9,2 %	2, 4, 9
11. Keseserasian waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan di kecamatan (F-2: 34)				

Lanjutan Tabel 4.3.3

INDIKATOR KOORDINASI	PROSENTASE RESPONDEN PER KLASIFIKASI PENDAPAT			Alasan
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
12. Arus penyampaian data, informasi dan pendapat forum-forum koordinasi dalam rangka koordinasi (F - 2: 39)	32,6 %	61,1 %	6,3 %	2, 3, 5, 6, 9
13. Peran camat dalam pengkoordinasian segala kegiatan dan usaha pembangunan desa (F-2:45)	60,2 %	33,3 %	6,5 %	8, 9
14. Ketepatan penjadualan pelaksanaan diskusi UDKP atau temu karya LKMD (F-3 : 29)	37,3 %	49,0 %	13,7 %	2, 3, 4, 8
15. Penyiapan jumlah, kualifikasi dan kualitas tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan mesin-mesin yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan / proyek (F-3 : 43)	6,1 %	36,7 %	57,2 %	2, 3, 8
16. Kondisi sumber daya manusia di kecamatan (F-3: 49)	63,7 %	-	33,3 %	1, 2, 8, 9
17. Keselarasan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan antar Instansui (F-4: 20)	32,4 %	68,4 %	-	2, 4, 9

Sumber : Data Lapangan, kuesioner, diolah

Keterangan alasan :

- | | |
|--|---|
| 1 = Alasan kuantitas/jumlah SDM | 6 = Alasan geografis dan kondisi daerah |
| 2 = Alasan kualitas dan dedikasi aparat | 7 = Alasan peraturan perundang-undangan |
| 3 = Alasan pendanaan | 8 = Alasan kualifikasi, kemampuan dan peranan Camat |
| 4 = Alasan dominasi pusat | 9 = Alasan lain-lain (bukan kategori 1,2,3, dst) |
| 5 = Alasan partisipasi dan budaya masyarakat | |

Petunjuk pelaksanaan yang diberikan Camat kepada Desa/Kelurahan merupakan salah satu instrumen dalam menciptakan koordinasi yang baik. Namun, diakui oleh aparat desa (Kepala Desa dan Ketua LKMD) ternyata masih banyak camat yang tidak memberikan petunjuk pelaksanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh desa/kelurahan. Ternyata, bukan hanya kepada Desa/Kelurahan, terhadap instansi vertikal dan otonom pun, masih banyak camat yang tidak memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukannya.

Permasalahan lain yang menyebabkan lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di beberapa kecamatan adalah, tidak adanya peraturan pelaksanaan tentang koordinasi yang ditetapkan oleh camat. Hal

ini diakui baik oleh Desa/kelurahan maupun oleh instansi vertikal dan otonom di kecamatan.

Diskusi UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan) dan temu karya LKMD sebagai salah satu forum yang diselenggarakan untuk koordinasi di kecamatan, perlu dilaksanakan secara rutin dan tepat jadwal. UDKP mempunyai arti strategis dalam pelaksanaan pembangunan desa, yang bertujuan: Pertama, mengkoordinasikan keseluruhan kegiatan pembangunan masuk desa, untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang lebih besar melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan wilayah yang menyeluruh dan terpadu dengan pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up planning*). Kedua,, menumbuhkan dan mengembangkan kota-kota kecamatan dan desa-desa dalam wilayahnya sebagai pusat perkembangan kecil atau terkecil di pedesaan, dengan meningkatkan fungsi fasilitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, baik bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan maupun ketertiban dan keamanan masyarakat. Dan ketiga, mempercepat pencapaian desa swasembada di seluruh wilayah, sebagai prakondisi untuk mencapai landasan yang kuat bagi terwujudnya sasaran-sasaran nasional (Mutawali).

Merujuk kepada tujuan-tujuan diselenggarakannya UDKP seperti dikemukakan tersebut, maka apabila UDKP tidak dilaksanakan dengan baik, niscaya upaya *bottom up planning*, pengembangan kota-kota kecamatan dan desa, dan pencapaian desa swasembada tidak akan berjalan dengan lancar. Dan hal ini menjadi kenyataan. Secara, signifikan dapat dikatakan bahwa lambannya pencapaian tujuan-tujuan tersebut antara lain disebabkan kurang baiknya penyelenggaraan diskusi UDKP di kecamatan. Kekurangbaikan penyelenggaraan diskusi UDKP tersebut di beberapa kecamatan terlihat dari: Kurang tepatnya penjadualan pelaksanaan diskusi UDKP Kecamatan atau temu karya LKMD; Kurangnya peran dan kehadiran camat dalam diskusi UDKP; Dan kurangnya keikutsertaan Camat dalam Rakorda Bangdes Tk.II, di beberapa kecamatan, seperti terlihat pada tabel di atas.

Dampak langsung dari kurang baiknya penyelenggaraan diskusi UDKP dan forum-forum koordinasi lainnya di kecamatan adalah kurang serasinya waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan antar instansi; Kurang baiknya arus penyampaian data, informasi, dan pendapat forum-forum koordinasi; Kurang efektifnya peran camat dalam pengkoordinasian segala kegiatan dan usaha pembangunan desa; Serta kurang baiknya dalam penyiapan jumlah, kualifikasi, dan kualitas tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan mesin-mesin yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/proyek.

4. Peran Instansi Teknis Yang Membawahi Instansi Vertikal/Otonom Di Kecamatan Dan Instansi Lainnya Di Kabupaten Daerah Tingkat II Dalam Pelaksanaan Koordinasi

Dari beberapa indikator tentang peran instansi teknis dan instansi lainnya yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II, terdapat dua permasalahan yang mendapat sorotan responden. Permasalahan pertama yang terungkap adalah kurangnya peran serta unsur perencanaan BAPPEDA Tingkat II dalam diskusi UDKP. Sedangkan permasalahan kedua adalah kurangnya kehadiran petugas BANGDES dalam diskusi UDKP kecamatan. Data lengkap hasil pengolahan pendapat responden mengenai kedua permasalahan ini dapat diikuti pada tabel berikut:

Tabel IV.3.4

Klasifikasi Pendapat Responden Tentang Beberapa Indikator Peran Instansi Teknis Yang Membawahi Instansi Di Kecamatan Dan Instansi Lainnya Yang Terkait Dalam Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan

INDIKATOR KOORDINASI	PROSENTASE RESPONDEN PER KLASIFIKASI PENDAPAT			Alasan
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1. Peran serta unsur perencana BAPPEDA Tk. II dalam diskusi UDKP atau Temu Karya LKMD (F-1 : 20) (F-2 : 23) (F-3: 23) (F-4: 15)				
	22,8 %	64,9 %	12,3 %	-
	19,8 %	74,4 %	5,8 %	-
	33,3 %	56,4 %	10,3 %	-
	45,9 %	48,7 %	5,4 %	9
2. Kehadiran petugas BANGDES dalam diskusi UDKP atau Temu Karya LKMD (F-1 : 27) (F-2 : 24) (F-3 : 22) (F-4 : 16)				
	47,2 %	46,4 %	6,4 %	2, 9
	23,8 %	70,2 %	6,0 %	-
	20,0 %	74,0 %	6,0 %	1
	43,9 %	51,2 %	4,9 %	-

Sumber : Data Lapangan, kuesioner, diolah

Keterangan alasan :

- 1 = Alasan kuantitas/ jumlah SDM
- 2 = Alasan kualitas dan dedikasi aparat
- 3 = Alasan pendanaan
- 4 = Alasan dominasi pusat
- 5 = Alasan partisipasi dan budaya masyarakat
- 6 = Alasan geografis dan kondisi daerah
- 7 = Alasan peraturan perundang-undangan
- 8 = Alasan kualifikasi, kemampuan dan peranan Camat
- 9 = Alasan lain-lain (bukan kategori 1,2,3, dst)

Unsur perencana BAPPEDA Tingkat II dan Kepala Kantor Bangdes Kabupaten/kotamadya dalam pelaksanaan diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD bertindak sebagai pengarah. Berdasarkan hasil akumulasi pendapat responden pada setiap strata, ternyata peran kedua unsur ini dalam diskusi UDKP kecamatan dan temu karya LKMD masih perlu ditingkatkan.

D. KOORDINASI PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Variabel ketiga yang menentukan kondisi koordinasi pembangunan di kecamatan adalah koordinasi dalam pelaporan, pengawasan dan pembinaan. Koordinasi pelaporan seperti dimaksudkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 Mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah, adalah: Pertama, bahwa instansi vertikal wajib melaporkan secara periodik (3 bulan sekali) kepada Kepala Wilayah segala sesuatu atas perkembangan pelaksanaan tugasnya. Kedua, setiap akhir tahun anggaran, Kepala Instansi Vertikal menyampaikan laporan tahunan kepada Kepala Wilayah mengenai pelaksanaan tugasnya selama tahun berjalan. Dan ketiga, laporan insidentil agar disampaikan oleh instansi vertikal kepada Kepala Wilayah terhadap hal-hal yang perlu segera mendapat penyelesaian.

Koordinasi pengawasan, seperti termaksud dalam Inmendagri yang sama, mencakup pengertian bahwasannya: Pertama, pengawasan pelaksanaan program/rencana instansi vertikal dilakukan oleh aparat pengawas departemen dan lembaga pemerintah non departemen di bawah koordinasi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Kedua, hasil pengawasan terhadap program/rencana instansi vertikal dimaksud disampaikan kepada Menteri Pimpinan Departemen dan Pimpinan LPN yang bersangkutan oleh BPKP serta tembusannya disampaikan kepada Kepala Wilayah. Dan ketiga, Kepala Wilayah melaporkan data dan informasi hasil pengawasan yang diterima dari BPKP kepada Menteri Pimpinan Departemen dan Pimpinan LPND disertai pertimbangan dan saran dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Sementara koordinasi pembinaan melingkupi dua aspek utama yaitu pengangkatan/pemindahan Kepala Instansi Vertikal dan pelantikannya. Dalam hal pengangkatan/pemindahan, seharusnya dikonsultasikan terlebih dahulu untuk mendapat persetujuan dari kepala wilayah. Selain itu kepala

Wilayah juga dapat memberikan usulan berkenaan dengan pemindahan/pengangkatan Kepala Instansi Vertikal, dan seharusnya selambat-lambatnya 3 bulan sebelum dilakukan mutasi, kepala wilayah mendapat pemberitahuan terlebih dahulu. Dan terakhir, kepala wilayah berhak memberikan pertimbangan penilaian dalam rangka pemberian kondite Kepala Instansi Vertikal kepada pejabat atasannya.

Mengacu kepada Inmendagri tersebut, serta dengan memperluas indikator variabel pelaporan, pengawasan dan pembinaan, tidak hanya terbatas kepada instansi verikal saja, melainkan termasuk juga instansi otonom yang ada di kecamatan, serta pengawasan dan pembinaan Camat terhadap Desa/Kelurahan, maka dilontarkan beberapa pertanyaan untuk menggali informasi tentang hal ini. Tigabelas pertanyaan dilontarkan kepada aparat desa dan tokoh masyarakat, 26 (duapuluh enam) pertanyaan dilontarkan kepada para petugas/kepala instansi vertikal dan otonom di kecamatan, 22 (duapuluh dua) pertanyaan dilontarkan kepada para camat, danramil dan kapolsek, serta 16 (enambelas) pertanyaan diajukan kepada responden aparat di Kabupaten DT.II.

Dari seluruh indikator yang diajukan, terdapat beberapa indikator yang crucial dan perlu mendapat perhatian prioritas untuk memperbaiki koordinasi pembangunan di kecamatan dimaksud. Secara khusus hasil pengolahan data tentang beberapa poin indikator yang perlu mendapat prioritas tersebut akan ditampilkan dalam pembahasan ini.

1. Pelaporan, Pengawasan, Dan Pembinaan Dalam Pelaksanaan Pembangunan/Kegiatan Di Tingkat Desa/Kelurahan

Pelaporan, pengawasan, dan pembinaan yang pertama kali dilihat adalah terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa/Kelurahan. Disadari, bahwa pelaporan, evaluasi dan pembinaan akan berhasil dengan efektif apabila berjalan secara timbal balik. Dal hal ini, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah kecamatan terhadap

Desa/Kelurahan, maupun pihak desa sendiri dalam melakukan konsultasi dan pelaporan-pelaporan, keduanya harus berjalan dengan baik.

Dalam paragraf ini yang akan disoroti adalah bagaimana sikap atau peran Desa/Kelurahan dalam mewujudkan iklim pelaporan, pembinaan, dan pengawasan yang baik di Desa/Kelurahan. Dari sejumlah indikator yang dilemparkan kepada responden, ada 2 (dua) indikator utama yang perlu ditingkatkan. Yang pertama, disiplin pihak Desa/Kelurahan dalam mendokumentasikan berbagai laporan kegiatan yang telah dilaksanakan; Dan kedua, adalah frekuensi komunikasi Desa/Kelurahan dengan camat. Hasil pengolahan data mengenai kedua hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4.1
Klasifikasi Pendapat Responden Tentang Beberapa Indikator Peran
Aparat Desa/Kelurahan Dalam Pelaporan, Pengawasan
Dan Pembinaan Dalam Rangka Koordinasi

INDIKATOR KOORDINASI	PROSENTASE RESPONDEN PER KLASIFIKASI PENDAPAT			Alasan
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1. Pendokumentasian laporan-laporan pelaksanaan kegiatan (F - 1 : 42)	66,7 %	29,6 %	3,7 %	2, 6
2. Frekuensi komunikasi aparat Desa/ Kelurahan dengan Camat (F - 1 : 43)	88,0 %	4,6 %	7,4 %	2, 5

Sumber : Data Lapangan, kuesioner, diolah

Keterangan alasan :

- | | |
|--|---|
| 1 = Alasan kuantitas/jumlah SDM | 6 = Alasan geografis dan kondisi daerah |
| 2 = Alasan kualitas dan dedikasi aparat | 7 = Alasan peraturan perundang-undangan |
| 3 = Alasan pendanaan | 8 = Alasan kualifikasi, kemampuan dan peranan Camat |
| 4 = Alasan dominasi pusat | 9 = Alasan lain-lain (bukan kategori 1,2,3, dst) |
| 5 = Alasan partisipasi dan budaya masyarakat | |

Kurangnya disiplin aparat desa, serta kondisi sarana dan prasarana desa yang kurang baik, merupakan dua faktor yang dominan menuriuti responden, yang merupakan lemahnya pendokumentasian laporan laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Desa/Kelurahan. Sementara yang

menjadi kendala dalam melakukan komunikasi antara Desa/Kelurahan dengan Camat, menurut mereka, selain kurangnya disiplin aparat desa sendiri, juga karena letak geografis desa-desa yang ada relatif jauh dengan kota kecamatan.

2. Peran Instansi Vertikal Dan Otonom Di Kecamatan Dalam Koordinasi Pelaporan, Pengawasan, Dan Pembinaan

Peran Instansi Vertikal dan Otonom yang ada di kecamatan sangat menentukan kelancaran dan ketertiban terselenggaranya koordinasi pelaporan, pengawasan, dan pembinaan di kecamatan. Hal ini disebabkan, instansi-instansi yang ada di kecamatan merupakan ujung tombak pelaksana program dan rencana pembangunan. Dari sejumlah indikator peran instansi vertikal dan otonom di kecamatan, terungkap beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Hasil pengolahan data mengenai hal ini □ dapat diikuti pada tabel berikut:

Tabel IV.4.2
Klasifikasi Pendapat Responden Tentang Beberapa Indikator Peran Instansi Vertikal Dan Otonom Kecamatan Dalam Koordinasi Pelaporan, Pengawasan Dan Pembinaan

INDIKATOR KOORDINASI	PROSENTASE RESPONDEN PER KLASIFIKASI PENDAPAT			Alasan
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1. Laporan Instansi di Kecamatan kepada Camat apabila mendapat hambatan dalam pelaksanaan rencana terutama yang bersangkutan dengan instansi lain (F-2 : 67)	51,0 %	36,2 %	12,8 %	2, 8
2. Pendokumentasian laporan-laporan pelaksanaan kegiatan proyek (F-2 : 84)	71,4 %	-	28,6 %	2, 8, 9
3. Laporan instansi yang ada di kecamatan kepada instansi atasannya tentang hasil koordinasi rencana kegiatan yang dilakukan di kecamatan (F-3 : 54)	35,4 %	64,6 %	-	2, 4, 5 7, 9
4. Tembusan laporan hasil koordinasi kepada camat (F-3: 54)	32,7 %	50,9 %	16,4 %	2, 4, 9

Lanjutan Tabel 4.4.2

INDIKATOR KOORDINASI	PROSENTASE RESPONDEN PER KLASIFIKASI PENDAPAT			Alasan
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
5. Laporan tertulis secara berkala dari instansi yang ada di kecamatan kepada Camat mengenai kegiatan yang dilaksanakannya (F-3 : 54)	25,9 %	40,7 %	33,4 %	4, 7, 8
6. Laporan instansi yang ada di kecamatan kepada camat mengenai rencana/program yang akan dilaksanakannya (F-3: 60)	32,7 %	40,7 %	18,2 %	2, 7, 8
7. Laporan instansi yang ada di Kecamatan kepada Camat mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan.(F-1:26)	32,1 %	39,3 %	28,6 %	2, 4, 7, 9
8. Laporan instansi yang ada di Kecamatan kepada Camat mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan (F-3: 62)	28,8 %	44,2 %	22,0 %	2, 7, 9
9. Laporan periodek 3 (tiga) bulanan dari instansi yang ada di Kecamatan kepada Camat yang berisi tentang perkembangan pelaksanaan tugasnya (F-3: 65)	32,7 %	40,4 %	26,9 %	2, 4, 7, 9
10. Laporan tahunan (setiap akhir tahun anggaran) dari instansi yang ada di Kecamatan kepada Camat yang berisi tentang pelaksanaan tugasnya (F-3: 66)	44,8 %	27,6 %	27,6 %	2, 3, 7
11. Laporan insidental instansi di kecamatan kepada Camat apabila ada hal-hal yang perlu segera diselesaikan (F-3: 67)				

Sumber : Data Lapangan, kuesioner, diolah

Keterangan alasan :

- | | |
|--|---|
| 1 = Alasan kuantitas/jumlah SDM | 6 = Alasan geografis dan kondisi daerah |
| 2 = Alasan kualitas dan dedikasi aparat | 7 = Alasan peraturan perundang-undangan |
| 3 = Alasan pendanaan | 8 = Alasan kualifikasi, kemampuan dan peranan Camat |
| 4 = Alasan dominasi pusat | 9 = Alasan lain-lain (bukan kategori 1,2,3, dst) |
| 5 = Alasan partisipasi dan budaya masyarakat | |

Berdasarkan pengamatan responden, kelemahan yang utama yang dimiliki oleh instansi vertikal dan otonom adalah dalam pelaporan baik yang sifatnya rutin maupun insidental (apabila ada hal-hal atau permasalahan yang perlu segera mendapat penyelesaian); Pelaporan kegiatan yang akan dilaksanakan, sedang dilaksanakan, maupun laporan kegiatan yang

telah dilaksanakan; Laporan terhadap Camat, maupun terhadap terhadap instansi atasannya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Fayol (Dalam Bay Suryawikarta, Makalah, 1996), bahwa koordinasi timbul akibat adanya pembagian pekerjaan (*division of work*). Dengan adanya pembagian pekerjaan maka spesialisasi berkembang.

Dengan semakin banyaknya pekerjaan, maka kemungkinan terjadinya benturan pun semakin besar. Berkaitan dengan itu koordinasi semakin penting dengan makin banyaknya perbedaan kegiatan-kegiatan (Bay Suryawikarta, Makalah).

Dalam kondisi ini perlu adanya koordinator baik bersifat institusi maupun individu. Dan dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan, Camat-lah yang bertindak sebagai koordinator. Sebagaimana dalam asas perencanaan dari bawah (*bottom up planning*), maka segala keluhan yang berkaitan dengan hambatan pelaksanaan koordinasi pembangunan perlu dilaporkan kepada koordinator, terlebih-lebih hambatan tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau kegiatan pihak lain dalam satu cakupan koordinasi. Merujuk kepada pendapat tersebut, maka kurang baiknya pelaporan instansi vertikal dan otonom yang ada di kecamatan kepada Camat, apabila mendapat hambatan yang berkenaan dengan instansi lainnya, merupakan kendala yang menghambat kelancaran pembangunan di Kecamatan.

Selain itu, untuk mengikuti dan menilai apakah penyelenggaraan kegiatan proyek sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan atau peraturan yang telah ditetapkan, maka diadakan sistem pengendalian yang memungkinkan identifikasi bagi tindakan-tindakan korektif secepatnya serta penyempurnaan perencanaan berikutnya. Dalam kegiatan usaha pengendalian program dan proyek pembangunan terdapat kegiatan pelaporan yang memberikan informasi dan data faktual tentang status perkembangannya (Tjokroamidjojo; 1987, 193).

Pelaporan instansi vertikal terhadap Camat, merupakan instrumen pengendalian Camat terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan berbagai instansi di wilayahnya. Sebagaimana dikatakan Bintoro Tjokroamidjojo (1987; 193), bahwa suatu pengendalian terdiri dari berbagai unsur antara lain adanya *feedback* dengan sistem pelaporan yang baik. Pelaporan yang baik, juga harus memuat mengenai pelaksanaan manajemennya, pencapaian sasaran fisik, pencapaian pelaksanaan pembiayaan, serta pencapaian tujuan dan sasarannya.

Dalam prakteknya, laporan yang semestinya dilakukan dengan baik oleh instansi vertikal dan otonom kepada Camat, dinilai oleh responden masih relatif kurang bahkan tidak baik. Laporan-laporan dimaksud adalah: Laporan mengenai rencana/program yang akan dilaksanakan, kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan kegiatan yang sedang dilaksanakan; Laporan periodik 3 (tiga) bulanan mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan; Serta Laporan tahunan (setiap akhir tahun anggaran) yang berisi tentang pelaksanaan tugasnya pada tahun anggaran yang bersangkutan. Tidak hanya dalam frekuensi pelaporannya, pendokumentasian yang merupakan salah satu unsur dari pelaporan, dinilai masih kurang baik bahkan tidak baik.

Kebijaksanaan dari Departemen/LPN untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di kecamatan, disampaikan oleh instansi-instansi bawahannya yang ada di Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten Daerah Tingkat II. Oleh karena itu, dalam rangka perencanaan dari bawah (*bottom up planning*), maka pelaporan dari instansi-instansi yang operasional di kecamatan merupakan masukan bagi instansi di atasnya. Dalam menentukan kebijaksanaan dan perencanaan lebih lanjut. Namun, berdasarkan pengakuan responden pelaporan tentang hasil koordinasi rencana kegiatan di kecamatan, dari instansi-instansi yang ada di kecamatan kepada atasannya ini belum berjalan dengan baik. Dengan demikian, ini pun merupakan salah satu kendala bagi terselenggaranya efektivitas pembangunan dan koordinasi pembangunan di Kecamatan.

Ada 6 (enam) alasan utama yang menyebabkan lemahnya peran instansi vertikal dan otonom di kecamatan, dalam melakukan pelaporan ini. Pertama, kurang disiplinnya para aparat yang ditempatkan di kecamatan tersebut; Kedua, kurangnya pendanaan, sehingga sistem pelaporan yang sangat penting ini, tidak terlalu dihiraukan; Ketiga dan keempat akibat adanya campur tangan atasan dalam baik langsung maupun berupa peraturan perundang-undangan yang membuat kaku terhadap proses pelaporan ini. Mengenai bentuk, serta frekuensi pelaporan yang sudah ditentukan, kadang membuat sistem menjadi kaku (tidak fleksibel). Dalam kondisi ini, instansi yang ada di kecamatan menghadapi komando ganda. Pertama dari atasannya langsung, yang kedua dari koordinator pembangunan di kecamatan yaitu Camat, yang kadang-kala antara kedua komando ini tidak berjalan secara berbarengan.

Faktor penyebab kelima adalah kurangnya dukungan masyarakat dalam memberikan data-data sebagai bahan laporan. Namun, sekali lagi bahwa dalam kondisi masyarakat yang sikap primordialnya masih tinggi, maka kurangnya partisipasi dan dukungan terhadap pembangunan, bukan semata-mata karena masyarakat yang tidak mau, namun sebagai dampak dari kurangnya pemberdayaan (*empowering*) yang dilakukan pihak aparat. Sementara alasan terakhir penyebab lemahnya pelaksanaan sistem pelaporan ini adalah kurangnya daya simpati dan wibawa Camat, sehingga para beberapa petugas instansi yang ada di kecamatan kurang hirau terhadap kepemimpinan Camat.

3. Peran Camat Dalam Koordinasi Pelaporan, Pengawasan, Dan Pembinaan

Camat merupakan subjek pengawasan dan pembinaan serta penerima laporan dari berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan berbagai instansi dan desa-desa/kelurahan yang ada di wilayahnya. Selain berhak menerima laporan, camat juga berkewajiban untuk memberikan laporan kepada atasannya. Sehubungan dengan itu berbagai indikator, dilontarkan kepada responden untuk melihat peran Camat dalam koordinasi

pelaporan, pengawasan, dan pembinaan, baik peran aktif maupun peran pasifnya. Hasil pengolahan data mengenai hal ini, terdapat 10 permasalahan utama berkenaan dengan peran Camat, sebagai berikut:

Tabel IV.4.3
Klasifikasi Pendapat Responden Tentang Beberapa Indikator
Peran Camat Dalam Koordinasi Pelaporan, Pengawasan
Dan Pembinaan Di Kecamatan

INDIKATOR KOORDINASI	PROSENTASE RESPONDEN PER KLASIFIKASI PENDAPAT			Alasan
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1. Bentuk instruksi Camat terhadap aparat Desa/Kelurahan (F - 1 : 48)	68,5 %	-	31,5 %	2, 4, 7, 8
2. Bentuk instruksi Camat terhadap Kepala/Petugas instansi di Kecamatan (F-2: 59)	76,0 %	-	24,0 %	8
3. Monitoring Camat terhadap kegiatan di Desa/Keluarahan (F - 3 : 54)	62,4 %	36,8 %	0,8 %	2, 6, 7, 8
4. Monitoring Camat terhadap kegiatan di Desa/Kelurahan (F-2 : 60) (F-4 : 28)	59,6 %	36,4 %	4,0 %	8
	81,4 %	18,0 %	-	8
5. Permintaan Camat atas keterangan pelaksanaan tugas yang dilakukan instansi di kecamatan (F-3 : 54)	43,2 %	43,2 %	13,6 %	
6. Evaluasi Camat terhadap kegiatan yang dilakukan di Desa/Kelurahan (F-1: 51)	65,0 %	33,3 %	1,7 %	8
7. Evaluasi Camat terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan instansi di Kecamatan. (F-2: 61) (F-4: 29)	44,8 %	43,8 %	11,4 %	8
	53,5 %	44,2 %	2,3 %	
8. Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Camat terhadap kegiatan di Desa/Kelurahan (F-1 : 50)	47,0 %	50,4 %	2,6 %	2, 8
9. Laporan Camat kepada pejabat berwenang dengan memberi tembusan kepada instansi di kecamatan dengan koordinasi (F-2 : 63) (F-4 : 31)	41,9 %	39,5 %	18,6 %	-
	43,2 %	52,3 %	4,5 %	2, 8, 9

Lanjutan Tabel IV.4.3.

INDIKATOR KOORDINASI	PROSENTASE RESPONDEN PER KLASIFIKASI PENDAPAT			Alasan
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
10. Usulan Camat kepada pejabat atasannya untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada petugas instansi yang lalai (F-2: 71) (F-3: 70) (F-4: 34)	22,6 % 18,8 % 31,7 %	36,9 % 34,4 % 31,7 %	40,5 % 46,8 % 36,6 %	 4, 6, 8 4, 8, 9

Sumber : Data Lapangan, kuesioner, diolah

Keterangan alasan :

- | | |
|--|---|
| 1 = Alasan kuantitas/jumlah SDM | 6 = Alasan geografis dan kondisi daerah |
| 2 = Alasan kualitas dan dedikasi aparat | 7 = Alasan peraturan perundang-undangan |
| 3 = Alasan pendanaan | 8 = Alasan kualifikasi, kemampuan dan peranan Camat |
| 4 = Alasan dominasi pusat | 9 = Alasan lain-lain (bukan kategori 1,2,3, dst) |
| 5 = Alasan partisipasi dan budaya masyarakat | |

Instruksi merupakan salah satu fungsi pokok komunikasi dalam anajemen yang bertujuan untuk memberikan perintah atau instruksi kepada perorangan atau kelompok mengenai berbagai hal yang harus dilakukan (Surya: 1994, 128). Komunikasi dilihat dari sudut proses administrasi merupakan alat untuk administrasi. Dengan demikian, suksesnya administrasi banyak tergantung dari suksesnya komunikasi. Salah kirim message, salah alamat, metode yang salah, alat kurang sesuai, semua itu dapat menimbulkan salah pengertian dan salah pengertian menimbulkan salah administrasi (Abulrachman: 1979, 141).

Dengan demikian, keefektivan instruksi yang disampaikan Camat baik kepada instansi vertikal dan otonom maupun kepada desa/kelurahan yang ada di wilayahnya, merupakan salah satu syarat tercapainya tujuan pembangunan. Namun, diakui responden instruksi yang diberikan Camat dirasakan kurang baik. Sering kali Camat memberikan instruksinya dalam bentuk 'lisan, atau secara tidak langsung melalui perantara pihak lain. Alhasil, tidak mustahil arus informasi tidak berjalan lancar. Ketidaksampaian informasi, kesalahan isi pesan, keterlambatan penyampaian

semacam ini, baik langsung atau pun tidak, dapat menjadi kendala bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kecamatan.

Monitoring, seperti dikemukakan pada paragraf sebelumnya, merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan. Demikian juga pengendalian yang dilakukan oleh Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan instansi dan Desa/Kelurahan yang ada di Wilayahnya. Kurangnya monitoring tersebut, seperti kondisi saat ini di beberapa kecamatan menyebabkan kurang efektif dan kurang efisiennya kegiatan pembangunan yang dilakukan di Kecamatan.

Aspek lain yang terdapat dalam suatu sistem pengendalian menurut **Bintoro Tjokroamidjojo** (1987: 193) adalah adanya evaluasi terhadap hasil pantauan, untuk mendapatkan masalah-masalah pelaksanaan yang harus dipecahkan. Evaluasi merupakan proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai (**Siagian: 1987, 141**). Bahkan **Sondang P. Siagian** mengatakan bahwa evaluasi merupakan fungsi organik, karena pelaksanaan fungsi ini turut menentukan mati/hidupnya suatu organisasi. Sementara **Coralie Bryant dan Louise G. White** (1989, 193) menyatakan, Evaluasi merupakan upaya untuk mendokumentasi apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi. Idealnya, suatu proyek dirancang untuk menentukan hubungan sebab akibat itu, dan dengan demikian pemikiran ke depan mengenai evaluasi menjadi suatu aspek integral dari rancangan semula.

Menyimak pendapat-pendapat para ahli tersebut, jelas bahwa evaluasi pelaksanaan pembangunan di kecamatan merupakan aspek penting yang mesti dilakukan apabila menginginkan kegiatan pembangunan tersebut berjalan dengan baik dan mengalami kemajuan dari periode ke periode atau dari fase ke fase, karena evaluasi bersifat korektif terhadap fase berikutnya (**Siagian; 1987, 143**). Jadi jelas, belum optimalnya pelaksanaan evaluasi yang dilakukan Camat terhadap instansi dan

Desa/Kelurahan yang ada di wilayahnya seperti sekarang ini, akan menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kecamatan.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat terhadap kegiatan yang dilakukan di Desa/Kelurahan dan instansi-instansi yang ada di Kecamatan, di beberapa kecamatan nampaknya belum optimal dilaksanakan. Padahal, pengawasan ditujukan agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian; 1987, 135). Selain dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, pengawasan juga dimaksudkan agar prosedur pelaksanaan sesuai dengan prosedur yang telah diciptakan, agar benar-benar pelaksanaan menjadi efektif dan efisien karena prosedur telah memperhatikan usaha penyatupaduan kegiatan (Sugandha; 1984, 99).

Pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang lalai atau kurang mengindahkan ketentuan yang ada, merupakan salah satu instrumen untuk menegakkan disiplin dalam upaya optimalitas pencapaian tujuan kegiatan pembangunan. Hal ini seperti disarankan Bintoro Tjokroamidjojo (1987, 202) bahwa dalam rangka hubungan pengawasan pembangunan dan iklim/nilai-nilai sosial perlu usaha positif pengembangan pola nilai dan perilaku yang kondusif untuk pengawasan pembangunan tersebut. Salah satu usaha yang perlu dilakukan adalah adanya diferensiasi dalam sistem insentif dan disinsentif *reward* dan *punishment* dalam penerapan kepada pelaksanaan disiplin dan susila kerja baik dan yang tidak baik.

Memperhatikan kondisi saat ini, dimana budaya ewuh pakewuh masih melekat kuat, tidak hanya di kalangan masyarakat melainkan pula di kalangan birokrat termasuk aparat kecamatan, menyebabkan lemahnya tindakan sanksi yang diberikan. Hal ini terlihat jelas dari pendapat responden, yang menyatakan bahwa usulan camat kepada pejabat atasannya untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada petugas instansi yang lalai, kurang berjalan.

Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Camat dalam rangka koordinasi pelaporan, pengawasan dan pembinaan ini pada dasarnya berpangkal dari 4 (empat) faktor utama yang menyebabkannya. Pertama, rendahnya disiplin dan dedikasi aparat kecamatan sendiri; Kedua, adanya dominasi pusat dalam arti instansi-instansi yang membawahi instansi vertikal dan otonom di Kecamatan, baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga membuat Camat kurang berdaya; Ketiga, kondisi geografis yang kurang mendukung, dimana letak kecamatan yang relatif jauh dari ibukota kabupaten, dan letak desa-desa yang juga kurang terjangkau informasi dari kecamatan. Dan penyebab terakhir adalah karena kurangnya kemampuan Camat sendiri dalam mewujudkan kondisi yang kondusif bagi koordinasi pelaporan, pengawasan dan evaluasi tersebut.

4. Peran Instansi Teknis Yang Membawahi Instansi Vertikal Dan Otonom Di Kecamatan Serta Instansi Lainnya Dalam Koordinasi Pelaporan, Pengawasan, Dan Pembinaan

Dari beberapa indikator yang dilontarkan kepada responden mengenai peran instansi teknis yang membawahi instansi vertikal dan otonom di Kecamatan, serta instansi lainnya yang terkait, ada 6 (enam) permasalahan pokok yang menurut responden masih relatif kurang bahkan tidak baik.

Keenam permasalahan tersebut adalah: Pertama, kurangnya konsultasi instansi teknis yang membawahi instansi-instansi di kecamatan dengan camat, apabila akan dilakukan pengangkatan kepala/petugas instansi tersebut di kecamatan. Kedua, pejabat penilai kurang memperhatikan pertimbangan Camat dalam melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan petugas instansi di kecamatan. Tiga, kurangnya tindakan administratif terhadap petugas instansi yang lalai atau tidak mengindahkan ketentuan koordinasi, yang dikenakan pejabat atasannya. Keempat, kurangnya pengawasan dari aparat pengawas Departemen/LPND-nya terhadap kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang ada di Kecamatan. Kelima, kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan

Departemen/LPND terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan koordinasi oleh instansi yang ada di Kecamatan. Dan terakhir, tembusan hasil pengawasan aparat pengawas Departemen/LPND jarang disampaikan kepada Camat. Keenam permasalahan tersebut dapat diikuti pada tabel berikut:

Tabel IV.4.4
Klasifikasi Pendapat Responden Tentang Beberapa Indikator
Peran Instansi Teknis Yang Membawahi Instansi Vertikal
Dan Otonon Di Kecamatan Serta Instansi Lainnya,
Dalam Koordinasi Pelaporan, Pengawasan
Dan Pembinaan Di Kecamatan

INDIKATOR KOORDINASI	PROSENTASE RESPONDEN PER KLASIFIKASI PENDAPAT			Alasan
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1. Konsultasi instansi teknis yang membawahi instansi-instansi di kecamatan, dengan camat apabila akan dilakukan pengangkatan kepala/ petugas instansi tersebut di Kecamatan (F - 3 : 38)	29,4 %	41,2 %	29,4 %	2, 4, 8, 9
2. Pejabat penilai dalam memperhatikan perimbangan camat apabila melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan petugas instansi (F-2 : 65) (F-3 : 59)	30,0 % 31,4 %	54,4 % 43,1 %	15,6 % 25,5 %	- 2, 4, 8, 9
3. Tindakan administratif terhadap petugas instansi lalai atau tidak mengindahkan ketentuan koordinasi, yang dikenakan pejabat atasannya (F-3 : 58)	24,4 %	40,0 %	35,6 %	2
4. Pengawasan dari aparat pengawas Departemen/LPND-nya terhadap kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang ada di Kecamatan (F-3 : 68) (F-4 : 33)	42,0 % 61,9 %	48,0 % 26,2 %	10,0 % 11,9 %	6, 9 9
5. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Departemen/LPND terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan koordinasi oleh instansi yang ada di kecamatan (F - 4 : 32)	45,0 %	37,5 %	17,5 %	2

Lanjutan Tabel IV.4.4

INDIKATOR KOORDINASI	PROSENTASE RESPONDEN PER KLASIFIKASI PENDAPAT			Alasan
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
6. Tembusan yang diberikan aparat pengawas Departemen/LPND kepada camat, mengenai hasil pengawasan terhadap instansi yang ada di Kecamatan (F-3 : 69)	26,8 %	30,4 %	42,8 %	2,4,7

Sumber : Data Lapangan, kuesioner, diolah

Keterangan alasan :

- | | |
|--|---|
| 1 = Alasan kuantitas/jumlah SDM | 6 = Alasan geografis dan kondisi daerah |
| 2 = Alasan kualitas dan dedikasi aparat | 7 = Alasan peraturan perundang-undangan |
| 3 = Alasan pendanaan | 8 = Alasan kualifikasi, kemampuan dan peranan Camat |
| 4 = Alasan dominasi pusat | 9 = Alasan lain-lain (bukan kategori 1,2,3, dst) |
| 5 = Alasan partisipasi dan budaya masyarakat | |

Jika disimak, kelemahan peran instansi teknis tersebut adalah terhadap dua pihak, pertama terhadap Camat sebagai koordinator pembangunan di kecamatan, dankedua terhadap bawahannya sendiri, yaitu instansi vertikal dan otonom yang ada di Kecamatan. Terhadap Camat, instansi teknis kurang menghiraukannya, mereka terlalu mendominasi dalam pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan di kecamatan. Sementara terhadap bawahannya, mereka kurang bertindak tegas dan kurang melakukan pembinaan.

Jika dilihat alasan yang dikemukakan responden, nampaknya sangat sejalan. Mereka mengatakan bahwa lemahnya peran instansi teknis dalam hal-hal tersebut disebabkan karena 5 (lima) hal utama, yaitu; Pertama, kurangnya disiplin aparat instansi teknis sendiri; Kedua, adanya dominasi instansi teknis tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk peraturan perundang-undangan; Ketiga, kondisi geografis yang kurang mendukung, dimana kecamatan-kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten atau tempat kedudukan instansi pembina dan pengawas berada, kurang mendapat perhatian dari instansi teknis tersebut. Dan alasan terakhir, karena kurangnya inisiatif pihak pemerintah kecamatan. Seperti dikemukakan pada paragraf sebelumnya, bahwa Camat kurang mempunyai inisiatif dalam mengajukan sanksi hukuman

administratif kepada instansi teknis jika ada instansi di wilayahnya yang lalai, Hal ini menyebabkan tindakan hukuman administratif yang dikenakan instansi yang berwenang pun sangat kurang. Dan secara logis hal ini, memperlemah sistem pengawasan, pengendalian, dan evaluasi, yang pada akhirnya memperlemah efektivitas pembangunan di Kecamatan.

E. PELAYANAN, PEMBERDAYAAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Aspek pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap pembangunan di Kecamatan. Dan perlu digarisbawahi pula, bahwa pembangunan di Kecamatan pada akhirnya bukan hanya dilaksanakan oleh instansi-instansi yang ada di kecamatan itu saja, tetapi justru yang paling dominan dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan komponen mutlak dalam pembangunan di Kecamatan.

Partisipasi masyarakat akan muncul apabila mereka mendapat perlakuan yang baik dari aparat dan merasakan kemanfaatan dari pembangunan itu. Mengenai "perlakuan yang baik" ini artinya, bahwa partisipasi masyarakat akan kuat jika didukung oleh pelayanan yang baik oleh aparat pemerintah terhadap masyarakat. Tentu argumen ini bermula dari, bahwasannya peran-serta masyarakat akan muncul tatkala masyarakat memandang positif terhadap aparat yang ada, dan aparat akan dipandang baik jika mampu memeberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Sebagaimana dikemukakan **David Osborn** dalam *Reinventing Government* bahwa image masyarakat terhadap aparatur akan berubah ke arah yang positif apabila aparatur mampu profesional.

Faktor lain pun yang berandil terhadap berperannya masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan adalah upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak aparat sendiri. Selain, faktor stimulus berupa kualitas dan kecepatan pelayanan, juga perlu motivasi berupa upaya pemberdayaan itu.

Tabel IV.5.1
Pendapat Responden Tentang Pelayanan Dan Pemberdayaan
Masyarakat Di Kecamatan

INDIKATOR KOORDINASI	PROSENTASE RESPONDEN PER KLASIFIKASI PENDAPAT			Alasan
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1. Ketanggapan Camat terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang (F-1 : 56) (F-2 : 89) (F-4 : 47)	77,7 % 89,9 % 79,5 %	17,5 % 10,1 % 20,5 %	4,8 % - -	- 6 8
2. Upaya Camat untuk mengatasi pengangguran di Wilayahnya (F-1 : 58) (F-1 : 91) (F-1 : 50)	50,5 % 56,3 % 48,8 %	45,4 % 43,7 % 46,5 %	4,1 % - 4,7 %	4, 8, 9 5, 8 2, 5, 9
3. Perhatian Camat terhadap penggunaan tenaga kerja di wilayahnya (F-1 : 60) (F-2 : 92) (F-4 : 51)	72,5 % 91,9 % 42,2 %	- - -	27,5 % 8,1 % 57,8 %	4, 8, 9 9 1, 2, 8
4. Kesesuaian berbagai kegiatan instansi di Desa dengan kebutuhan masyarakat (F-1 : 63)	23,1 %	61,5 %	15,4 %	2, 8, 9
5. Upaya Camat dalam pembangunan prasarana desa dan pengembangan perekonomian desa (F-1 : 64)	54,9 %	41,8 %	4,3 %	4
6. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Kepada Masyarakat (F-1 : 71c) (F-4 : 53c)	50,6 % 39,1 %	43,7 % 40,6 %	5,7 % 20,3 %	- -
7. Penyelesaian perselisihan-perselisihan yang diajukan oleh Kepala Desa sebagai hakim perdamaian (F-1 : 71p) (F-4 : 53p)	76,7 % 60,0 %	20,0 % 20,0 %	3,3 % 20,0 %	- -
8. Kantor Camat dalam fungsinya sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat (F-1 : 67) (F-3 : 77) (F-4 : 52)	70,5 % 73,8 % 67,4 %	22,1 % 26,2 % 33,6 %	7,4 % - -	2, 4 1, 2, 8 -

Lanjutan Tabel 4.4.2

INDIKATOR KOORDINASI	PROSENTASE RESPONDEN PER KLASIFIKASI PENDAPAT			Alasan
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
9. Kantor Camat dalam fungsinya sebagai pusat pengolahan data (F-3: 76)	27,5 %	68,8 %	3,7 %	2,3,8
10. Pelaksanaan kewajiban camat dlm membina kehidupan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melayani masyarakat (F-1 : 53) (F-2 : 85)	83,0 % 78,3 %	12,5 % 17,4 %	4,5 % 4,3 %	9 9
11. Pemberian penerangan oleh Camat kepada seluruh instansi dan masyarakat di Desa, mengenai kebijaksanaan pemerintah (F-1 : 54) (F-2 : 86)	62,4 % 76,4 %	23,8 % 20,2 %	13,8 % 3,4 %	7,8,9 3,8,9
12. Perlombaan Desa, dalam rangka merangsang pelaksanaan pembangunan desa (F-1 : 68)	64,0 %	25,3 %	10,7 %	4,5
13. Penjelasan Camat bersama-sama kepala (petugas) instansi dan Kepala Desa/ Kelurahan dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kegiatan/ proyek yang akan dilaksanakan serta manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat (F-1 : 69) (F-3 : 74)	62,9 % 78,3 %	29,2 % 16,7 %	7,9 % 5,0 %	4,9 -
14. Camat bersama-sama kepala (petugas) instansi dan Kepala Desa/ Kelurahan dalam menyiapkan dukungan dana pembinaan gerakan peran serta masyarakat (F-1 : 70) (F-3 : 75)	49,1 % 64,5 %	34,5 % 32,3 %	16,4 % 3,2 %	- -
15. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan unsur perlindungan, bimbingan, pembinaan dan pelayanan (F-1 : 71b) (F-4 : 53b)	24,4 % 38,6 %	70,9 % 42,9 %	4,7 % 18,5 %	- -
16. Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Desa (LBD) di wilayahnya (F-1 : 71q) (F-4 : 53 q)	87,7 % 60,0 %	12,3 % 20,0 %	- 20,0 %	- -

Sumber : Data Lapangan, kuesioner, diolah

Keterangan alasan :

- | | |
|--|---|
| 1 = Alasan kuantitas/jumlah SDM | 6 = Alasan geografis dan kondisi daerah |
| 2 = Alasan kualitas dan dedikasi aparat | 7 = Alasan peraturan perundang-undangan |
| 3 = Alasan pendanaan | 8 = Alasan kualifikasi, kemampuan dan peranan Camat |
| 4 = Alasan dominasi pusat | 9 = Alasan lain-lain (bukan kategori 1,2,3, dst) |
| 5 = Alasan partisipasi dan budaya masyarakat | |

Pelayanan yang baik hanya akan dihasilkan oleh aparat yang profesional. Glasser, Abelson, & Garrison mengatakan bahwa birokrat negara dituntut untuk memiliki keahlian, kepaiawaian, dalam bidang spesialisasi tertentu dalam menjalankan roda administrasi negara (Suryawikarta dalam Menuju Format Baru, 1994, 42). Sementara itu, memperhatikan wewenang, tugas dan kewajiban seorang Kepala Wilayan seperti halnya Camat yang begitu kompleks, apalagi jika di wilayahnya belum terdapat instansi-instansi teknis baik vertiukal maupun otonom yang lengkap, maka diperlukan seorang "generalis" yang mampu mengetahui serba sedikit mengenai banyak hal serta menyangkut bidang tugas dengan cakupan yang luas dan beraneka ragam. Namun, seiring dengan kemajuan masyarakat dan tingkat kerumitan tugas pelayanan umum, peran generalis tertsebut secara bertahap akan berkurang diganti oleh para spesialis. Sang generalis tersebut pada akhirnya hanya akan berfungsi sebagai koordinator (Wasistiono, 1991, 16).

Dari pernyataan-pernyataan ini, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa kurang baiknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh Camat, banyak disebabkan oleh karena terlalu banyaknya wewenang, tugas, dan kewajiban Camat, disamping sebagai koordinator pembangunan di Wilayahnya. Di satu sisi Camat harus berkualifikasi "generalis", namun di sisi lain Camat juga harus berkualifikasi "spesialis".

Kurang baiknya pelayanan yang diberikan oleh Camat dalam aspek-aspek tertentu, dapat dilihat pada tabel di atas. Ketanggapan terhadap aspirasi masyarakat yang selalu berkembang, upaya untuk mengatasi pengangguran, perhatian terhadap penggunaan tenaga kerja, pembangunan prasarana desa dan pengembangan perekonomian desa,

pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada masyarakat, penyelesaian perselisih-perselisihan yang diajukan oleh Kepala Desa sebagai akim perdamaian Desa, merupakan tugas dan kewajiban Camat dalam melayani masyarakat di Wilayahnya, yang banyak mendapat sorotan esponden karena dirasakan masih relatif kurang bahkan tidak baik. Demikian juga, keberfungsian Kantor Camat sebagai pusat pelayanan epada masyarakat dan sebagai pusat pengolahan dan sumber data merupakan aspek pelayanan yang dirasakan masih kurang baik.

Apabila ditelusuri faktor-faktor penyebabnya yang terungkap dari opini responden tersebut, tidaklah jauh seperti yang diungkapkan oleh para ahli di atas. Pertama, kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di Kecamatan, karena meskipun itu merupakan tugas dan kewajiban Camat, namun tidak terlepas dari aparat-aparat lain yang membatunya di Kecamatan. Kualitas dan kuantitas yang kurang dibarengi pula oleh disiplin dan dedikasi yang rendah, dan kurangnya dana untuk upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut, yang apada akhirnya seolah-olah Camat tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Faktor-faktor eksternal berupa adanya dominasi dari tingkat pusat sehingga membuat Camat dan para pembantunya kaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kondisi geografis yang kurang dapat dijangkau dari Kecamatan, serta faktor budaya dan partisipasi masyarakat yang kurang mendukung juga berpengaruh terhadap pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Camat dan aparat kecamatan lainnya.

Aspek pemberdayaan masyarakat, sebagai upaya aktif dari pihak pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, baik melalui instrumen langsung berupa pembinaan, penerangan, himbauan dan lain-lain, maupun secara tidak langsung melalui pemberian perhatian dan pelayanan kepada masyarakat, merupakan aspek penting dalam menunjang kelancaran pembangunan di kecamatan. Berkaitan dengan hal tersebut,

ada beberapa aspek yang mendapat perhatian responden mengenai aspek pemberdayaan ini, seperti terlihat pada tabel di atas.

Pembinaan kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melayani masyarakat, pemberian penerangan kepada seluruh instansi dan masyarakat Desa mengenai kebijaksanaan pemerintah, dan pembinaan serta pengembangan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Desa (LBD) di Wilayah Kecamatan, perlombaan Desa dalam rangka merangsang pelaksanaan pembangunan Desa, merupakan tugas dan kewajiban camat dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang banyak disoroti oleh responden. Ketiga aspek tersebut dinilai masih kurang baik, seperti terlihat pada tabel di atas.

Demikian juga penjelasan Camat bersama petugas instansi dan Kepala Desa/Kelurahan kepada masyarakat mengenai kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan serta manfaat langsung maupun tidak langsungnya bagi masyarakat, serta penyiapan dukungan dan pembinaan gerakan peranserta masyarakat, tidak selalu dilaksanakan.

Berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat, **Buchari Zainun** (Dalam "Menuju Format Baru Pelayanan Umum", 1994, 2-4) mengkaitkannya dengan dua aspek. Buchari Zainun mengatakan, substansi pelayanan bukanlah semata-mata persoalan administratif atau pemenuhan kebutuhan fisik belaka. Pelayanan secara lebih mendasar menyangkut pula 2 (dua) aspek lainnya, yaitu aspek partisipasi masyarakat, dan akses pembangunan bagi masyarakat. Jadi anatar aspek pelayanan, partisipasi masyarakat, dan akses pembangunan bagi masyarakat merupakan 3 (tiga) aspek yang tidak bisa dipisahkan.

Tabel IV.5.2
Pendapat Responden Tentang Respon/Partisipasi
Masyarakat Di Kecamatan

INDIKATOR KOORDINASI	PROSENTASE RESPONDEN PER KLASIFIKASI PENDAPAT			Alasan
	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1. Respon masyarakat terhadap kebijaksanaan instansi dan program-program kerja instansi (F-1 : 61)	53,4 %	39,0 %	7,6 %	4,9
(F-3 : 78)	67,5 %	30,0 %	2,5 %	-
(F-4 : 44)	42,9 %	57,1 %	-	3,5

Sumber : Data Lapangan, kuesioner, diolah

Keterangan alasan :

- | | |
|--|---|
| 1 = Alasan kuantitas/jumlah SDM | 6 = Alasan geografis dan kondisi daerah |
| 2 = Alasan kualitas dan dedikasi aparat | 7 = Alasan peraturan perundang-undangan |
| 3 = Alasan pendanaan | 8 = Alasan kualifikasi, kemampuan dan peranan Camat |
| 4 = Alasan dominasi pusat | 9 = Alasan lain-lain (bukan kategori 1,2,3, dst) |
| 5 = Alasan partisipasi dan budaya masyarakat | |

Merujuk kepada pendapat ahli tersebut, maka kurang baiknya respon/partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi di Kecamatan, akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya jika pelayanan yang diberikan oleh aparat kurang baik maka partisipasi masyarakat pun akan rendah.

Memperhatikan hubungan timbal balik seperti tersebut, maka rendahnya respon/partisipasi masyarakat terhadap program-program dan kebijaksanaan instansi disebabkan rendahnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dan kurangnya akses pembangunan bagi masyarakat.

REKAPITULASI

Rekapitulasi Laporan Keuangan Tahunan 2013
Perusahaan Terbuka

Kategori	Laporan Laba Rugi			Catatan
	2013	2012	2011	
1. Pendapatan Operasional	4.211	2.185	2.508	1.1.1
2. Biaya Operasional	4.211	4.572	4.556	1.1.2
3. Laba Rugi	0	(2.387)	(2.048)	1.1.3

1.1.1 Pendapatan Operasional
 1.1.2 Biaya Operasional
 1.1.3 Laba Rugi

Rekapitulasi Laporan Keuangan Tahunan 2013
 Perusahaan Terbuka

Rekapitulasi Laporan Laba Rugi menunjukkan bahwa pendapatan operasional tahun 2013 sebesar Rp 4.211,00 juta, sama dengan tahun 2012. Biaya operasional tahun 2013 sebesar Rp 4.211,00 juta, lebih rendah dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp 4.572,00 juta. Akibatnya, laba rugi tahun 2013 adalah Rp 0,00 juta, sedangkan tahun 2012 mengalami kerugian sebesar Rp 2.387,00 juta.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dalam koordinasi pembangunan di Wilayah Kecamatan, ditentukan oleh 5 pelaku utama, yaitu Desa/Kelurahan, masyarakat, Instansi Vertikal dan Otonom yang ada di Kecamatan, Camat, dan Instansi-instansi yang ada di tingkat atasnya yang terkait baik langsung atau pun tidak dengan pembangunan di Kecamatan. Sementara itu, dilihat dari prosesnya, koordinasi pembangunan di Kecamatan dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan dan pembinaan, serta partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan 5 (lima) pelaku utama, serta proses pelaksanaan koordinasi tersebut, untuk meningkatkan koordinasi dalam upaya pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan di Kecamatan, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan di Desa dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), yang dibahas saat Rapat LKMD dengan Ketua LKMD sebagai pimpinan; Camat dan petugas BANGDES Kecamatan sebagai pengarah; Pengurus LKMD, LMD, dan aparat pemerintah yang ada di Desa sebagai peserta. Dalam kesempatan tersebut, dibahas rencana proyek-proyek yang diusulkan oleh LKMD, lalu usulan proyek yang telah disepakati itu disampaikan kepada LMD untuk disahkan. Selanjutnya, proyek yang telah disahkan oleh LMD diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat. Dalam kenyataannya, perencanaan tahunan pada tingkat Desa/Kelurahan sekarang ini masih kurang baik.

Kurang baiknya perencanaan di Tingkat Desa/Kelurahan, juga ditunjukkan dengan masih banyaknya rencana yang kurang memperhatikan kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan terjadi. Perencanaan yang dibuat belum mampu menjangkau situasi dan kondisi

yang akan datang, bahkan dalam satu periode perencanaan sekali pun (1 tahun).

Diantara penyebab lemahnya perencanaan tahunan di Tingkat Desa/Kelurahan ini adalah mekanisme perencanaan di Tingkat Desa belum dijalankan sebagaimana mestinya, serta kualitas SDM di desa/kelurahan masih relatif rendah.

Dalam forum-forum koordinasi di Tingkat Kecamatan seperti Rapat UDKP dan Temu Karya LKMD, meskipun sebagian besar aparat desa (antara lain kepala desa dan ketua LKMD) taat mengikuti forum-forum tersebut, namun di desa-desa tertentu masih terdapat kepala desa dan ketua LKMD yang tidak berperan bahkan tidak aktif dalam forum-forum koordinasi tersebut.

2. Instansi-instansi vertikal dan otonom yang ada di Kecamatan belum sepenuhnya memperhatikan hubungan-hubungan atau keterkaitan antara sektor-sektor dalam rangka menunjukkan secara jelas bidang-bidang kegiatan yang esensial untuk persoalan-persoalan kunci. Keadaan seperti ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih pekerjaan dalam suatu waktu dan tempat, yang menimbulkan kegagalan salah satu rencana atau bahkan kedua-duanya. Atau kadang-kadang menyebabkan terdapatnya suatu bidang/aspek yang tidak dikerjakan karena setiap instansi merasa bukan pekerjaannya.

Penyiapan jumlah, kualifikasi, dan kualitas tenaga kerja, serta peralatan dan mesin dalam suatu kegiatan relatif kurang, disebabkan oleh terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki.

Sumber daya dan sumber dana yang relatif terbatas tersebut, malah sebagian terbuang oleh inefisiensi akibat terjadinya tumpang tindih kegiatan.

3. Pembudayaan *bottom up planning* dengan menggunakan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai acuan bagi perencanaan selanjutnya, juga kurang dilaksanakan di Kecamatan baik oleh kalangan instansi vertikal dan otonom maupun oleh Desa/Kelurahan. Hal ini tercermin dari seringnya perubahan atas rencana-rencana yang telah ditetapkan, selain akibat situasi dan kondisi yang menuntut untuk diadakannya perubahan, juga karena adanya dominasi dari pihak atasan yang cukup kuat dalam menentukan rencana kegiatan di kecamatan.

4. Kurangnya peran Camat dalam koordinasi pembangunan di Kecamatan terutama dalam pengumpulan data dan informasi bagi penyusunan rencana pembangunan Desa. Dalam membuat perencanaan, kadang-kadang Camat bertindak tanpa data dan informasi yang lengkap. Dampak dari tindakan Camat yang demikian, kadang-kadang menyebabkan kegiatan atau proyek yang dilakukan kurang bermanfaat bagi masyarakat atau penempatan lokasi tidak sesuai.

Kelemahan ini, juga dibarengi dengan kurang dilaksanakannya pembahasan program/rencana instansi vertikal dan otonom oleh Camat beserta instansi lainnya dalam rangka memadukan berbagai rencana/program yang ada. Pengusulan rencana proyek beserta lokasi pembangunan sarana dan prasarana, seperti untuk pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah, dan lain-lain, juga kadang-kadang tidak diusulkan oleh Camat.

5. Daftar Inventarisasi Kegiatan/Proyek Pembangunan Dan Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan, tidak selalu diberikal oleh Bupati/Walikota/Kabupaten/Kota kepada Camat.

Padahal, sesuai dengan Inmendagri, penyampaian Daftar Inventarisasi dan Pedoman Pelaksanaan ini dimaksudkan agar Camat menguasai data dan informasi tentang: Penyebaran lokasi kegiatan/proyek di masing-masing Kecamatan; Keterkaitan suatu kegiatan/proyek dengan kegiatan/proyek lainnya, termasuk dalam hubungannya dengan persiapan untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup; Identifikasi jenis-jenis kegiatan/

- proyek yang karena sifatnya memerlukan peranserta langsung masyarakat; Luas tanah dan lokasi yang harus disediakan untuk suatu kegiatan/proyek, selanjutnya sebagai bahan bagi Camat dalam mengajukan usulan/saran tentang tata letak yang tepat; Dan agar camat menguasai tentang biaya konstruksi kegiatan/proyek di wilayahnya, sehingga dapat diketahui penyiapan jumlah dan kualitas tenaga kerja, serah-bahan-bahan, peralatan dan mesin yang diperlukan oleh kegiatan/proyek yang bersangkutan.
6. Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan di tingkat desa/kelurahan tidak selalu tepat jadwal. Pengunduran waktu sudah menjadi kebiasaan. Hal tersebut dapat mempengaruhi respon masyarakat desa/kelurahan terhadap berbagai program atau kebijaksanaan yang disampaikan oleh pihak kecamatan. Apalagi dalam kondisi dan momen-momen tertentu, aparat kecamatan (camat) sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah yang ada di atasnya sering memberikan harapan-harapan kepada masyarakat, seperti perbaikan sarana dan prasarana desa, serta perbaikan kehidupan masyarakat desa, terutama menjelang pesta demokrasi (Pemilu). Rakyat desa, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa, Ketua LKMD, dan tokoh-tokoh masyarakat, menilai bahwa janji-janji yang kadang tak kunjung tiba ini, merupakan penyimpangan dari penjadualan kegiatan yang telah ditetapkan.
 7. Petunjuk pelaksanaan yang diberikan Camat kepada Desa/Kelurahan atau Instansi Vertikal dan Otonom di Kecamatan merupakan salah satu instrumen dalam menciptakan koordinasi yang baik. Namun, ternyata masih banyak camat yang tidak memberikan petunjuk pelaksanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan itu.
 8. Unsur perencana BAPPEDA Tingkat II dan Kepala Kantor Bangdes Kabupaten/kotamadya dalam pelaksanaan diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD bertindak sebagai pengarah. Peran kedua unsur ini dalam diskusi UDKP kecamatan dan temu karya LKMD dinilai masih kurang, oleh karena itu masih perlu ditingkatkan.

9. Kurangnya disiplin aparat desa, serta kondisi sarana dan prasarana desa yang kurang baik, merupakan dua faktor yang dominan penyebab lemahnya pendokumentasian laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Desa/Kelurahan. Sementara yang menjadi kendala dalam melakukan komunikasi antara Desa/Kelurahan dengan Camat, selain kurangnya disiplin aparat desa sendiri, juga karena letak geografis desa-desa yang ada relatif jauh dengan kota kecamatan.
10. Laporan yang semestinya dilakukan instansi vertikal dan otonom, baik yang sifatnya rutin maupun insidental (apabila ada hal-hal atau permasalahan yang perlu segera mendapat penyelesaian); Baik kegiatan yang akan dilaksanakan, sedang dilaksanakan, maupun laporan kegiatan yang telah dilaksanakan; terhadap Camat maupun terhadap instansi atasannya, kadang-kadang tidak dibuat oleh instansi-instansi yang ada di Kecamatan tersebut.

Laporan tentang hasil koordinasi rencana kegiatan di kecamatan, dari instansi-instansi yang ada di kecamatan kepada atasannya juga belum berjalan dengan baik. Demikian juga laporan-laporan periodik 3 (tiga) bulanan mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan; serta Laporan tahunan (setiap akhir tahun anggaran) yang berisi tentang pelaksanaan tugasnya pada tahun anggaran yang bersangkutan, masih kurang baik.

Tidak hanya dalam frekuensi pelaporannya, pendokumentasian yang merupakan salah satu unsur dari pelaporan, juga dinilai masih kurang baik.

Sebagaimana dalam asas perencanaan dari bawah (*bottom up planning*), maka segala kegiatan pembangunan dan keluhan yang berkaitan dengan hambatan pelaksanaan koordinasi pembangunan perlu dilaporkan kepada koordinator, terlebih-lebih hambatan tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau kegiatan pihak lain dalam satu cakupan koordinasi. Dengan demikian, kurang

baiknya pelaporan instansi vertikal dan otonom kepada Camat, merupakan kendala bagi kelancaran pembangunan di Kecamatan.

11. Keefektifan instruksi yang disampaikan Camat baik kepada instansi vertikal dan otonom maupun kepada desa/kelurahan yang ada di wilayahnya, merupakan salah satu syarat tercapainya tujuan pembangunan. Namun, instruksi yang diberikan Camat dirasakan kurang baik. Sering kali Camat memberikan instruksinya dalam bentuk lisan, atau secara tidak langsung melalui perantara pihak lain. Dengan demikian, tidak mustahil arus informasi tidak berjalan lancar. Ketidaksampaian informasi, kesalahan isi pesan, keterlambatan penyampaian informasi, dan lain-lain, sangat mungkin terjadi. Dispersi informasi semacam ini, baik langsung atau pun tidak, dapat menjadi kendala bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kecamatan.

12. Monitoring dan evaluasi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan.

Demikian juga pengendalian yang dilakukan oleh Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan instansi dan Desa/Kelurahan yang ada di Wilayahnya. Kurangnya monitoring dan evaluasi tersebut, seperti kondisi saat ini di beberapa kecamatan menyebabkan kurang efektif dan kurang efisiennya kegiatan pembangunan yang dilakukan di Kecamatan.

Demikian juga, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat terhadap kegiatan yang dilakukan di Desa/Kelurahan dan instansi-instansi yang ada di Kecamatan, di beberapa kecamatan nampaknya belum optimal dilaksanakan.

Pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang lalai atau kurang mengindahkan ketentuan yang ada, merupakan salah satu instrumen untuk menegakkan disiplin dalam upaya optimalitas pencapaian tujuan

kegiatan pembangunan. Kondisi saat ini, dimana budaya ewuh pakewuh masih melekat kuat, tidak hanya di kalangan masyarakat melainkan pula di kalangan birokrat termasuk aparat kecamatan, menyebabkan lemahnya tindakan sangsi yang diberikan.

13. Sementara itu, terdapat 6 (enam) permasalahan pokok mengenai koordinasi pelaporan, pengawasan dan pembinaan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Teknis yang membawahi Instansi Vertikal dan Otonon di Kecamatan serta instansi lainnya yang terkait. Keenam permasalahan tersebut adalah: Pertama, kurangnya konsultasi instansi teknis yang membawahi instansi-instansi di kecamatan dengan camat, apabila akan dilakukan pengangkatan kepala/petugas instansi tersebut di kecamatan. Kedua, pejabat penilai kurang memperhatikan pertimbangan Camat dalam melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan petugas instansi di kecamatan. Tiga, kurangnya tindakan administratif terhadap petugas instansi yang lalai atau tidak mengindahkan ketentuan koordinasi, yang dikenakan pejabat atasannya. Keempat, kurangnya pengawasan dari aparat pengawas Departemen/LPND-nya terhadap kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang ada di Kecamatan. Kelima, kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Departemen/LPND terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan koordinasi oleh instansi yang ada di Kecamatan. Dan terakhir, tembusan hasil pengawasan aparat pengawas Departemen/LPND jarang disampaikan kepada Camat.
14. Pelayanan dan ketanggapan aparat kecamatan terutama camat terhadap masyarakat dinilai masih relatif kurang, antara lain terhadap upaya untuk mengatasi pengangguran, perhatian terhadap penggunaan tenaga kerja, pembangunan prasarana desa dan pengembangan perekonomian desa, pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada masyarakat, serta dalam penyelesaian perselisih-perselisihan yang diajukan oleh Kepala Desa atau masyarakat.

15. Pembinaan kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melayani masyarakat, pemberian penerangan kepada seluruh instansi dan masyarakat Desa mengenai kebijaksanaan pemerintah, dan pembinaan serta pengembangan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Desa (LBD) di Wilayah Kecamatan, serta perlombaan Desa dalam rangka merangsang pelaksanaan pembangunan Desa, merupakan tugas dan kewajiban Camat dalam upaya memberdayakan masyarakat dinilai oleh masyarakat masih kurang baik.

Demikian juga penjelasan Camat bersama petugas instansi dan Kepala Desa/Kelurahan kepada masyarakat mengenai kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan serta manfaat langsung maupun tidak langsungnya bagi masyarakat, serta penyiapan dukungan dan pembinaan gerakan peranserta masyarakat, tidak selalu dilaksanakan.

Di lain pihak, masyarakat pun kurang respon/berpartisipasi terhadap kebijaksanaan instansi dan program-program kerja instansi di Kecamatan.

Kurang baiknya respon/partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi di Kecamatan, akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya jika pelayanan yang diberikan oleh aparat kurang baik maka partisipasi masyarakat pun akan rendah. Memperhatikan hubungan timbal balik seperti tersebut, maka rendahnya respon/partisipasi masyarakat terhadap program-program dan kebijaksanaan instansi disebabkan rendahnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dan kurangnya akses pembangunan bagi masyarakat.

16. Secara umum, kurang baiknya koordinasi pembangunan di Kecamatan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pembinaan, dan evaluasi, maupun dalam peran serta masyarakat, terutama disebabkan

oleh 8 (delapan) alasan utama yang dominan yaitu: *Pertama*, alasan kuantitas Sumber Daya Manusia; *Kedua*, alasan kualitas dan dedikasi SDM dengan lebih spesifik SDM aparatur; *Ketiga*, alasan pendanaan (keuangan); *Keempat* karena adanya dominasi pusat atau atau instansi atasannya; *Kelima*, alasan partisipasi dan budaya masyarakat; *Keenam* kondisi geografis, terutama jauh dekatnya desa/kelurahan terhadap ibukota kecamatan, atau jauh/dekatnya kecamatan terhadap ibukota kabupaten, atau juga tingkat kelabilan/kestabilan lahan, serta kemudahan lokasi tersebut dijangkau oleh informasi; *Ketujuh* karena dominasi peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, *kedelapan* adalah alasan kualifikasi, kemampuan, dan peranan camat dalam melakukan pengkoordinasian pembangunan di wilayahnya.

B. SARAN-SARAN

Seperti telah dipaparkan di muka, bahwa ada delapan faktor dominan yang menyebabkan kurangnya koordinasi pembangunan di kecamatan.

Sehubungan dengan itu, saran kebijaksanaan dalam upaya peningkatan koordinasi di kecamatan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan dan pembinaan, serta penggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pun perlu menyentuh kedelapan faktor penyebab itu, dan menyentuh 5 (lima) pelaku utamanya yaitu Camat, Instansi Vertikal dan Otonom di Kecamatan, Desa/Kelurahan, Masyarakat, serta instansi-instansi terkait yang ada di Kabupaten/Kotamadya DT.II.

Pertama, pemenuhan kuantitas Sumber Daya Manusia di Kecamatan, terutama penambahan jumlah petugas-petugas Instansi Vertikal dan Dinas Otonom di Kecamatan. Jumlah petugas instansi vertikal dan Dinas Otonom seyogyanya disesuaikan dengan keluasan wilayah garapan dan jumlah penduduk di Kecamatan.

Kedua, peningkatan kualitas dan dedikasi aparat baik di tingkat Desa, Kecamatan (aparat Kecamatan dan para petugas Instansi Vertikal dan Dinas Otonom di Kecamatan), serta aparat pada instansi-instansi teknis terkait yang ada di tingkat atasnya, terutama di Kabupaten Daerah Tingkat II. Peningkatan kualitas aparat bisa dilakukan melalui berbagai jenis diklat, tidak kecuali para aparat di tingkat Desa/Kelurahan. Sementara untuk meningkatkan disiplin dan dedikasi aparat, perlu dilakukan pembekalan moralitas yang tinggi, serta penegakkan sanksi disiplin yang tegas.

Ketiga, peningkatan pendanaan bagi koordinasi pembangunan di kecamatan. Biaya koordinasi, seyogyanya tidak hanya mengandalkan swadaya. Selain Dana koordinasi pada Tingkat Kecamatan, juga perlu adanya dana bagi musyawarah-musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan.

Keempat, dominasi pusat atau instansi atasan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan seyogyanya dikendorkan. Dengan kata lain perlu makin dikembangkannya budaya *bottom up planning* yang selaras dengan *top down policy*. Hal ini atas pertimbangan, bahwa sesungguhnya pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat setempat. Untuk itu, pengendoran dominasi atasan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat.

Kelima, untuk menggerakkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat, selain melalui penjelasan, pembinaan, serta kampanye informasi-informasi pembangunan oleh aparat, juga perlu ditempuh melalui metode persuasif yaitu peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan. Apabila masyarakat merasa dilayani dan diperhatikan dengan baik, maka masyarakat pun akan memberikan respon yang baik terhadap program-program pemerintah.

Keenam untuk mengatasi kendala geografis, terutama jauhnya desa/kelurahan ke ibukota kecamatan, atau jauhnya kecamatan ke ibukota

kabupaten, perlu peningkatan kemudahan lokasi tersebut untuk dijangkau oleh informasi. Pengadaan sarana dan prasarana komunikasi seperti listrik, telephone, televisi, radio dan sebagainya, perlu ditingkatkan.

Ketujuh, untuk mengurangi dominasi peraturan perundang-undangan yang dirasakan sangat mengikat dan kaku sehingga menghambat kelancaran pembangunan, perlu adanya peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Peninjauan diarahkan kepada perbaikan agar peraturan perundang-undangan yang ada lebih akomodatif terhadap pembangunan yang dilaksanakan serta fleksibel terhadap berbagai perubahan, namun tetap terkendali.

Kedelapan untuk meningkatkan kualifikasi, kemampuan, dan peranan camat dalam melakukan koordinasi pembangunan di wilayahnya, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya, maka selain selektivitas dalam penunjukkan calon Camat, juga perlu pembinaan dan peningkatan kualitas/kemampuan camat melalui berbagai diklat, penataran dan sejenisnya.

The following table presents a summary of the data on the effects of the 1974-75 winter on the economy of the United States. The data are presented in terms of the number of days of snow, ice, or freezing weather, and the number of days of no snow, ice, or freezing weather.

The data show that the 1974-75 winter was a particularly severe one for the United States. The number of days of snow, ice, or freezing weather was significantly higher than in previous years, and the number of days of no snow, ice, or freezing weather was significantly lower. This had a significant impact on the economy, particularly in the transportation and energy sectors.

The following table presents a summary of the data on the effects of the 1974-75 winter on the economy of the United States. The data are presented in terms of the number of days of snow, ice, or freezing weather, and the number of days of no snow, ice, or freezing weather.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Bryant, Carolie & Louise G. White, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Davey, KJ, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah; Praktek-praktek Internasional Dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, UI-Press, 1988.
- Djumara, Noorsyamsa, *Menuju Format Baru Pelayanan Umum*, Lembaga Administrasi Negara, 1994.
- Hall, Richard H, *Organizations: Structure and Process*, Third Edition, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc, 1972.
- Harmon, Michael M., Mayer, Richard T, *Orqanization Theory for Public Administration*, Boston,Mass: Little, Brown and Company, 1986.
- Hodgetts, Richard M, *Manaqement: Theory. Process and Practice*. Third Edition, Holt-Saunders International Editions, 1982.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim, *Perilaku Organisasi*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Kunarjo, *Perencanaan Dan Pembiayaan Pembangunan*, UI-Press, Jakarta, 1992.
- Lembaga Administrasi Negara, *Penelitian Tentang Keberfungsian Lembaga Musyawarah Desa Dalam Pemerintahan Desa Di Jawa Barat*, Bandung, 1990.

- Lembaga Administrasi Negara, *Laporan Temu Kaji Posisi Dan Peran Ilmu Administrasi Dan Manajemen Dalam Pembangunan*, Jakarta, 1988.
- Lembaga Administrasi Negara, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta, 1993.
- Lembaga Administrasi Negara, *Manajemen Modern Menyongsong PJP II*, Jakarta, 1993.
- Litterer, Joseph A, *The Analysis of Organizations*. 2nd ed., New York: John Wiley & Sons, 1973.
- Mintzberg, H, *The Structuring of Organizations*, Engle-wood Cliffs, Calif.: Prentice-Hall, 1979.
- Mintzberg, H, *Mintzberg on Management*. New York: The Free Press, 1989.
- Pareek, Udai, *Perilaku Organisasi; Pedoman ke arah pemahaman proses komunikasi antar pribadi dan motivasi kerja*, Pustaka Binaman Pressindo dan LPPM, Jakarta 1991.
- Siagian, Sondang P, *Filsafat Administrasi*, Haji Masagung, Jakarta, 1987.
- Siagian, Sondang P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- Smelser, Neil, "Toward an Theory of Modernization," Pp. 268 - 284 - in Amitai Etzioni and Eva Etzioni (eds.) *Social Change*, New York : Basic Books, 1964.
- Soemarno & Dardjo Sumardjono, *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974* □ Sempurna Karunia, Jakarta, 1984.

Sugandha, Dann, *Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1981.

Sugandha, Dann, *Koordinasi Sebagai Pemersatu Gerak Dalam Proses Administrasi*, Ilham Jaya, Bandung, 1984.

Sukirno, Sadono, *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1982.

Surya, Mohamad, *Psikologi Manajemen*, Ilham Jaya, Bandung, 1994.

Thompson, James D, *Organizations in Action*, New York : McGraw-Hill, 1967.

Tjokroamidjojo, Bintoro, *Manajemen Pembangunan*, Haji Masagung, Jakarta, 1987.

Wasistiono, Sadu, *Organisasi Kecamatan* □ Mekar Rahayu, Bandung, 1991.

Weber, Max. "Essay in Socioology" by H.Gerth and C.Wright Mills. Copyright 1946 by Oxford University Press, Inc., renewed 1973 by Hans H.Gerth.

DOKUMEN-DOKUMEN

Republik Indonesia. *Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*. Eksemplar lepas.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah*. Eksemplar lepas.

Republik Indonesia. *Instruksi Presiden No.04 Tahun 1969 tentang Pedoman Hubungan Kerja Antara Aparatur Pemerintah di Tingkat Pusat dan Daerah dalam Melaksanakan Pembangunan Nasional*, Eksemplar lepas.

LAMPIRAN 1

ORGANISASI PENELITIAN

Berdasarkan SK Ketua LAN Nomor 1131 A/IX/6/4/1995 tentang Susunan Personalia Tim Pelaksana Proyek Penelitian tentang Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas-tugas di Wilayah Kecamatan Dalam Rangka Efisiensi dan Efektivitas Pembangunan di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--|
| 1. Pembina Program | : DR. J.B. Kristiadi
Drs. Poltak Panggabean |
| 2. Penanggung Jawab | : Dr. Karhi Nisjar S., Ak.MM. |
| 3. Penanggung Jawab
Operasional/Peneliti | : Drs. Desi Fernanda, M.Soc.Sc. |
| 4. Koordinator/Peneliti | : Dra. Jat Jat Wirjadinata, Mag.Rer.Publ. |
| 5. Peneliti | : Drs. Nooryamsa Djumara, MSi. |
| 6. Peneliti | : Dra. Sedarmayanti, MPd. |
| 7. Peneliti | : Dr. Harapan Tobing |
| 8. Peneliti | : Drs. H. Jusuf Taudjiri |
| 9. Peneliti | : Baban Sobandi, SE. |
| 10. Pembantu Peneliti | : Dra. Hayuni Rachmawati |
| 11. Pembantu Peneliti | : Gugum Gumelar, SH. |
| 12. Pembantu Peneliti | : Dra. Yunasli Uyun |
| 13. Pembantu Peneliti | : Dra. Edah Jubaedah |
| 14. Pembantu Peneliti | : Drs. Eris Yustiono |
| 15. Pembantu Peneliti | : Dra. Nefi Aris Ambar Asmara |
| 16. Pembantu Peneliti | : Dra. Ara Ruhara |
| 17. Pembantu Peneliti | : Dra. Arundina DRP. |
| 18. Pembantu Peneliti | : Dra. Rina Christina |
| 19. Pembantu Peneliti | : Dra. Teni Listiani |

LAMPIRAN 2

**DAFTAR PERTANYAAN
UNTUK TOKOH MASYARAKAT/
APARAT DESA DI KECAMATAN**

**PENELITIAN TENTANG PENINGKATAN KOORDINASI
PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS DI WILAYAH KECAMATAN
DALAM RANGKA EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT**

A. ASPEK PERENCANAAN DALAM RANGKA KOORDINASI

1. Apakah Desa Bapak telah mempunyai rencana kegiatan tahunan?

- a. Telah ada dan lengkap
- b. Telah ada, namun belum lengkap
- c. Belum ada

Penjelasan:

.....

2. Apakah Desa Bapak telah mempunyai rencana kegiatan jangka panjang (satu periode Kepala Desa)

- a. Telah ada dan lengkap
- b. Telah ada, namun belum lengkap
- c. Belum ada

Penjelasan:

.....

3. Jika telah punya rencana, pernahkah terjadi perubahan secara mendadak karena situasi dan kondisi berubah, sehingga merusak rencana yang telah ditetapkan itu?

- a. Sering terjadi perubahan
- b. Antara 50% s.d. 75% dari seluruh rencana, terjadi perubahan mendadak
- c. Antara 25% s.d. 50% dari seluruh rencana, terjadi perubahan mendadak
- d. Maksimal 25% dari seluruh rencana, terjadi perubahan mendadak
- e. Tidak pernah terjadi perubahan mendadak, karena belum punya rencana yang mantap

Penjelasan:

.....

4. Jika pernah terjadi perubahan rencana secara mendadak, apakah mampu menyesuaikan dengan tuntutan perubahan itu, sehingga rencana terus berjalan meskipun tidak persis sesuai dengan yang direncanakan semula?
- Selalu mampu disesuaikan
 - Lebih banyak yang mampu disesuaikan dari pada yang gagal total
 - Antara yang mampu disesuaikan dengan yang gagal total, lebih kurang sama
 - Lebih banyak yang gagal total dari pada yang mampu disesuaikan
 - Jika terjadi perubahan mendadak, selalu menjadi gagal total.
- Penjelasan:

.....

.....

.....

5. Bila terdapat suatu persoalan/masalah yang timbul berkenaan dengan perencanaan yang telah ditetapkan, bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut?
- Dipecahkan oleh Kepala Desa beserta Stafnya secara bersama-sama, dengan terlebih dahulu meminta saran Camat
 - Ditanggulangi oleh instansi yang berhubungan dengan masalah itu, dengan memohon saran Camat terlebih dahulu.
 - Ditanggulangi oleh Kepala Desa beserta Stafnya tanpa meminta saran dari Camat
 - Ditanggulangi sendiri oleh instansi yang berhubungan dengan masalah tersebut, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat.
 - Menunggu perintah atau instruksi dari atasannya langsung
 - Menunggu perintah/instruksi dari Camat
 - Dibiarkan saja, menunggu waktu berikutnya.

Penjelasan:

.....

.....

.....

6. Apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Bapak, mempunyai rencana pokok sebagai dasar pembuatan rencana yang akan datang.
- Seluruhnya mempunyai
 - Sebagian besar mempunyai
 - Sebagian kecil mempunyai
 - Tidak ada yang punya, karena menunggu keputusan instansi atasan (Pusat)
 - Tidak ada, semuanya berjalan tanpa rencana pokok.

Penjelasan:

.....

.....

.....

7. Apabila di Desa Bapak telah dilaksanakan suatu proyek/kegiatan, apakah proyek/kegiatan tersebut digunakan sebagai bahan/proyeksi tahun berikutnya, dalam rangka perencanaan dari bawah (*bottom up planning*)?
- Selalu digunakan sebagai proyeksi tahun berikutnya
 - Lebih sering digunakan dari pada tidak
 - Lebih sering tidak digunakan dari pada digunakan
 - Proyek tersebut tidak pernah digunakan sebagai proyeksi tahun berikutnya

Penjelasan:

.....

.....

.....

8. Bagaimanakah pihak kecamatan dalam memadukan kegiatan-kegiatan sejenis dan berkaitan, serta menyasikan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai instansi di Desa Bapak?
- Sangat baik
 - Baik
 - Kurang baik
 - Tidak baik

Penjelasan:

.....

.....

.....

9. Apakah Camat melakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan desa?
- Selalu melakukan
 - Lebih sering melakukan dari pada tidak
 - Lebih sering tidak melakukan dari pada melakukan
 - Tidak pernah melakukan

Penjelasan:

.....

.....

.....

B. ASPEK PELAKSANAAN KOORDINASI

10. Apakah ada petunjuk pelaksanaan yang diberikan Camat kepada Bapak, dalam rangka pelaksanaan tugas Bapak?
- Setiap Kegiatan ada
 - Kebanyakan kegiatan ada Juklaknya
 - Hanya sedikit saja kegiatan yang diberi Juklak
 - Tidak pernah ada petunjuk pelaksanaan
 - Ada petunjuk pelaksanaan yang bersifat umum, bukan per kegiatan

Penjelasan:

.....

.....

.....

11. Dalam rangka penyelenggaraan koordinasi, apakah Camat pernah menetapkan peraturan pelaksanaan koordinasi tersebut?
- Ya

b. Tidak

Penjelasan:

.....

.....

.....

12. Apabila pelaksanaan rencana mengalami kegagalan, apakah penyebab kegagalan tersebut?

- a. Kurangnya dana
- b. Kurangnya personil
- c. Kurangnya sumber daya lain
- d. Karena selalu menunggu keputusan yang lebih atas (Pusat)
- e. Karena faktor luar (ekstern) yang tidak dapat diduga
- f. Karena kurang baiknya perencanaan

Penjelasan:

.....

.....

.....

13. Pelaksanaan tugas dan pemecahan masalah yang timbul, dilakukan melalui:

- a. Penilaian efisiensi dan efektivitas
- b. Menunggu instruksi dari camat/instansi yang berwenang
- c. Atas inisiatif sendiri, dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada Camat/instansi yang berwenang
- d. Secara lugas apa adanya, tanpa menunggu instruksi dan saran dari camat/instansi yang berwenang

Penjelasan:

.....

.....

.....

14. Sumber daya insani (manusia) yang terampil untuk menjalankan semua kebijaksanaan dan program kerja, merupakan syarat mutlak keberhasilan

program kerja tersebut. Bagaimana kondisi sumber daya insani aparat di Desa Bapak?

- a. Sudah sangat memadai, baik kualitas maupun kuantitas
- b. Kualitas memadai, namun dari sisi kuantitas masih kurang-
- c. Kuantitas memadai, namun kualitas masih kurang
- d. Baik kuantitas maupun kualitas masih kurang

Penjelasan:

.....

.....

.....

15. Menurut Bapak sampai dimanakah ketepatan waktu dari semua kegiatan baik pelaksanaan proyek maupun kegiatan rutin yang dilaksanakan berbagai instansi di Desa Bapak?

- a. Sangat tepat
- b. Tepat
- c. Cukup tepat
- d. Kurang tepat
- e. Tidak tepat

Penjelasan:

.....

.....

.....

16. Menurut pengamatan Bapak, apakah jadwal kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan mengalami pengunduran waktu dalam pelaksanaannya?

- a. Tidak pernah terlambat
- b. Rata-rata terlambat 1-3 bulan
- c. Rata-rata terlambat 4-6 bulan
- d. Rata-rata terlambat 7-9 bulan
- e. Rata-rata terlambat 10-12 bulan
- f. Rata-rata terlambat 12 bulan atau lebih

Penjelasan:

.....

-
-
17. Berdasarkan pengamatan Bapak, apakah pernah terdapat suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh lebih dari satu instansi, padahal sebenarnya pekerjaan tersebut cukup dilaksanakan oleh satu instansi saja?
- Sering sekali ditemukan tumpang tindih kegiatan
 - Jarang
 - Pernah terjadi, namun sangat jarang
 - Tidak pernah terjadi

Penjelasan:

.....

.....

.....

18. Pernahkan ada tugas/pekerjaan di Desa Bapak yang seharusnya dikerjakan oleh salah satu instansi, tetapi tidak ada yang mengerjakan, karena masing-masing instansi merasa bukan tugasnya?
- Sering terjadi
 - Jarang terjadi
 - Pernah terjadi, namun sangat jarang
 - Tidak pernah terjadi

Penjelasan:

.....

.....

.....

19. Bagaimanakah kepemimpinan Camat dalam diskusi UDKP atau temu karya LKMD?
- Sangat berwibawa
 - Kurang berwibawa
 - Tidak berwibawa, peserta acuh-acuh saja terhadap kepemimpinan camat

Penjelasan:

.....

.....

.....

20. Bagaimana peran serta unsur perencana BAPPEDA Tingkat II dalam diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD?

- a. Sangat berperan
- b. Berperan
- c. Kurang berperan, dan jarang hadir
- d. Satu tahun terakhir ini, belum pernah hadir

Penjelasan:

.....

.....

.....

21. Bagaimana peran serta Kepala Kantor Bangdes Kabupaten/Kodya Daerah Tingkat II dalam diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD?

- a. Sangat berperan
- b. Berperan
- c. Kurang berperan, dan jarang hadir
- d. Satu tahun terakhir ini, belum pernah hadir

Penjelasan:

.....

.....

.....

22. Bagaimanakah keikutsertaan instansi pemerintah/tim-tim koordinasi yang ada di Kecamatan dalam diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD? (Jawaban boleh lebih dari satu)

- a. Seluruhnya selalu ikut
- b. Lebih banyak yang ikut dari pada yang tidak
- c. Setiap kali diskusi, lebih kurang hanya setengahnya saja yang hadir

d. Lebih banyak yang tidak ikut dari pada yang ikut

e. Ada instansi yang tidak pernah ikut sama sekali

Penjelasan:

.....

.....

.....

23. Bagaimanakah peranserta dan keaktifan instansi pemerintah/ tim-tim koordinasi yang ada di kecamatan dalam diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD?

a. Sangat aktif

b. Biasa-biasa saja

c. Kurang aktif

d. Tidak aktif sama sekali (pasif)

Penjelasan:

.....

.....

.....

24. Bagaimanakah ketepatan penjadualan pelaksanaan diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD?

a. Selalu tepat jadual

b. Lebih sering tepat jadual daripada tidak

c. Lebih sering tidak tepat jadual daripada tepat

d. Tidak pernah tepat jadual

e. Satu tahun terakhir ini belum pernah dilaksanakan

Penjelasan:

.....

.....

.....

25. Bagaimanakah kepemimpinan Ketua Umum LKMD dalam rapat LKMD?

a. Sangat berwibawa

b. Kurang berwibawa

- c. Tidak berwibawa, peserta acuh-acuh saja terhadap kepemimpinan Ketua LKMD

Penjelasan:

.....

26. Apakah Camat selalu hadir dalam rapat LKMD di Desa Bapak?

- a. Selalu hadir
 b. Kadang-kadang tidak hadir
 c. Lebih sering tidak hadir, dari pada hadir
 d. Tahun terakhir ini tidak pernah hadir
 e. Tidak pernah hadir

Penjelasan:

.....

27. Apakah Petugas BANGDES Kecamatan selalu hadir dalam rapat LKMD di Desa Bapak?

- a. Selalu hadir
 b. Kadang-kadang tidak hadir
 c. Lebih sering tidak hadir, dari pada hadir
 d. Tahun terakhir ini tidak pernah hadir
 e. Tidak pernah hadir

Penjelasan:

.....

28. Apakah Aparat Desa selalu hadir dalam rapat LKMD? (boleh lebih dari satu pilihan)

- a. Semuanya selalu hadir
 b. Sebagian besar hadir

- c. Sebagian besar tidak hadir
 - d. Ada aparat desa yang tidak pernah hadir
- Penjelasan:

.....

.....

.....

29. Apakah pengurus LKMD-LMD selalu hadir dalam rapat LKMD?
- a. Semuanya selalu hadir
 - b. Sebagian besar hadir
 - c. Sebagian besar tidak hadir
 - d. Ada aparat desa yang tidak pernah hadir
- Penjelasan:

.....

.....

.....

30. Bagaimanakah kondisi koordinasi kegiatan antar instansi yang ada di Desa Bapak?
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
- Penjelasan:

.....

.....

.....

31. Apakah pernah terjadi tumpang tindih (*overlapping*) kegiatan dalam suatu waktu dan lokasi yang sama di Desa Bapak, yang disebabkan kurangnya koordinasi?
- a. Tidak pernah terjadi
 - b. Sekali-sekali pernah terjadi
 - c. Sering terjadi

d. Sangat sering terjadi

Penjelasan:

.....

.....

.....

32. Jika pernah terjadi tumpang tindih kegiatan dalam satu waktu dan lokasi, bagaimanakah dampaknya?

a. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya

b. Semuanya berjalan, tetapi tidak seperti yang direncanakan

c. Salah satu digagalkan, dan dijadualkan kembali

d. Semuanya digagalkan, dan dijadualkan kembali

Penjelasan:

.....

.....

.....

33. Untuk melakukan koordinasi kegiatan di Desa Bapak, apakah rapat koordinasi selalu dilaksanakan?

a. Selalu dilakukan sesuai peraturan yang berlaku

b. Lebih sering dilakukan daripada tidak

c. Lebih sering tidak dilakukan daripada dilakukan

d. Tidak pernah dilakukan rapat koordinasi

Penjelasan:

.....

.....

.....

34. Bagaimana arus penyampaian data, informasi atau pendapat forum-forum koordinasi dalam rangka koordinasi?

a. Sangat lancar

b. Lebih sering lancar, daripada tidak lancar

c. Lebih sering tidak lancar daripada lancar

d. Tidak pernah lancar.

Penjelasan:

.....

35. Bagaimanakah sikap dan perilaku peserta diskusi UDKP atau Temu Karya LKMD terhadap kepemimpinan camat?

- a. Sangat simpati
- b. Biasa-biasa saja
- c. Acuh-acuh saja
- d. Di belakang menggerutu, tidak setuju kepemimpinan camat,

Penjelasan:

.....

36. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban camat dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan?

- a. Sangat berwibawa dan ditaati masyarakat
- b. Biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol
- c. Kurang berwibawa, kadang kebijaksanaannya kurang sesuai dengan aspirasi rakyat
- d. Tidak berwibawa, dan masyarakat bersifat acuh terhadap camat

Penjelasan:

.....

37. Sampai sejauh manakah Camat dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya?

- a. Sangat baik, sehingga tidak pernah terjadi tumpang tindih kegiatan
- b. Biasa-biasa saja, kadang terjadi tumpang tindih kegiatan
- c. Kurang baik, sangat sering terjadi tumpang tindih pekerjaan

- d. Tidak baik, hampir setiap pelaksanaan proyek atau kegiatan terjadi tumpang tindih

Penjelasan:

.....

38. Apakah Camat melakukan pengkoordinasian segala kegiatan dan usaha pembangunan desa?

- a. Selalu
 b. Lebih sering pengkoordinasian melakukan dari pada tidak
 c. Lebih sering tidak melakukan pengkoordinasian daripada melakukan
 d. Tidak pernah melakukan pengkoordinasian

Penjelasan:

.....

39. Coba Bapak sebutkan, semua kejadian yang pernah Bapak alami atau bapak lihat yang menurut hemat Bapak merupakan dampak dari kurangnya koordinasi antar kegiatan di Kecamatan?

.....

C. ASPEK PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI KEGIATAN DALAM RANGKA KOORDINASI

40. Apabila di Desa Bapak dilaksanakan suatu proyek/kegiatan, apakah Camat bersama-sama kepala (petugas) instansi dan Kepala Desa/ Kelurahan memantau dan mengendalikan pelaksanaan masing-masing maupun keseluruhan kegiatan/proyek tersebut?

- a. Selalu memantau dan mengendalikan
 b. Lebih sering memantau dan mengendalikan dari pada tidak

c. Lebih sering tidak memantau dan tidak mengendalikan

d. Tidak pernah memantau dan mengendalikan

Penjelasan:

.....

.....

.....

41. Apabila di Desa Bapak dilaksanakan suatu proyek/kegiatan, apakah Camat bersama-sama kepala (petugas) instansi dan Kepala Desa/Kelurahan melaporkan perkembangan pelaksanaan serta hambatan yang dijumpai baik secara periodik maupun sewaktu-waktu diperlukan, kepada atasannya masing-masing?

a. Selalu melaporkan

b. Lebih sering melaporkan dari pada tidak

c. Lebih sering tidak melaporkan

d. Tidak pernah melaporkannya

Penjelasan:

.....

.....

.....

42. Apakah laporan-laporan pelaksanaan kegiatan proyek telah didokumentasikan sesuai dengan klasifikasinya?

a. Diarsip sesuai dengan klasifikasinya

b. Sebagian diarsip sesuai dengan klasifikasinya

c. Kadang-kadang diklasifikasi

d. Cukup sampai disahkan laporan

e. Tidak disahkan asal mudah diarsip

Penjelasan:

.....

.....

.....

43. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan/proyek/tugas yang menjadi tanggung jawab Bapak, rata-rata berapa kali Bapak berkomunikasi dengan Camat?
- 24 kali atau lebih dalam setahun
 - 12 kali dalam setahun
 - 6 kali setahun
 - 3 kali dalam setahun
 - Setahun sekali

Penjelasan:

.....

.....

.....

44. Dalam hal apakah komunikasi yang paling sering Bapak lakukan dengan Camat?
- Mengenai koordinasi pelaksanaan tugas/kegiatan/proyek
 - Memohon saran untuk perencanaan dan pelaksanaannya
 - Mengenai teknik dan metode pelaksanaan kegiatan/proyek
 - Mengenai sumber dananya
 - Mengenai peran serta masyarakat dalam kegiatan tersebut

Penjelasan:

.....

.....

.....

45. Setiap kali berkomunikasi atau bertukar pikiran dengan Camat mengenai tugas yang akan Bapak lakukan, apakah Camat memberikan respon positif dan memberikan saran pemecahan jika ada masalah?
- Selalu menanggapi dengan positif dan memberi saran jika ada masalah
 - Menanggapi secara positif, tapi tidak memberi saran pemecahan jika ada masalah
 - Bersikap biasa-biasa saja, Kadang memberi respon, kadang juga acuh.
 - Bersikap acuh

- e. Menolak ide yang dilontarkan, Camat selalu memaksakan kehendaknya sendiri.

Penjelasan:

.....

.....

.....

46. Bagaimanakah kemampuan Camat dalam mengidentifikasi keterkaitan tugas, wewenang, dan kepentingan antara instansi (fungsional, sektoral dan regional) yang ada di kecamatan Bapak?

- a. Sangat baik
 b. Baik
 c. Kurang baik
 d. Tidak baik

Penjelasan:

.....

.....

.....

47. Komunikasi yang baik antara wilayah kecamatan dengan desa merupakan syarat terselenggaranya kelancaran pembangunan desa. Sehubungan dengan hal tersebut, bagaimana kondisi komunikasi antar kecamatan dan instansi yang ada di kecamatan dengan tingkat desa, yang selama ini dilakukan?

- a. Sangat baik
 b. Baik
 c. Kuang baik
 d. Tidak baik

Penjelasan:

.....

.....

.....

48. Apabila Bapak mendapatkan instruksi dari Camat, dalam bentuk apakah instruksi tersebut Bapak terima?
- Perintah dalam bentuk tertulis
 - Perintah langsung secara lisan
 - Perintah tidak langsung secara lisan
 - tidak pernah ada perintah baik lisan maupun tertulis
- Penjelasan:

.....

.....

.....

49. Apakah Camat, mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan yang Bapak laksanakan?
- Selalu mengikuti
 - Kadang-kadang mengikuti
 - Kurang mengikuti
 - Tidak pernah mengikuti
- Penjelasan:

.....

.....

.....

50. Apakah Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan Lembaga Desa?
- Selalu melakukan
 - Lebih sering melakukan dari pada tidak
 - Lebih sering tidak melakukan dari pada melakukan
 - Tidak pernah melakukan
- Penjelasan:

.....

.....

.....

51. Apakah camat melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang Bapak laksanakan?
- Selalu
 - Lebih sering melakukan evaluasi, daripada tidak
 - Lebih sering tidak melakukan evaluasi, daripada melakukan
 - Tidak pernah melakukan evaluasi

Penjelasan:

.....

.....

.....

52. Apakah Camat suka meminta keterangan pelaksanaan tugas yang telah Bapak kerjakan?
- Selalu
 - Lebih sering meminta, daripada tidak
 - Lebih sering tidak meminta, dari pada meminta
 - Tidak pernah meminta

Penjelasan:

.....

.....

.....

D. PELAYANAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

53. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban camat dalam membina kehidupan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melayani masyarakat?
- Sangat perhatian terhadap kehidupan masyarakatnya, berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
 - Biasa-biasa saja
 - Kurang perhatian terhadap kehidupan, kesejahteraan, dan pelayanan masyarakat

- d. Tidak perhatian terhadap kehidupan masyarakat, sering melakukan pungutan-pungutan yang illegal, dan pelayanan yang diberikan berbelit-belit

Penjelasan:

.....

.....

.....

- 54. Apakah camat memberi penerangan kepada seluruh instansi dan masyarakat di Desa Bapak, mengenai kebijaksanaan pemerintah?
 - a. Selalu memberi penerangan
 - b. Lebih sering memberi penerangan dari pada tidak
 - c. Lebih sering tidak memberi penerangan dari pada memberi
 - d. Tidak pernah memberi penerangan

Penjelasan:

.....

.....

.....

- 55. Apakah Camat melaksanakan pengamanan atas proyek-proyek dan tempat-tempat yang dianggap vital?
 - a. Selalu mengamankan
 - b. Lebih sering melaksanakan pengamanan, dari pada tidak
 - c. Lebih sering tidak melaksanakan pengamanan, dari pada melaksanakan
 - d. Tidak pernah melaksanakan pengamanan

Penjelasan:

.....

.....

.....

- 56. Apakah Camat tanggap terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang?
 - a. Sangat tanggap, berusaha menampung dan menjadikannya sebagai masukan

- b. Tanggap, tetapi kadang kala bersikap acuh (tidak memperhatikan)
- c. Kurang tanggap, kebanyakan aspirasi masyarakat tidak diperhatikan
- d. Tidak tanggap, bahkan mengarah kepada pemaksaan kehendak dan mematikan aspirasi

Penjelasan:

.....

.....

.....

57. Apakah Camat sudah melaksanakan fungsinya sebagai pembina BKPD, LPK, dan KCK yang ada di kecamatan?
- a. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh
 - b. Sudah melaksanakan, namun belum sungguh-sungguh
 - c. Sangat kurang berusaha
 - d. Tidak pernah melaksanakannya

Penjelasan:

.....

.....

.....

58. Dalam aspek ketenagakerjaan, apakah Camat berupaya untuk mengatasi pengangguran di wilayahnya?
- a. Berusaha keras dengan berbagai program
 - b. Berusaha, namun hanya dalam bentuk himbauan, tidak ada program nyata
 - c. Tidak pernah berusaha
 - d. Acuh-acuh saja terhadap pengangguran di wilayahnya

Penjelasan:

.....

.....

.....

59. Bagaimanakah upaya camat dalam pelaksanaan proyek penghijauan di wilayahnya?

- a. Sangat berupaya keras
- b. Biasa-biasa saja, hanya berupa himbauan kepada masyarakat
- c. Kurang berusaha (acuh-acuh saja) terhadap proyek penghijauan tersebut
- d. Tidak berusaha sama sekali untuk mensukseskan proyek penghijauan tersebut?

Penjelasan:

.....
.....
.....

60. Apakah Camat ikut memperhatikan penggunaan tenaga kerja di wilayahnya?
- a. Ikut memperhatikan
 - b. Acuh-acuh saja
 - c. Tidak memperhatikan sama sekali

Penjelasan:

.....
.....
.....

61. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap kebijakan Instansi dan program-program kerja instansi yang ada di Desa Bapak?
- a. Sangat baik, dan ikut berpartisipasi mensukseskannya
 - b. Baik, tetapi kurang ikut berpartisipasi
 - c. Kurang baik, hanya sedikit saja yang ikut berpartisipasi
 - d. Tidak baik, masyarakat bersikap acuh
 - e. Sangat tidak baik, masyarakat menolaknya

Penjelasan:

.....
.....
.....

62. Apakah kualitas pelaksanaan kegiatan berbagai instansi di Desa Bapak, sudah sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Seluruhnya sesuai
 - Sebagian besar kegiatan sesuai
 - Lebih kurang hanya 50% saja dari seluruh kegiatan, yang sesuai dengan rencana
 - Sebagian besar tidak sesuai
 - Selalu menyimpang dari sasaran yang telah direncanakan
- Penjelasan:

.....

63. Apakah kegiatan berbagai instansi di Desa Bapak, sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
- Seluruhnya sesuai
 - Sebagian besar kegiatan sesuai
 - Lebih kurang hanya 50% saja dari seluruh kegiatan, yang sesuai dengan rencana
 - Sebagian besar tidak sesuai
 - Selalu menyimpang dari sasaran yang telah direncanakan
- Penjelasan:

.....

64. Apakah Camat berupaya melaksanakan pembangunan di bidang prasarana desa dan pengembangan perekonomian desa?
- Selalu melakukan
 - Lebih sering melakukan dari pada tidak
 - Lebih sering tidak melakukan dari pada melakukan
 - Tidak pernah melakukan

Penjelasan:

.....

.....

.....

65. Apakah Camat melakukan usaha-usaha dan memberikan petunjuk-petunjuk untuk meningkatkan gotong royong?
- Selalu melakukan
 - Jarang melakukan
 - Sangat jarang melakukan
 - Tidak pernah melakukan

Penjelasan:

.....

.....

.....

66. Apakah Camat memberikan bimbingan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang menyangkut kepentingan beberapa desa di wilayahnya?
- Selalu memberikan
 - Lebih sering memberikan dari pada tidak
 - Lebih sering tidak memberikan dari pada memberikan
 - Tidak pernah memberikan

Penjelasan:

.....

.....

.....

67. Apakah Kantor Camat telah berfungsi dengan baik sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat?
- Berfungsi dengan baik
 - Berfungsi, namun kurang memuaskan
 - Kurang berfungsi
 - Tidak pernah berfungsi sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat

Penjelasan:

.....

.....

.....

68. Apakah Camat setiap tahun melakukan perlombaan Desa, dalam rangka merangsang pelaksanaan pembangunan desa?
- Selalu melakukan setiap tahun
 - Lebih sering melakukan dari pada tidak
 - Lebih sering tidak melakukan dari pada melakukan
 - Tidak pernah melakukan

Penjelasan:

.....

.....

.....

69. Apabila di Desa Bapak akan dilaksanakan suatu proyek/kegiatan, apakah Camat bersama-sama kepala (petugas) instansi dan Kepala Desa/Kelurahan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kegiatan/proyek tersebut serta manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat?
- Selalu memberi penjelasan
 - Lebih sering memberi penjelasan dari pada tidak
 - Lebih sering tidak memberi penjelasan
 - Tidak pernah memberi penjelasan

Penjelasan:

.....

.....

.....

70. Apabila di Desa Bapak akan dilaksanakan suatu proyek/kegiatan, apakah Camat bersama-sama kepala (petugas) instansi dan Kepala Desa/Kelurahan menyiapkan dukungan dan pembinaan gerakan peranserta masyarakat?

- a. Selalu menyiapkan, setiap ada proyek/kegiatan
- b. Lebih sering menyiapkan dari pada tidak
- c. Lebih sering tidak menyiapkan
- d. Tidak pernah menyiapkan dukungan dan pembinaan gerakan peran serta masyarakat

Penjelasan:

.....

.....

.....

71. Berikan penilaian (dengan membubuhkan tanda "X" pada kolom yang tersedia) terhadap pelaksanaan tugas camat dalam mengawasi, membimbing, dan membina Pemerintahan Desa di Wilayah Bapak!

TUGAS CAMAT	TARAP PELAKSANAAN TUGAS			
	Sudah dilakukan sepenuhnya	Lebih sering dilakukan daripada tidak	Lebih sering tidak dilakukan daripada dilakukan	Tidak pernah dilakukan
Membina Kehidupan masyarakat				
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan unsur perlindungan, bimbingan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat				
Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada masyarakat				
Memberi pertimbangan kpd Bupati Dalam pengangkatan Sekretaris Desa				
Atas nama Bupati/Walikota mengangkat dan memberhentikan Kepala Urusan Sekretariat Desa				

TUGAS CAMAT	TARAP PELAKSANAAN TUGAS			
	Sudah dilakukan sepenuhnya	Lebih sering dilakukan daripada tidak	Lebih sering tidak dilakukan daripada dilakukan	Tidak pernah dilakukan
Atas nama Bupati mengangkat dan memberhentikan Kepala Dusun				
Memeriksa Kas dan administrasi desa				
Menyelenggarakan rapat mingguan, minimal 2 kali dalam sebulan				
Mengadakan pengawasan dlm rapat penentuan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD)				
Memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan rancangan APPKD dan penyelenggaraan rapat APPKD				
Memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan rancangan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa				
Penguasaan kriteria Tipologi Desa serta pengetahuan dan memonitor perkembangan tipologi Desa				
Memikirkan dan mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan pemekaran/pemecahan desa-desa di wilayahnya				
Memperhatikan keadaan perangkat desa khususnya desa-desa yang dipertimbangkan perlu mendapat tunjangan keme-rosoan, serta mengawasi penyerahannya				
Mengawasi pemanfaatan dan kelestarian kekayaan desa serta memikirkan pengembangannya				

TUGAS CAMAT	TARAP PELAKSANAAN TUGAS			
	Sudah dilakukan sepenuhnya	Lebih sering dilakukan daripada tidak	Lebih sering tidak dilakukan daripada dilakukan	Tidak pernah dilakukan
Menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang diajukan oleh Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa				
Membina dan mengembangkan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Desa (LBD) di wilayahnya				

TABEL 1.1.1.1.1.1.1			
No	Nama	Jenis	Kategori
1	Kendaraan	Mobil	Kendaraan
2	Kendaraan	Motor	Kendaraan
3	Kendaraan	Sepeda	Kendaraan

LAMPIRAN 3

**DAFTAR PERTANYAAN
UNTUK DINAS DAN INSTANSI OTONOM DI KECAMATAN**

**PENELITIAN TENTANG PENINGKATAN KOORDINASI
PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS DI WILAYAH KECAMATAN
DALAM RANGKA EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT**

No	Daerah	Instansi	Alamat	Telepon	Waktu
1					
2					
3					
4					
5					

A. ASPEK PERENCANAAN DALAM RANGKA KOORDINASI

1. Menurut yang Bapak ketahui, apakah sudah ada rencana kerja tiap instansi baik vertikal maupun dinas otonom yang ada di Kecamatan. Bila sudah ada, apakah rencana kerja tersebut sudah jelas dan memperhatikan keterkaitan dengan kegiatan instansi lain?
 - a. Belum ada
 - b. Ada, tapi belum memperhatikan keterkaitan tugas
 - c. Ada dan sudah memperhatikan keterkaitan tugas, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
 - d. Ada dan baik; dalam peraturan maupun pelaksanaannya sudah memperhatikan keterkaitan dengan instansi lain.

Penjelasan:

.....

.....

.....

2. Setiap rencana kerja sudah tentu mempunyai sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Selain sasaran yang bersifat makro dalam lingkup instansional, bagaimanakah sasaran-sasaran dalam lingkup mikro, yaitu pada tingkat kecamatan? (Beri tanda silang X pada kolom yang tersedia)

S A S A R A N	Sangat baik	Baik	Kurang baik	Tidak ada
Penentuan sasaran jangka panjang (> 5 Tahun)				
Penentuan sasaran jangka menengah (2-5 Tahun)				
Penentuan sasaran jangka pendek (1 tahunan)				
Penentuan target-target dalam periode tertentu				

Penjelasan:

.....

.....

.....

3. Menurut Bapak, bagaimanakah dukungan sumber daya dan sumber dana terhadap rencana-rencana kerja berbagai instansi di Kecamatan Bapak?
- Sangat didukung sumber daya dan dana, sehingga semua rencana terselesaikan
 - Didukung sumber daya; hanya sebagian kecil rencana yang tidak terealisasi.
 - Kurang didukung sumber daya, sehingga lebih kurang 50% rencana tidak dapat dilaksanakan
 - Hanya sedikit saja rencana yang terealisasi dan didukung sumber daya.
- Penjelasan:

.....

.....

.....

4. Apakah Bapak biasa menerima program/rencana serta pelaksanaan tugas dari instansi vertikal atau dinas otonom yang ada di wilayah Bapak?
- Selalu
 - Lebih sering menerima dari pada tidak
 - Lebih sering tidak menerima dari pada menerima
 - Tidak pernah menerima
- Penjelasan:

.....

.....

.....

5. Apakah Camat membahas program/rencana yang telah disampaikan oleh instansi vertikal atau dinas otonom, bersama-sama dengan instansi lainnya yang ada di wilayah bapak untuk memadukan berbagai rencana dan program yang ada?
- Selalu membahas
 - Lebih sering membahas dari pada tidak membahas
 - Lebih sering tidak membahas dari pada membahas
 - Tidak pernah membahas

Penjelasan:

.....

6. Apakah program/rencana yang telah dikoordinasikan, disampaikan oleh Kepala instansi yang ada di Kecamatan Bapak kepada atasannya untuk mendapat persetujuan?
- Selalu disampaikan
 - Lebih sering disampaikan daripada tidak
 - Lebih sering tidak disampaikan daripada disampaikan
 - Tidak pernah disampaikan

Penjelasan:

.....

7. Menurut yang Bapak ketahui, apakah Camat biasa mengajukan usulan/saran mengenai tata letak yang tepat untuk kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan?
- Selalu mengajukan
 - Lebih sering mengajukan dari pada tidak
 - Lebih sering tidak mengajukan dari pada mengajukan
 - Tidak pernah mengajukan

Penjelasan:

.....

8. Dalam melaksanakan kegiatan/proyek di kecamatan Bapak, apakah penyiapan jumlah, kualifikasi dan kualitas tenaga kerja, serta bahan-bahan, peralatan dan mesin yang diperlukan, sesuai dengan kebutuhan?
- Selalu sesuai
 - Lebih sering sesuai dari pada tidak sesuai

- c. Lebih sering tidak sesuai dari pada sesuai
- d. Selalu tidak sesuai dengan kebutuhan

Penjelasan:

.....

.....

.....

9. Apabila di Kecamatan Bapak telah dilaksanakan suatu proyek/kegiatan, apakah proyek/kegiatan tersebut digunakan sebagai bahan/proyeksi tahun berikutnya, dalam rangka perencanaan dari bawah (*bottom up planning*)?

- a. Selalu digunakan sebagai proyeksi tahun berikutnya
- b. Lebih sering digunakan dari pada tidak
- c. Lebih sering tidak digunakan dari pada digunakan
- d. Proyek tersebut tidak pernah digunakan sebagai proyeksi tahun berikutnya

Penjelasan:

.....

.....

.....

10. Apakah Camat memberikan saran/usul mengenai rencana proyek beserta lokasi pembangunan prasarana kesehatan dan pendidikan Sedolah dasar dan Madrasah di wilayahnya?

- a. Selalu
- b. Kurang aktif dalam mengusulkan proyek tersebut
- c. Tidak pernah mengusulkan rencana proyek maupun lokasinya

Penjelasan:

.....

.....

.....

11. Pernahkah terjadi perubahan mendadak atas rencana yang telah ditetapkan, karena situasi dan kondisi berubah, sehingga merusak situasi koordinasi yang telah ditetapkan semula?
- Sering terjadi perubahan
 - Antara 50% s.d. 75% dari seluruh rencana, terjadi perubahan mendadak
 - Antara 25% s.d. 50% dari seluruh rencana, terjadi perubahan mendadak
 - Maksimal 25% dari seluruh rencana, terjadi perubahan mendadak
 - Tidak pernah terjadi perubahan mendadak

Penjelasan:

.....

.....

.....

12. Jika pernah terjadi perubahan rencana secara mendadak, apakah mampu menyesuaikan dengan tuntutan perubahan itu, sehingga rencana terus berjalan meskipun tidak persis sesuai dengan yang direncanakan semula?

- Selalu mampu disesuaikan
- Lebih banyak yang mampu disesuaikan dari pada yang gagal total
- Antara yang mampu disesuaikan dengan yang gagal total, lebih kurang sama
- Lebih banyak yang gagal total dari pada yang mampu disesuaikan
- Jika terjadi perubahan mendadak, selalu menjadi gagal total.

Penjelasan:

.....

.....

.....

B. ASPEK PELAKSANAAN KEGIATAN

13. Dalam menangani pelaksanaan kegiatan/proyek, seharusnya dilakukan koordinasi antar instansi terkait. Bagaimana hubungan kerja yang selama ini berjalan?
- a. Sangat baik
 - b. baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
- Penjelasan:

.....

.....

.....

14. Di kecamatan Bapak, pernahkah diadakan rapat koordinasi antar instansi untuk membahas pelaksanaan kebijaksanaan yang terkait dengan pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan, yang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh petugas instansi yang ada?
- a. Secara rutin dilaksanakan setengah bulan sekali
 - b. Secara rutin dilaksanakan sebulan sekali
 - c. Kadang-kadang bila diperlukan, waktunya tidak tentu.
 - d. Tidak pernah dilaksanakan
- Penjelasan:

.....

.....

.....

15. Bagaimanakah keikutsertaan setiap instansi (petugas instansi) dalam rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan di tingkat kecamatan?
- a. Sangat berpartisipasi
 - b. Berpartisipasi
 - c. Kurang berpartisipasi
 - d. Tidak berpartisipasi

Penjelasan:

.....

16. Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan misi dan tugas pokoknya, perlu melakukan komunikasi yang baik dan jelas antar instansi terkait yang ada di wilayah. Bagaimanakah kondisi komunikasi yang selama ini dilaksanakan?
- Sangat baik
 - Baik
 - Kurang baik
 - Tidak baik
- Penjelasan:

.....

17. Komunikasi yang baik, perlu juga dilakukan antara instansi di wilayah kecamatan dengan instansi lain yang terkait di tingkat atasnya. Bagaimana kondisi komunikasi ini dilakukan sekarang?
- Sangat baik
 - Baik
 - Kurang baik
 - Tidak baik
- Penjelasan:

.....

18. Tak kalah pentingnya, komunikasi antara wilayah kecamatan dengan desa. Bagaimana kondisi komunikasi antar instansi yang ada di kecamatan dengan tingkat desa, yang selama ini dilakukan?
- Sangat baik

- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

Penjelasan:

.....

.....

.....

19. Bagaimanakah keikutsertaan camat dalam Rakorda Bangdes Tingkat II?

- a. Selalu ikut
- b. Lebih sering ikut
- c. Lebih sering tidak ikut
- d. Tidak pernah ikut

Penjelasan:

.....

.....

.....

20. Bagaimanakah peran serta camat dalam Rakorda Bangdes Tingkat II?

- a. Berperan sesuai tugas dan fungsinya
- b. Kurang berperan
- c. Sangat kurang berperan
- d. Tidak pernah berperan serta

Penjelasan:

.....

.....

.....

21. Bagaimanakah kepemimpinan Camat dalam diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD?

- a. Sangat baik dan sangat berwibawa
- b. Baik dan berwibawa
- c. Kurang baik dan kurang berwibawa
- d. Tidak baik dan tidak berwibawa

Penjelasan:

.....

.....

.....

22. Bagaimanakah sikap dan perilaku peserta diskusi UDKP atau Temu Karya LKMD terhadap kepemimpinan camat?
- Sangat simpati
 - Biasa-biasa saja
 - Acuh-acuh saja
 - Di belakang menggerutu, tidak setuju kepemimpinan camat,

Penjelasan:

.....

.....

.....

23. Bagaimana peran serta unsur perencana BAPPEDA Tingkat II dalam diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD?
- Sangat berperan
 - Berperan
 - Kurang berperan, dan jarang hadir
 - Satu tahun terakhir ini, belum pernah hadir

Penjelasan:

.....

.....

.....

24. Bagaimana peran serta Kepala Kantor Bangdes Kabupaten/Kodya Daerah Tingkat II dalam diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD?
- Sangat berperan
 - Berperan
 - Kurang berperan, dan jarang hadir
 - Satu tahun terakhir ini, belum pernah hadir

Penjelasan:

.....

.....

.....

25. Bagaimanakah keikutsertaan instansi pemerintah/tim-tim koordinasi yang ada di Kecamatan dalam diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD? (Jawaban boleh lebih dari satu)
- a. Seluruhnya selalu ikut
 - b. Lebih banyak yang ikut dari pada yang tidak
 - c. Setiap kali diskusi, lebih kurang hanya setengahnya saja yang hadir
 - d. Lebih banyak yang tidak ikut dari pada yang ikut
 - e. Ada instansi yang tidak pernah ikut sama sekali

Penjelasan:

.....

.....

.....

26. Bagaimana keikutsertaan Kepala Desa dalam diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD? (Jawaban boleh lebih dari satu)
- a. Semuanya selalu ikut
 - b. Lebih banyak yang ikut dari pada yang tidak
 - c. Setiap kali diskusi, lebih kurang hanya setengahnya saja yang hadir
 - d. Lebih banyak yang tidak ikut dari pada yang ikut
 - e. Ada instansi yang tidak pernah ikut sama sekali

Penjelasan:

.....

.....

.....

27. Bagaimanakah peran serta Kepala Desa dalam diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD?
- a. Kebanyakan sangat aktif
 - b. Kebanyakan biasa-biasa saja

- c. Kebanyakan kurang aktif
- d. Kebanyakan tidak aktif sama sekali (pasif)

Penjelasan:

.....

.....

.....

28. Bagaimana keikutsertaan Ketua LKMD dalam diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD? (Jawaban boleh lebih dari satu)
- a. Semuanya selalu ikut
 - b. Lebih banyak yang ikut dari pada yang tidak
 - c. Setiap diskusi, yang hadir lebih kurang hanya setengahnya
 - c. Lebih banyak yang tidak ikut dari pada yang ikut
 - d. Ada yang tidak pernah ikut

Penjelasan:

.....

.....

.....

29. Bagaimanakah peranserta Ketua LKMD dalam diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD?
- a. Kebanyakan sangat aktif
 - b. Kebanyakan biasa-biasa saja
 - c. Kebanyakan kurang aktif
 - d. Kebanyakan tidak aktif sama sekali (pasif)

Penjelasan:

.....

.....

.....

30. Bagaimanakah ketepatan penjadualan pelaksanaan diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD?
- a. Selalu tepat jadual
 - b. Lebih sering tepat jadual daripada tidak

- c. Lebih sering tidak tepat jadwal daripada tepat
- d. Tidak pernah tepat jadwal
- e. Satu tahun terakhir ini belum pernah dilaksanakan

Penjelasan:

.....

.....

.....

31. Bagaimanakah kondisi koordinasi kegiatan antar instansi yang ada di Wilayah Kecamatan Bapak?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

Penjelasan:

.....

.....

.....

32. Bagaimanakah kemampuan Camat dalam mengidentifikasi keterkaitan tugas, wewenang, dan kepentingan antara instansi (fungsional, sektoral dan regional) yang ada di kecamatan Bapak?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

Penjelasan:

.....

.....

.....

33. Bagaimanakah kemampuan Camat dalam memadukan kegiatan-kegiatan sejenis dan berkaitan, serta menyerasikan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai instansi di wilayahnya Bapak?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

Penjelasan:

.....

.....

.....

34. Apakah pernah terjadi tumpang tindih (*overlapping*) kegiatan dalam suatu waktu dan lokasi yang sama di Kecamatan Bapak, yang disebabkan kurangnya koordinasi?
- a. Tidak pernah terjadi
 - b. Sekali-sekali pernah terjadi
 - c. Sering terjadi
 - d. Sangat sering terjadi

Penjelasan:

.....

.....

.....

35. Jika pernah terjadi tumpang tindih kegiatan dalam satu waktu dan lokasi, bagaimanakah dampaknya?
- a. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya
 - b. Semuanya berjalan, tetapi tidak seperti yang direncanakan
 - c. Salah satu digagalkan, dan dijadualkan kembali
 - d. Semuanya digagalkan, dan dijadualkan kembali

Penjelasan:

.....

.....

.....

36. Apakah ada petunjuk pelaksanaan yang diberikan Camat kepada Bapak, dalam rangka pelaksanaan tugas Bapak di Kecamatan?

- a. Setiap Kegiatan ada
- b. Kebanyakan kegiatan ada Juklaknya
- c. Hanya sedikit saja kegiatan yang diberi Juklak
- d. Tidak pernah ada petunjuk pelaksanaan

Penjelasan:

.....

.....

.....

37. Bagaimanakah hubungan komunikasi dan informasi antara petugas (instansi) yang ada di Kecamatan Bapak?

- a. Sangat lancar
- b. Lebih sering lancarnya, daripada tidak lancar
- c. Lebih sering tidak lancar
- d. Tidak pernah lancar

Penjelasan:

.....

.....

.....

38. Untuk melakukan koordinasi kegiatan di Kecamatan bapak, apakah rapat koordinasi selalu dilaksanakan?

- a. Selalu dilakukan sesuai peraturan yang berlaku
- b. Lebih sering dilakukan daripada tidak
- c. Lebih sering tidak dilakukan daripada dilakukan
- d. Tidak pernah dilakukan rapat koordinasi

Penjelasan:

.....

.....

.....

39. Bagaimana arus penyampaian data, informasi atau pendapat forum-forum koordinasi dalam rangka koordinasi?

- a. Sangat lancar

- b. Lebih sering lancar, daripada tida lancar
- c. Lebih sering tidak lancar daripada lancar
- d. Tidak pernah lancar.

Penjelasan:

.....

.....

.....

40. Dalam rangka penyelenggaraan koordinasi, apakah Camat pernah menetapkan peraturan pelaksanaan koordinasi tersebut?

- a. Ya
- b. Tidak

Penjelasan:

.....

.....

.....

41. Sebelum dilaksanakan oleh setiap instansi vertikal atau dinas otonom yang ada di kecamatan, apakah program/rencana yang telah disetujui oleh atasannya, diberi petunjuk pelaksanaan (Juklak) terlebih dahulu oleh Camat?

- a. Selalu diberi juklak
- b. Lebih sering diberi juklak dari pada tidak
- c. Lebih sering tidak diberi juklak dari pada diberi
- d. Tidak pernah diberi juklak

Penjelasan:

.....

.....

.....

42. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban camat dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan?

- a. Sangat berwibawa dan ditaati masyarakat
- b. Biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol

- c. Kurang berwibawa, kadang kebijaksanaannya kurang sesuai dengan aspirasi rakyat
 - d. Tidak berwibawa, dan masyarakat bersifat acuh terhadap camat
- Penjelasan:

.....

.....

.....

43. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan antar instansi vertikal dan dinas yang ada di kecamatan?

- a. Sangat berwibawa, mampu, dan ditaati oleh seluruh instansi yang ada
 - b. Biasa-biasa saja, kadang-kadang tidak ditaati oleh instansi yang ada
 - c. Kurang berwibawa, lebih sering tidak ditaati dari pada ditaati oleh instansi yang ada
 - d. Tidak berwibawa, instansi yang ada bersikap acuh terhadap camat
- Penjelasan:

.....

.....

.....

44. Sampai sejauh manakah Camat dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya?

- a. Sangat baik, sehingga tidak pernah terjadi tumpang tindih kegiatan
- b. Biasa-biasa saja, kadang terjadi tumpang tindih kegiatan
- c. Kurang baik, sangat sering terjadi tumpang tindih pekerjaan
- d. Tidak baik, hampir setiap pelaksanaan proyek atau kegiatan terjadi tumpang tindih

Penjelasan:

.....

.....

.....

45. Apakah Camat melakukan pengkoordinasian segala kegiatan dan usaha pembangunan desa?
- Selalu
 - Lebih sering pengkoordinasian melakukan dari pada tidak
 - Lebih sering tidak melakukan pengkoordinasian daripada melakukan
 - Tidak pernah melakukan pengkoordinasian

Penjelasan:

.....
.....
.....

46. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan/proyek/tugas Bapak, rata-rata berapa kali Bapak berkomunikasi dengan Camat?

- 24 kali atau lebih dalam setahun
- 12 kali dalam setahun
- 6 kali setahun
- 3 kali dalam setahun
- Setahun sekali

Penjelasan:

.....
.....
.....

47. Dalam hal apakah komunikasi yang paling sering Bapak lakukan dengan Camat?

- Mengenai koordinasi pelaksanaan tugas/kegiatan/proyek
- Memohon saran untuk perencanaan dan pelaksanaannya
- Mengenai teknik dan metode pelaksanaan kegiatan/proyek
- Mengenai sumber dananya
- Mengenai peran serta masyarakat dalam kegiatan tersebut

Penjelasan:

.....
.....
.....

48. Setiap kali berkomunikasi atau bertukar pikiran dengan Camat mengenai tugas yang akan Bapak lakukan, apakah Camat memberikan respon positif dan memberikan saran pemecahan jika ada masalah?
- Selalu menanggapi dengan positif dan memberi saran jika ada masalah
 - Menanggapi secara positif, tapi tidak memberi saran pemecahan jika ada masalah
 - Bersikap biasa-biasa saja, Kadang memberi respon, kadang juga acuh.
 - Bersikap acuh
 - Camat menolak ide yang dilontarkan, dan selalu memaksakan kehendaknya sendiri.

Penjelasan:

.....

.....

.....

49. Berdasarkan pengamatan Bapak, apakah pernah terdapat suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh lebih dari satu instansi, padahal sebenarnya pekerjaan tersebut cukup dilaksanakan oleh satu instansi saja?
- Sering sekali ditemukan tumpang tindih kegiatan
 - Jarang
 - Pernah terjadi, namun sangat jarang
 - Tidak pernah terjadi

Penjelasan:

.....

.....

.....

50. Menurut Bapak, pernahkan ada tugas/pekerjaan yang seharusnya dikerjakan tetapi tidak ada yang mengerjakan, karena masing-masing instansi merasa bukan tugasnya?
- Sering terjadi
 - Jarang terjadi
 - Pernah terjadi, namun sangat jarang

d. Tidak pernah terjadi

Penjelasan:

.....

.....

.....

51. Bila terdapat suatu persoalan/masalah yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh masing-masing pejabat/Instansi dalam mengatasinya masalah tersebut?

- a. Dipecahkan bersama, dengan terlebih dahulu meminta saran Camat
- b. Ditanggulangi oleh instansi yang berhubungan dengan masalah itu, dengan memohon saran Camat terlebih dahulu.
- c. Ditanggulangi sendiri oleh instansi yang berhubungan dengan masalah tersebut, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat.
- d. Menunggu perintah atau instruksi dari atasannya langsung
- e. Menunggu perintah/instruksi dari Camat
- f. Dibiarkan saja, menunggu waktu berikutnya.

Penjelasan:

.....

.....

.....

52. Menurut yang Bapak ketahui, apakah kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan yang berjalan mempunyai rencana pokok sebagai dasar pembuatan rencana yang akan datang.

- a. Seluruhnya mempunyai
- b. Sebagian besar mempunyai
- c. Sebagian kecil mempunyai
- d. Tidak ada yang punya, karena menunggu keputusan instansi atasan (Pusat)
- e. Tidak ada, semuanya berjalan tanpa rencana pokok.

Penjelasan:

.....

.....

.....

53. Bila pelaksanaan rencana mengalami kegagalan, apakah penyebab kegagalan tersebut?
- Kurangnya dana
 - Kurangnya personil
 - Kurangnya sumber daya lain
 - Karena selalu menunggu keputusan yang lebih atas (Pusat)
 - Karena faktor luar (ekstern) yang tidak dapat diduga
- Penjelasan:

.....

.....

.....

54. Pelaksanaan tugas dan pemecahan masalah yang timbul kepada instansi yang ada, dilakukan melalui:
- Penilaian efisiensi dan efektivitas
 - Menunggu instruksi dari atasan
 - Menunggu saran dari camat
 - Atas inisiatif sendiri, dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada atasan dan memohon saran dari Camat
 - Secara lugas apa adanya, tanpa menunggu instruksi atasan dan saran dari camat
- Penjelasan:

.....

.....

.....

55. Sumber daya insani (manusia) yang terampil untuk menjalankan semua kebijaksanaan dan program kerja, merupakan syarat mutlak keberhasilan

program kerja tersebut. Bagaimana kondisi sumber daya insani untuk bidang kerja Bapak di kecamatan tempat Bapak ditugaskan?

- a. Sudah sangat memadai, baik kualitas maupun kuantitas
- b. Kualitas memadai, namun dari sisi kuantitas masih kurang-
- c. Kuantitas memadai, namun kualitas masih kurang
- d. Baik kuantitas maupun kualitas masih kurang

Penjelasan:

.....

.....

.....

56. Menurut Bapak sampai dimanakah ketepatan waktu dari semua kegiatan baik pelaksanaan proyek maupun kegiatan rutin, dalam hal perijinan.

- a. Sangat tepat
- b. Tepat
- c. Cukup tepat
- d. Kurang tepat
- e. Tidak tepat

Penjelasan:

.....

.....

.....

57. Menurut Bapak adakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan mengalami pengunduran waktu yang telah ditetapkan, akibat kurangnya kemampuan camat dalam mengkoordinasikan?

- a. Terlambat 2 bulan
- b. Terlambat 4 bulan
- c. Terlambat 6 bulan
- d. Terlambat 8 bulan
- e. Terlambat 12 bulan

Penjelasan:

.....

.....

58. Coba Bapak sebutkan, semua kejadian yang pernah Bapak alami atau bapak lihat yang menurut hemat Bapak merupakan dampak dari kurangnya koordinasi antar kegiatan di Kecamatan?

.....

C. PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI KEGIATAN

59. Apabila Bapak mendapatkan instruksi dari Camat, dalam bentuk apakah instruksi tersebut Bapak terima?
 a. Perintah dalam bentuk tertulis
 b. Perintah langsung secara lisan
 c. Perintah tidak langsung secara lisan
 d. Tidak pernah ada perintah baik lisan maupun tertulis

Penjelasan:

.....

60. Apakah Camat, mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan yang Bapak laksanakan?
 a. Selalu mengikuti
 b. Kadang-kadang mengikuti
 c. Kurang mengikuti
 d. Tidak pernah mengikuti

Penjelasan:

.....

61. Apakah camat, melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang Bapak laksanakan?
- Selalu
 - Lebih sering melakukan evaluasi, daripada tidak
 - Lebih sering tidak melakukan evaluasi, daripada melakukan
 - Tidak pernah melakukan evaluasi

Penjelasan:

.....

.....

.....

62. Apakah Camat suka meminta keterangan pelaksanaan tugas yang telah Bapak kerjakan?
- Selalu
 - Lebih sering meminta, daripada tidak
 - Lebih sering tidak meminta, dari pada meminta
 - Tidak pernah meminta

Penjelasan:

.....

.....

.....

63. Apakah Camat, biasa melaporkan hasil koordinasi kepada pejabat berwenang dengan memberi tembusan kepada instansi vertikal atau dinas otonom yang bersangkutan?
- Selalu
 - Lebih sering melaporkan dari pada tidak
 - Lebih sering tidak melaporkan dari pada melaporkan
 - Tidak pernah melaporkan

Penjelasan:

.....

.....

.....

64. Apakah pimpinan Departemen dan LPND melakukan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan koordinasi terhadap kepala (petugas) instansi vertikal atau dinas otonom yang ada di kecamatan Bapak?

- a. Selalu membina dan mengawasi
- b. Lebih sering membina dan mengawasi dari pada tidak
- c. Lebih sering tidak membina dan tidak mengawasi
- d. Tidak pernah membina dan mengawasi

Penjelasan:

.....

.....

.....

65. Dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan petugas (Kepala) instansi vertikal atau dinas otonom oleh Pejabat Penilai, apakah memperhatikan pertimbangan Camat?

- a. Selalu
- b. Lebih sering memperhatikannya dari pada tidak
- c. Lebih sering tidak memperhatikannya
- d. Tidak pernah memperhatikan pertimbangan Camat

Penjelasan:

.....

.....

.....

66. Apakah Camat biasa meminta program/rencana serta laporan pelaksanaan tugas dari Bapak?

- a. Selalu
- b. Lebih sering meminta dari pada tidak
- c. Lebih sering tidak meminta dari pada meminta
- d. Tidak pernah meminta

Penjelasan:

.....

-

67. Apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaan program/rencana, terutama yang bersangkutan dengan instansi lainnya, apakah Kepala (petugas) instansi melaporannya kepada Camat untuk mendapatkan pemecahannya?
- Selalu melaporkan
 - Lebih sering melaporkan dari pada tidak
 - Lebih sering tidak melaporkan dari pada melaporkan
 - Tidak pernah melaporkan
- Penjelasan:
-

68. Apakah dalam laporan Kepala (petugas) instansi yang ada di Kecamatan Bapak mengenai bidang tugas kegiatannya, memuat hal-hal sebagai berikut? (lingkari yang sesuai/jawaban boleh satu, dua, tiga, atau semua pilihan)
- Jenis pekerjaan (apa yang akan dikerjakan)
 - Waktu (Jadual) pelaksanaan
 - Instansi yang terkait
 - Pelaksanaan kegiatan yang telah diselesaikan
- Penjelasan:
-

69. Apakah program/rencana yang dilaksanakan instansi yang ada di kecamatan Bapak mendapat pengawasan yang baik dari aparat pengawas departemen/LPND-nya masing-masing?
- Selalu mendapat pengawasan yang baik
 - Lebih sering mendapat pengawasan dari pada tidak

c. Lebih sering tidak diawasi dari pada diawasi

d. Tidak pernah diawasi

Penjelasan:

.....

.....

.....

70. Dalam memberikan bahan pertimbangan penilaian dalam rangka pemberian kondite kepala (petugas) instansi, apakah Camat memberikan pertimbangan/bahan penilaian tersebut sesuai dengan kenyataannya/tidak dibuat-buat?

a. Selalu sesuai

b. Lebih banyak sesuainya dari pada tidak sesuai

c. Lebih banyak tidak sesuainya

d. Tidak ada yang sesuai dengan kenyataan/banyak dibuat-buat

Penjelasan:

.....

.....

.....

71. Jika ada Kepala (petugas) instansi yang lalai dan tidak mengindahkan ketentuan mengenai koordinasi, apakah Camat pernah mengusulkan kepada pejabat atasannya untuk diberi tindakan administratif sesuai dengan ketentuan?

a. Selalu mengusulkan, jika ada yang lalai

b. Lebih sering mengusulkan dari pada tidak, kalau ada yang lalai

c. Lebih sering tidak mengusulkan, meskipun ada yang lalai

d. Tidak pernah mengusulkan, meskipun ada yang lalai

e. Tidak pernah mengusulkan, karena tidak pernah ada yang lalai

Penjelasan:

.....

.....

.....

72. Menurut Bapak, bagaimanakah kemampuan Camat dalam mengikuti perkembangan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas instansi yang ada di wilayahnya?
- Sangat baik
 - Baik
 - Kurang baik
 - Tidak baik

Penjelasan:

.....

.....

.....

73. Menurut pengetahuan Bapak, apakah Camat menguasai data dan informasi mengenai penyebaran lokasi kegiatan/proyek di masing-masing kecamatan?

- Menguasai seluruhnya
- Lebih banyak tahunya dari pada yang tidak tahunya
- Lebih banyak yang tidak tahunya dari pada yang tahunya
- Tidak tahu sama sekali

Penjelasan:

.....

.....

.....

74. Menurut pengetahuan Bapak, apakah Camat mengetahui keterkaitan suatu kegiatan/proyek dengan kegiatan/proyek lainnya?

- Tahu seluruhnya
- Lebih banyak tahunya dari pada yang tidak tahunya
- Lebih banyak yang tidak tahunya dari pada yang tahunya
- Tidak ada yang tahu

Penjelasan:

.....

.....

.....

75. Menurut Bapak, apakah Camat mengetahui jenis-jenis kegiatan/proyek yang karena sifatnya memerlukan peran serta langsung masyarakat?
- Tahu seluruhnya
 - Lebih banyak tahunya dari pada yang tidak tahunya
 - Lebih banyak yang tidak tahunya dari pada yang tahunya
 - Tidak ada yang tahu

Penjelasan:

.....

.....

.....

76. Menurut pengetahuan Bapak, apakah Camat tahu mengenai luas dan lokasi yang harus disediakan untuk suatu kegiatan/proyek?
- Tahu seluruhnya
 - Lebih banyak tahunya dari pada yang tidak tahunya
 - Lebih banyak yang tidak tahunya dari pada yang tahunya
 - Tidak ada yang tahu

Penjelasan:

.....

.....

.....

77. Menurut pengetahuan Bapak, apakah Camat mengetahui besarnya biaya kegiatan/proyek yang dilaksanakan instansi di wilayah Bapak?
- Tahu seluruhnya
 - Lebih banyak tahunya dari pada yang tidak tahunya
 - Lebih banyak yang tidak tahunya dari pada yang tahunya
 - Tidak ada yang tahu

Penjelasan:

.....

.....

.....

78. Apabila di Kecamatan Bapak akan dilaksanakan suatu proyek/kegiatan, apakah Camat bersama-sama kepala (petugas) instansi dan Kepala Desa/Kelurahan memantau dan mengendalikan pelaksanaan masing-masing maupun keseluruhan kegiatan/proyek pembangunan yang ada?
- Selalu memantau dan mengendalikan
 - Lebih sering memantau dan mengendalikan dari pada tidak
 - Lebih sering tidak memantau dan tidak mengendalikan
 - Tidak pernah memantau dan mengendalikan

Penjelasan:

.....

.....

.....

79. Apabila di Kecamatan Bapak akan dilaksanakan suatu proyek/kegiatan, apakah Camat bersama-sama kepala (petugas) instansi dan Kepala Desa/Kelurahan melaporkan perkembangan pelaksanaan serta hambatan yang dijumpai baik secara periodik maupun sewaktu-waktu diperlukan, kepada atasannya masing-masing?
- Selalu melaporkan
 - Lebih sering melaporkan dari pada tidak
 - Lebih sering tidak melaporkan
 - Tidak pernah melaporkannya

Penjelasan:

.....

.....

.....

80. Apakah Camat biasa meminta laporan/keterangan mengenai perencanaan/pelaksanaan pembangunan dari instansi Bapak?
- Selalu
 - Lebih sering meminta laporan, dari pada tidak
 - Lebih sering tidak meminta laporan dari pada meminta
 - Tidak pernah meminta laporan

Penjelasan:

.....

.....

.....

81. Apakah Camat selalu membuat laporan periodik kepada atasannya, mengenai kegiatan pembangunan prasarana pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah?
- Selalu membuat laporan dengan baik sesuai dengan keadaan sebenarnya
 - Membuat laporan, namun sering tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya
 - Kadang membuat, kadang tidak
 - Tidak pernah membuat laporan

Penjelasan:

.....

.....

.....

82. Bagaimanakah pelaksanaan tugas camat sebagai Ketua Badan Pengawas prasarana kesehatan di wilayahnya?
- Sangat baik
 - Biasa-biasa saja
 - Kurang baik
 - Tidak baik

Penjelasan:

.....

.....

.....

83. Apakah Camat memberikan bimbingan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang menyangkut kepentingan beberapa desa di wilayahnya?
- Selalu memberikan

- b. Lebih sering memberikan dari pada tidak
- c. Lebih sering tidak memberikan dari pada memberikan
- d. Tidak pernah memberikan

Penjelasan:

.....

.....

.....

84. Apakah laporan-laporan pelaksanaan kegiatan proyek telah didokumentasikan sesuai dengan klasifikasinya?
- a. Diarsip sesuai dengan klasifikasinya
 - b. Sebagian diarsip sesuai dengan klasifikasinya
 - c. Kadang-kadang diklasifikasi
 - d. Cukup sampai disahkan laporan
 - e. Tidak disahkan asal mudah diarsip

Penjelasan:

.....

.....

.....

D. ASPEK PELAYANAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN FAKTOR PENDUKUNG LAINNYA

85. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban camat dalam membina kehidupan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melayani masyarakat?
- a. Sangat perhatian terhadap kehidupan masyarakatnya, berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
 - b. Biasa-biasa saja
 - c. Kurang perhatian terhadap kehidupan, kesejahteraan, dan pelayanan masyarakat

- d. Tidak perhatian terhadap kehidupan masyarakat, sering melakukan pungutan-pungutan yang illegal, dan pelayanan yang diberikan berbelit-belit

Penjelasan:

.....

.....

.....

86. Apakah camat memberi penerangan kepada seluruh instansi dan masyarakat di wilayahnya, mengenai kebijaksanaan pemerintah?
- a. Selalu memberi penerangan
 - b. Lebih sering memberi penerangan dari pada tidak
 - c. Lebih sering tidak memberi penerangan dari pada memberi
 - d. Tidak pernah memberi penerangan

Penjelasan:

.....

.....

.....

87. Apakah Camat bertanggung jawa atas pengamanan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya?
- a. Sangat bertanggung jawab
 - b. Biasa-biasa saja
 - c. Kurang bertanggung jawab
 - d. Tidak bertanggung jawab

Penjelasan:

.....

.....

.....

88. Apakah camat melaksanakan pengamanan atas proyek-proyek dan tempat-tempat yang dianggap vital?
- a. Selalu mengamankan
 - b. Lebih sering melaksanakan pengamanan, dari pada tidak

- c. Lebih sering tidak melaksanakan pengamanan, dari pada melaksanakan
- d. Tidak pernah melaksanakan pengamanan

Penjelasan:

.....

.....

.....

89. Apakah Camat tanggap terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang?
- a. Sangat tanggap, berusaha menampung dan menjadikannya sebagai masukan
 - b. Tanggap, tetapi kadang kala bersikap acuh (tidak memperhatikan)
 - c. Kurang tanggap, kebanyakan aspirasi masyarakat tidak diperhatikan
 - d. Tidak tanggap, bahkan mengarah kepada pemaksaan kehendak dan mematikan aspirasi

Penjelasan:

.....

.....

.....

90. Terhadap perusahaan yang ada di Kecamatan, apakah camat melakukan pemeriksaan apabila perusahaan tersebut mengajukan izin tempat usaha dan izin berusaha?
- a. Selalu memeriksa
 - b. Lebih sering diperiksa dari pada tidak
 - c. Lebih sering tidak diperiksa dari pada diperiksa
 - c. Tidak pernah diperiksa

Penjelasan:

.....

.....

.....

91. Dalam aspek ketenagakerjaan, apakah Camat berupaya untuk mengatasi pengangguran di wilayahnya?

- a. Berusaha keras dengan berbagai program
- b. Berusaha, namun hanya dalam bentuk himbauan, tidak ada program nyata
- c. Tidak pernah berusaha
- d. Acuh-acuh saja terhadap pengangguran di wilayahnya

Penjelasan:

.....

.....

.....

92. Apakah Camat ikut memperhatikan penggunaan tenaga kerja di wilayahnya?
- a. Ikut memperhatikan
 - b. Acuh-acuh saja
 - c. Tidak memperhatikan sama sekali

Penjelasan:

.....

.....

.....

93. Bagaimanakah upaya camat dalam pelaksanaan proyek penghijauan di wilayahnya?
- a. Sangat berupaya keras
 - b. Biasa-biasa saja, hanya berupa himbauan kepada masyarakat
 - c. Kurang berusaha (acuh-acuh saja) terhadap proyek penghijauan tersebut
 - d. Tidak berusaha sama sekali untuk mensukseskan proyek penghijauan tersebut?

Penjelasan:

.....

.....

.....

94. Apakah Kantor Kecamatan sudah berfungsi dengan baik sebagai pusat pengolahan data dan sumber data?
- Berfungsi dengan baik
 - Berfungsi, namun tidak semua data yang diperlukan ada
 - Kurang berfungsi, kebanyakan data yang mestinya ada, tidak ada
 - Tidak berfungsi dengan baik

Penjelasan:

.....

.....

.....

95. Apakah Kantor Camat telah berfungsi dengan baik sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat?
- Berfungsi dengan baik
 - Berfungsi, namun kurang memuaskan
 - Kurang berfungsi
 - Tidak pernah berfungsi sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat

Penjelasan:

.....

.....

.....

96. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap kebijakan Instansi dan program-program kerja instansi yang ada di kecamatan Bapak?
- Sangat baik, dan ikut berpartisipasi mensukseskannya
 - Baik, tetapi kurang ikut berpartisipasi
 - Kurang baik, hanya sedikit saja yang ikut berpartisipasi
 - Tidak baik, masyarakat bersikap acuh
 - Sangat tidak baik, masyarakat menolaknya

Penjelasan:

.....

.....

.....

97. Apabila di Kecamatan Bapak akan dilaksanakan suatu proyek/kegiatan, apakah Camat bersama-sama kepala (petugas) instansi dan Kepala Desa/Kelurahan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kegiatan/proyek tersebut serta manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat?
- Selalu memberi penjelasan
 - Lebih sering memberi penjelasan dari pada tidak
 - Lebih sering tidak memberi penjelasan
 - Tidak pernah memberi penjelasan

Penjelasan:

.....

.....

.....

98. Apabila di Kecamatan Bapak akan dilaksanakan suatu proyek/kegiatan, apakah Camat bersama-sama kepala (petugas) instansi dan Kepala Desa/Kelurahan menyiapkan dukungan dan pembinaan gerakan peranserta masyarakat?
- Selalu menyiapkan, setiap ada proyek/kegiatan
 - Lebih sering menyiapkan dari pada tidak
 - Lebih sering tidak menyiapkan
 - Tidak pernah menyiapkan dukungan dan pembinaan gerakan peran serta masyarakat

Penjelasan:

.....

.....

.....

4. The Commission shall have the authority to...
The Commission shall have the authority to...
The Commission shall have the authority to...

- a. To conduct investigations...
- b. To subpoena witnesses...
- c. To examine records...
- d. To administer oaths...

5. The Commission shall have the authority to...
The Commission shall have the authority to...
The Commission shall have the authority to...

6. The Commission shall have the authority to...
The Commission shall have the authority to...
The Commission shall have the authority to...

- a. To conduct investigations...
- b. To subpoena witnesses...
- c. To examine records...
- d. To administer oaths...

7. The Commission shall have the authority to...
The Commission shall have the authority to...
The Commission shall have the authority to...

LAMPIRAN 4

**DAFTAR PERTANYAAN
UNTUK KECAMATAN**

**PENELITIAN TENTANG PENINGKATAN KOORDINASI
PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS DI WILAYAH KECAMATAN
DALAM RANGKA EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT**

No	Daerah	Waktu	Tempat	Isi Pertanyaan
1				
2				
3				
4				
5				

A. ASPEK PERENCANAAN DALAM RANGKA KOORDINASI

1. Menurut yang Bapak ketahui, apakah sudah ada rencana kerja tiap instansi baik vertikal maupun dinas otonom yang ada di Kecamatan. Bila sudah ada, apakah rencana kerja tersebut sudah jelas dan memperhatikan keterkaitan dengan kegiatan instansi lain?
 - a. Belum ada
 - b. Ada, tapi belum memperhatikan keterkaitan tugas
 - c. Ada dan sudah memperhatikan keterkaitan tugas, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
 - d. Ada dan baik; dalam peraturan maupun pelaksanaannya sudah memperhatikan keterkaitan dengan instansi lain.

Penjelasan:

.....

.....

.....

2. Setiap rencana kerja instansi yang ada di kecamatan Bapak, sudah tentu mempunyai sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Selain sasaran yang bersifat makro dalam lingkup instansional, bagaimanakah sasaran-sasaran dalam lingkup mikro, yaitu pada tingkat kecamatan? (Beri tanda silang X pada kolom yang tersedia)

S A S A R A N	Sangat baik	Baik	Kurang baik	Tidak ada
Penentuan sasaran jangka panjang (> 5 Tahun)				
Penentuan sasaran jangka menengah (2-5 Tahun)				
Penentuan sasaran jangka pendek (1 tahunan)				
Penentuan target-target dalam periode tertentu				

Penjelasan:

.....

.....

.....

3. Menurut Bapak, apakah rencana-rencana kerja berbagai instansi di Kecamatan Bapak, layak dan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat?
- sangat sesuai
 - sesuai
 - Kurang sesuai
 - Tidak sesuai

Penjelasan:

.....

.....

.....

4. Menurut Bapak, bagaimanakah dukungan sumber daya dan sumber dana terhadap rencana-rencana kerja berbagai instansi di Kecamatan Bapak?
- Sangat didukung sumber daya dan dana, sehingga semua rencana terselesaikan
 - Didukung sumber daya; hanya sebagian kecil rencana yang tidak terealisasikan.
 - Kurang didukung sumber daya, sehingga lebih kurang 50% rencana tidak dapat dilak
 - Hanya sedikit saja rencana yang terealisasi dan didukung sumber daya.

Penjelasan:

.....

.....

.....

5. Apakah program/rencana yang telah disampaikan oleh instansi vertikal atau dinas otonom, dibahas bersama-sama dengan instansi lainnya yang

ada di wilayah bapak untuk memadukan berbagai rencana dan program yang ada?

- a. Selalu membahas
- b. Lebih sering membahas dari pada tidak membahas
- c. Lebih sering tidak membahas dari pada membahas
- d. Tidak pernah membahas

Penjelasan:

.....

.....

.....

6. Apakah program/rencana yang telah dikoordinasikan, disampaikan oleh Kepala instansi yang ada di Kecamatan Bapak kepada atasannya untuk mendapat persetujuan?

- a. Selalu disampaikan
- b. Lebih sering disampaikan daripada tidak
- c. Lebih sering tidak disampaikan daripada disampaikan
- d. Tidak pernah disampaikan

Penjelasan:

.....

.....

.....

7. Setiap tahun, apakah Bapak menerima daftar inventarisasi kegiatan/proyek pembangunan yang telah disusun dan pedoman/petunjuk pelaksanaan, yang disampaikan Bupati/Walikota/madya?

- a. Selalu menerima
- b. Lebih sering menerima dari pada tidak
- c. Lebih sering tidak menerima dari pada menerima
- d. Tidak pernah menerima

Penjelasan:

.....

.....

.....

8. Apakah Bapak biasa mengajukan usulan/saran mengenai tata letak yang tepat untuk kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan?
- a. Selalu mengajukan
 - b. Lebih sering mengajukan dari pada tidak
 - c. Lebih sering tidak mengajukan dari pada mengajukan
 - d. Tidak pernah mengajukan, karena tidak diminta

Penjelasan:

.....
.....
.....

9. Apabila di Kecamatan Bapak telah dilaksanakan suatu proyek/kegiatan, apakah proyek/kegiatan tersebut digunakan sebagai bahan/proyeksi tahun berikutnya, dalam rangka perencanaan dari bawah (*bottom up planning*)?
- a. Selalu digunakan sebagai proyeksi tahun berikutnya
 - b. Lebih sering digunakan dari pada tidak
 - c. Lebih sering tidak digunakan dari pada digunakan
 - d. Proyek tersebut tidak pernah digunakan sebagai proyeksi tahun berikutnya

Penjelasan:

.....
.....
.....

10. Pernahkah terjadi perubahan mendadak atas rencana instansi yang telah ditetapkan, karena situasi dan kondisi berubah, sehingga merusak situasi koordinasi yang telah ditetapkan semula?
- a. Sering terjadi perubahan
 - b. Antara 50% s.d. 75% dari seluruh rencana, terjadi perubahan mendadak
 - c. Antara 25% s.d. 50% dari seluruh rencana, terjadi perubahan mendadak
 - d. Maksimal 25% dari seluruh rencana, terjadi perubahan mendadak

e. Tidak pernah terjadi perubahan mendadak

Penjelasan:

.....

.....

.....

11. Jika pernah terjadi perubahan rencana secara mendadak, apakah instansi tersebut mampu menyesuaikan dengan tuntutan perubahan itu, sehingga rencana terus berjalan meskipun tidak persis sesuai dengan yang direncanakan semula?

a. Selalu mampu disesuaikan

b. Lebih banyak yang mampu disesuaikan dari pada yang gagal total

c. Antara yang mampu disesuaikan dengan yang gagal total, lebih kurang sama

d. Lebih banyak yang gagal total dari pada yang mampu disesuaikan

e. Jika terjadi perubahan mendadak, selalu menjadi gagal total.

Penjelasan:

.....

.....

.....

12. Pernahkah terjadi perubahan mendadak atas rencana instansi yang telah ditetapkan, karena instruksi dari atasannya, sehingga merusak situasi koordinasi yang telah ditetapkan semula?

a. Sering terjadi perubahan

b. Antara 50% s.d. 75% dari seluruh rencana, terjadi perubahan mendadak

c. Antara 25% s.d. 50% dari seluruh rencana, terjadi perubahan mendadak

d. Maksimal 25% dari seluruh rencana, terjadi perubahan mendadak

e. Tidak pernah terjadi perubahan mendadak

Penjelasan:

.....

.....

.....

13. Menurut yang Bapak ketahui, apakah kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan yang berjalan mempunyai rencana pokok sebagai dasar pembuatan rencana yang akan datang.
- Seluruhnya mempunyai
 - Sebagian besar mempunyai
 - Sebagian kecil mempunyai
 - Tidak ada yang punya, karena menunggu keputusan instansi atasan (Pusat)
 - Tidak ada, semuanya berjalan tanpa rencana pokok.

Penjelasan:

.....

.....

.....

B. ASPEK PELAKSANAAN KEGIATAN

14. Dalam menangani pelaksanaan kegiatan/proyek, seharusnya dilakukan koordinasi antar instansi terkait. Bagaimana hubungan kerja yang selama ini berjalan?
- Sangat baik
 - baik
 - Kurang baik
 - Tidak baik

Penjelasan:

.....

.....

.....

15. Di kecamatan Bapak, pernahkah diadakan rapat koordinasi antar instansi untuk membahas pelaksanaan kebijaksanaan yang terkait dengan pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan, yang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh petugas instansi yang ada?
- Secara rutin dilaksanakan setengah bulan sekali
 - Secara rutin dilaksanakan sebulan sekali

c. Kadang-kadang bila diperlukan, waktunya tidak tentu.

d. Tidak pernah dilaksanakan

Penjelasan:

.....

.....

.....

16. Bagaimanakah keikutsertaan setiap instansi (petugas instansi) dalam rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan di tingkat kecamatan?

a. Sangat berpartisipasi

b. Berpartisipasi

c. Kurang berpartisipasi

d. Tidak berpartisipasi

Penjelasan:

.....

.....

.....

17. Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan misi dan tugas pokoknya, perlu melakukan komunikasi yang baik dan jelas antar instansi terkait yang ada di wilayah. Bagaimanakah kondisi komunikasi yang selama ini dilaksanakan?

a. Sangat baik

b. Baik

c. Kuang baik

d. Tidak baik

Penjelasan:

.....

.....

.....

18. Komunikasi yang baik, perlu juga dilakukan antara instansi di wilayah kecamatan dengan instansi lain yang terkait di tingkat atasnya. Bagaimana kondisi komunikasi ini dilakukan sekarang?

- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kuang baik
 - d. Tidak baik
- Penjelasan:

.....

.....

.....

19. Tak kalah pentingnya, komunikasi antara wilayah kecamatan dengan desa. Bagaimana kondisi komunikasi antar instansi yang ada di kecamatan dengan tingkat desa, yang selama ini dilakukan?

- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kuang baik
 - d. Tidak baik
- Penjelasan:

.....

.....

.....

20. Bagaimanakah sikap dan perilaku peserta, pada saat diskusi UDKP atau Temu Karya LKMD ?

- a. Sangat serius
 - b. Biasa-biasa saja
 - c. Acuh-acuh saja
 - d. Di belakang menggerutu, tidak setuju terhadap keputusan yang ditetapkan.
- Penjelasan:

.....

.....

.....

21. Bagaimana peran serta unsur perencana BAPPEDA Tingkat II dalam diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD?
- Sangat berperan
 - Berperan
 - Kurang berperan, dan jarang hadir
 - Satu tahun terakhir ini, belum pernah hadir
- Penjelasan:

.....

.....

.....

22. Bagaimana peran serta Kepala Kantor Bangdes Kabupaten/Kodya Daerah Tingkat II dalam diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD?
- Sangat berperan
 - Berperan
 - Kurang berperan, dan jarang hadir
 - Satu tahun terakhir ini, belum pernah hadir
- Penjelasan:

.....

.....

.....

23. Bagaimanakah keikutsertaan instansi pemerintah/tim-tim koordinasi yang ada di Kecamatan dalam diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD? (Jawaban boleh lebih dari satu)
- Seluruhnya selalu ikut
 - Lebih banyak yang ikut dari pada yang tidak
 - Setiap kali diskusi, lebih kurang hanya setengahnya saja yang hadir
 - Lebih banyak yang tidak ikut dari pada yang ikut
 - Ada instansi yang tidak pernah ikut sama sekali
- Penjelasan:

.....
.....
.....

24. Bagaimanakah keaktifan instansi pemerintah/tim-tim koordinasi yang ada di kecamatan dalam diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD?

- a. Sangat aktif
- b. Biasa-biasa saja
- c. Kurang aktif
- d. Tidak aktif sama sekali (pasif)

Penjelasan:

.....
.....
.....

25. Bagaimana keikutsertaan Kepala Desa dalam diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD? (Jawaban boleh lebih dari satu)

- a. Semuanya selalu ikut
- b. Lebih banyak yang ikut dari pada yang tidak
- c. Setiap kali diskusi, lebih kurang hanya setengahnya saja yang hadir
- d. Lebih banyak yang tidak ikut dari pada yang ikut
- e. Ada instansi yang tidak pernah ikut sama sekali

Penjelasan:

.....
.....
.....

26. Bagaimanakah keaktifan Kepala Desa dalam diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD?

- a. Kebanyakan sangat aktif
- b. Kebanyakan biasa-biasa saja
- c. Kebanyakan kurang aktif
- d. Kebanyakan tidak aktif sama sekali (pasif)

Penjelasan:

.....

.....

.....

27. Bagaimana keikutsertaan Ketua LKMD dalam diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD? (Jawaban boleh lebih dari satu)
- Semuanya selalu ikut
 - Lebih banyak yang ikut dari pada yang tidak
 - Setiap diskusi, yang hadir lebih kurang hanya setengahnya
 - Lebih banyak yang tidak ikut dari pada yang ikut
 - Ada yang tidak pernah ikut

Penjelasan:

.....

.....

.....

28. Bagaimanakah keaktifan Ketua LKMD dalam diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD?
- Kebanyakan sangat aktif
 - Kebanyakan biasa-biasa saja
 - Kebanyakan kurang aktif
 - Kebanyakan tidak aktif sama sekali (pasif)

Penjelasan:

.....

.....

.....

29. Bagaimanakah ketepatan penjadualan pelaksanaan diskusi UDKP Kecamatan atau Temu Karya LKMD?
- Selalu tepat jadual
 - Lebih sering tepat jadual daripada tidak
 - Lebih sering tidak tepat jadual daripada tepat
 - Tidak pernah tepat jadual

e. Satu tahun terakhir ini belum pernah dilaksanakan
Penjelasan:

.....
.....
.....

30. Bagaimanakah kondisi koordinasi kegiatan antar instansi yang ada di Wilayah Kecamatan Bapak?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

Penjelasan:

.....
.....
.....

31. Apakah pernah terjadi tumpang tindih (*overlapping*) kegiatan dalam suatu waktu dan lokasi yang sama di Kecamatan Bapak, yang disebabkan kekurangan instansi yang ada di kecamatan Bapak?

- a. Tidak pernah terjadi
- b. Sekali-sekali pernah terjadi
- c. Sering terjadi
- d. Sangat sering terjadi

Penjelasan:

.....
.....
.....

32. Jika pernah terjadi tumpang tindih kegiatan dalam satu waktu dan lokasi, bagaimanakah dampaknya?

- a. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya
- b. Semuanya berjalan, tetapi tidak seperti yang direncanakan
- c. Salah satu digagalkan, dan dijadualkan kembali

d. Semuanya digagalkan, dan dijadualkan kembali

Penjelasan:

.....

.....

.....

33. Apakah petugas (Kepala) instansi vertikal atau dinas otonom yang ada di kecamatan Bapak mematuhi petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Camat?

- a. Selalu
- b. Lebih sering melapor, daripada tidak
- c. Lebih sering tidak melapor daripada melapor
- d. Tidak pernah melapor

Penjelasan:

.....

.....

.....

34. Bagaimanakah hubungan komunikasi dan informasi antara petugas (instansi) yang ada di Kecamatan Bapak?

- a. Sangat lancar
- b. Lebih sering lancarnya, daripada tidak lancar
- c. Lebih sering tidak lancar
- d. Tidak pernah lancar

Penjelasan:

.....

.....

.....

35. Untuk melakukan koordinasi kegiatan di Kecamatan bapak, apakah rapat koordinasi selalu dilaksanakan?

- a. Selalu dilakukan sesuai peraturan yang berlaku
- b. Lebih sering dilakukan daripada tidak
- c. Lebih sering tidak dilakukan daripada dilakukan

d. Tidak pernah dilakukan rapat koordinasi

Penjelasan:

.....

.....

.....

36. Bagaimana arus penyampaian data, informasi atau pendapat forum-forum koordinasi dalam rangka koordinasi?

- a. Sangat lancar
- b. Lebih sering lancar, daripada tidak lancar
- c. Lebih sering tidak lancar daripada lancar
- d. Tidak pernah lancar.

Penjelasan:

.....

.....

.....

37. Apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaan program/rencana, terutama yang bersangkutan dengan instansi lainnya, apakah Kepala (petugas) instansi melaporannya kepada Camat untuk mendapatkan pemecahannya?

- a. Selalu melaporkan
- b. Lebih sering melaporkan dari pada tidak
- c. Lebih sering tidak melaporkan dari pada melaporkan
- d. Tidak pernah melaporkan

Penjelasan:

.....

.....

.....

38. Jika terjadi pengangkatan kepala (petugas) instansi di kecamatan Bapak, apakah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Bapak?

- a. Selalu dikonsultasikan
- b. Lebih sering dikonsultasikan dari pada tidak

- c. Lebih sering tidak dikonsultasikan dari pada dikonsultasikan
- d. Tidak pernah dikonsultasikan

Penjelasan:

.....

.....

.....

39. Menurut penelaian Bapak, apakah kepala (petugas) instansi yang ada di kecamatan Bapak mempunyai kriteria seperti berikut? (pilihan boleh satu, dua, tiga, atau semuanya)
- a. Taat terhadap petunjuk pelaksanaan yang diberikan Camat
 - b. Kerja sama dengan instansi lain baik
 - c. Mempunyai daya inisiatif yang tinggi dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas
 - d. Mempunyai dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya

Penjelasan:

.....

.....

.....

40. Menurut peraturan yang berlaku, selambat-lambatnya 3 bulan sebelum dilakukan mutasi kepala (petugas) instansi di wilayah (termasuk di Kecamatan), pimpinan departemen/ LPND harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Wilayah. Apakah hal ini dipenuhi dalam mutasi kepala (petugas) instansi yang ada di kecamatan Bapak?
- a. Selalu dipenuhi
 - b. Lebih sering dipenuhi dari pada tidak
 - c. Lebih sering tidak dipenuhi dari pada dipenuhi
 - d. Tidak pernah dipenuhi

Penjelasan:

.....

.....

.....

41. Apakah, petugas instansi vertikal yang ada di Kecamatan Bapak dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman kepada kebijaksanaan yang ditetapkan oleh instansi atasannya?
- Selalu
 - Lebih sering berpedoman, daripada tidak
 - Lebih sering tidak berpedoman daripada berpedoman
 - Tidak pernah berpedoman kepada kebijaksanaan atasannya

Penjelasan:

.....

.....

.....

42. Apakah petugas instansi yang ada di kecamatan Bapak, dalam melaksanakan tugasnya bisa bekerja sama dengan pihak lain dan mudah dikoordinasikan?
- Sangat mudah dikoordinasikan
 - Lebih sering dapat kerja sama dan bisa dikoordinasikan
 - Lebih sering tidak bisa kerjasama dan membangkang
 - Tidak bisa kerja sama dan tidak dapat dikoordinasikan

Penjelasan:

.....

.....

.....

43. Dalam melaksanakan kegiatan/proyek suatu instansi di kecamatan Bapak, apakah penyiapan jumlah, kualifikasi dan kualitas tenaga kerja, serta bahan-bahan, peralatan dan mesin yang diperlukan, sesuai dengan kebutuhan?
- Selalu sesuai
 - Lebih sering sesuai dari pada tidak sesuai
 - Lebih sering tidak sesuai dari pada sesuai
 - Selalu tidak sesuai dengan kebutuhan

Penjelasan:

.....

44. Berdasarkan pengamatan Bapak, apakah pernah terdapat suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh lebih dari satu instansi, padahal sebenarnya pekerjaan tersebut cukup dilaksanakan oleh satu instansi saja?
- a. Sering sekali ditemukan tumpang tindih kegiatan
 - b. Jarang
 - c. Pernah terjadi, namun sangat jarang
 - d. Tidak pernah terjadi

Penjelasan:

.....

45. Menurut pengamatan Bapak, pernahkan ada tugas/pekerjaan yang seharusnya dikerjakan tetapi tidak ada yang mengerjakan, karena setiap instansi merasa bukan tugasnya?
- a. Sering terjadi
 - b. Jarang terjadi
 - c. Pernah terjadi, namun sangat jarang
 - d. Tidak pernah terjadi

Penjelasan:

.....

46. Bila terdapat suatu persoalan/masalah yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan rencana masing-masing instansi, bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh masing-masing pejabat/Instansi dalam mengatasinya masalah tersebut?
- a. Dipecahkan bersama, dengan terlebih dahulu meminta saran Camat

- b. Ditanggulangi oleh instansi yang berhubungan dengan masalah itu, dengan memohon saran Camat terlebih dahulu.
- c. Ditanggulangi sendiri oleh instansi yang berhubungan dengan masalah tersebut, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat.
- d. Menunggu perintah atau instruksi dari atasannya langsung
- e. Menunggu perintah/instruksi dari Camat
- f. Dibiarkan saja, menunggu waktu berikutnya.

Penjelasan:

.....

.....

.....

47. Bila pelaksanaan rencana mengalami kegagalan, apakah penyebab kegagalan tersebut?
- a. Kurangnya dana
 - b. Kurangnya personil
 - c. Kurangnya sumber daya lain
 - d. Karena selalu menunggu keputusan yang lebih atas (Pusat)
 - e. Karena faktor luar (ekstern) yang tidak dapat diduga

Penjelasan:

.....

.....

.....

48. Pelaksanaan tugas dan pemecahan masalah yang timbul kepada instansi yang ada, dilakukan melalui:
- a. Penilaian efisiensi dan efektivitas
 - b. Menunggu instruksi dari atasan
 - c. Menunggu saran dari camat
 - d. Atas inisiatif sendiri, dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada atasan dan memohon saran dari Camat
 - e. Secara lugas apa adanya, tanpa menunggu instruksi atasan dan saran dari camat

Penjelasan:

.....

49. Sumber daya insani (manusia) yang terampil untuk menjalankan semua kebijaksanaan dan program kerja, merupakan syarat mutlak keberhasilan program kerja tersebut. Bagaimana kondisi sumber daya insani pelaksana proyek/program instansi di Kecamatan Bapak?
- a. Sudah sangat memadai, baik kualitas maupun kuantitas
 - b. Kualitas memadai, namun dari sisi kuantitas masih kurang-
 - c. Kuantitas memadai, namun kualitas masih kurang
 - d. Baik kuantitas maupun kualitas masih kurang

Penjelasan:

50. Menurut pengamatan Bapak adakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan instansi-instansi di kecamatan Bapak mengalami penguduran waktu yang telah ditetapkan?
- a. Terlambat 2 bulan
 - b. Terlambat 4 bulan
 - c. Terlambat 6 bulan
 - d. Terlambat 8 bulan
 - e. Terlambat 12 bulan

Penjelasan:

51. Coba Bapak sebutkan, semua kejadian yang pernah Bapak alami atau bapak lihat yang menurut hemat Bapak merupakan dampak dari kurangnya koordinasi antar kegiatan di Kecamatan?

.....
.....
.....

C. ASPEK PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI KEGIATAN

52. Apakah Kepala Instansi yang ada di kecamatan Bapak biasa melaporkan segala kebijaksanaan dan rencana kegiatan yang ditetapkan oleh instansi atasannya kepada Camat?
- a. Selalu
 - b. Lebih sering melapor, daripada tidak
 - c. Lebih sering tidak melapor daripada melapor
 - d. Tidak pernah melapor

Penjelasan:

.....
.....
.....

53. Menurut pengamatan Bapak, apakah petugas (kepala) instansi vertikal atau dinas otonom yang ada di Kecamatan Bapak biasa melaporkan hasil koordinasdi rencana kegiatan yang dilakukan di Kecamatan, kepada instansi atasannya?

- a. Selalu
- b. Lebih sering melapor, daripada tidak
- c. Lebih sering tidak melapor daripada melapor
- d. Tidak pernah melapor

Penjelasan:

.....
.....
.....

54. Sehubungan dengan pertanyaan Nomor 36, jika memberi laporan, apakah tembusannya disampaikan kepada Camat?
- Selalu
 - Lebih sering memberi tembusan, daripada tidak
 - Lebih sering tidak memberi tembusan daripada memberi
 - Tidak pernah memberi tembusan

Penjelasan:

.....

.....

.....

55. Apakah petugas (Kepala) instansi vertikal atau dinas otonom yang ada di kecamatan Bapak biasa menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Bapak mengenai kegiatan yang dilaksanakannya?

- Selalu
- Lebih sering menyampaikan, daripada tidak
- Lebih sering tidak menyampaikan, daripada menyampaikan
- Tidak pernah menyampaikan laporan tertulis

Penjelasan:

.....

.....

.....

56. Jika diminta keterangan oleh Camat, apakah petugas (kepala) instansi vertikal atau dinas otonom yang ada di kecamatan Bapak suka memberikan keterangan?

- Selalu
- Lebih sering memberikan, dari pada tidak
- Lebih sering tidak memberikan dari pada memberikan
- Tidak pernah memeberikan keterangan

Penjelasan:

.....

.....

.....

57. Apakah pimpinan Departemen dan LPND melakukan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan koordinasi terhadap kepala (petugas) instansi vertikal atau dinas otonom yang ada di kecamatan Bapak?
- a. Selalu membina dan mengawasi
 - b. Lebih sering membina dan mengawasi dari pada tidak
 - c. Lebih sering tidak membina dan tidak mengawasi
 - d. Tidak pernah membina dan mengawasi

Penjelasan:

.....
.....
.....

58. Jika Kepala (petugas) instansi vertikal atau dinas otonom yang ada di kecamatan Bapak lalai dan tidak mengindahkan ketentuan mengenai koordinasi, apakah dikenakan tindakan administratif oleh pejabat atasannya yang berwenang?
- a. Selalu
 - b. Lebih sering dikenakan tindakan dari pada tidak
 - c. Lebih sering tidak dikenakan tindakan
 - d. Tidak pernah dikenakan tindakan administratif

Penjelasan:

.....
.....
.....

59. Dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan petugas (Kepala) instansi vertikal atau dinas otonom oleh Pejabat Penilai, apakah memperhatikan pertimbangan Camat?
- a. Selalu
 - b. Lebih sering memperhatikannya dari pada tidak
 - c. Lebih sering tidak memperhatikannya
 - d. Tidak pernah memperhatikan pertimbangan Camat

Penjelasan:

.....

60. Apakah Bapak biasa menerima program/rencana serta pelaksanaan tugas dari instansi vertikal atau dinas otonom yang ada di wilayah Bapak?

- a. Selalu
- b. Lebih sering menerima dari pada tidak
- c. Lebih sering tidak menerima dari pada menerima
- d. Tidak pernah menerima

Penjelasan:

.....

61. Apakah Kepala (petugas) instansi yang ada di kecamatan Bapak biasa melaporkan kepada Bapak, perihal bidang tugas dan kegiatan yang sudah dilaksanakannya?

- a. Selalu melaporkan
- b. Lebih sering melaporkan dari pada tidak
- c. Lebih sering tidak melaporkan dari pada melaporkan
- d. Tidak pernah melaporkan

Penjelasan:

.....

62. Apakah Kepala (petugas) instansi yang ada di kecamatan Bapak biasa melaporkan kepada Bapak, perihal bidang tugas dan kegiatan yang sedang dilaksanakannya?

- a. Selalu melaporkan
- b. Lebih sering melaporkan dari pada tidak

- c. Lebih sering tidak melaporkan dari pada melaporkan
- d. Tidak pernah melaporkan

Penjelasan:

.....

.....

.....

63. Apakah Kepala (petugas) instansi yang ada di kecamatan Bapak biasa melaporkan kepada Bapak, perihal bidang tugas dan kegiatan yang akan dilaksanakannya?

- a. Selalu melaporkan
- b. Lebih sering melaporkan dari pada tidak
- c. Lebih sering tidak melaporkan dari pada melaporkan
- d. Tidak pernah melaporkan

Penjelasan:

.....

.....

.....

64. Apakah dalam laporan Kepala (petugas) instansi yang ada di Kecamatan Bapak mengenai bidang tugas kegiatannya, memuat hal-hal sebagai berikut? (lingkari yang sesuai/jawaban boleh satu, dua, tiga, atau semua pilihan)

- a. Jenis pekerjaan (apa yang akan dikerjakan)
- b. Waktu (Jadual) pelaksanaan
- c. Instansi yang terkait
- d. Pelaksanaan kegiatan yang telah diselesaikan

Penjelasan:

.....

.....

.....

65. Apakah kepala (petugas) instansi yang ada di kecamatan Bapak melaporkan secara periodik (3 bulan sekali) kepada Camat, mengenai perkembangan pelaksanaan tugasnya?
- Selalu melaporkan
 - Lebih sering melapor dari pada tidak
 - Lebih sering tidak melapor dari pada melapor
 - Tidak pernah melapor secara periodik

Penjelasan:

.....

.....

.....

66. Apakah setiap akhir tahun anggaran, kepala (petugas) instansi yang ada di kecamatan Bapak membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya?
- Selalu membuat laporan dan tepat waktu
 - Lebih sering dan lebih banyak yang melaporkan dari pada tidak
 - Lebih sering dan lebih banyak yang tidak membuat laporan dari pada yang membuat
 - Tidak pernah ada yang membuat laporan tahunan

Penjelasan:

.....

.....

.....

67. Apakah Kepala (petugas) instansi yang ada di kecamatan Bapak biasa membuat laporan insidental kepada Camat terhadap hal-hal yang perlu segera mendapat penyelesaian?
- Setiap ada hal-hal yang perlu segera mendapat penyelesaian, selalu melapor
 - Jika ada hal-hal yang perlu segera mendapat penyelesaian, lebih sering melapor
 - Jika ada hal-hal yang perlu segera mendapat penyelesaian, lebih sering tidak melapor

d. Jika ada hal-hal yang perlu segera mendapat penyelesaian, tidak pernah melapor

Penjelasan:

.....
.....
.....

68. Apakah program/rencana yang dilaksanakan instansi yang ada di kecamatan Bapak mendapat pengawasan yang baik dari aparat pengawas departemen/LPND-nya masing-masing?

- a. Selalu mendapat pengawasan yang baik
- b. Lebih sering mendapat pengawasan dari pada tidak
- c. Lebih sering tidak diawasi dari pada diawasi
- d. Tidak pernah diawasi

Penjelasan:

.....
.....
.....

69. Apakah Bapak menerima tembusan dari aparat pengawas departemen/LPND mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan program/rencana instansi yang ada di kecamatan Bapak?

- a. Selalu
- b. Lebih sering mendapat tembusan dari pada tidak
- c. Lebih sering tidak mendapat tembusan dari pada mendapat tembusan
- d. Tidak pernah mendapat tembusan

Penjelasan:

.....
.....
.....

70. Jika ada Kepala (petugas) instansi yang lalai dan tidak mengindahkan ketentuan mengenai koordinasi, apakah Camat pernah mengusulkan

kepada pejabat atasannya untuk diberi tindakan administratif sesuai dengan ketentuan?

- a. Selalu mengusulkan, jika ada yang lalai
- b. Lebih sering mengusulkan dari pada tidak, kalau ada yang lalai
- c. Lebih sering tidak mengusulkan, meskipun ada yang lalai
- d. Tidak pernah mengusulkan, meskipun ada yang lalai
- e. Tidak pernah mengusulkan, karena tidak pernah ada yang lalai

Penjelasan:

.....

.....

.....

71. Apabila di Kecamatan Bapak dilaksanakan suatu proyek/kegiatan, apakah kepala (petugas) instansi dan Kepala Desa/Kelurahan turut serta dengan Camat dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan masing-masing maupun keseluruhan kegiatan/proyek pembangunan yang ada?

- a. Selalu memantau dan mengendalikan
- b. Lebih sering memantau dan mengendalikan dari pada tidak
- c. Lebih sering tidak memantau dan tidak mengendalikan
- d. Tidak pernah memantau dan mengendalikan

Penjelasan:

.....

.....

.....

72. Apabila di Kecamatan Bapak dilaksanakan suatu proyek/kegiatan, apakah kepala (petugas) instansi dan Kepala Desa/Kelurahan melaporkan perkembangan pelaksanaan serta hambatan yang dijumpai baik secara periodik maupun sewaktu-waktu diperlukan, kepada atasannya masing-masing?

- a. Selalu melaporkan
- b. Lebih sering melaporkan dari pada tidak
- c. Lebih sering tidak melaporkan
- d. Tidak pernah melaporkannya

Penjelasan:

.....

73. Apakah laporan-laporan pelaksanaan kegiatan proyek telah didokumentasikan sesuai dengan klasifikasinya?
- Diarsip sesuai dengan klasifikasinya
 - Sebagian diarsip sesuai dengan klasifikasinya
 - Kadang-kadang diklasifikasi
 - Cukup sampai disahkan laporan
 - Tidak disahkan asal mudah diarsip

Penjelasan:

.....

D. PELAYANAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN FAKTOR PENDUKUNG LAINNYA

74. Apabila di Kecamatan Bapak akan dilaksanakan suatu proyek/kegiatan, apakah kepala petugas) instansi dan Kepala Desa/Kelurahan ikut serta dengan Camat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kegiatan/proyek tersebut serta manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat?
- Selalu memberi penjelasan
 - Lebih sering memberi penjelasan dari pada tidak
 - Lebih sering tidak memberi penjelasan
 - Tidak pernah memberi penjelasan

Penjelasan:

.....

75. Apabila di Kecamatan Bapak akan dilaksanakan suatu proyek/kegiatan, apakah kepala (petugas) instansi dan Kepala Desa/Kelurahan turut serta dengan Camat dalam menyiapkan dukungan dan pembinaan gerakan peranserta masyarakat?
- Selalu menyiapkan, setiap ada proyek/kegiatan
 - Lebih sering menyiapkan dari pada tidak
 - Lebih sering tidak menyiapkan
 - Tidak pernah menyiapkan dukungan dan pembinaan gerakan peran serta masyarakat

Penjelasan:

.....

.....

.....

76. Apakah Kantor Kecamatan sudah berfungsi dengan baik sebagai pusat pengolahan data dan sumber data?
- Berfungsi dengan baik
 - Berfungsi, namun tidak semua data yang diperlukan ada
 - Kurang berfungsi, kebanyakan data yang mestinya ada, tidak ada
 - Tidak berfungsi dengan baik

Penjelasan:

.....

.....

.....

77. Apakah Kantor Camat telah berfungsi dengan baik sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat?
- Berfungsi dengan baik
 - Berfungsi, namun kurang memuaskan
 - Kurang berfungsi
 - Tidak pernah berfungsi sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat

Penjelasan:

.....
.....
.....

78. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap kebijakan Instansi dan program-program kerja instansi yang ada di kecamatan Bapak?
- a. Sangat baik, dan ikut berpartisipasi mensukseskannya
 - b. Baik, tetapi kurang ikut berpartisipasi
 - c. Kurang baik, hanya sedikit saja yang ikut berpartisipasi
 - d. Tidak baik, masyarakat bersikap acuh
 - e. Sangat tidak baik, masyarakat menolaknya
- Penjelasan:

.....
.....
.....

